SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangungan jangka menengah nasional.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
    a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
    b. penyusunan RKPD; dan
    c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

(1) RPJMD 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. Bab I Pendahuluan;
    b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
    c. Bab III Visi Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
    d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. Bab V Penutup.

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

(2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Dearah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
   a. bencana alam;
   b. goncangan politik;
   c. krisis ekonomi;
   d. konflik sosial budaya;
   e. gangguan keamanan;
   f. pemekaran Daerah; dan/atau
   g. perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 192

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 64.02/80/12/2025.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu daerah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki keunikan yang mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, serta kekayaan alam yang luar biasa. Sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah yang panjang sebagai pusat Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai warisan sejarah yang mendalam. Salah satunya tercermin dalam tradisi adat dan budaya Erau, festival budaya yang telah menjadi daya tarik wisata internasional.

Keanekaragaman suku yang mendiami Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai dari Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, dan sebagainya, yang semuanya hidup berdampingan dengan harmonis, menciptakan mozaik budaya yang eksotis. Letak Kabupaten Kutai Kartanegara juga relatif dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sehingga menambah nilai strategis sebagai wilayah bersejarah, sekaligus menjadi tumpuan masa depan Indonesia.

Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di berbagai sektor, baik sumber daya alam, pariwisata, maupun ekonomi kreatif. Potensi tambang batu bara, minyak, dan gas alam menjadi tulang punggung ekonomi Daerah. Di sisi lain, kekayaan keanekaragaman hayati, termasuk kawasan konservasi sebagai "jantungnya Kalimantan" *(Heart of Borneo)*, serta menawarkan begitu banyak daya tarik ekowisata yang menjanjikan.

Pertanian, perikanan, dan perkebunan juga menjadi sektor unggulan, dengan hasil utama berupa padi, ikan, dan kelapa sawit. Didukung oleh

infrastruktur yang terus berkembang, Kabupaten Kutai Kartanegara berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Timur. Kombinasi potensi alam, sejarah, dan lokasi strategis menjadikan kabupaten ini menjadi salah satu wilayah dengan prospek yang cerah di masa depan.

Perencanaan pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang bertujuan untuk menetapkan arah pembangunan, demi mencapai kondisi yang lebih baik. Sebagai elemen penting pembangunan, perencanaan memberikan arah yang jelas dalam perkembangan Daerah, sekaligus berfungsi sebagai standar pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Tanpa perencanaan yang matang, tujuan pembangunan akan sulit dicapai.

Dilantiknya dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes sebagai Bupati Kutai Kartanegara dan H. Rendi Solihin sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Juni 2025 maka pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Perencanaan yang efektif harus berbasis pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, serta akuntabel, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan Daerah harus memperhatikan kondisi serta potensi lokal, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di tingkat Daerah, provinsi, maupun nasional. Pada periode 2025-2029, pembangunan Daerah difokuskan pada visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata,
dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi ini mendukung tema pembangunan sebagaimana tertuang dalam tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, yaitu: Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan dua cita-cita luhur itu, telah disusun misi strategis yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ekonomi berbasis sektor non ekstraktif, tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan pendidikan berbasis karakter, serta pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Sinergi antara visi, tema, dan misi itu bertujuan untuk membangun fondasi pembangunan yang kokoh dan berkesinambungan. Hal ini untuk menjamin keselarasan dengan arah pembangunan regional dan nasional, sehingga Daerah mampu menjawab tantangan pembangunan masa kini,

sekaligus mempersiapkan kesinambungan pembangunan untuk periode mendatang.

RPJMD Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman utama bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD akan menjadi landasan bagi Perangkat Daerah untuk merumuskan program, kegiatan, dan target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan Daerah.

Dengan berlandaskan RPJMD sebagai acuan, maka diharapkan setiap Perangkat Daerah akan mampu berkontribusi dengan optimal dalam mencapai prioritas pembangunan, memastikan sinergi antar sektor, dan mendukung keberlanjutan pembangunan sesuai dengan tema transformasi yang diusung.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2025-2029; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Dokumen-dokumen terkait tersebut adalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Materi dasar dari RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergitas dan hubungan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

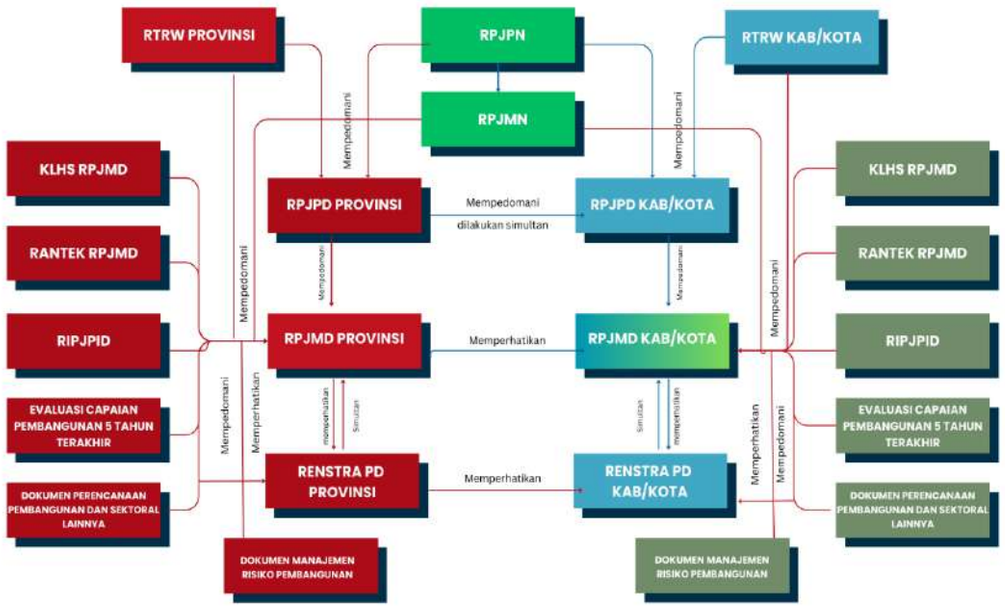

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam dokumen RPJMN, telah ditegaskan bahwa wilayah Kalimantan diarahkan menjadi *"Superhub Ekonomi Nusantara"*. Dengan demikian, Kalimantan telah ditempatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi strategis untuk mendukung pertumbuhan nasional.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan di wilayah Kalimantan, Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan *Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara*. Dalam mendukung arahan strategis nasional tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara berperan strategis yang diwujudkan melalui berbagai intervensi pembangunan prioritas.

Fokus utama diarahkan pada pengembangan klaster ekonomi yang didukung oleh infrastruktur berkualitas. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pengembangan konektivitas infrastruktur logistik, serta pembangunan pelabuhan laut, menjadi langkah awal untuk memperkuat mobilitas barang dan jasa. Pengembangan moda transportasi berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari strategi. Hal ini sejalan dengan upaya mendorong mobilitas yang ramah

lingkungan dan efisien.

Di sektor pertanian, Kabupaten Kutai Kartanegara berfokus pada pengembangan kawasan pangan untuk memperkuat ketahanan pangan regional. Rantai pasok industri juga diperkuat melalui jaminan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, guna mendukung industri padat karya dan hilirisasi, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Lebih jauh lagi, peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan inovasi berbasis riset menjadi perhatian utama untuk mendorong akselerasi pembangunan.

"Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur" dan "Kawasan Agroekowisata Perdesaan" dikembangkan dengan strategis untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, menciptakan peluang kerja, dan memperkuat basis ekonomi lokal. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat berperan penting sebagai motor penggerak bagi pembangunan Kalimantan, sekaligus memperkuat posisinya dalam mendukung eksistensi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

b. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Hal ini muncul karena penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 telah mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dengan mendorong pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan pariwisata, yang diiringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi.

Keterpaduan ini bertujuan untuk menjamin keefektifan dan efisiensi pembangunan Daerah. Dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, indikator kinerja, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, diharapkan pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas.

c. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan. RPJMD ini merupakan penjabaran dari periode

pertama RPJPD yang memiliki prioritas pembangunan: “Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara”, dimana fokus pembangunan adalah pada aspek dan komponen yang memiliki dampak dan penentu keberhasilan pembangunan pada periode berikutnya.

Upaya memperkuat fondasi transformasi, dilakukan dengan cara menyasar aspek transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang ditopang oleh landasan transformasi berupa stabilitas ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ekologi. Secara lebih konkret, berbagai program pemenuhan kebutuhan dasar (fasilitas pelayanan, infrastruktur dasar, sumber daya manusia yang berkualitas, perlindungan sosial, dan lain sebagainya), harus menjadi prioritas.

Pada periode pertama RPJPD, berbagai terobosan inovatif mulai diimplementasikan, misalnya diversifikasi ekonomi nonekstraktif, implementasi *smart government*, sinkronisasi perencanaan pembangunan, dan sebagainya, sehingga akan dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan rencana pembangunan pada periode berikutnya.

d. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Tahun 2023-2042

RPJMD Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan strategis dengan dokumen RTRW Daerah Tahun 2023–2042, terutama pada arah pembangunan wilayah dan pemanfaatan ruang yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

RTRW berfungsi sebagai kerangka spasial jangka panjang, yang memberikan arahan lokasi dan distribusi kegiatan pembangunan. Sedangkan RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, yang menguraikan program dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD wajib mengacu pada struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Daerah, agar pembangunan tidak hanya sebatas efektif secara sektoral, tetapi juga sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah.

Keselarasan antara RPJMD dan RTRW Daerah tercermin melalui pengintegrasian tujuan pembangunan Daerah dengan kebijakan penataan ruang. Misalnya pengembangan sistem pusat kegiatan yang terintegrasi, penguatan infrastruktur wilayah, dan optimalisasi sektor

unggulan seperti industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Dalam RPJMD, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk mendukung fungsi Daerah sebagai mitra strategis Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sejalan dengan visi RTRW yang juga menempatkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga yang tangguh dan berwawasan lingkungan.

Program-program pembangunan yang dirancang dalam RPJMD juga harus memperhatikan zonasi ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, baik pada kawasan lindung maupun budidaya, untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang dan menjamin keberlanjutan pembangunan Daerah.

e. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan, serta indikasi program, kegiatan dan subkegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara.

f. Hubungan RPJMD dan RKPD

RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui dokumen RKPD Tahun 2026-2030. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan setiap tahun dalam RKPD.

Perangkat Daerah menyusun program, kegiatan dan subkegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, setiap tahun diselenggarakan Musrenbang RKPD yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan para pemangku kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

g. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD tidak boleh mengesampingkan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini karena KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

(sustainable development) telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

KLHS Daerah menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa RPJMD Tahun 2025–2029 telah disusun secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Keselarasan RPJMD dengan KLHS ditunjukkan melalui integrasi isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam KLHS ke dalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah. Selain itu, beberapa rekomendasi kebijakan, sasaran dan program KLHS dapat menjadi rujukan dan arahan kebijakan dan program yang dirumuskan dalam RPJMD.

h. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID)

RPJMD memiliki keterkaitan strategis dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) sebagai upaya mengintegrasikan kebijakan pembangunan Daerah dengan agenda penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RIPJ-PID memetakan arah dan tahapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara sistematis dalam jangka panjang, yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan ekosistem inovasi Daerah. Dalam konteks ini, RPJMD berfungsi sebagai dokumen pelaksana jangka menengah yang menerjemahkan target-target RIPJ-PID ke dalam program dan kegiatan konkret yang dapat diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.

Sinkronisasi antara RPJMD dan RIPJ-PID sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan Daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Dengan mengintegrasikan RIPJ-PID ke dalam RPJMD, Pemerintah Daerah dapat memperkuat daya saing Daerah, mempercepat pertumbuhan sektor unggulan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan akselerasi penyelesaian masalah strategis daerah, dan menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi.

i. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral

RPJMD memiliki hubungan fungsional dan substantif dengan

dokumen perencanaan sektoral yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah, seperti Renstra Perangkat Daerah, sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan program pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dokumen perencanaan sektoral berfungsi untuk menerjemahkan visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD ke dalam strategi dan program spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi sektoral setiap Perangkat Daerah. Dengan demikian, keselarasan antara RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral menjadi krusial, agar implementasi pembangunan Daerah berlangsung secara terkoordinasi, konsisten, dan terukur.

Hubungan tersebut juga menjamin bahwa alokasi sumber daya, indikator kinerja, dan target pembangunan di masing-masing sektor mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, perencanaan sektoral yang berbasis pada RPJMD merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas tata kelola pembangunan, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, agar kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

a. Merumuskan gambaran umum kondisi Daerah sebagai dasar dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Daerah, juga sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan, dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029.
b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan Daerah, serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
c. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-

masing Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 pada periode pertama tahun 2025-2029;

d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.
e. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD di masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan 2029, berdasarkan urusan dan kewenangan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
f. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
g. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan Daerah.
h. Menetapkan indikator dan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun.
i. Mewujudkan keselarasan antara perencanaan pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.
j. Memberikan fondasi yang kokoh bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan Daerah di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada segmen ini disajikan tentang gambaran umum mengenai kondisi secara menyeluruh, yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan Daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain: geografi dan demografi, kesejahteraan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

masyarakat, daya saing Daerah, pelayanan umum. Selain itu, bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah, permasalahan, dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan pula tentang strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan Daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini merinci program-program Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja, serta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi arahan transisi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Daerah. Selain itu, pedoman implementasi RPJMD 2025-2029 juga dijelaskan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satu di antara sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peta Dasar RTRW Tahun 2023-2042, luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 25.292,24 km² dan menempatkan Kutai Kartanegara sebagai kabupaten terluas ke-2 di Indonesia setelah Kutai Timur (31.051,71 km²).

Letak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu di antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta di antara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan:

- bagian Timur dengan Selat Makassar.
- bagian Barat dengan Kabupaten Kutai Barat.
- bagian Selatan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
- bagian Utara dengan Kabupaten Malinau, Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Dengan adanya pemekaran wilayah dan terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara kini terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Muara Jawa, Sangasanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat belasan sungai yang tersebar di hampir semua kecamatan, dan merupakan prasarana angkutan utama di samping angkutan darat. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 km (sembilan ratus dua puluh kilometer).

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, masing-masing zona Hulu, zona Tengah dan zona Pesisir dengan rincian sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Zona Hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan, dan perairan sungai, dengan potensi ekonomi berupa pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, dan budi daya perairan sungai. Zona ini terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan: Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Muntai dan Muara Wis.

Zona Tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan, dan perairan sungai. Potensi ekonomi didominasi oleh pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa. Wilayah ini terdiri dari 6 (enam) kecamatan: Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan.

Zona Pesis*ir* dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan, perairan laut, dan muara. Potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, wilayah ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan: Marangkayu, Muara Badak, Sangasanga, Anggana, dan Muara Jawa.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara

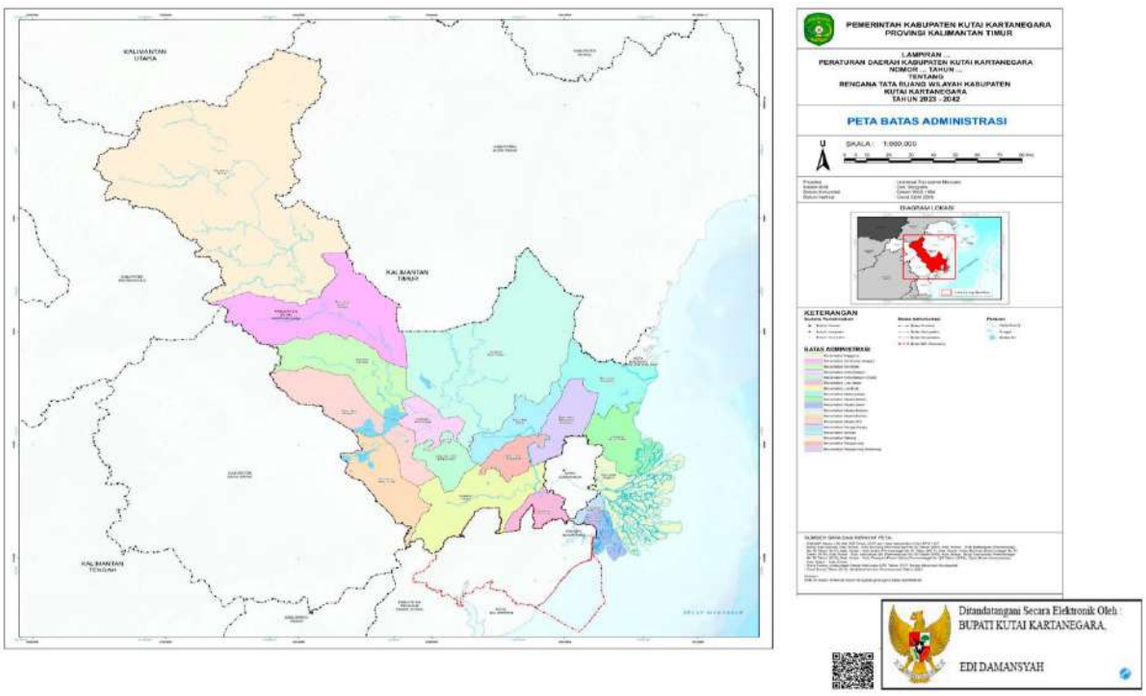

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2042

Dari luas area Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 25.368,35 km^2 (dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan koma tiga puluh lima kilometer persegi) Kecamatan Tabang merupakan kecamatan terluas dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu 8.111,61 km^2 (delapan ribu seratus sebelas koma enam puluh satu kilometer persegi) atau 32,07 % (tiga puluh dua koma tujuh persen). Dari delapan belas kecamatan, Sangasanga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 100,36 km^2 (seratus koma tiga puluh enam kilometer persegi) atau 0,40 % (nol koma empat puluh persen). Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat, maka secara resmi lahirlah Kecamatan Kota Bangun Darat. Di Kutai Kartanegara terdapat dua kecamatan yang di dalam wilayahnya terdapat pulau, yaitu Kecamatan Loa Kulu (Pulau Jembayan) dan Tenggarong (Pulau Kumala).

Tabel 2.1.

Daftar Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas Area, Persentase Luas, dan Jumlah Pulau di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km^2)	Persentase thd Luas Kabupaten (%)	Jumlah Pulau
1	Anggana	Sungai Meriam	1.068,01	4,21	-
2	Kembang Janggut	Kembang Janggut	2.191,31	8,64	-
3	Kenohan	Kahala	1.316,30	5,19	-
4	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	441,74	1,74	-
5	Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	460,25	1,81	-
6	Loa Janan	Loa Janan Ulu	329,47	1,30	-
7	Loa Kulu	Loh Sumber	1.365,47	5,38	1
8	Marangkayu	Sebuntal	864,85	3,41	-
9	Muara Badak	Muara Badak Ulu	798,54	3,15	-
10	Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	204,84	0,81	-
11	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	4.238,71	16,71	-
12	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	947,11	3,73	-
13	Muara Wis	Muara Wis	1.313,84	5,18	-
14	Sangasanga	Sangasanga Dalam	100,36	0,40	-
15	Sebulu	Sebulu Ilir	600,19	2,37	-
16	Tabang	Sidomulyo	8.111,61	31,98	-
17	Tenggarong	Melayu	358,48	1,41	1
18	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	657,28	2,59	-
	Kutai Kartanegara	Tenggarong	25.368,35	100,00	2

Sumber: Peta Dasar Revisi RTRW 2023-2042 Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki belasan sungai besar yang tersebar di hampir semua kecamatan, yang tidak hanya menjadi sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga berperanan vital sebagai jalur transportasi utama, selain jaringan transportasi darat. Sungai Mahakam-sungai terpanjang di Kalimantan Timur menjadi tulang punggung pergerakan orang dan barang, sekaligus sebagai urat nadi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di sepanjang alirannya.

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa gugusan gunung dan pegunungan, yang terdapat di hampir semua kecamatan. Terdapat sekitar 10 (sepuluh) gunung, dengan gunung tertinggi adalah Gunung Lengkup dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tinggi 485 mdpl (empat ratus delapan puluh lima meter diatas permukaan laut) yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Selain itu, juga terdapat 16 (enam belas) danau, dengan danau terluas adalah Danau Semayang yaitu 13.000 ha (tiga belas ribu hektare).

Selain sumber daya alam, letak geografis kabupaten ini juga memiliki potensi strategis bagi perekonomian. Letaknya yang berada di tengah Provinsi Kalimantan Timur menjadikannya sebagai jalur penghubung utama-antar kabupaten. Selain itu, wilayahnya juga mengelilingi Kota Samarinda, berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sangat berpengaruh pada tingkat akselerasi pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini.

b. Topografi

Berdasarkan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit, dengan kelerengan didominasi oleh kelas datar yaitu 0-8 % (nol sampai dengan delapan persen) dengan luas mencapai 71,94 % (tujuh puluh satu koma sembilan puluh empat persen) dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daerah dengan kelas kemiringan datar terdapat di wilayah pantai dan daerah aliran sungai (DAS) Mahakam. Di wilayah pedalaman dan perbatasan, pada umumnya juga merupakan wilayah kawasan pegunungan. Sementara itu, terdapat 0,10 % (nol sampai dengan sepuluh persen) atau seluas 2.637,64 ha (dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh empat hektare) wilayah yang tidak memiliki data karena berbagai sebab, di antaranya tertutup awan pada saat satelit merekam citra di wilayah tersebut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.2.

Luas Area untuk Tiap Kelas Lereng

di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kecamatan	Luas Kelas Kelerengan (hektare)							Total (hektare)
		0-2 %	2-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %	No Data	
1	Anggana	104.889,49	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91	106.801,32
2	Kembang Janggut	189.325,81	19.084,84	8.498,01	2.077,58	0,00	0,00	68,61	219.130,52
3	Kenohan	128.555,94	2.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	131.629,81
4	Kota Bangun	43.936,51	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.173,71
5	Kota Bangun Darat	29.051,41	12.507,87	4.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46.024,94
6	Loa Janan	31.813,71	1.079,89	20,79	0,00	0,00	0,00	19,19	32.946,96
7	Loa Kulu	82.738,30	27.262,24	26.225,82	206,88	0,00	0,00	25,61	136.546,90
8	Marangkayu	78.324,99	7.810,88	267,53	0,00	0,00	0,00	42,79	86.484,58
9	Muara Badak	72.601,40	1.117,73	32,41	0,00	0,00	0,00	99,12	79.853,94
10	Muara Jawa	20.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,41	20.484,22
11	Muara Kaman	417.299,62	6.226,63	5,48	0,00	0,00	0,00	54,45	423.870,60
12	Muara Muntai	77.306,37	6.740,42	10.539,60	44,41	0,00	0,00	45,90	94.711,27
13	Muara Wis	125.974,88	4.790,09	427,23	0,00	0,00	0,00	0,68	131.384,18
14	Sangasanga	9.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,47	10.035,55
15	Sebulu	53.472,76	6.022,81	474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60.019,35
16	Tabang	93.657,47	63.205,67	137.452,51	213.544,89	270.506,43	32.067,09	114,40	811.160,78
17	Tenggarong	35.747,51	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.848,35
18	Tenggarong Seberang	57.289,20	8.230,28	155,55	0,00	0,00	0,00	2,45	65.728,13
	Kutai Kartanegara	1.652.357,72	167.251,41	188.530,29	215.873,76	270.506,43	32.067,09	2.637,64	2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.2.

Peta Topografi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

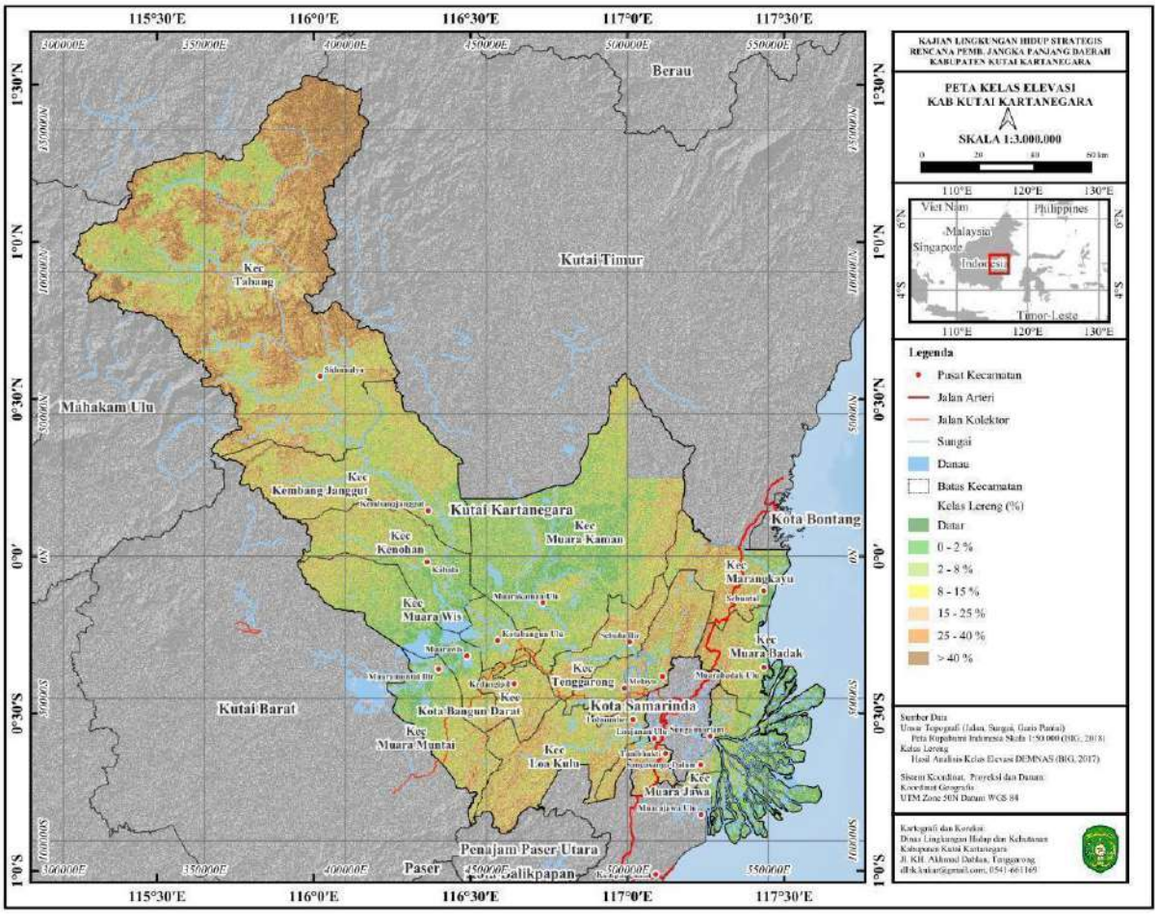

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

c. Geologi

Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, formasi geologi pembentuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi dengan formasi endapan aluvium seluas 644.389,23 ha (enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh tiga hektare) atau sekitar 25,48 % (dua puluh lima koma empat puluh delapan persen) dari luas wilayah total Daerah. Endapan aluvium berwarna abu-abu gelap hingga hitam, terdiri atas lumpur organik, lempung, dan sedikit pasir halus, mengandung material organik dan akar tumbuh-tumbuhan. Endapan ini bersifat lepas, lembek, dan sangat lunak serta jenuh air. Sebagian besar formasi ini terdapat di Kecamatan Muara Kaman, Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Wis, dan Kenohan.

Formasi lain yang juga mendominasi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah formasi Balikpapan yaitu seluas 369.275,49 ha (tiga ratus enam puluh sembilan dua ratus tujuh puluh lima koma empat puluh sembilan hektare) atau sekitar 14,60 % (empat belas koma enam puluh persen) dari total luas wilayah Daerah. Formasi Balikpapan berumur *miosen*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

akhir bagian bawah, hingga *miosen* tengah bagian atas. Formasi ini terdiri dari siklus endapan laut dangkal, yang membentuk batuan sedimen klastik dan batuan sedimen biokimia.

Pada lingkungan pengendapan laut dangkal, saat persediaan sedimen di daratan diangkut menuju laut, maka perselingan pasir, lempung, dan lanau akan diendapkan. Endapan ini terkompaksi, diagenesa, sementasi, dan menjadi batuan sedimen klastik. Formasi ini banyak terdapat di Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Gambar 2.3.

Peta Formasi Geologi

di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

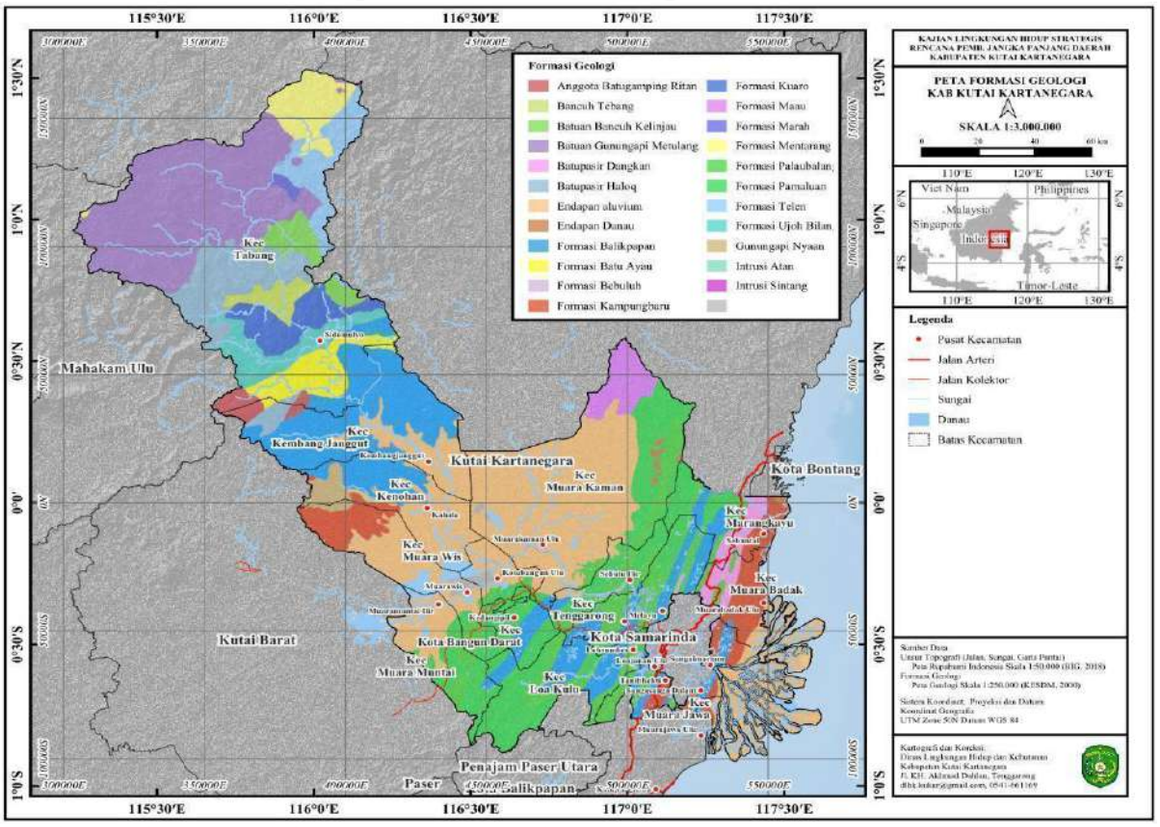

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Luas Formasi Geologi
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Formasi	Luas (hektare)	Formasi	Luas (hektare)
Anggota Batugamping Ritan	19.872,67	Formasi Kuaro	57.055,66
Bancuh Tebang	24.240,40	Formasi Maau	40.956,11
Batuan Bancuh Kelinjau	36.594,22	Formasi Marah	5.392,90
Batuan Gunungapi Metulang	315.697,51	Formasi Mentarang	58.699,68
Batupasir Dangkan	34.288,25	Formasi Pulaubalang	178.325,79
Batupasir Haloq	103.657,83	Formasi Pamaluan	283.594,70
Endapan aluvium	644.389,23	Formasi Telen	59.195,70
Endapan Danau	5.196,56	Formasi Ujoh Bilang	54.713,19
Formasi Balikpapan	369.275,49	Gunungapi Nyaan	19.750,42
Formasi Batu Ayau	54.785,61	Intrusi Atan	846,98
Formasi Bebuluh	1.307,86	Intrusi Sintang	66,02
Formasi Kampungbaru	113.992,55	Jumlah Total	2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

d. Hidrologi

Kondisi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa air permukaan maupun air tanah. Air permukaan terlihat sebagai aliran sungai yang terbagi menjadi beberapa DAS, mata air, dan cekungan air tanah (CAT). Sungai merupakan bagian penting dari DAS, sangat berperan penting bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara keseluruhan, terdapat 5 (lima) DAS di wilayah ini yang terbagi dalam 74 (tujuh puluh empat) Sub-DAS, di mana 24 (dua puluh empat) Sub-DAS di antaranya tidak termasuk dalam kelima DAS yang ada. Hal tersebut disebabkan karena Sub-DAS itu berada di perbatasan wilayah, sehingga beberapa Sub-DAS masuk ke dalam DAS wilayah lain atau berada di garis pantai.

Gambar berikut menampilkan DAS dan Sub-DAS yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel selanjutnya.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 2.4.
Peta Jaringan Sungai
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

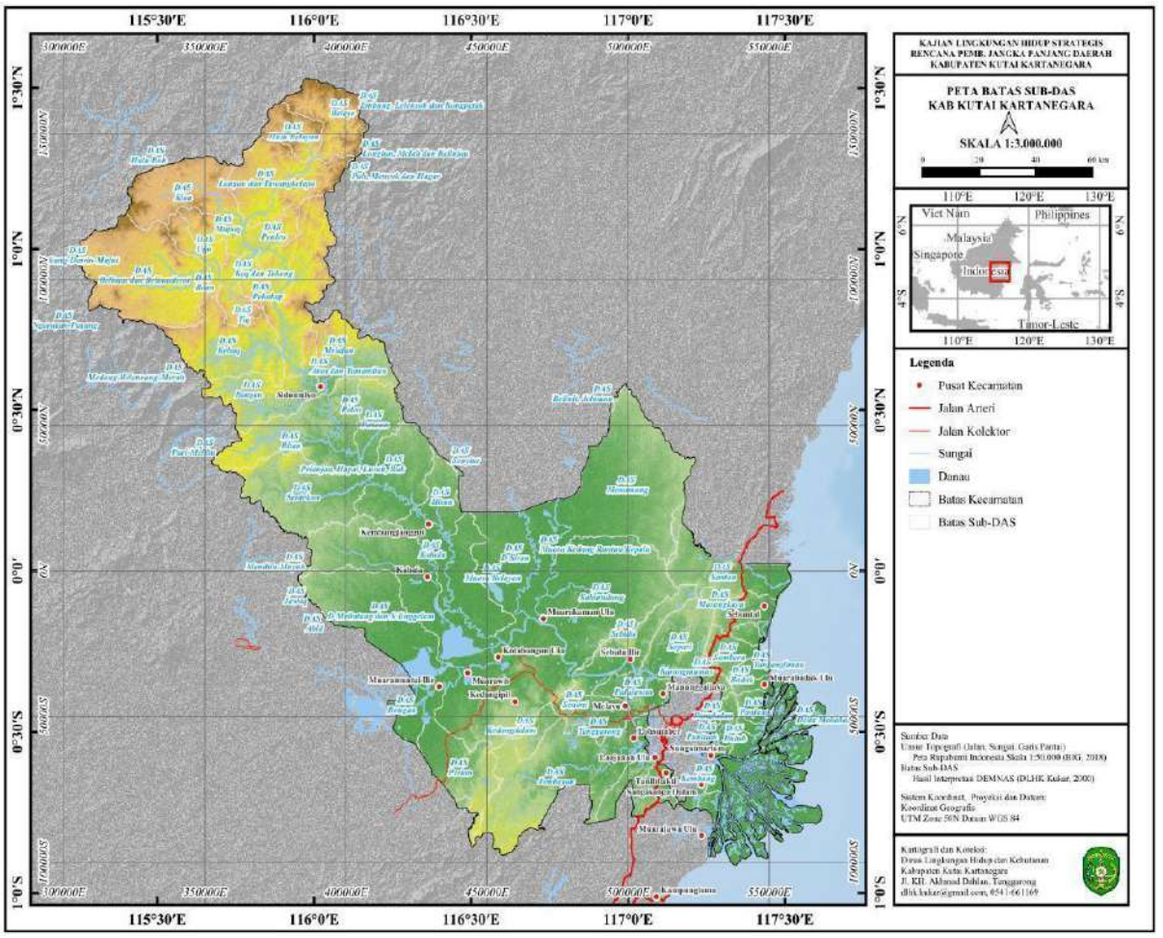

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel 2.3.
DAS dan Sub DAS
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

DAS dan Sub-DAS		Luas (hektare)
DAS Belayan		
1	Atan dan Tamandiun	8.692,01
2	Bean	3.683,08
3	Belayo	46.989,30
4	Belinau dan Belinau Lesot	125.472,43
5	Bengen	48.946,23
6	D Semayang dan S Lamin Telihan	120.825,19
7	Hiran	26.550,05
8	Hulu Belayan	26.258,09

DAS dan Sub-DAS		Luas (hektare)
DAS Kelinjau-Telen		
39	Beliwit, Jelmuan	1.003,44
40	Embung, Lelensoh dan Kongpetak	488,54
41	Longlun, Melah dan Kelinjau	304,81
42	Puh, Menyok dan Hagar	901,67
43	Senyiur	1.026,98
Luas DAS Kelinjau-Telen		3.725,44
DAS Mahakam		
44	Bakung-Dawin-	330,13

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DAS dan Sub-DAS		Luas (hektare)
9	Jumahang dan Melafang	44.453,88
10	Kahala	22.727,75
11	Kebaq	73.365,93
12	Keq dan Tokong	8.096,98
13	Kiau	68.127,55
14	Lanyau dan Tawang Kelapa	31.090,04
15	Lau dan Matelai	91.872,91
16	Melajan	48.780,62
17	Muara Belayan	46.523,25
18	Mupoq	21.636,56
19	Niruk, Tengkeran dan Tembutuk	18.981,09
20	Pekakap	9.872,79
21	Pelanjau, Hapai, Lurah, Buk	42.673,96
22	Peleo	21.393,38
23	Penoon	36.523,90
24	Peuleu	17.848,58
25	Ritan	66.291,18
26	Sentekan	85.671,11
27	Tiq	13.715,75
28	Ugu	17.854,62
Luas DAS Belayan		1.194.918,21
DAS Bongan-Kedang Pahu		
29	Abid	148,60
30	Bongan	24.326,25
31	D Melintang dan S Enggelam	104.067,81
32	Jawaq	53,00
33	Perian	52.725,06
34	Wis-Kedang Ipil	125.215,30
Luas DAS Bongan-Kedang Pahu		306.536,02
DAS Kedang Rantau-Kedang Kepala		
35	D Siran	63.861,87
36	Menamang	156.285,58

DAS dan Sub-DAS		Luas (hektare)
	Mujut	
45	Hulu Boh	92,42
46	Karangmumus	9.302,56
47	Medang-Belenoang-Merah	239,49
48	Menihin-Muyub	1.322,60
49	Ngaruyan-Payang	3,30
50	Pari-Melibu	272,20
Luas DAS Mahakam		11.562,70
Tidak Ada Data		
51	Badak	7.781,19
52	Buluh	6.402,37
53	Delta Mahakam	116.173,97
54	Haji Brahim	6.513,39
55	Jembayan	133.740,87
56	Kedang Dalam	13.358,76
57	Kembang	4.299,32
58	Lacengek-Bosang	5.886,91
59	Loa Haur	22.579,17
60	Mangkurawang	11.554,93
61	Marangkayu	24.718,64
62	Nilam	4.179,85
63	Palujawan	15.023,07
64	Pangkalan	11.216,10
65	Panjang	3.637,26
66	Pantuan	4.376,74
67	Sambera	19.982,02
68	Sangasanga	5.736,23
69	Santan	54.148,09
70	Sebulu	37.013,99
71	Senoni	15.053,76
72	Separi	45.205,42
73	Tanjung Limau	5.610,75
74	Tenggarong	24.293,42

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DAS dan Sub-DAS		Luas (hektare)
37	Muara Kedang Rantau/Kepala	32.896,41
38	Sabintulung	139.700,50
Luas DAS Kedang Rantau-Kedang Kepala		392.744,36

DAS dan Sub-DAS		Luas (hektare)
75	Tidak Ada Data	21.251,38
Luas DAS		619.737,60
Total Luas DAS		2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Sementara itu, terdapat 5 (lima) CAT di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di 16 (enam belas) kecamatan. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah wilayah untuk cadangan penyimpanan air yang terletak di bawah tanah dalam waktu tertentu, yang memiliki batasan hidrogeologis sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dari 931.329,14 ha (sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma empat belas hektare) luas CAT di Kutai Kartanegara, 64,57 % (enam puluh empat koma lima puluh tujuh persen) atau seluas 601.333,16 ha (enam ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga hektare) merupakan CAT Sendawar, yang meliputi Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, dan Sebulu.

Tabel 2.4.

Cekungan Air Tanah

di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Kecamatan	Luas CAT (hektare)
CAT Samarinda-Bontang	
• Anggana	90.203,20
• Loa Janan	11.943,13
• Marangkayu	46.682,55
• Muara Badak	65.874,33
• Muara Jawa	15.894,48
• Sangasanga	10.035,55
• Tenggarong Seberang	7.817,67
Luas CAT Samarinda-Bontang	248.450,90
CAT Sendawar	
• Kembang Janggut	46.535,60
• Kenohan	62.471,30
• Kota Bangun	34.785,01
• Muara Kaman	292.731,34
• Muara Muntai	51.104,71
• Muara Wis	108.381,35

Kecamatan	Luas CAT (hektare)
CAT Jonggon	
• Loa Kulu	16.017,38
• Tenggarong	10.998,23
Luas CAT Jonggon	27.015,61
CAT Loa Haur	
• Loa Janan	3.949,88
• Loa Kulu	459,17
• Marangkayu	469,33
• Tenggarong Seberang	16.759,99
Luas CAT Loa Haur	21.638,38
CAT Tenggarong	
• Loa Janan	234,01
• Loa Kulu	22.296,99
• Sebulu	55,81
• Tenggarong	4.461,68
• Tenggarong Seberang	5.842,61

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kecamatan	Luas CAT (hektare)	Kecamatan	Luas CAT (hektare)
• Sebulu	5.323,84	Luas CAT Tenggarong	32.891,10
Luas CAT Sendawar	601.333,16	Total Luas CAT	931.329,14

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.5.

Peta Cekungan Air Tanah

di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

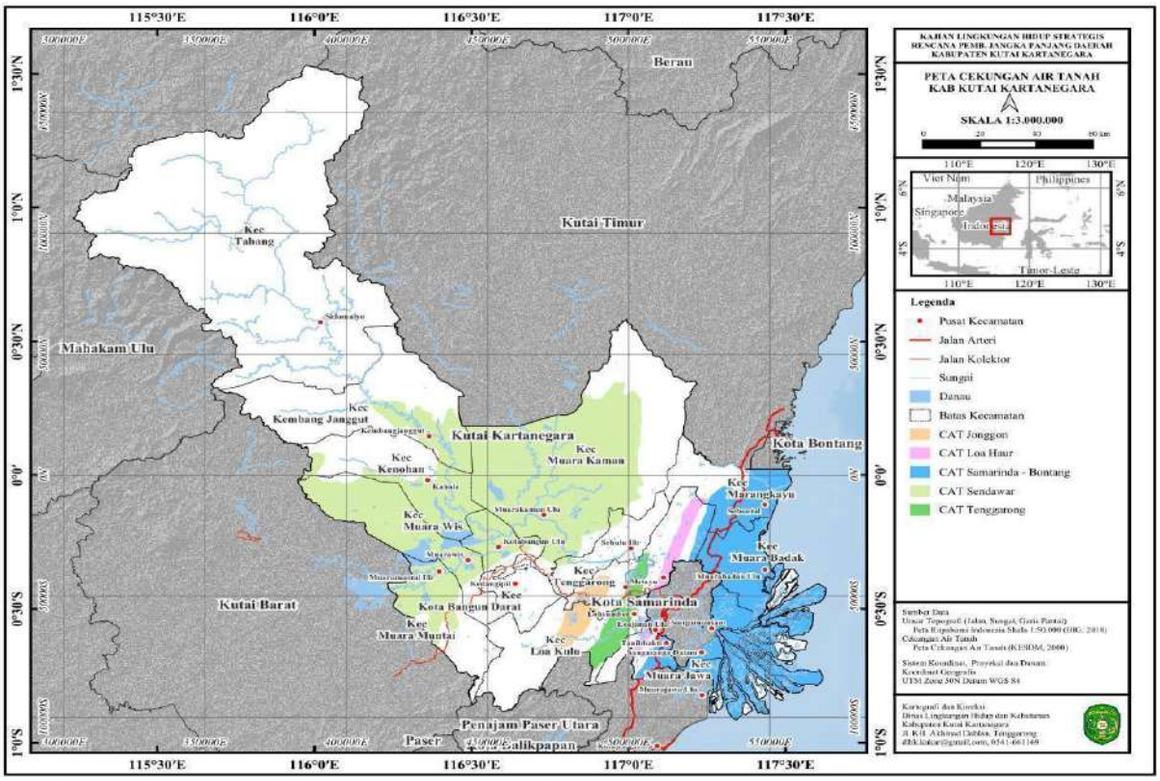

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

CAT merupakan tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung di suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis. Peta CAT digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tata ruang sumber daya air, termasuk di antaranya air tanah yang digunakan dalam berbagai kegiatan, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kegiatan industri, pertanian, perikanan, jasa, dan kegiatan pariwisata.

e. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis, memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan relatif tidak merata setiap bulan dalam setahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 324,7 mm (tiga ratus dua puluh empat koma tujuh milimeter), dengan jumlah hari hujan sebanyak 31 (tiga puluh satu) hari.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sedangkan hari hujan tertinggi berada pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 31 (tiga puluh satu) hari.

Gambar 2.6.
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

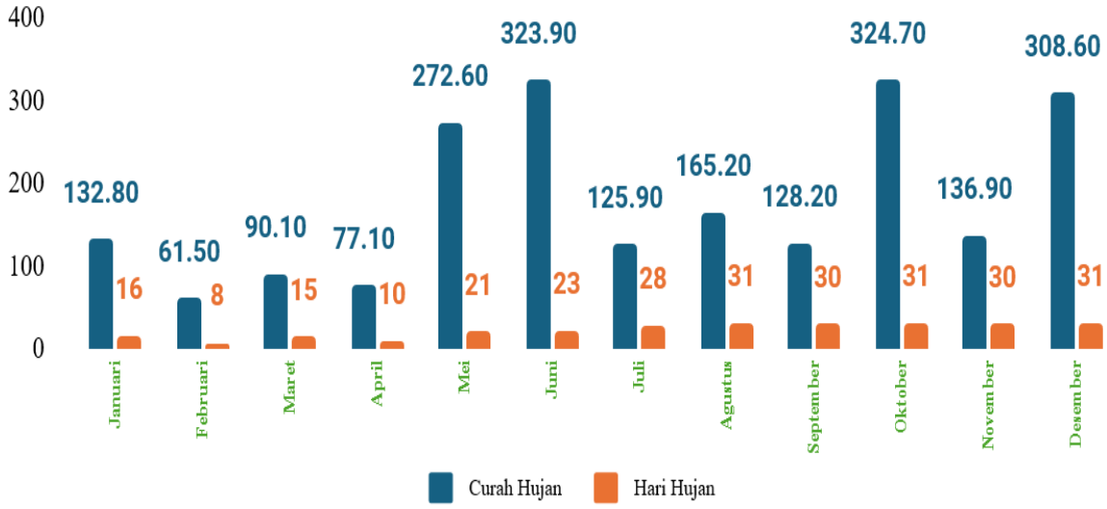

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

f. Penggunaan Lahan

Tutupan lahan adalah salah satu indikator utama dalam menilai keberlangsungan fungsi ekologis suatu wilayah. Semakin luas kawasan yang tertutup oleh vegetasi yang sehat dan beragam, semakin besar pula kemampuannya dalam menjaga keseimbangan ekologis, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendukung siklus hidrologi secara berkelanjutan. Secara konseptual, tutupan lahan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk penutup permukaan bumi baik alami maupun buatan yang tampak secara kasat mata dan dapat diidentifikasi melalui citra spasial maupun pengamatan langsung di lapangan (FAO, 1990).

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa tutupan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh hutan lahan kering sekunder seluas 1.140.718,99 ha (satu juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas koma sembilan puluh sembilan hektare) atau 45,10 % (empat puluh lima koma sepuluh persen) luas Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan terluas yang memiliki jenis tutupan lahan semacam ini adalah Kecamatan Tabang yaitu 767.134,35 ha (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat koma tiga puluh lima hektare).

Urutan kedua sebegai bentuk penutup lahan dominan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tutupan lahan perkebunan kelapa sawit.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Komoditas ini telah berkembang pesat seiring dengan tren ekspansi agribisnis dan kebutuhan pasar global. Perkebunan sawit mengokupansi 10,79 % (sepuluh koma tujuh puluh sembilan persen) dari luas wilayah seluas 273.000,68 ha (dua ratus tujuh puluh tiga ribu koma enam puluh delapan hektare). Tiga kecamatan yang menjadi pusat ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah Muara Kaman yaitu 87.900,97 ha (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus koma sembilan puluh tujuh hektare), Kenohan yaitu 62.802,36 ha (enam puluh dua ribu delapan ratus dua koma tiga puluh enam hektare), dan Kembang Janggut yaitu 36.109,75 ha (tiga puluh enam ribu seratus sembilan koma tujuh puluh lima hektare).

Pola sebaran ini mencerminkan pergeseran karakteristik ekologi wilayah menjadi kawasan produksi komoditas unggulan, yang berdampak pada perubahan bentang alam secara signifikan. Secara detail, sebaran luasan tutupan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada peta dan tabel berikut ini.

Gambar 2.7.

Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045

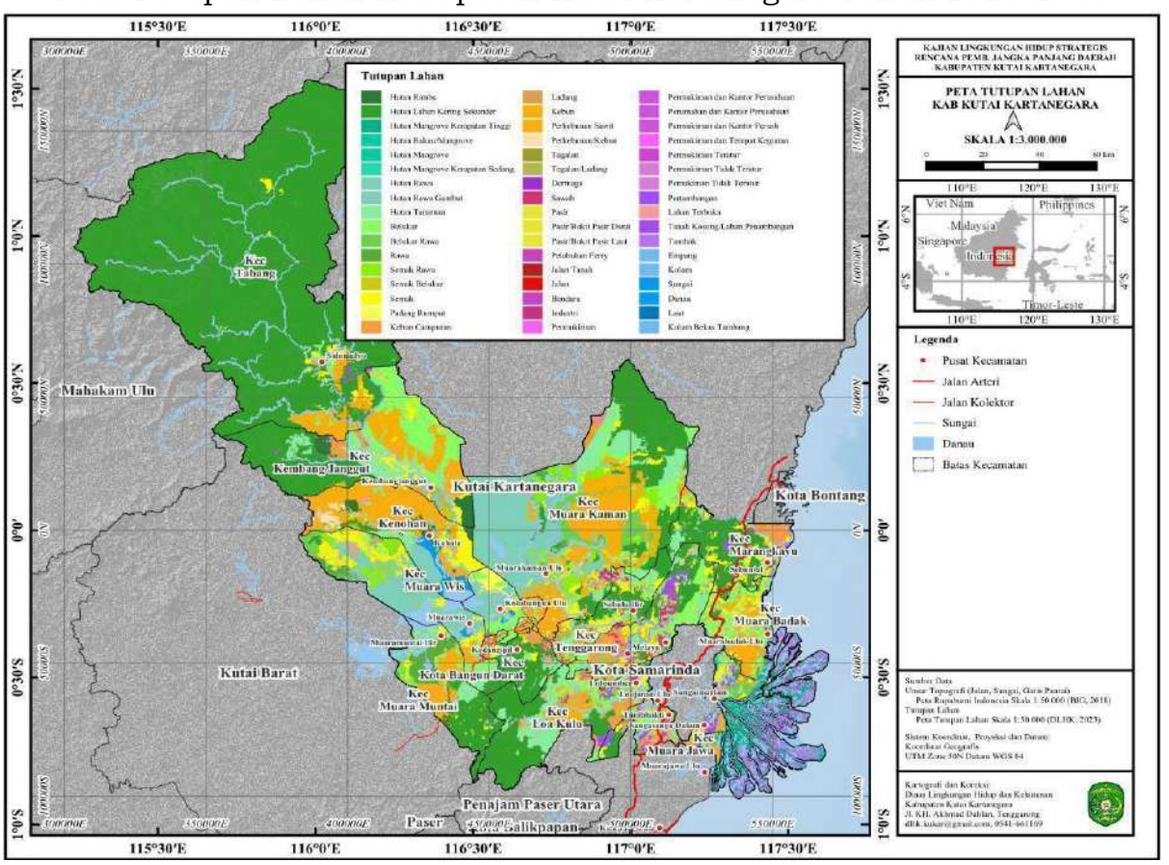

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Luas Tutupan Lahan

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (hektare)	No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (hektare)
1	Bandara	83,58	24	Padang Rumput	8.295,28
2	Belukar	211.574,75	25	Pasir	6,73
3	Belukar Rawa	33.351,53	26	Pasir/Bukit Pasir Darat	25,77
4	Danau	34.914,21	27	Pelabuhan Ferry	1,23
5	Dermaga	0,43	28	Pemukiman	297,81
6	Empang	28,48	29	Pemukiman dan Kantor Perusahaan	634,76
7	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.140.718,99	30	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	1.691,34
8	Hutan Mangrove	0,04			
9	Hutan Mangrove Kerapatan Sedang	15.602,85	31	Pemukiman Teratur	31,99
			32	Pemukiman Tidak Teratur	9.525,47
10	Hutan Mangrove Kerapatan Tinggi	49.104,83	33	Perkebunan Sawit	273.000,68
			34	Perkebunan/Kebun	6.984,37
11	Hutan Rawa	12.123,03	35	Pertambangan	22.448,80
12	Hutan Rawa Gambut	173.131,26	36	Rawa	24.788,96
13	Hutan Rimba	17.508,80	37	Sawah	15.077,74
14	Hutan Tanaman	101.427,08	38	Semak	149.293,14
15	Industri	1.025,00	39	Semak Belukar	12.772,40
16	Jalan	1.522,85	40	Semak Rawa	37.925,12
17	Jalan Tanah	118,58	41	Sungai	16.819,52
18	Kebun	2.614,20	42	Tambak	57.081,45
19	Kebun Campuran	51.700,28	43	Tanah Kosong/Lahan Penambangan	3,17
20	Kolam	941,89			
21	Kolam Bekas Tambang	676,77	44	Tegalan	2.746,70
22	Ladang	454,78	45	Tegalan/Ladang	21.721,82
23	Lahan Terbuka	19.425,85		Total Luas	2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Selain itu, terdapat 52,04 % (lima puluh dua koma nol empat persen) wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berstatus agak kritis (1.316.168,42 hektare). Lahan kritis terindikasi seluas 10,69 % (sepuluh koma enam puluh sembilan persen) atau 270.417,13 ha (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh belas koma tiga belas hektare) dan lahan berstatus sangat kritis seluas 0,36 % (nol koma tiga puluh enam persen) atau 9.107,10 ha (sembilan ribu seratus tujuh koma sepuluh hektare). Lahan berstatus kritis terluas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terletak di Kecamatan Loa Kulu yaitu 74.451,29 ha (tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu koma dua puluh sembilan hektare) dan lahan berstatus sangat kritis terluas terletak di Kecamatan Kembang Janggut yaitu 1.855,35 ha (seribu delapan ratus lima puluh lima koma tiga puluh lima hektare) dan Anggana yaitu 1.019,94 ha (seribu sembilan belas koma sembilan puluh empat hektare).

Gambar 2.8.

Peta Lahan Kritis

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

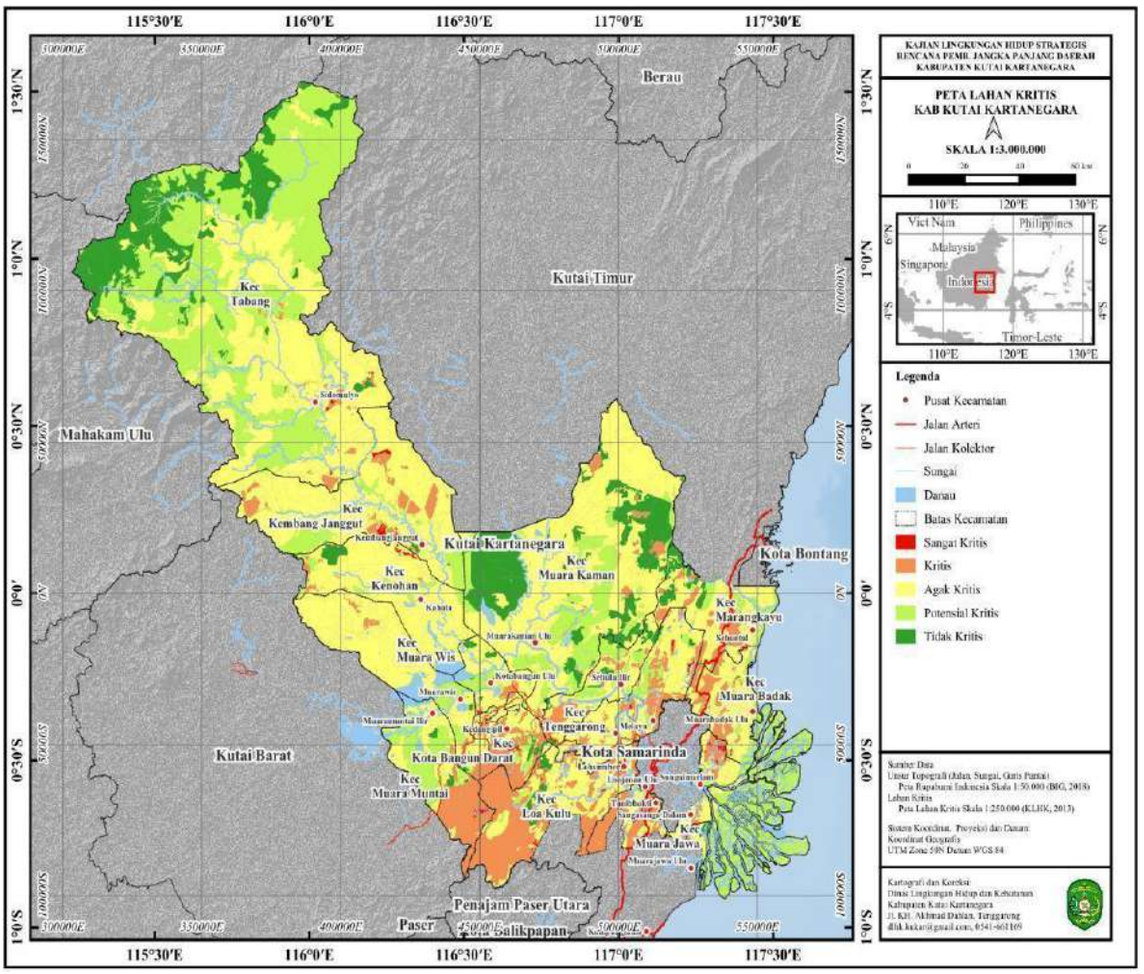

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel 2.5.

Luas Lahan Kritis

di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Kecamatan	Luas Lahan (hektare)					
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total
Anggana	3.872,87	77.097,39	18.704,03	5.893,06	1.019,94	106.801,32
Kembang Janggut	2.459,79	23.542,18	174.820,61	16.376,92	1.855,35	219.130,52
Kenohan	10.449,65	9.181,79	108.529,40	2.741,45	646,56	131.629,81
Kota Bangun	4.798,04	7.613,40	28.993,14	2.433,61	202,66	44.173,71
Kota Bangun	2.522,64	3.507,88	18.589,98	20.492,26	876,97	46.024,94

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kecamatan	Luas Lahan (hektare)					
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total
Darat						
Loa Janan	301,42	8,39	10.711,13	20.968,10	944,54	32.946,96
Loa Kulu	4.913,58	2.724,90	53.422,54	74.451,29	946,55	136.546,90
Marangkayu	9.477,99	10.356,32	49.273,62	16.700,18	638,08	86.484,58
Muara Badak	785,16	16.762,63	41.390,88	14.854,73	57,26	79.853,94
Muara Jawa	2.232,76	13.431,48	4.195,77	842,82		20.484,22
Muara Kaman	98.623,15	68.797,33	246.875,27	9.290,44		423.870,60
Muara Muntai	4.136,14	34.959,41	23.595,33	31.390,28	595,53	94.711,27
Muara Wis	9.542,51	9.840,97	102.251,42	9.495,82	62,16	131.384,18
Sangasanga	322,45	0,51	7.845,88	1.969,57		10.035,55
Sebulu	7.026,41	11.600,10	29.791,43	11.552,54		60.019,35
Tabang	100.843,33	370.916,59	330.776,18	7.559,85	452,51	811.160,78
Tenggarong	1.079,85	117,63	28.336,40	6.190,63	95,56	35.848,35
Tenggarong Seberang	1.567,52	8.117,55	38.065,40	17.213,57	713,44	65.728,13
Total	264.955,27	668.576,42	1.316.168,42	270.417,13	9.107,10	2.536.835,10

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Selanjutnya, berdasarkan peta pola ruang RTRW, penggunaan lahan didominasi oleh kawasan hutan produksi tetap seluas 686.997,79 ha (enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan hektare) atau 27,16% (dua puluh tujuh koma enam belas persen) diikuti dengan kawasan hutan produksi terbatas seluas 541.993,17 ha (lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh belas hektare) atau 21,43% (dua puluh satu koma empat puluh tiga persen), perkebunan seluas 341.752,54 ha (13,51%) dan kawasan tanaman pangan seluas 307.348,17 ha (12,15%). Jenis penggunaan lahan lain yang mendominasi adalah kawasan hutan lindung seluas 205.942,28 ha (dua ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh delapan hektare) atau 8,14% (delapan koma empat belas persen). Sisanya terbagi ke dalam berbagai jenis penggunaan lahan lainnya yang berorientasi sebagai lingkungan terbangun perkotaan dan kawasan konservasi. Rincian luas masing-masing kelas penggunaan lahan disajikan pada gambar dan tabel berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 2.9.

Peta Rencana Pola Ruang

di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

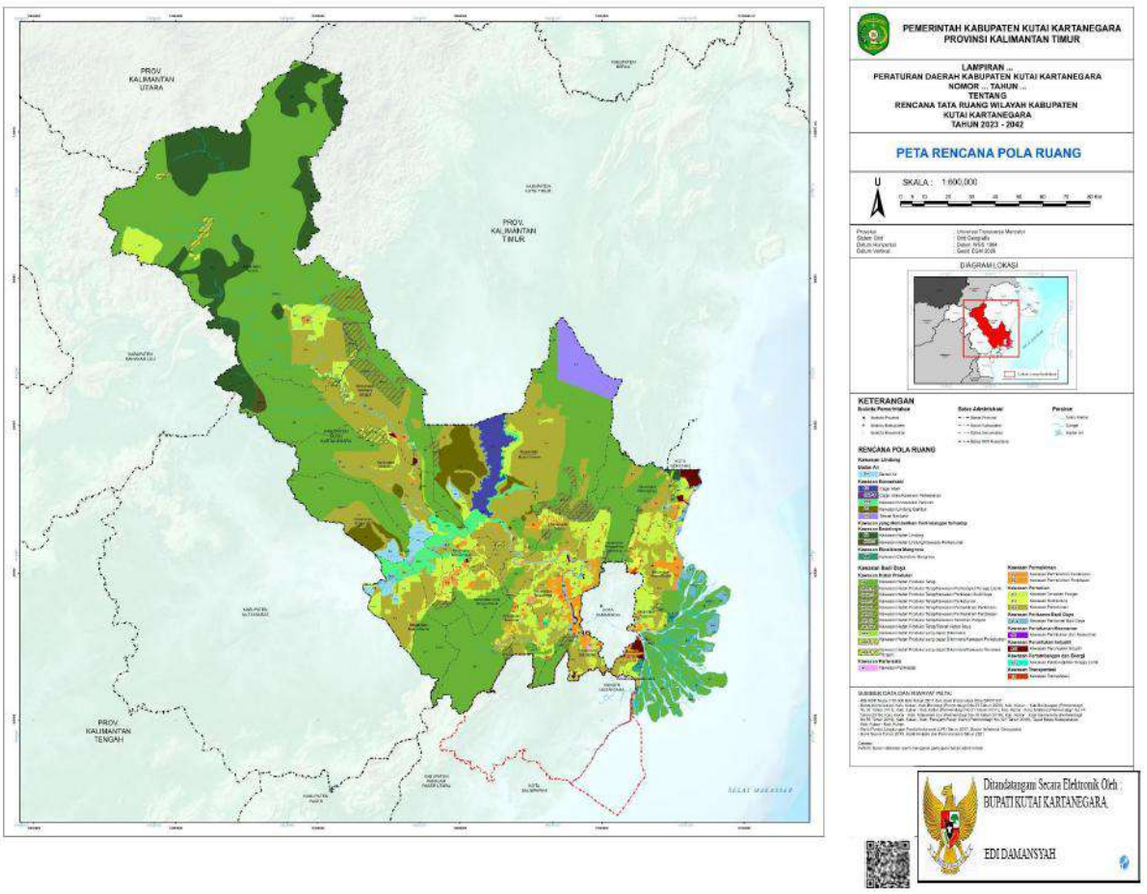

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Luas Penggunaan Lahan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (hektare)	Luas (%)	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (hektare)	Luas (%)
Badan Air	43.553,57	1,72	Perkebunan	341.752,54	13,51
Danau	4.061,81	0,16	Perkebunan Rakyat	15.682,14	0,62
Cagar Alam	32.045,96	1,27	Permukiman Perdesaan	17.567,54	0,69
Ekosistem Mangrove	3.031,57	0,12	Permukiman Perkotaan	50.052,24	1,98
Hortikultura	8.650,67	0,34	Peruntukan Industri	5.847,99	0,23
Hutan Lindung	205.942,28	8,14	Sekitar Danau atau Waduk	3.787,11	0,15
Hutan Produksi Terbatas	541.993,17	21,43			
Hutan Produksi Tetap	686.997,79	27,16	Suaka Alam	0,00	0,00
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	27.397,19	1,08	Tanaman Pangan	307.348,17	12,15
			Sempadan Pantai	1.974,21	0,08
Imbuhan Air Tanah	32.169,45	1,27	Sempadan Sungai	23.337,13	0,92
Lindung Gambut	69.330,35	2,74	Suaka Margasatwa	1.039,97	0,04
Pariwisata	421,23	0,02	Taman Hutan Raya	46331,56	1,83
Pelestarian Alam	8,63	0,00	Taman Nasional	40602,13	1,61
Perikanan Budi Daya	18.297,92	0,72	Total Luas	2.536.835,10	100,00

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi tenaga surya yang cukup tinggi, yaitu seluas 954,31 km^2 (sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga puluh satu kilometer persegi) dengan rata-rata 661,35 watt/m^2 (enam ratus enam puluh satu watt per meter kubik dan rata-rata 4,3 kwh/m^2 (empat koma tiga kilo watt hour per meter kubik). Potensi total ini senilai dengan 39,13 (tiga puluh sembilan koma tiga belas) *Global Warming Potential (GWP),* angka ini merupakan pencapaian tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.6.

Potensi Tenaga Surya

Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Luas (km^2)	Rata-rata watt/m^2	Rata-rata kwh/m^2	Potensi GWP
1	Berau	286.61	689.92	4.48	11.75
2	Kota Balikpapan	111.49	691.54	4.49	4.57
3	Kota Bontang	30.73	708.33	4.60	1.26
4	Kota Samarinda	140.08	628.72	4.09	5.74
5	Kutai Barat	247.63	667.35	4.34	10.15
6	Kutai Timur	351.07	681.95	4.43	14.39
7	Kutai Kartanegara	954.31	661.35	4.30	39.13
8	Mahakam Ulu	73.70	668.40	4.34	3.02
9	Paser	198.78	663.22	4.31	8.15
10	Penajam Paser Utara	189.73	670.90	4.36	7.78
	Kalimantan Timur	2,584.12	672.42	4.37	105.95

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Potensi PLTS terapung di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 14 kecamatan dengan besaran potensi besar di Kecamatan Kota Bangun (10.674,70 hektare) dengan potensi 533.73 MW. Potensi total PLTS terapung di Kabupaten Kutai Kartanegara senilai 1.125,19 MW, merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.7.

Potensi PLTS Terapung

Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kecamatan	Luas (hektare)	Potensi (MW)	Klasifikasi
1	Konahan	579,46	28,97	Kecil
2	Kota Bangun	10674,70	533,73	Besar
3	Kota Bangun	28,42	1,42	Kecil
4	Loa Janan	23,00	1,15	Kecil
5	Loa Kulu	97,10	4,86	Kecil
6	Marangkayu	40,02	2,00	Kecil
7	Muara Kaman	1207,40	60,37	Sedang
8	Muara Muntai	848,81	42,44	Kecil
9	Muara Wis	8506,95	425,35	Sedang
10	Muara Wis	33,38	1,67	Kecil
11	Samboja	167,18	8,36	Kecil
12	Sangasanga	78,89	3,94	Kecil

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Kecamatan	Luas (hektare)	Potensi (MW)	Klasifikasi
13	Tenggarong Seberang	142,42	7,12	Kecil
14	Tenggarong	75,99	3,80	Kecil
	Kutai Kartanegara	22503,72	1125,19	

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Potensi tenaga angin di Kabupaten Kutai Kartanegara juga yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar kecepatan angin 2.676,05 (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam koma nol lima) dengan luasan 424,73 km^2 (empat ratus dua puluh empat koma tujuh puluh tiga kilometer persegi).

Tabel 2.8.

Potensi Tenaga Angin

Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Kecepatan angin (pada ketinggian 50 m)	Luas (km2)
1	Berau	1.257,43	246,10
2	Kota Balikpapan	296,07	60,59
3	Kota Bontang	263,51	19,48
4	Kutai Barat	773,44	195,37
5	Kutai Timur	1.595,18	233,60
6	Kutai Kartanegara	2.676,05	424,73
7	Paser	1.461,49	298,24
8	Penajam Paser Utara	419,23	63,78
	KALIMANTAN TIMUR	8.742,40	1.541,91

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Secara keseluruhan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar, yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian dan mendukung tercapainya konsep *net zero emission*. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang tepat dan terukur dalam pemanfaatan potensi SDA ini.

Potensi SDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi pilar utama perekonomian daerah dapat dilihat dari eksistensi sektor pertanian beserta subsektor tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, serta sektor perikanan. Lahan pertanian yang luas memungkinkan bagi upaya pengembangan komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura, yang akan menopang ketahanan pangan lokal maupun regional. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, data produktivitas sektor pertanian tampak mengalami fluktuasi. Produktivitas pertanian tertinggi terjadi pada 2023

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yaitu 471,4 ton/ha (empat ratus tujuh puluh satu koma empat ton per hektare).

Di bidang perkebunan, Kutai Kartanegara juga kaya dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, yang berkontribusi signifikan terhadap nilai tambah ekonomi serta peluang yang besar bagi hilirisasi. Demikian juga sektor peternakan berkembang pesat dengan populasi sapi, ayam, dan kambing yang mampu mendukung kebutuhan protein hewani masyarakat, sekaligus membuka peluang industri olahan hasil ternak.

Kabupaten Kutai Kartanegara juga dikenal memiliki potensi perikanan darat dan budi daya perairan, khususnya ikan air tawar (gabus dan patin). Hal ini antara lain karena keberadaan Sungai Mahakam, sehingga subsektor perikanan menunjukkan potensi ekonomi yang terus meningkat.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari nilai produksi subsektor perikanan pada 2020 yang hanya sebesar Rp6.648.846.000.000,00 (enam triliun enam ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian melonjak menjadi Rp12.621.931.397.000,00 (dua belas triliun enam ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada 2024. Potensi yang besar ini, jika dikelola dengan benar dan berkelanjutan, dapat menjadi basis utama bagi upaya transformasi ekonomi daerah menuju ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing Daerah.

Tabel 2.9.

Data Potensi Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sektor Pertanian						
Produktivitas Pertanian per hektare per tahun	Ton/Ha	439,99	460,95	402,24	471,4	459,42
Luas areal panen	Ha	33.698,00	28.686,00	29.608,00	28.054,00	26.873,00
Total Produksi Pertanian	Ton	120.237	110.159	112.008	122.778	110.844
Subsektor Tanaman Pangan Hortikultura						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Subsektor Tanaman Pangan Hortikultura	Persen	9,50	10,49	-25,22	-20,94	27,30
Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	0,46	5,34	-19,81	-12,54	1,10
Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	283.170,63	298.289,44	239.187,52	209.204,70	211.506,51
Subsektor Peternakan						

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Subsektor Peternakan	Persen	4,47	5,14	-18,76	90,12	13,41
Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Peternakan	Persen	4,96	7,77	-9,61	73,04	13,33
Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	14.993.990	16.158.897	14.606.183	25.275.214	28.644.064
Subsektor Perkebunan						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Subsektor Perkebunan	Persen	1,48	3,52	1,95	10,88	5,54
Total Nilai Produksi	Juta Rupiah	3.255.714	3,370,337	3.436.170	3.810.122	4,021,353
Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	3,31	2,96	1,87	11,41	5,97
Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	2.892.651,33	2.978.217,41	3.033.948,48	3.380.077,55	3.581.861,51
Produktivitas Komoditas Kelapa Sawit	Ton/Ha	15,75	18,58	15,24	15,91	14,86
Luas Areal Tanam Kelapa Sawit	Ha	218.722,00	220.325,00	226.845,00	230.169,00	258.047,28
Luas Areal Tanam Kelapa Sawit TM	Ha	182.637,15	159.436,34	197.969,40	211.339,46	239.685,55
Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	2.876.599	2.961.595	3.016.673	3.363.058	3.561.863
Sektor Perikanan						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Sektor Perikanan	Persen	0,00	6,48	1,54	43,65	22,23
Total nilai Produksi sektor Perikanan	Juta Rupiah	6.648.846	7.079.474	7.188.498	10.326.514	12.621.931
Pertumbuhan Produksi Perikanan	Persen	6,48	2,56	1,37	34,07	15,17
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	202.277,3	207.461,1	210.308,0	281.950,6	324.727,8

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, 2025

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT-LH) mencakup evaluasi kondisi ekoregion, tutupan lahan, serta daya dukung dan daya tampung. DDDT diukur melalui nilai jasa lingkungan hidup, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin besar kapasitasnya.

Untuk memperoleh nilai jasa lingkungan hidup, digunakan dua metode penaksiran: *landscape based proxy* dan *landscape/land used based proxy*. Dua metode tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemetaan DDDT-LH.

Jasa lingkungan hidup terbagi menjadi 4 (empat) kategori: penyediaan *(provisioning)*, pengaturan *(regulating)*, budaya *(cultural)*, dan pendukung *(supporting)*. Penilaian DDDT-LH jasa lingkungan hidup di Kabupaten Kutai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kartanegara mencakup 20 (dua puluh) jenis. Uraian berikut ini menjelaskan dengan lengkap mengenai kondisi dan fungsi jasa lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diambil dari laporan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

   Ketersediaan air di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa mayoritas lahan atau seluas 1.680.921,36 ha (satu juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tiga puluh enam hektare) atau 66,26 % (enam puluh enam koma dua puluh enam persen), tergolong dalam kategori penyediaan air yang rendah. Hal ini diikuti dengan lahan dengan penyediaan air sangat rendah seluas 494.327,75 ha (empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima hektare) atau 19,49 % (sembilan belas koma empat puluh sembilan persen), lahan dengan penyediaan air sedang mencapai 319.220,33 ha (tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh koma tiga puluh tiga hektare) atau 12,58 % (dua belas koma lima puluh delapan persen), lahan dengan penyediaan air tinggi hanya 26.144,32 ha (dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat koma tiga puluh dua hektare) atau 1,03 % (satu koma nol tiga persen), lahan denga penyediaan air sangat tinggi sangat terbatas, hanya 16.221,34 ha (enam belas ribu dua ratus dua puluh satu hektare) atau 0,64 % (nol koma enam puluh empat persen).

2. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

   Kondisi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia pangan Daerah menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kemampuan wilayah untuk menyediakan lahan subur bagi kegiatan pertanian sangat bervariasi. Berdasarkan data KLHS, lahan dengan kategori penyediaan pangan sangat tinggi mencakup areal seluas 136.740,35 ha (seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh koma tiga puluh lima hektare) atau 5,39 % (lima koma tiga puluh sembilan persen) dari luas wilayah total seluas 2.536.835,10 ha (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima koma sepuluh hektare). Lahan dengan kategori penyediaan pangan tinggi mencakup 133.843,13 ha (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga belas hektare) atau 5,28 % (lima koma dua puluh delapan persen), sementara lahan dengan kategori sedang mendominasi dengan luas areal mencapai 1.596.877,50 ha (satu juga lima ratus sembilan puluh enam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma lima puluh hektare) atau 62,95 % (enam puluh dua koma sembilan puluh lima persen). Selanjutnya, lahan dengan kategori rendah mencakup 300.936,39 ha (tiga ratus ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga puluh sembilan hektare) atau 11,86 % (sebelas koma delapan puluh enam persen), dan kategori sangat rendah mencakup 368.437,71 ha (tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh satu hektare) atau 14,52 % (empat belas koma lima puluh dua persen).

3. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Serat

   Jasa lingkungan hidup penyedia serat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang didominasi oleh kategori tinggi, dengan wilayah seluas 1.161.174,40 ha (satu juta seratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat koma empat puluh hektare) atau 45,77 % (empat puluh lima koma tujuh puluh tujuh persen). Rincian kategori lainnya meliputi kategori sangat tinggi seluas 6.774,56 ha (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat hektare) 0,27 % (nol koma dua puluh tujuh persen), kategori sedang seluas 440.265,57 ha (empat ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh lima hektare) 17,35 % (tujuh belas koma tiga puluh lima persen), kategori rendah seluas 561.537,56 ha (lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh enam hektare) atau 22,14 % (dua puluh dua koma empat belas persen), dan kategori sangat rendah seluas 367.083,00 ha (tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga hektare) atau 14,47 % (empat belas koma empat puluh tujuh persen).

4. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik

   Jasa lingkungan hidup penyedia sumber daya genetik di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki distribusi yang bervariasi. Kategori tinggi mendominasi dengan luas 990.892,59 ha (sembila ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma lima puluh sembilan hektare) atau 39,06 % (tiga puluh sembilan koma nol enam persen), diikuti oleh kategori sedang seluas 539.026,17 ha (lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh enam koma tujuh belas hektare) atau 21,25 % (dua puluh satu koma dua puluh lima persen), dan kategori sangat tinggi seluas 506.201,00 ha (lima ratus enam ribu dua ratus satu hektare) 19,95 % (sembilan belas koma sembilan puluh lima persen). Kategori rendah dan sangat rendah masing-masing

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mencakup 262.728,66 ha (dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma enam puluh enam hektare) atau 10,36 % (sepuluh koma tiga puluh enam persen), dan 238.019,79 ha (dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan belas koma tujuh puluh sembilan hektare) atau 9,38 % (sembilan koma tiga puluh delapan persen).

5. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara

Jasa ini terfokus pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi manusia. Kebutuhan oksigen tidak hanya ditinjau secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sebagian besar wilayah berada dalam kategori sangat tinggi dengan luasan mencapai 902.326,86 ha (sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam hektare) atau 35,57 % (tiga puluh lima koma lima puluh tujuh persen). Kategori tinggi mencakup 559.662,29 ha (lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koam dua puluh sembilan hektare) atau 22,06 % (dua puluh dua koma nol enam persen), kategori sedang seluas 436.639,39 ha (empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan hektare) atau 17,21 % (tujuh belas koma dua puluh satu persen), kategori rendah seluas 512.418,93 ha (lima ratus dua belas ribu empat ratus delapan belas koma sembilan puluh tiga hektare) atau 19,19 % (sembilan belas koma sembilan belas persen), dan kategori sangat rendah seluas 125.788,63 ha (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tiga hektare) atau 5,96 % (lima koma sembilan puluh enam persen).

6. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim

Luas kawasan hutan sangat mempengaruhi jasa lingkungan hidup dalam mengatur iklim. Hutan berperan dalam menghasilkan karbondioksida dan oksigen, yang dapat membantu menjaga temperatur tetap sejuk. Dalam skala lokal, kondisi vegetasi dapat mempengaruhi iklim mikro di sekitarnya, sedangkan pada skala ekoregional, kondisi tersebut dapat mempengaruhi pengaturan iklim secara global.

Jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara mayoritas termasuk dalam kategori tinggi dengan areal seluas 1.554.727,73 ha (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh tiga hektare) atau 61,29 %

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(enam puluh satu persen). Kategori lainnya adalah sangat tinggi dengan luas 176.649,87 ha (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembila koma delapan puluh tujuh hektare) atau 6,96 % (enam koma sembilan puluh enam persen), kategori sedang dengan luas 163.771,15 ha (seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma lima belas hektare) atau 6,46 % (enam koma empat puluh enam persen), kategori rendah dengan luas 623.579,13 ha (enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan hektare) atau 24,58 % (dua puluh empat koma lima puluh delapan persen), dan kategori sangat rendah dengan 18.107,23 ha (delapan belas ribu seratus tujuh koma dua puluh tiga hektare) atau 0,71 % (nol koma tujuh puluh satu persen).

7. Jasa Lingkungan Hidup Pencegah Banjir

Jasa lingkungan hidup dalam pencegahan banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk kategori sangat tinggi mencakup luasan terbesar yaitu 962.072,45 ha (sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh dua koma empat puluh lima hektare) atau 37,92 % (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen). Kategori tinggi seluas 800.143,66 ha (delapan ratus ribu seratus empat puluh tiga koma enam puluh enam hektare) atau 31,54 % (tiga puluh satu koma lima puluh empat persen), kategori sedang 412.632,90 ha (empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh hektare) atau 16,27 % (enam belas koma dua puluh tujuh persen), kategori rendah 352.181,97 ha (tiga ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh hektare) atau 13,88 % (tiga belas koma delapan puluh delapan persen), dan kategori sangat rendah 9.804,11 ha (sembilan ribu delapan ratus empat koma sebelas hektare) atau 0,39 % (nol koma tiga puluh sembila persen).

Kawasan hutan yang luas mampu mengendalikan aliran udara permukaan dengan mengurangi laju aliran udara dan meningkatkan evapotranspirasi. Sebaliknya, tanah aluvial yang telah menjadi permukiman memiliki potensi pencegahan banjir yang “sangat rendah”. Permukaan tanah yang telah diperkeras di permukiman menyebabkan air hujan langsung mengalir ke sungai atau menggenang, sehingga meningkatkan potensi banjir akibat kenaikan aliran sungai dalam waktu singkat. Jumlah vegetasi yang dapat menahan air hujan juga berkurang drastis karena digantikan oleh bangunan dan permukiman.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Jasa Lingkungan Hidup Pencegah Tanah Longsor

Tanah longsor umumnya terjadi di wilayah dengan banyak lereng yang curam, dengan kemiringan lebih dari 45° (empat puluh lima derajat), meskipun juga dapat terjadi di tanah datar dengan kemungkinan lebih kecil. Proses ini sering terjadi karena terganggunya keseimbangan, membuat tanah menjadi labil dan mudah bergeser akibat adanya air yang masuk ke dalam lapisan tanah dan berperan sebagai area gelincir. Jika air masuk ke dalam area gelincir pada lapisan tanah, maka pembatas antara tanah bagian atas dan bawah menjadi goyah dan memudahkan pergeseran. Risiko ini meningkat jika terdapat bangunan di atas tanah yang sudah goyah, menambah beban pada tanah.

Jasa lingkungan hidup dalam pencegahan tanah longsor di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kategori sangat tinggi mendominasi dengan luas 895.633,03 ha (delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga koma nol tiga hektare) atau 35,31 % (tiga puluh lima koma tiga puluh satu persen). Kategori tinggi mencakup 623.135,40 ha (enam ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma empat puluh hektare) atau 24,56 % (dua puluh empat koma lima puluh enam persen), kategori sedang seluas 282.355,29 ha (dua ratus delapan puluh dua koma tiga ratus lima puluh lima koma dua puluh sembilan hektare) atau 11,13 % (sebelas koma tiga belas persen), kategori rendah 547.602,72 ha (lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua koma tujuh puluh dua hektare) atau 21,59 % (dua puluh satu koma lima puluh sembilan persen), dan kategori sangat rendah seluas 188.108,66 ha (seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan koma enam puluh enam hektare) atau 7,42 % (tujuh koma empat puluh dua persen).

9. Jasa Lingkungan Hidup Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Insiden kebakaran hutan dan lahan sering menjadi ancaman signifikan di wilayah Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada periode musim kemarau, kondisi hutan dan lahan sangat rentan terhadap risiko kebakaran. Oleh karena itu, pembukaan lahan selama musim kemarau harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan penggunaan metode pembakaran telah dilarang dengan tegas. Kondisi jasa lingkungan hidup pencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa lahan dalam kategori sangat tinggi mencakup 133.540,47 ha (seratus tiga puluh tiga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ribu lima ratus empat puluh koma empat puluh tujuh hektare) atau 5,26 % (lima koma dua puluh enam persen). Sementara itu, kategori tinggi mencakup lahan seluas 1.115.455,08 ha (satu juta seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh lima koma nol delapan hektare) atau 43,98 % (empat puluh tiga koma sembilan puluh delapan persen), dan kategori sedang mendominasi dengan 1.287.839,54 ha (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh empat hektare) atau 50,77 % (lima puluh koma tujuh puluh tujuh persen). Tidak ada lahan yang masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah.

10. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air

    Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur air berada di daerah yang tidak bervegetasi, kemampuan tumbuhan untuk menyimpan air menjadi tidak ada, sehingga air hujan lebih banyak mengalir sebagai aliran air permukaan. Vegetasi penutup tanah memainkan peran penting dalam siklus air di permukaan bumi, dan kemampuan suatu ekoregion sebagai pengatur air sangat bervariasi.

    Jasa lingkungan hidup pengatur air di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh lahan dengan kategori tinggi, yang mencakup 1.101.726,90 ha (satu juta seratus satu ribu tujuh ratus dua puluh enam koma sembilan puluh hektare) atau 43,43 % (empat puluh tiga koma empat puluh tiga persen). Kategori sedang mencakup 409.841,27 ha (empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu koma dua puluh tujuh hektare) atau 16,16 % (enam belas koma enam belas persen), kategori rendah mencakup 715.982,18 ha (tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma delapan belas hektare) atau 28,22 % (dua puluh delapan persen), dan kategori sangat rendah mencakup 267.309,33 ha (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan koma tiga puluh tiga hektare) atau 10,54 % (sepuluh koma lima puluh empat persen). Kategori sangat tinggi hanya mencakup 41.975,42 ha (empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma empat puluh dua hektare) atau 1,65 % (satu koma enam puluh lima persen).

11. Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

    Jasa lingkungan hidup dalam hal pemurnian air dan pengolahan limbah di menunjukkan variasi kemampuan lahan dalam mendukung

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

proses *self-purification*. Tanah dan batuan alami berperan sebagai penyaring alami yang membantu memurnikan air.

Lahan dengan kapasitas pemurnian air kategori sangat tinggi mendominasi, mencakup 776.752,53 ha (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua hektare) atau 30,62 % (tiga puluh koma enam puluh dua persen). Kategori tinggi mencakup 739.544,47 ha (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat koma empat puluh tujuh hektare) atau 29,15 % (dua puluh sembilan koma lima belas persen), sementara kategori sedang meliputi 215.591,43 ha (dua ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh satu koma empat puluh tiga hektare) atau 8,50 % (delapan koma lima puluh persen). Kategori rendah 366.339,44 ha (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh empaqt hektare atau 14,44 % (empat belas koma empat puluh empat persen) dan kategori sangat rendah 438.607,24 ha (empat belas tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh koma dua puluh empat hektare) atau 17,29 % (tujuh belas koma dua puluh sembilan persen).

12. Jasa Lingkungan Hidup Penyerbukan Alami

Jasa lingkungan hidup dalam pengaturan penyerbukan alami di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan variasi signifikan antar kecamatan. Penyerbukan alami, sangat penting bagi reproduksi tumbuhan berbunga, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan keberadaan spesies penyerbuk. Kategori tinggi mendominasi dengan luas 1.115.151,83 ha (satu juta seratus lima belas ribu seratus lima puluh satu koma delapan puluh tiga hektare) atau 43,96 % (empat puluh tiga koma sembilan puluh enam persen), diikuti kategori sedang 425.592,86 ha (empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh enam hektare) atau 16,78 % (enam belas koma tujuh puluh delapan persen), kategori rendah 502.750,72 ha (lima ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh koma tujuh puluh dua hektare) atau 19,82 % (sembilan belas koma delapan puluh dua persen), dan kategori sangat rendah 484.295,25 ha (empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima koma dua puluh lima hektare) atau 19,09 % sembilan belas koma nol sembilan persen). Potensi lahan dalam kategori sangat tinggi hanya mencakup 9.044,43 ha (sembilan ribu empat puluh empat koma empat puluh tiga hektare) atau 0,36 % (nol koma tiga puluh enam persen).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

13. Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama

Pengendalian hama dan penyakit adalah upaya untuk mengatur makhluk-makhluk atau organisme yang dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi.

Jasa Lingkungan Hidup dalam pengendalian hama dan penyakit bervariasi dari kategori sedang hingga sangat rendah. Tidak ada lahan dalam kategori sangat tinggi. Kategori sedang mencakup 840.243,32 ha (delapan ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh tiga koma tiga puluh dua hektare) atau 33,12 % (tiga puluh tiga koma dua belas persen), kategori tinggi 513.208,67 ha (lima ratus tiga belas ribu dua ratus delapan koma enam puluh tujuh hektare) atau 20,23 % (dua puluh koma dua puluh tiga persen), kategori rendah 714.139,64 ha (tujuh ratus empat belas ribu seratus tiga puluh sembilan koma enam puluh empat hektare) atau 28,15 % (dua puluh delapan koma lima belas persen), dan kategori sangat rendah 469.243,46 ha (empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh enam hektare) atau 18,50 % (delapan belas koma lima puluh persen).

14. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Habitat dan Kehati

Jasa lingkungan hidup pendukung habitat dan keanekaragaman hayati (kehati) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar-kecamatan.

Berdasarkan luas total wilayah penyedia jasa, kategori sangat tinggi mencakup area seluas 764.022,85 ha (tujuh ratus enam puluh empat ribu dua puluh dua koma delapan puluh lima hektare) atau 30,12 % (tiga puluh koma dua belas persen), seluas 602.476,87 ha (enam ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh tujuh hektare) atau 23,75 % (dua puluh tiga koma tujuh puluh lima persen) berada dalam kategori tinggi, dan 437.698,11 ha (empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma sebelas hektare) atau 17,25 % (tujuh belas koma dua puluh lima persen) berada dalam kategori sedang. Kategori rendah mencakup 490.609,13 ha (empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan koma tiga belas hektare) atau 19,34 % (sembilan belas koma tiga puluh empat persen), dan kategori sangat rendah mencakup 242.028,14 ha (dua ratus empat puluh dua ribu dua puluh delapan koma empat belas hektare) atau 9,54 % (sembilan koma lima puluh empat persen).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

15. Jasa Lingkungan Hidup Pembentukan dan Regenerasi Tanah

    Jasa lingkungan hidup untuk pembentukan dan regenerasi tanah menunjukkan distribusi yang beragam. Kategori sangat tinggi mencakup luas sebesar 835.846,75 ha (delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh puluh lima hektare) 32,95 % (tiga puluh dua koma sembilan puluh lima persen), kategori tinggi 771.956,15 (tujuh ratus tujuh puluh sati ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima belas hektare) atau 30,43 % (tiga puluh koma empat puluh tiga persen), kategori sedang 525.194,06 ha (lima ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat koma nol lima hektare) atau 20,70 % (dua puluh koma tujuh puluh persen), kategori rendah 249.616,64 ha (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam belas koma enam puluh empat hektare) atau 9,84 % (sembilan koma delapan puluh empat persen), dan kategori sangat rendah 154.221,50 ha (seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu koma lima puluh hektare) atau 6,08 % (enam koma nol delapan persen).

16. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer

    Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi biomassa sebagai jasa lingkungan hidup pendukung produksi primer yang beragam. Kategori sangat tinggi mencakup 227.815,55 ha (dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas koma lima puluh lima hektare) atau 8,98 % (delapan koma sembilan puluh delapan persen), kategori tinggi 994.541,12 ha (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu koma dua puluh satu hektare atau 39,20 % (tiga puluh sembilan koma dua puluh persen), kategori sedang 782.722,36 ha (tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua koma tiga puluh enam hektare) atau 30,85 % (tiga puluh koma delapan puluh lima persen), kategori rendah 365.348,12 ha (tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma dua belas hektare) atau 14,40 % (empat belas koma empat puluh persen), dan kategori sangat rendah 166.407,95 ha (seratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh koma sembilan puluh lima hektare) atau 6,56 % (enam koma lima puluh enam persen). Mayoritas potensi produksi primer ada pada kategori tinggi yaitu 39,20 % (tiga puluh sembilan koma dua puluh persen) dan kategori sedang yaitu 30,85 % (tiga puluh koma delapan puluh lima persen).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

17. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara

    Jasa lingkungan hidup siklus hara didominasi oleh kategori sedang, yaitu seluas 1.033.631,02 ha (satu juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu koma nol dua hektare) atau 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen), diikuti kategori tinggi dengan luas 506.657,19 ha (lima ratus enam ribu enam ratus lima puluh tujuh koma sembilan hektare atau 19,97 % (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh persen), dan kategori rendah 630.624,67 ha (enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat koma enam puluh tujuh hektare) atau 24,86 % (dua puluh empat koma delapan puluh enam persen). Kategori sangat rendah seluas 365.922,22 ha (tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua koma dua puluh dua hektare) atau 14,42 % (empat belas koma empat puluh dua persen).

18. Jasa Lingkungan Hidup Kultural Estetika

    Jasa lingkungan hidup kultural rekreasi, jasa lingkungan kultural estetika terlihat bahwa luas area yang termasuk dalam kategori sangat tinggi adalah 52.557,87 ha (lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tujuh hektare) atau 2,07 % (dua koma nol tujuh persen). Area yang masuk dalam kategori tinggi mencapai 332.304,54 ha (tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat koam lima puluh empat hektare) atau 13,10 % (tiga belas koma sepuluh persen). Kategori sedang mendominasi dengan luas 1.848.155,65 ha (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima koma enam puluh lima hektare) atau 72,85 % (tujuh puluh dua koma delapan puluh lima persen), sedangkan kategori “rendah” meliputi 12.855,03 hektare (0,51 persen). Kategori “sangat rendah” seluas 290.961,01 hektare (11,47 persen). Mayoritas potensi jasa lingkungan hidup kultural estetika di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kategori “sedang” (72,85 persen) dari total luas areal.

19. Jasa Lingkungan Hidup Kultural Rekreasi

    Jasa lingkungan hidup kultural rekreasi didominasi oleh kategori sedang 1.790.208,47 ha (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan koma empat puluh tujuh hektare) atua 70,57 % (tujuh puluh koma lima puluh tujuh persen). Luas area yang termasuk dalam kategori sangat tinggi seluas 48.681,02 ha (empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu koma nol dua hektare) atau 1,92 % (satu koma sembilan puluh dua persen), kategori tinggi mencapai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

139.941,27 ha (saratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu koma dua puluh tujuha hektare) atau 5,52 % lima koma lima puluh dua persen), kategori rendah meliputi 267.042,88 ha (dua ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh dua koma delapan puluh delapan hektare) atau 10,53 (sepuluh koma lima puluh tiga persen), dan kategori sangat rendah memiliki luas 290.961,01 ha (dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu koma nol satu hektare) atau 11,47 % (sebelas koma empat puluh tujuh persen).

20. Jasa Lingkungan Hidup Warisan Budaya dan Identitas

Luas jasa lingkungan hidup warisan budaya dan identitas menunjukkan bahwa luas area dengan kategori tinggi adalah 1.075.568,48 ha (satu juta tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma empat puluh delapan hektare) atau 42,40 % (empat puluh dua koma empat puluh persen), kategori sedang 975.921,38 ha (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tiga puluh delapan hektare) atau 38,47 % (tiga puluh delapan koma empat puluh tujuh persen), kategori rendah seluas 158.606,84 ha (seratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam koma delapan puluh empat hektare) atua 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen), dan kategori sangat rendah seluas 320.619,88 ha (tiga ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan belas koma delapan puluh delapan hektare atau 12,64 % (dua belas koma enam puluh empat persen).

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir aneka macam air limbah, baik limbah perusahaan maupun dari limbah domestik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih di antaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air ledeng, sumur pompa, mata air terlindung, dan sumur terlindung.

Dengan melihat sumber air minum ini, maka akan dapat digambarkan tingkat kesehatan rumah tangga atau masyarakat suatu daerah. Sesuai data KLHS, jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

peningkatan jumlah rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.10.

Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	87,90	70,85	89,32	82,18	80,20
2	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	117.198	121.926	131.920	161.911	156.924
3	Jumlah Total Rumah Tangga	185.433	185.433	172.099	197.028	185.433
4	Penduduk Berakses Air Minum	468.792	487.704	527.680	647.645	627.696
5	Jumlah Penduduk	729.382	733.626	738.189	788.113	789.767
6	Rasio (%)	64,27	66,48	71,48	82,18	79,48

Sumber: Dinas Perumahan & Pemukiman / PDAM, 2025

Ketersediaan pangan Daerah cukup memadai hal ini terlihat dari tabel indikator pangan.

Tabel 2.11.

Indikator Pangan

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	128,82	128,72	118,00	118,46	102,95
2	Produksi Beras (Ton)	64.530,52	60.750,49	61.090,11	66.952,24	61.978,93
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (persen)	11,14	14,41	18,52	10,59	8,06
4	Indeks Ketahanan Pangan	84,28	84,73	84,44	85,53	87,16

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2025; BPS, 2025

Ketersediaan pangan utama menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu pada tahun 2020 sebesar 128,82 % (seratus dua puluh delapan koma delapan puluh dua persen), dan terus turun menjadi 118,00 % (seratus delapan belas persen) pada tahun 2022. Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yaitu 118,46 % (seratus delapan belas koma empat puluh enam persen) dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pada tahun 2024 turun kembali menjadi sebesar 102,95 % (seratus dua koma sembilan puluh lima persen).

Produksi beras juga mengalami fluktuasi selama periode ini. Produksi beras pada tahun 2020 mencapai 64.530,52 ton (enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh koma lima puluh dua ton) menurun menjadi 60.750,49 ton (enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh koma empat puluh sembilan ton) pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 66.952,24 ton (enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua koma dua puluh empat ton) pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 61.978,93 ton (enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh tiga) pada tahun 2024.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami peningkatan dari 11,14 % (sebelas koma empat belas persen) pada tahun 2020, menjadi 14,41 % (empat belas koma empat puluh satu persen) pada tahun 2021. Angka ini melonjak signifikan menjadi 18,52 % (delapan belas koma lima puluh dua persen) pada tahun 2022, namun kemudian turun menjadi 10,59 % (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) pada tahun 2023, dan terus menurun menjadi 9,72 % (sembilan koma tujuh puluh dua persen) pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dan produksi beras di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi dengan beberapa penurunan dan peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sempat mengalami peningkatan cukup tajam, namun berhasil ditekan kembali pada 2024.

Meskipun data yang ditampilkan menunjukkan kondisi yang semakin bagus, namun masih ditemukan beberapa desa yang masuk dalam kategori rawan pangan. Kriteria desa tersebut antara lain kesulitan dalam ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan pangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan aman bagi seluruh warganya.

Jika ditinjau pada 2020 sampai dengan 2024, tampak jumlah desa rawan pangan yang semakin menurun dari tahun 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) desa dan menjadi 18 (delapan belas) desa pada tahun 2024.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 2.10.
Desa Kategori Rawan Pangan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

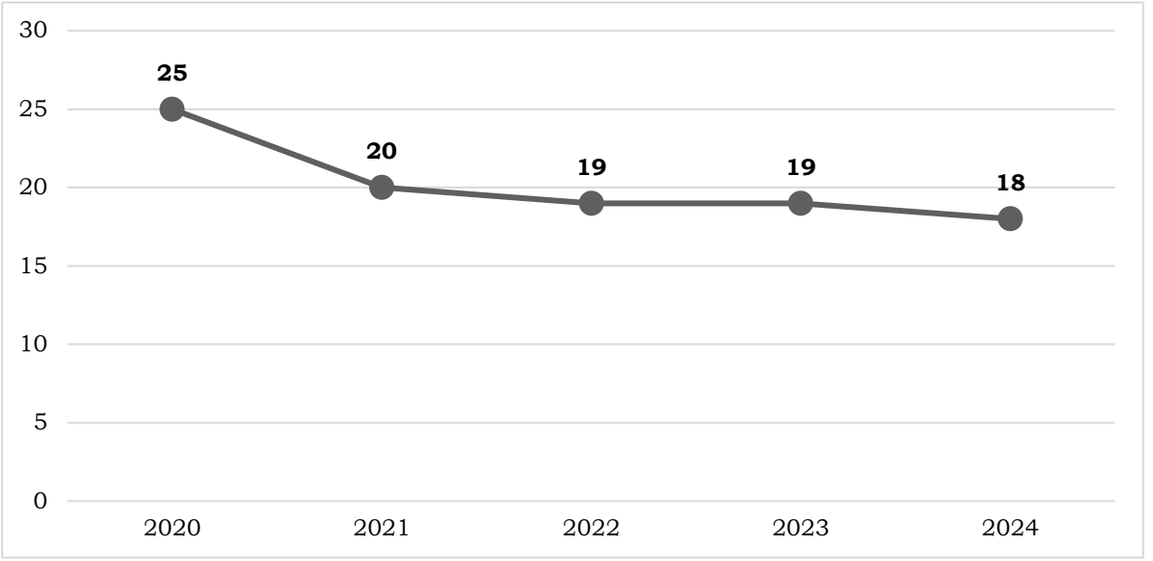

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengukur kualitas lingkungan hidup, yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan. Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengelompokkan predikat IKLH dalam 5 (lima) kategori yaitu:

a. kategori sangat baik dengan IKLH lebih besar dari 80 (delapan puluh) /IKLH>80;
b. kategori baik dengan IKLH di antara 80 (delapan puluh) dan 70 (tujuh puluh)/80>IKLH>70;
c. cukup baik dengan IKLH di antara 70 (tujuh puluh) dan 60 (enam puluh)/70>IKLH>60;
d. kurang baik dengan IKLH di antara 60 (enam puluh) dan 50 (lima puluh)/60>IKLH>50; dan
e. sangat kurang baik dengan IKLH di antara 50 (lima puluh) dan 40 (empat puluh)/50>IKLH>40.

Menurut data DLHK, Kabupaten Kutai Kartanegara meraih predikat cukup baik dan baik dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan IKLH dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. IKA menurun tajam dari tahun 2020 dan stabil pada tingkat lebih rendah hingga tahun 2023, dan pada tahun 2024 kembali meningkat yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

juga menunjukkan peningkatan kualitas air. IKU menurun pada tahun 2020, tetapi meningkat dan stabil tinggi dari tahun 2021 hingga tahun 2023, menunjukkan adanya pemulihan kualitas udara. IKTL terus meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, menandakan perbaikan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2.12.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 – 2024

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2020	52,73	85,94	64,50	68,76
2021	52,98	91,69	70,89	71,58
2022	53,08	89,31	71,42	71,77
2023	50,53	91,53	74,62	72,41
2024	52,05	92,73	75,17	73,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Data dalam tabel di atas menunjukkan adanya penurunan kualitas yang signifikan di semua indeks lingkungan hidup pada 2020, kemungkinan besar sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Namun, mulai tahun 2021 hingga tahun 2023, terdapat perbaikan pada berbagai aspek kualitas lingkungan, terutama kualitas udara dan tutupan lahan.

Menurut data DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa faktor yang menyebabkan perubahan kualitas air antara lain peningkatan beban pencemaran di sungai dari tahun ke tahun, baik yang disebabkan oleh masyarakat maupun aktivitas industri, sedangkan kemampuan daya tampung dan dukung lingkungan relatif terbatas. Oleh karena itu, kualitas air perlu diperbaiki secara luas untuk mendukung penyediaan air yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hasil pengujian kualitas udara juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada dalam kategori baik, meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lalu lintas, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan-bahan penghasil emisi yang tidak ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kualitas udara.

Lingkungan hidup merujuk pada entitas spasial yang mencakup berbagai komponen, energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan aktivitasnya, yang saling mempengaruhi kondisi alam, kelangsungan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Seiring dengan pelaksanaan proyek strategis Daerah, di mana pembangunan memerlukan pemanfaatan sumber daya alam yang meningkat, terdapat risiko seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kondisi tersebut dapat mengancam daya dukung, kapasitas tahanan, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik sangat penting bagi keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan.

Setiap tahun, pengelolaan sampah Daerah menunjukkan perkembangan yang positif, dengan kondisi yang terus membaik dari tahun ke tahun. Pengelolaan persampahan, penanganan sampah juga mengalami perkembangan positif. Volume sampah yang tercatat pada tahun 2024 sebanyak 135.200.790 m^3 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh meter kubik) telah tertangani sebesar 57,94 % (lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen). Kinerja penanganan sampah itu harus menjadi perhatian serius, mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Tabel 2.13.

Pengelolaan Persampahan

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)	Persentase Penanganan Sampah (%)	Persentase Sampah Terkelola (%)
2020	75.858,97	22,45	30,15
2021	80.426,11	59,14	65,46
2022	111.390,03	69,91	85,07
2023	116.442,07	70,14	88,18
2024	135.200,79	57,94	73,62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan LPPD, 2024

Lingkungan hidup yang berkualitas dapat dilihat juga dari kelayakan serta keamanan akses atas sanitasi bagi hunian yang ditempati oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara, persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman, mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pada tahun 2020, indikator tersebut sebesar 68,37 (enam puluh delapan koma tiga puluh tujuh) dan terus meningkat menjadi 89,10 (delapan puluh sembilan koma sepuluh) pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses sanitasi yang layak dan aman mengalami peningkatan. Diharapkan kondisi ini dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Tabel 2.14.

Akses Sanitasi Layak dan Aman

Kabupaten Kutai Kartanegara , 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	68,37	69,80	76,14	83,48	89,10

Sumber: Dinas Perumahan & Pemukiman, 2025

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menurut BNPB, salah satu indeks makro yang digunakan untuk mengukur kerentanan bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari tujuh parameter yang mencakup 7 (tujuh) prioritas dan 71 (tujuh puluh satu) indikator kebencanaan. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan.
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu.
3. Pengembangan sistem informasi, pelatihan, dan logistik.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana.
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, pada tahun 2021 hingga tahun 2024 nilai IKD Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan. Nilai ini terdiri dari penilaian terhadap masing-masing prioritas sebagaimana tercantum di atas. IKD pada tahun 2021 sebesar 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,46 (nol koma empat puluh enam). Kemudian membaik pada

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tahun 2023 dan 2024, yaitu meningkat menjadi 0,52 (nol koma lima puluh dua).

Tabel 2.15.
Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	n.a	0,49	0,46	0,52	0,52

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Indeks lain yang digunakan untuk menilai kerentanan bencana adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Berdasarkan dokumen DDDT-LH, rumus dasar IRB adalah *hazard* x *vulnerability capacity*. Bahaya *(hazard)* adalah ukuran peringkat bahaya berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan dari fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dan lainnya. Kerentanan *(vulnerability)* diukur berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kapasitas dinilai dari pendekatan tingkat ketahanan daerah yang serupa dengan IKD.

Berdasarkan data BNPB pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024 sebagaimana gambar di bawah, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki skor 118,8 (seratus delapan belas koma delapan) yang masuk kategori kerawanan bencana sedang. Aplikasi *Inarisk* BNPB menunjukkan IRB Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung menurun, ini adalah indikasi baik yang menunjukkan penurunan risiko bencana setiap tahun.

Gambar 2.11.
Indeks Risiko Bencana
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 – 2024

Sumber: Inarisk BNPB, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengidentifikasi 12 (dua belas) jenis ancaman bencana antara lain banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrem, epidemi atau wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, serta kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan RTRW Tahun 2023-2042, terdapat beberapa kawasan yang masuk dalam kategori rawan bencana sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.12.
Peta Rawan Bencana
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

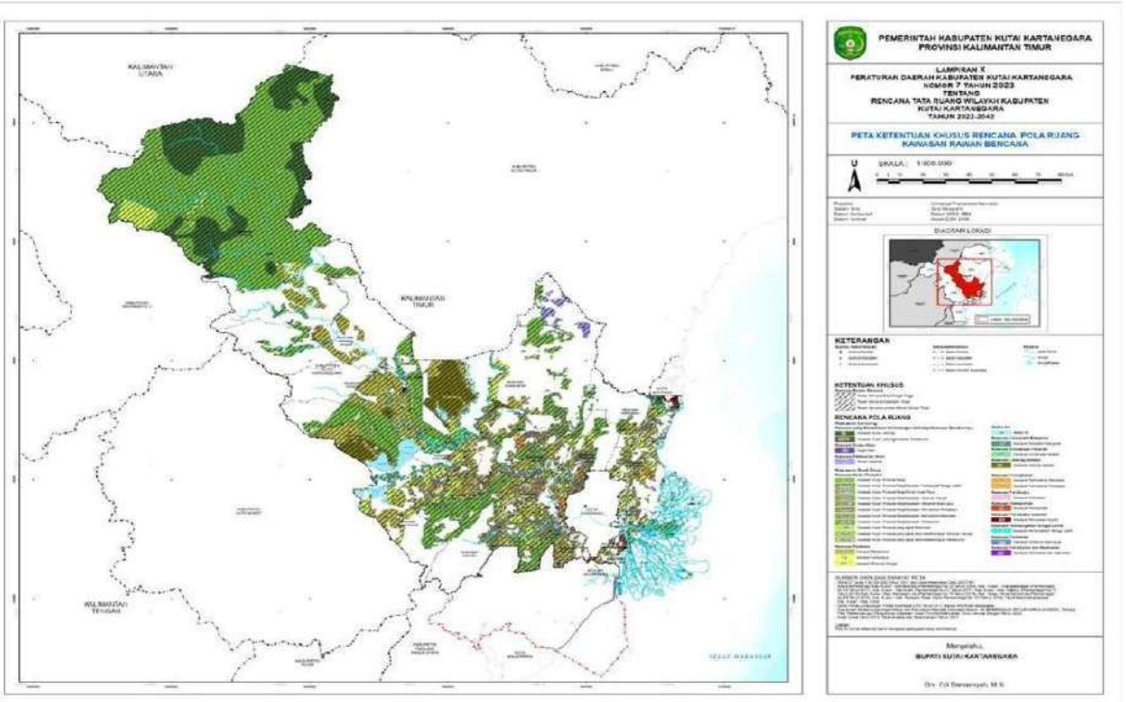

Sumber: Dokumen Rencana Tata Ruang Kutai Kartanegara, 2023-2045

Kebencanaan juga berkaitan dengan perubahan iklim yang saat ini dapat dilihat dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penurunan emisi GRK merupakan indikator utama dalam pembangunan rendah karbon yang menggambarkan menurunnya kadar emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia selama periode tertentu, dibandingkan dengan kondisi dasar *(baseline)*.

Dalam lima tahun terakhir, penurunan emisi GRK tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai penurunan 15.460.869,70 (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh) ton CO2-eq. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Daerah dalam menerapkan energi bersih, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, rehabilitasi hutan, atau transportasi rendah emisi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.16.

Penurunan Emisi GRK

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Realisasi Penurunan Emisi (Ton CO2-eq)
2020	11.442.089,00
2021	11.680.591,00
2022	11.474.356,00
2023	10.948.259,00
2024	15.460.869,70

Sumber: DHLK Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

2.1.1.7. Demografi

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 806.964 (delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) jiwa. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 734.485 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima) jiwa. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan jumlah penduduk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan itu juga dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, yang juga meningkat dari 27,34 per km^2 (dua puluh tujuh koma tiga puluh empat per kilometer persegi) pada tahun 2020 menjadi 30,03 per km^2 (tiga puluh koma nol tiga per kilometer persegi) pada tahun 2024. Demikian, pada indikator *sex ratio* pun terjadi peningkatan dari 108,81 (seratus delapan ribu koma delapan puluh satu) pada tahun 2020 menjadi 108,94 (seratus delapan koma sembilan puluh empat) pada tahun 2024.

Tabel 2.17.

Indikator Kependudukan

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km^2)	*Sex Ratio* Penduduk	Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin	
					Laki-Laki	Perempuan
2020	734.485	n.a	27,34	108,81	382.783	351.785
2021	753.862	2,64	28,06	108,56	392.404	361.458
2022	778.096	3,21	28,96	108,64	405.154	372.942
2023	788.113	1,29	29,33	108,84	410.731	377.382
2024	806.964	2,39	30,03	108,94	420.744	386.220

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021-2025

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sejumlah komunitas masyarakat adat yang hidup dan berkembang dalam tatanan sosial dan tradisinya. Berbagai komunitas masyarakat adat seperti masyarakat Dayak dan Kutai, tetap mempertahankan tradisi, hukum adat, serta praktik sosial budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Hal tersebut tercermin dalam beragam ritual keagamaan, kesenian tradisional, hingga pengelolaan sumber daya alam yang mereka lakukan secara arif dan berkelanjutan. Kecamatan yang paling banyak dihuni oleh sub-suku komunitas adalah Kecamatan Tabang sebanyak 7 (tujuh) sub-suku komunitas dengan populasi terbanyak adalah sub-suku Kutai Adat Lawas Sumping Layang yaitu 1.506 (seribu lima ratus enam) jiwa.

Tabel 2.18.

Kependudukan Masyarakat Adat

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Kecamatan	Subsuku Komunitas	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK
		Laki- Laki	Perempuan		
Loa Kulu	Kenyah Lepoq Jalan	270	230	500	150
Muara Badak	Desa Adat Sungai Bawang	341	315	656	202
Sebulu	Kenyah Lempo Bem Lekaq Kidau	254	210	464	134
Tabang	Kayan Umaq Lasan	282	225	507	167
	Punan Lisum Suleq Tiq	170	485	315	89
	Punan Lisum Muara Salung	77	74	151	47
	Punan Lisum Muara Kebaq	150	120	270	90
	Punan Lisum Muara Belinau)	118	94	212	61
	Punan Bekatan	140	146	286	n.a.
	Kutai Adat Lawas Sumping Layang	816	690	1.506	816

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara, 2025

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dari waktu ke waktu berdasarkan tren demografis pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan inisiatif untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah, sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyusunan kebijakan, khususnya dalam perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. Jumlah penduduk pada tahun 2025 yaitu 845.610 (delapa ratus empat puluh lima ribu enam ratus sepuluh) jiwa diproyeksikan akan meningkat menjadi 1.031.830 (satu juta tiga puluh satu ribu delapan puluh tiga jiwa pada tahun 2029. Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun tentu akan meningkatkan densitas penduduk, di mana pada tahun 2029 diperkirakan densitas penduduk akan mencapai 38 jiwa per km^2 (tiga puluh delapan jiwa per kilometer persegi).

Pada tahun 2025-2029, Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada jendela bonus demografi, di mana rasio ketergantungan selama lima tahun itu berada di bawah 50 (lima puluh). Hal tersebut mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia non-produktif berada di bawah 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penduduk usia produktif.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus diantisipasi, sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM agar mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Bonus demografi dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, kurangnya lapangan kerja yang dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, tingginya jumlah penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan naiknya kualitas SDM, dapat pula mengakibatkan tingkat ekonomi masyarakat mengalami stagnasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel 2.19.

Proyeksi Penduduk

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2030

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (jiwa)	845.620	897.920	946.490	991.180	1.031.830	1.068.530
Laki-laki	438.020	464.320	488.690	511.050	531.300	549.530
Perempuan	407.600	433.600	457.800	480.140	500.530	519.000
Kepadatan Penduduk*	31	33	35	37	38	40
Rasio Ketergantungan	40,92	39,74	39,01	38,63	38,51	38,54
Kel. Umur (ribu jiwa):						
0–14	200.190	206.580	213.370	220.380	227.450	234.050
15–64	600.060	642.580	680.890	714.990	744.940	771.260
65+	45.370	48.760	52.230	55.810	59.440	63.220

Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025 (data diolah)

**= kepadatan penduduk masih melihat luas sebelum IKN*

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka panjang yang meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi dan menyediakan berbagai barang dan jasa bagi penduduknya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Dengan kata lain, suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi (positif) jika nilai PDRB-nya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Daerah mengalami kontraksi sebesar minus 4,21 % (empat koma dua puluh satu persen) akibat pandemi *Covid-19*. Namun demikian, mulai memulih pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Daerah kembali tumbuh positif sebesar 2,68 % (dua koma enam puluh delapan persen). Pada tahun 2022, kembali meningkat menjadi 3,7 % (tiga puluh tujuh) persen. Meski telah tumbuh positif, capaian tersebut masih belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi *Covid-19*. Baru pada tahun 2023, laju pertumbuhan telah meningkat menjadi 5,13 % (lima koma tiga belas persen), hingga pada tahun 2024 menjadi 5,62 % (lima koma enam puluh dua persen).

Tabel 2.20.

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 – 2024

	Kategori/ Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,54	1,11	1,91	2,91	2,94
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,83	2,60	3,00	4,20	4,58
C	Industri Pengolahan	-3,54	0,69	2,92	2,11	18,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,34	1,49	4,80	17,17	27,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,50	4,95	12,50	11,25	7,28
F	Konstruksi	-4,01	5,80	11,28	15,45	7,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,72	3,82	5,29	7,66	9,61
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,17	3,40	11,07	11,24	8,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,48	2,27	7,58	13,30	16,53

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	Kategori/ Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
J	Informasi dan Komunikasi	8,94	8,76	6,98	7,74	8,31
K	Jasa Keuangan	2,05	3,49	8,19	5,75	5,44
L	Real Estate	0,39	-1,83	2,42	12,44	6,28
M, N	Jasa Perusahaan	-3,72	1,30	5,63	12,39	9,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,79	2,05	6,46	6,79	17,68
P	Jasa Pendidikan	0,86	3,05	4,54	5,15	6,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,73	11,69	4,81	6,80	6,83
RST U	Jasa Lainnya	-1,81	3,25	7,16	9,33	11,97
Pertumbuhan Ekonomi		-4,21	2,68	3,70	5,13	5,62
Pertumbuhan Ekonomi non Ekstraktif		-0,30	2,87	5,32	7,21	7,88

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (diolah), 2020-2024

Ditinjau dari lapangan usaha, pandemi *Covid-19* telah menyebabkan setengah dari sektor-sektor ekonomi Daerah mengalami kontraksi. Sektor pertambangan dan penggalian, yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan, mengalami kontraksi hingga minus 5,83 % (lima koma delapan puluh tiga persen). Namun demikian, masih ada pertumbuhan positif di tiga sektor yaitu pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Ketiga sektor tersebut justru berkembang pesat selama pandemi *Covid-19* sebagai akibat dari kebijakan *work from home*, *study from home*, dan berbagai pembatasan kegiatan yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi non-ekstraktif Daerah juga menunjukkan tren positif. Hal tersebut mencerminkan mulai berkurangnya ketergantungan terhadap sektor-sektor perekonomian berbasis sumber daya alam. Pada tahun 2020, sektor non-ekstraktif masih tertekan dengan kontraksi minus 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) sebagai akibat dari dampak pandemi. Namun demikian, pada tahun 2021 perekonomian mulai beranjak pulih dengan pertumbuhan positif 2,87 % (dua koma delapan puluh tujuh persen), dan terus menguat menjadi 5,32 % (lima koma tiga puluh dua persen) pada tahun 2022.

Tren pertumbuhan tersebut terus berlanjut dengan pencapaian 7,21 % (tujuh koma dua puluh satu persen) pada tahun 2023, hingga mencapai 7,88 % (tujuh koma delapan puluh delapan persen) pada tahun 2024. Pertumbuhan yang stabil dan meningkat tersebut menunjukkan bahwa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

diversifikasi ekonomi Daerah melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, serta industri pengolahan mulai menampakkan hasil yang signifikan dalam menopang kinerja ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur selama periode lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Daerah cenderung masih berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Angka pertumbuhan ekonomi Daerah memang pernah lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur pada 2021. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Daerah mencapai 2,68 % (dua koma enam puluh delapan) persen, sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sedikit di bawahnya yaitu 2,55 % (dua koma lima puluh lima persen).

Sama halnya ketika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Daerah masih cenderung di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2024 misalnya, laju pertumbuhan ekonomi Daerah berada sedikit lebih tinggi daripada nasional, walaupun angkanya masih tetap lebih rendah daripada capaian Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.13.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2020–2024

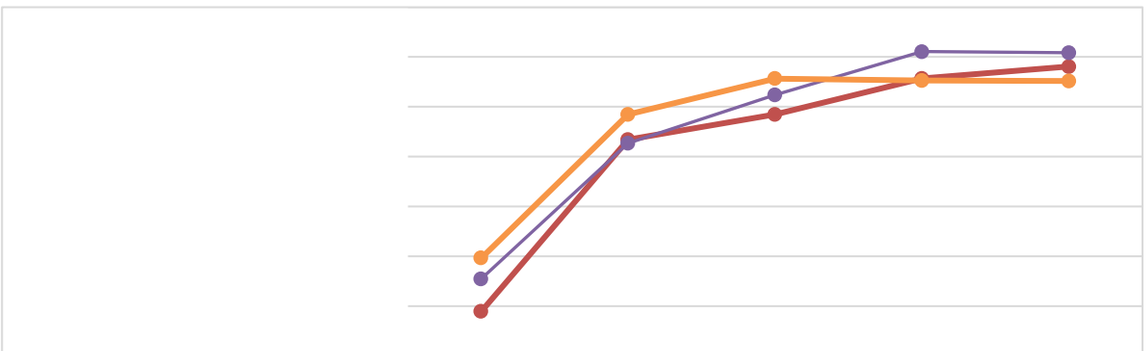

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kutai Kartanegara	-4.21	2.68	3.70	5.13	5.62
Prov. Kalimantan Timur	-2.90	2.55	4.48	6.22	6.17
Nasional	-2.07	3.70	5.13	5.05	5.03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

b. Tingkat Kemiskinan

Seseorang dikategorikan miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan akan terus meluas seiring dengan melebarnya kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kesejahteraan yang diukur berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pengukuran angka kemiskinan dilakukan dengan menetapkan standar kebutuhan minimum (makanan dan non-makanan) yang harus dipenuhi seseorang agar mampu hidup layak. Standar kebutuhan minimum ini disebut dengan garis kemiskinan.

Penetapan garis kemiskinan lazimnya didasarkan pada berbagai variabel ekonomi dan sosial, sehingga angkanya sering berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Gambar di bawah ini menunjukkan garis kemiskinan Daerah, yang setiap tahun mengalami peningkatan dengan intensitas yang stabil.

Pada tahun 2020, nilainya sebesar Rp548.423,00 (lima ratus empat puluh delapan empat ratus dua puluh tiga rupiah) sedangkan pada tahun 2024 nilainya sudah lebih tinggi yaitu Rp682.490,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Garis kemiskinan juga terus mengalami kenaikan, salah satunya disebabkan karena laju inflasi yang menyebabkan harga barang terus meningkat, sehingga garis kemiskinan pun juga mengalami kenaikan. Tren tersebut sejalan dengan garis kemiskinan di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam lima tahun terakhir, garis kemiskinan Daerah mengalami kenaikan sebesar 24,45 % (dua puluh empat koma empat puluh lima persen), sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur naik sebesar 25,92 % (dua puluh lima koma sembilan puluh dua persen). Persentase kenaikan yang lebih rendah di Kabupaten Kutai Kartanegara itu menunjukkan bahwa kebutuhan standar Daerah mengalami kenaikan dengan intensitas yang lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.14.

Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara

dan Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024

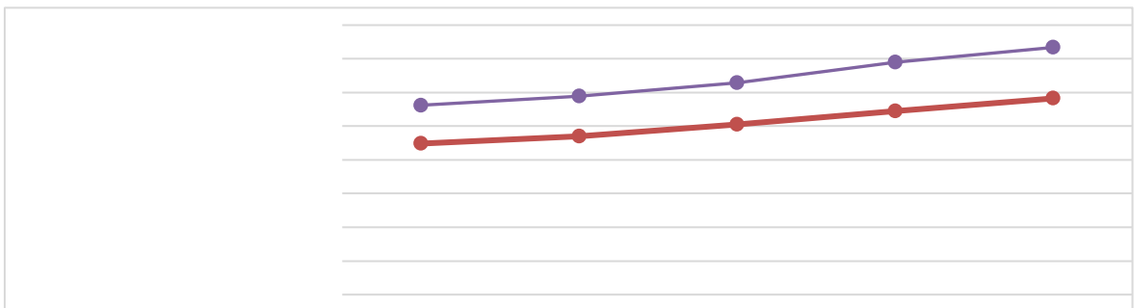

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kutai Kartanegara	548,423.00	569,640.00	605,321.00	644,570.00	682,490.00
Prov. Kalimantan Timur	662,302.00	689,035.00	728,208.00	790,186.00	833,955.00

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren naik selama pandemi *Covid-19*, sampai dengan tahun 2022 angkanya mencapai 62.870 (enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) jiwa. Penanganan dan pemulihan pandemi menjadi kunci atas penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan hingga menjadi 59.000 (lima puluh sembilan ribu) jiwa pada 2024.

Gambar 2.15.

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 – 2024

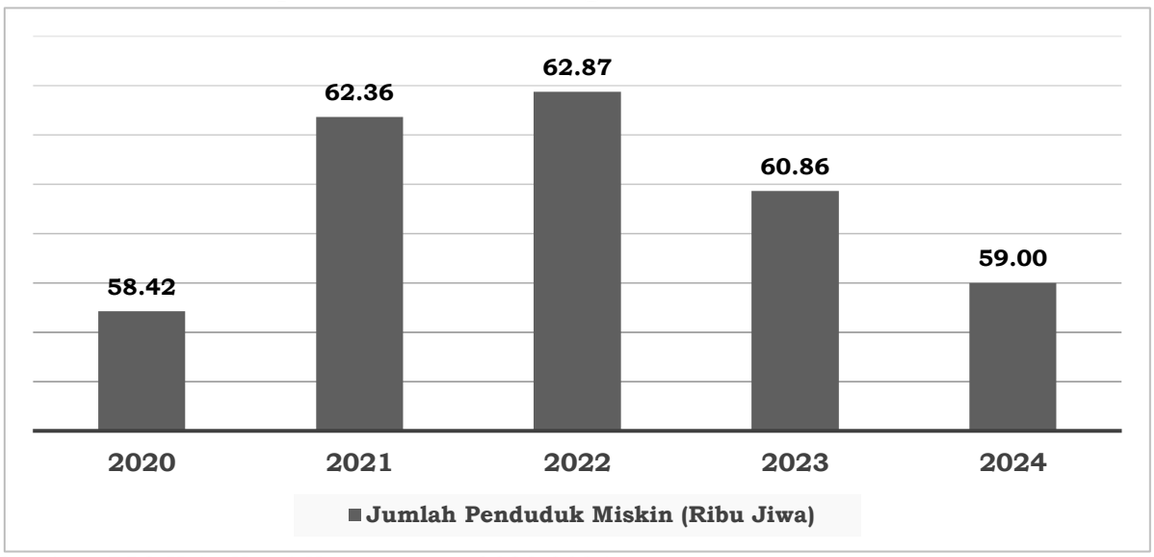

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Perkembangan persentase penduduk miskin Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2021 menunjukkan peningkatan, dengan angka tertinggi terjadi pada 2021 yaitu 7,99 % (tujuh koma sembilan puluh sembilan persen). Kenaikan ini ditengarai karena pandemi *Covid-19* yang telah menurunkan aktivitas ekonomi, yang berujung pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pada tahun berikutnya, kemiskinan menunjukkan tren menurun, yaitu sebesar 7,96 % (tujuh koma sembilan puluh enam persen) pada tahun 2022, 7,61 % (tujuh koma enam puluh satu persen) pada tahun 2023, hingga pada tahun 2024 penurunannya menjadi 7,28 % (tujuh koma dua puluh delapan persen).

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi kemiskinan yang paling parah, yaitu ketika seseorang atau rumah tangga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Kebutuhan hidup minimum tersebut mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.

Dalam konteks kebijakan nasional, Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta RPJMN

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tahun 2020–2024 telah menetapkan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu fokus utama penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Batasan yang digunakan adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita kurang dari atau sama dengan Rp10.739,00 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) per hari (harga konstan 2022). Kemiskinan ekstrem Daerah selama 4 (empat) empat tahun terakhir mengalami tren menurun yang cukup signifikan.

Pada tahun 2020, kemiskinan ekstrem mencapai angka 0 (nol), yang menunjukkan program penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil. Namun demikian, pada tahun 2024 angka tersebut kembali meningkat menjadi 0,27 % (nol koma dua puluh tujuh persen), di mana angka tersebut sama dengan angka capaian Provinsi Kalimantan Timur. Kenaikan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 itu menandakan bahwa masih ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan capaian angka nol kemiskinan ekstrem.

Gambar 2.16.

Persentase Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2020–2024

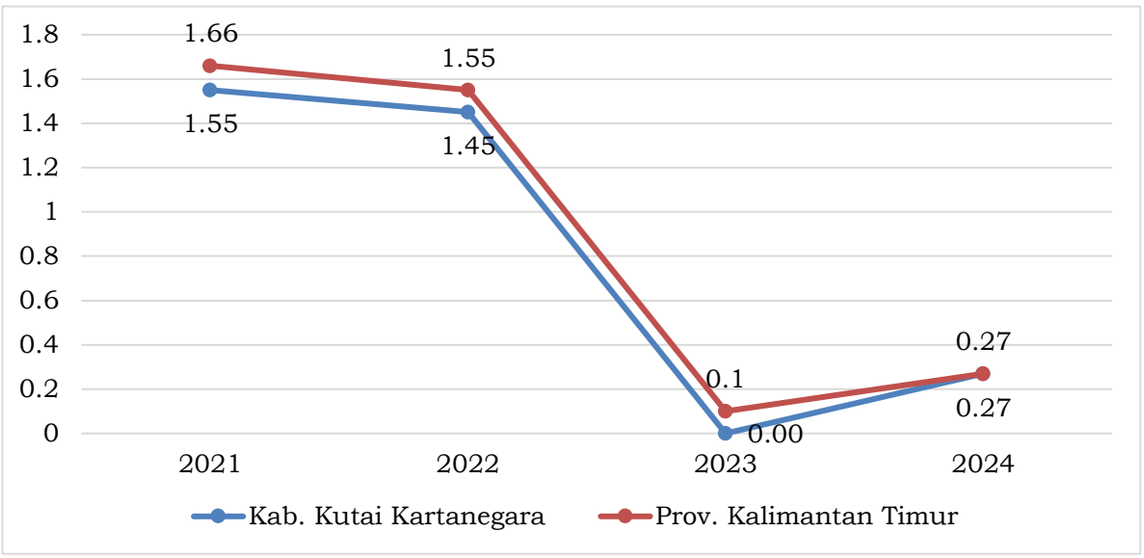

Sumber: BPS, 2025

Data penduduk miskin ekstrem Daerah per kecamatan digunakan untuk berbagai tujuan perencanaan, evaluasi, dan intervensi kebijakan, baik di level Daerah maupun kecamatan.

Jumlah penduduk Desil-I merujuk pada jumlah penduduk yang masuk dalam 10 % (sepuluh persen) kelompok rumah tangga dengan pengeluaran terendah di suatu wilayah. Setelah memasuki tahap verifikasi dan validasi, jumlah penduduk miskin Desil-I tercatat sebanyak 5.888 (lima ribu delapan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ratus delapan puluh delapan) jiwa, dengan kecamatan terbanyak adalah Kecamatan Anggana yaitu 588 (lima ratus delapan puluh delapan) jiwa.

Jumlah Penduduk Desil I dan Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil-I	Jumlah Penduduk Miskin*
1	Tenggarong	731	322
2	Tenggarong Seberang	728	339
3	Loa Kulu	1.188	399
4	Loa Janan	1.125	336
5	Muara Badak	622	309
6	Marangkayu	576	340
7	Muara Jawa	562	252
8	Sebulu	1.143	363
9	Muara Kaman	1.626	682
10	Kota Bangun	368	195
11	Muara Muntai	633	342
12	Kenohan	646	203
13	Kembang Janggut	450	108
14	Tabang	516	258
15	Muara Wis	270	167
16	Sangasanga	161	77
17	Anggana	1.242	588
18	Kota Bangun Darat	289	124
	TOTAL	12.876	5.404

Sumber : Hasil Verifikasi dan Validasi Data P3KE

** hasil verifikasi dan validasi*

Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, angka kemiskinan Daerah memang lebih tinggi, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional.

Laju penurunan angka kemiskinan Daerah setelah pandemi *Covid-19* juga tidak sebesar capaian Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Namun

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

demikian, penurunan ini dipandang positif karena sudah mendekati capaian angka kemiskinan sebelum pandemi *Covid-19*.

Gambar 2.17.
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2020–2024

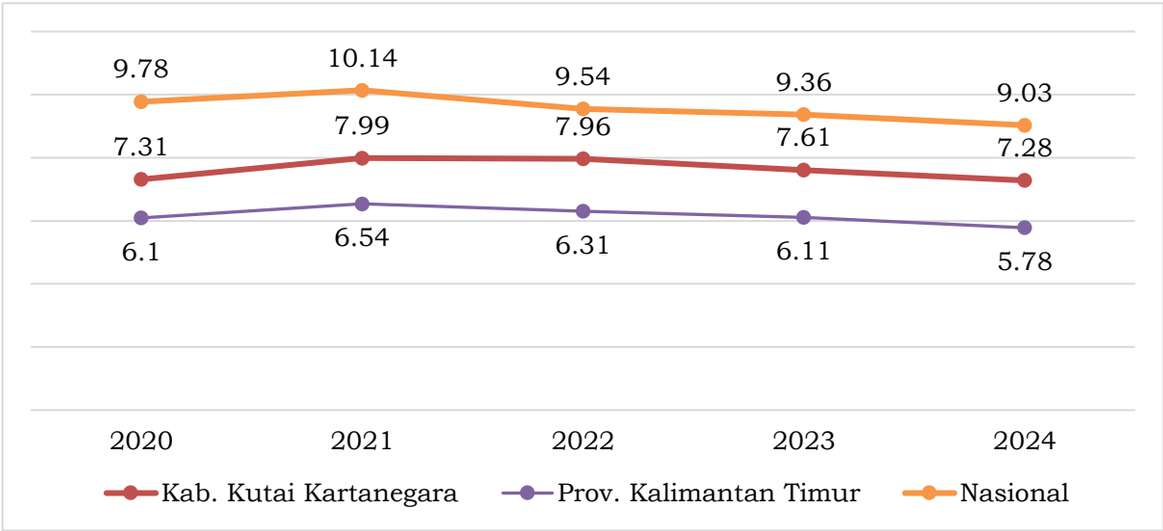

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur jarak rata-rata penduduk miskin dari garis kemiskinan. Secara sederhana, P1 memberikan gambaran tentang seberapa jauh pendapatan atau konsumsi orang miskin berada di bawah garis kemiskinan. Indeks ini membantu menunjukkan tidak hanya pada jumlah orang miskin, tetapi juga seberapa besar intensitas kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, menunjukkan bahwa kedalaman rata-rata kemiskinan semakin menjauh dari garis kemiskinan, yang berarti tingkat kemiskinan mereka yang lebih dalam.

Pada tahun 2020, nilai P1 Daerah menurun hingga 0,91 (nol koma sembilan puluh satu), kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,22 (satu koma dua puluh dua), dan kemudian pada tahun 2024 turun kembali hingga mencapai 0,65 (nol koma enam puluh lima). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara itu, pada periode tahun 2020- 2021 di Provinsi Kalimantan Timur dan nasional justru menunjukkan terjadi tren kenaikan P1, meskipun kemudian diikuti penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Nilai P1 Provinsi Kalimantan Timur pada 2022-2024 lebih rendah daripada Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menunjukkan adanya *recovery* yang lebih cepat di tingkat Daerah. Baik P1 Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Provinsi Kalimantan Timur masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan P1 nasional.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengukur ketimpangan di antara orang miskin dengan mempertimbangkan seberapa jauh jaraknya dari garis kemiskinan, serta distribusi pendapatan di antara mereka. P2 memberi bobot lebih pada kelompok yang sangat jauh dari garis kemiskinan dan membantu memahami keparahan kemiskinan dengan mencerminkan disparitas di antara orang-orang miskin. Nilai P2 yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar di antara orang-orang miskin.

P2 Daerah menunjukkan tren serupa dengan P1. Kenaikan pada tahun 2021 menunjukkan semakin besar ketimpangan yang terjadi antar-penduduk miskin selama pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 nilainya menurun menjadi 0,10. Penurunan itu menunjukkan tingkat ketimpangan antar-penduduk miskin yang semakin rendah. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, penurunan P2 di provinsi lebih cepat dalam tiga tahun terakhir. Secara umum P2 nasional juga lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.21.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kutai Kartanegara		Kalimantan Timur		Nasional	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2
2020	0,91	0,16	1,02	0,24	1,61	0,38
2021	1,22	0,37	1,22	0,34	1,71	0,42
2022	1,18	0,26	0,99	0,23	1,59	0,39
2023	0,93	0,17	0,77	0,14	1,53	0,38
2024	0,65	0,10	0,80	0,15	1,46	0,35

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

c. PDRB Per Kapita

PDRB Daerah per kapita menjadi salah satu instrumen penting dalam memotret kinerja ekonomi Daerah, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk memahami posisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks yang lebih luas, data PDRB per kapita dianalisis secara komparatif dengan capaian nilai Provinsi Kalimantan Timur.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 2.18.
PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara
dan Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024
(dalam Juta Rupiah)

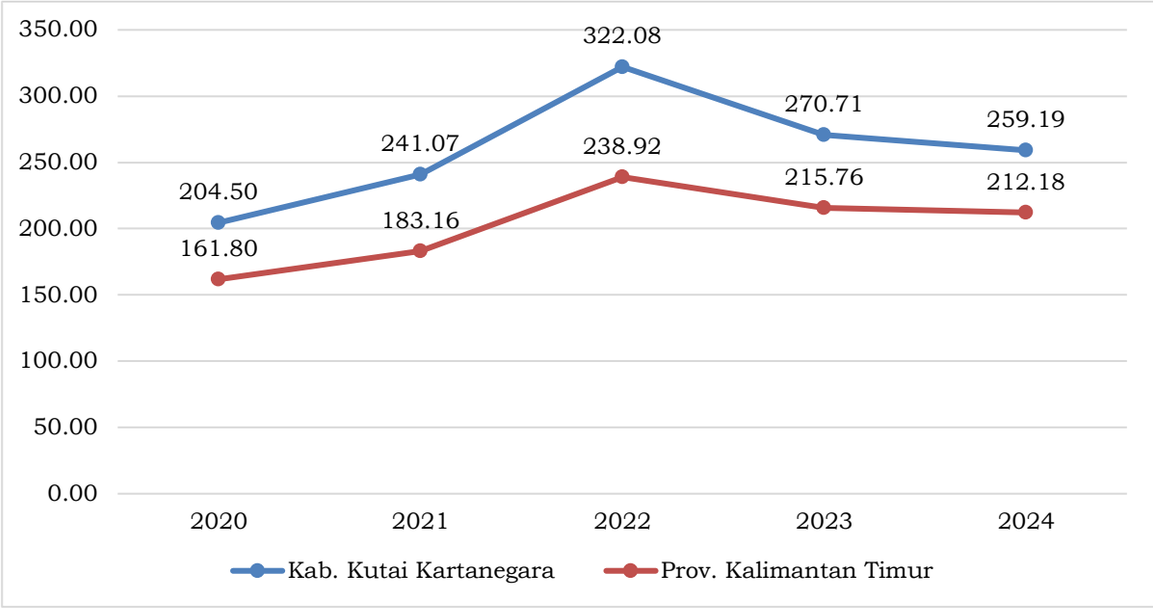

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada periode 2020-2024 PDRB per kapita Daerah lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur, yaitu antara Rp204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp322.080.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah). Sementara itu, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kisaran Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp238.920.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa dari segi PDRB per kapita, tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan rasio antara jumlah pengangguran dengan keseluruhan angkatan kerja. Nilai TPT menunjukkan seberapa banyak tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran mencakup mereka yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum memulai bekerja.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Perkembangan TPT di Daerah selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan tren menurun. Penurunan yang terjadi selama periode tahun 2020-2021 tampak tidak begitu signifikan. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022. Nilai TPT menurun menjadi 4,14 % (empat koma empat belas persen), di mana sebelumnya yang masih berada di angka 5,66 % (lima koma enam puluh enam persen). Angka tersebut terus menurun hingga tahun 2024 yaitu 4,11 % (empat koma sebelas persen). Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, nilai TPT Daerah periode tahun 2020-2024 selalu lebih rendah. Tren penurunan ini konsisten dengan yang terjadi di level Provinsi Kalimantan Timur dan nasional.

Gambar 2.19.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2020-2024

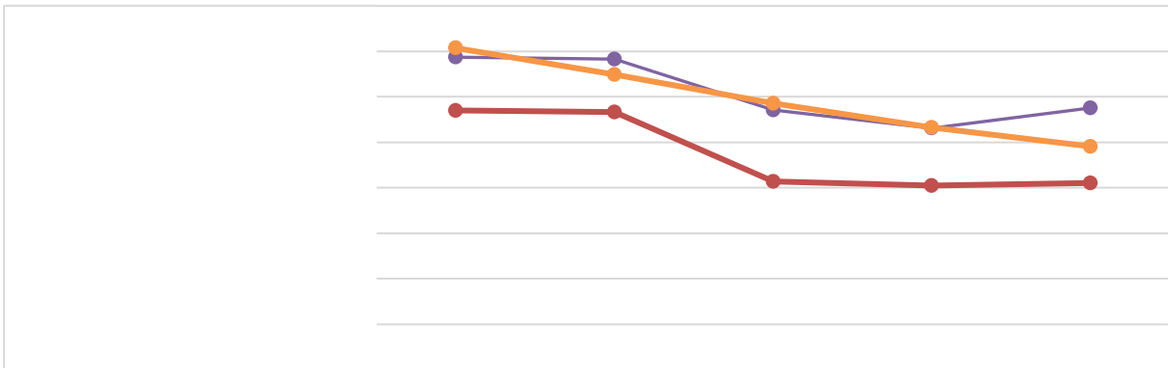

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kutai Kartanegara	5.70	5.66	4.14	4.05	4.11
Prov. Kalimantan Timur	6.87	6.83	5.71	5.31	5.75
Nasional	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Realisasi TPT Daerah mengalami fluktuasi yang antara lain diakibatkan oleh rendahnya penyerapan sektor pertambangan terhadap tenaga kerja lokal, ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri, serta keterbatasan modal dan keterampilan angkatan kerja.

Pandemi *Covid-19* sempat meningkatkan pengangguran akibat terhambatnya aktivitas usaha, namun kondisi mulai membaik seiring dengan pemulihan ekonomi, masuknya investasi, dan program penciptaan lapangan kerja. Peningkatan keterampilan serta adaptasi tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar turut menekan angka pengangguran, sehingga TPT Daerah berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional.

Tingkat pengangguran di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan penduduk. Pada tahun 2024, angka pengangguran relatif tinggi terjadi di kelompok lulusan SMA/SMK, meskipun jumlah mereka

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

besar, lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi belum sebanding dengan jumlah pencari kerja. Penganggur dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 12.274 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh empat) orang. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan seluruh jenjang usia kerja.

Tabel 2.26.
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Tingkat Pendidikan				Total Pengangguran
	<= SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
2020	4.865	9.918	4.667	1.047	20.497
2021	4.865	9.918	4.667	1.047	20.497
2022	4.656	2.397	7.418	959	15.430
2023	443	2.160	10.389	2.059	15.051
2024	840	1.022	12.274	1.989	16.125

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2025

Ditinjau dari jenis kelamin, tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Jumlah laki-laki mendominasi angkatan kerja, sehingga secara absolut jumlah pengangguran laki-laki cenderung lebih besar. Namun demikian, ternyata perempuan lebih rentan menghadapi pengangguran karena keterbatasan akses, peran ganda dalam rumah tangga, serta diskriminasi di pasar kerja. Pada tahun 2024, dari 16.105 (enam belas ribu seratus lima) penganggur di Kabupaten Kutai Kartanegara, 16,91 % (enam belas koma sembilan puluh satu persen) atau 9.983 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) orang berjenis kelamin laki-laki.

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Jenis Kelamin		Pengangguran Total
	Laki-laki	Perempuan	
2020	12.685	7.812	20.497
2021	12.685	7.812	20.497
2022	6.907	8.523	15.430
2023	9.328	5.723	15.051
2024	9.983	6.142	16.125

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

e. Indeks Gini

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu disertai dengan pemerataan. Fokus hanya pada pertumbuhan dapat menyebabkan dua masalah utama yaitu ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Nilai pada Indeks Gini terletak di antara angka 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin mendekati 1 (satu), maka ketimpangan di wilayah tersebut semakin besar.

Gambar 2.20.

Indeks Gini di Kabupaten Kutai Kartanegara,

Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2020–2024

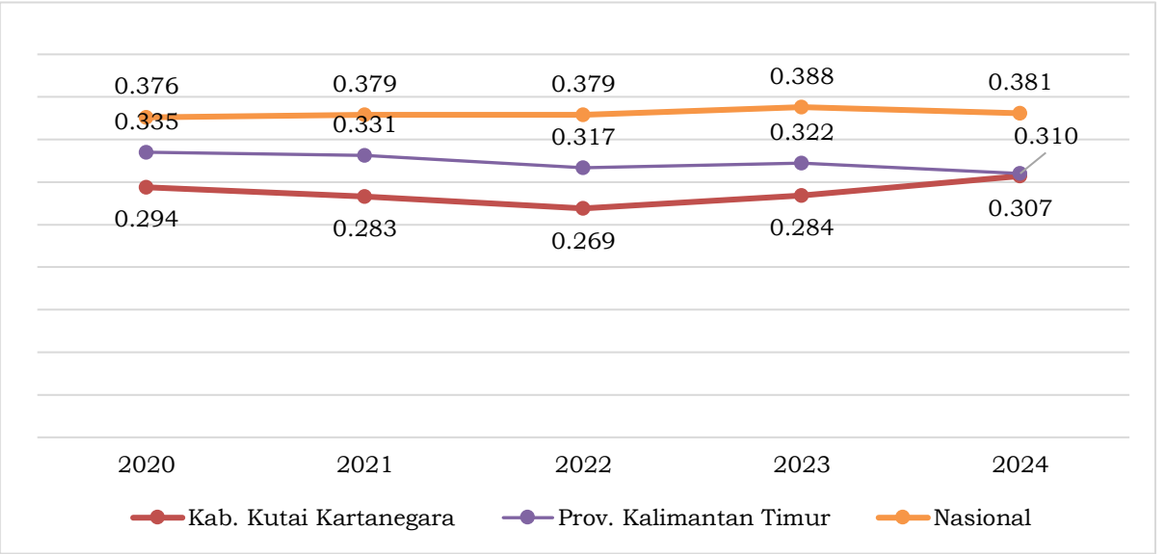

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indeks Gini Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat fluktuatif. Pada tahun 2020, Indeks Gini sebesar 0,294 (nol koma dua ratus sembilan puluh empat) dan dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai nilai tertinggi sebesar 0,307 (nol koma tiga ratus tujuh) yaitu pada tahun 2024. Indeks Gini ini kemudian menunjukkan penurunan pada periode tahun 2021- 2022 masing-masing sebesar 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) dan 0,269 (nol koma dua ratus enam puluh sembilan), sebelum akhirnya pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 0,284 (nol koma dua ratus delapan puluh empat).

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia, Indeks Gini Daerah tampak lebih rendah. Perbedaan ini menjadi cermin dari ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata, yang mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan di antara kelompok masyarakat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Ketidaksetaraan ekonomi dapat memburuk jika kelompok berpendapatan rendah terus mengalami pertumbuhan yang lambat, sementara kelompok berpendapatan tinggi tetap tumbuh dengan pesat. Jika masalah ini dibiarkan tanpa adanya penanganan yang memadai, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan politik yang merugikan.

Kesenjangan ekonomi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, serta tingkat kemiskinan, menjadi dua masalah serius yang lazim terjadi di negara-negara berkembang. Walaupun isu pemerataan selalu muncul di setiap tahap pembangunan, sangat penting untuk mengendalikan dampaknya agar tidak meluas. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan di suatu daerah perlu untuk selalu dipantau supaya pengambil kebijakan dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menekan ketimpangan.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam tiga dimensi utama: kesehatan (dengan mempertimbangkan harapan hidup), pendidikan (dengan mempertimbangkan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah), dan standar hidup (dengan mempertimbangkan pendapatan riil per kapita).

IPM digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kualitas sumber daya manusia suatu daerah, yang menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing ekonomi dan sosial daerah tersebut. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin baik kualitas hidup dan kemampuan SDM untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan.

Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2020 – 2024

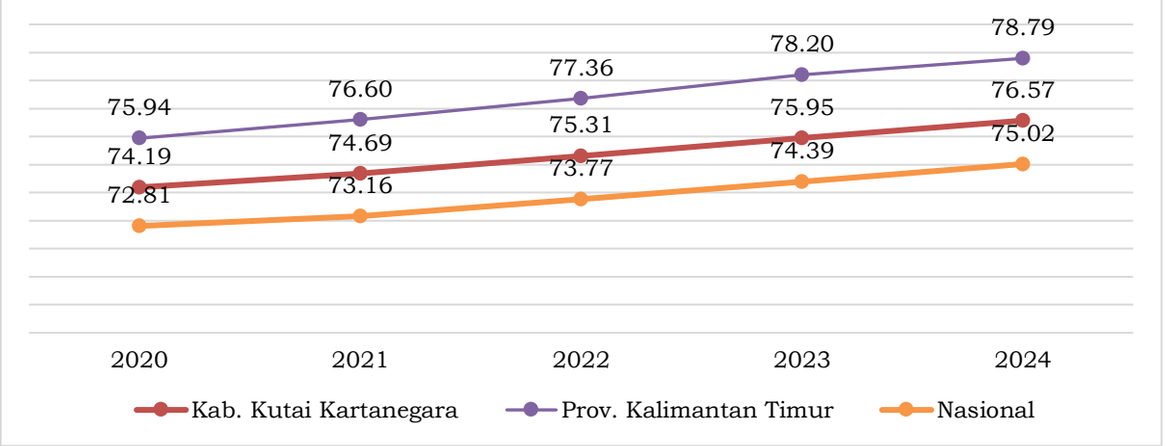

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

IPM Daerah menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Nilai IPM terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 74,19 (tujuh puluh empat koma sembilan belas) sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Selanjutnya, peningkatan terjadi dengan cukup stabil dari tahun ke tahun hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024 yaitu 76,57 (tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh).

Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, nilai IPM Daerah masih relatif tertinggal, walaupun menunjukkan tren yang sama. Meskipun demikian, IPM Daerah masih selalu lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Jika ditinjau dari pertumbuhannya, nilai IPM Daerah tampak tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada 2024, IPM Daerah tumbuh sebesar 0,82 (nol koma delapan puluh dua), sementara Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).

Tabel 2.27.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

Komponen IPM	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27
Laki-Laki	tahun	9,57	9,58	9,59	9,61	9,62
Perempuan	tahun	8,63	8,64	8,81	8,82	8,81
Harapan Lama Sekolah	tahun	13,59	13,60	13,63	13,64	13,65
Laki-Laki	tahun	13,53	13,54	13,57	13,58	13,59
Perempuan	tahun	13,65	13,66	13,67	13,96	13,97
Ank. Harapan Hdp	tahun	73,64	73,99	74,00	74,12	74,33
Laki-Laki	tahun	70,39	70,67	70,69	70,78	70,96
Perempuan	tahun	74,36	74,50	74,51	74,81	75,01
Pengeluaran/kapita	ribu rupiah	10.720	11.048	11.677	12.323	12.957
Laki-Laki	ribu rupiah	17.553	18.079	19.097	19.821	20.518
Perempuan	ribu rupiah	4.477	4.625	4.900	5.133	5.410
IPM	indeks	74,19	74,69	75,31	75,95	76,57
Laki-Laki	indeks	79,04	79,47	80,03	80,44	80,87
Perempuan	indeks	62,36	62,88	63,86	64,87	65,67

Sumber: BPS Pusat, 2020-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Kesehatan merupakan variabel utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Derajat kesehatan yang baik seseorang akan mampu bekerja dengan optimal hingga menghasilkan *output* yang berkualitas.

Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat terdapat beberapa indikator yang dapat merepresentasikan. Misalnya, Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan, di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan durasi (tahun) hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak dilahirkan.

Berdasarkan hasil *long form* SP2020 Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tahun 2024 AHH mencapai 74,33 (tujuh puluh empat koma tiga puluh tiga) tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 akan mempunyai harapan hidup hingga usia 74-75 (tujuh puluh empat sampai tujuh puluh lima) tahun ke depan.

Gambar 2.22.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 – 2024

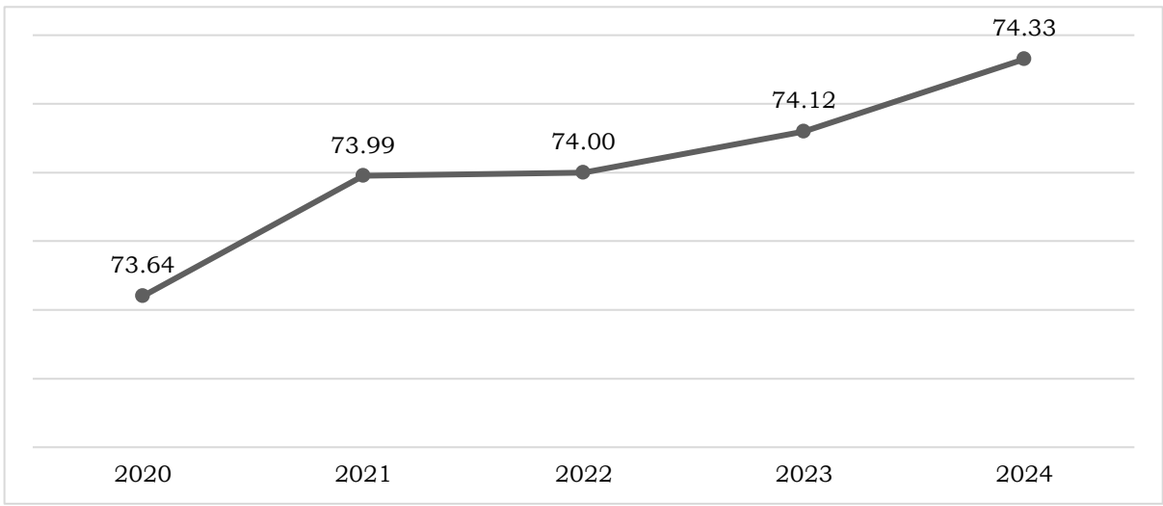

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 (dua belas) indikator yang mencakup variabel kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

Indikator tersebut meliputi keluarga yang mengikuti program keluarga berencana (KB), ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan, bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi yang mendapatkan air susu ibu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(ASI) eksklusif, balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru yang mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi yang melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga yang tidak merokok, keluarga yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga yang memiliki akses ke sarana air bersih, dan keluarga yang memiliki akses atau menggunakan jamban sehat.

Nilai IKS Daerah menunjukkan tren meningkat pada periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, nilai IKS sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) dan pada tahun 2024 naik menjadi 0,36 (nol koma tiga puluh enam) atau meningkat sebesar 0,16 (nol koma enam belas) poin.

Gambar 2.23.
Indeks Keluarga Sehat
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

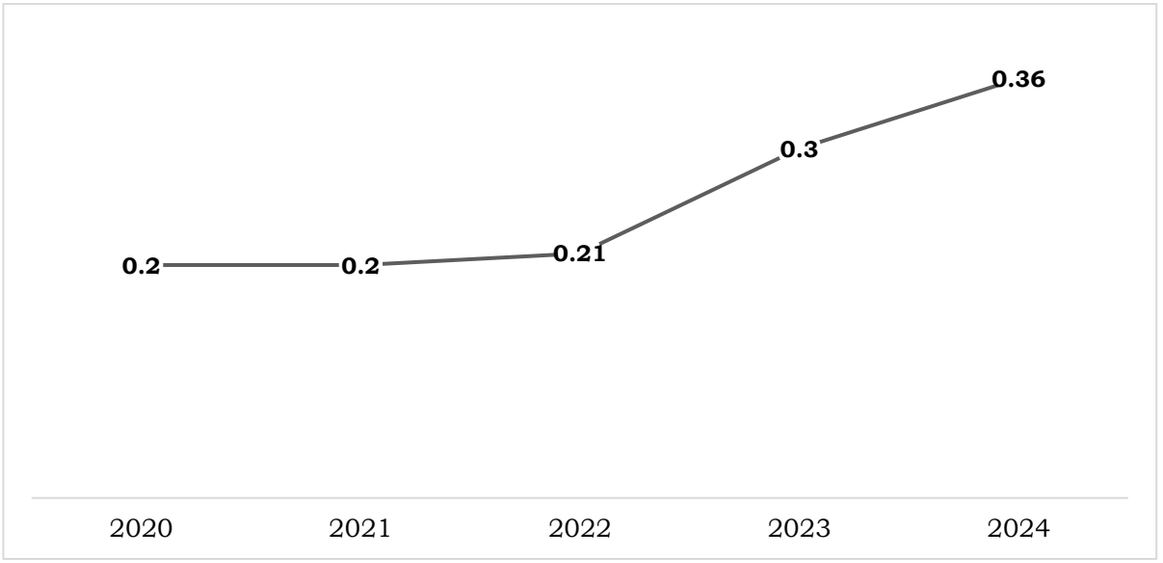

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

c. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Data Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2020-2024 menunjukkan variasi yang signifikan, terutama dalam tren kematian ibu per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup. Pada tahun 2020, jumlah kematian ibu sebanyak 30 (tiga puluh) kasus dari 12.862 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua) kelahiran hidup, jumlah kasus tersebut mengakibatkan AKI meningkat tajam menjadi 233,25 (dua ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima). Pada tahun 2021, angka kematian ibu meningkat lagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) kasus dari 12.526 (dua belas ribu lima

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ratus dua puluh enam) kelahiran hidup dan menyebabkan AKI mencapai puncaknya yaitu 303,37 (tiga ratus tiga koma tiga puluh tujuh).

Pada tahun 2022, telah terjadi penurunan jumlah kematian ibu menjadi 24 (dua puluh empat) kasus dari 12.825 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh lima) kelahiran hidup, sehingga AKI menurun dengan signifikan menjadi 187,13 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga belas). Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana jumlah kematian ibu lebih rendah lagi yaitu 12 (dua belas) kasus dari 12.458 (dua belas ribu empat ratus lima puluh delapan) kelahiran hidup dan menghasilkan AKI sebesar 96,32 (sembilan puluh enam koma tiga puluh dua). Penurunan drastis AKI pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan yang baik dalam hal kesehatan ibu dan layanan kesehatan di daerah tersebut.

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Jumlah Kematian Ibu (kasus)	Jumlah Kelahiran Hidup (kasus)	AKI
2020	30	12.862	233,25
2021	38	12.526	303,37
2022	24	12.825	187,13
2023	12	12.458	96,32
2024	13	11.675	111,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

Adapun Angka Kematian Bayi (AKB) Daerah selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, AKB tercatat sebesar 15 (lima belas), kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 19 (sembilan belas). Selanjutnya, angka kematian bayi menurun pada tahun 2022 menjadi 13 (tiga belas) dan kembali menurun pada tahun 2023 hingga mencapai titik terendah sebesar 11 (sebelas). Namun, pada tahun 2024 terjadi kenaikan AKB menjadi 13 (tiga belas).

Secara umum, tren ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesehatan ibu dan bayi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih terdapat dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas persalinan, status gizi ibu dan bayi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kenaikan pada tahun tertentu menunjukkan perlunya penguatan intervensi kesehatan maternal dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

neonatal secara berkelanjutan agar penurunan angka kematian bayi dapat berlangsung lebih stabil dan konsisten ke depan.

Gambar 2.24.

Angka Kematian Bayi

di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

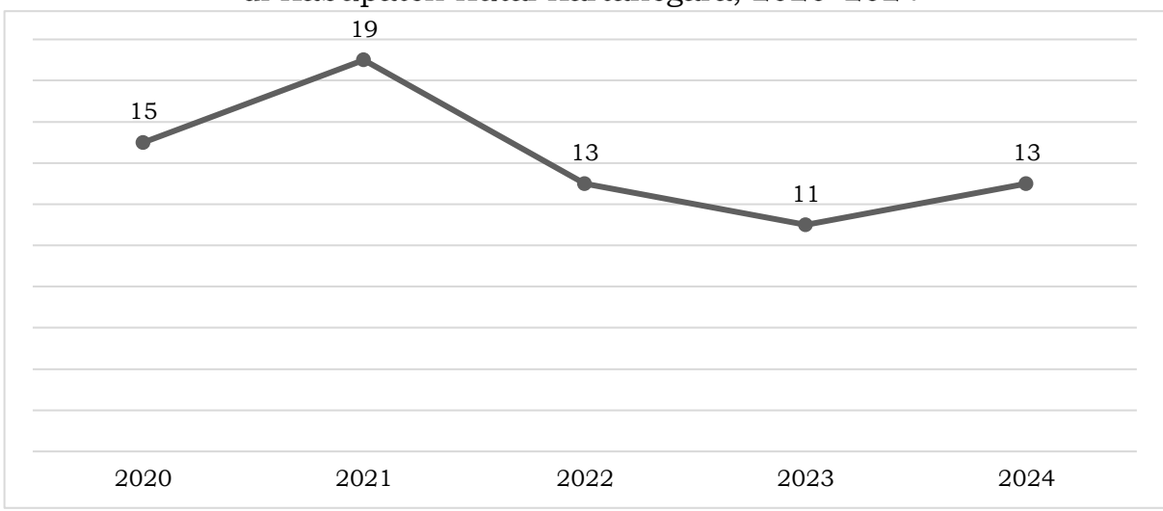

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

d. Prevalensi Status Gizi Balita *Stunting*

Data prevalensi balita *stunting* Daerah periode tahun 2021-2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan. berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 prevalensi *stunting* tercatat sebesar 26,40 % (dua puluh enam koma empat puluh persen). Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 27,10 % (dua puluh tujuh koma sepuluh persen) dan terus menunjukkan peningkatan masalah *stunting* di wilayah tersebut.

Namun demikian, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI), pada tahun 2023 prevalensi *stunting* mengalami penurunan drastis menjadi 17,60 % (tujuh belas koma enam puluh satu persen). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan atas status gizi balita di Kabupaten Kutai Kartanegara selama setahun terakhir. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain mencakup peningkatan intervensi kesehatan dan gizi, program pemerintah yang efektif, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik mengenai pentingnya gizi anak.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.28.
Prevalensi Status Gizi Balita *Stunting*
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021–2024

Tahun	Persentase (%)
2021	17,08
2022	17,64
2023	16,39
2024	14,63

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

e. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis

Selama lima tahun terakhir, cakupan penemuan kasus *tuberculosis* di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan angka yang fluktuatif. Cakupan penemuan kasus *tuberculosis* pada tahun 2020 tercatat sebesar 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) kasus. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 ditemukan 713 (tujuh ratus tiga belas) kasus, pada tahun 2022 sebanyak 1.018 (seribu delapan belas) kasus, pada tahun 2023 sebanyak 1.196 (seribu seratus sembilan puluh enam) kasus dan pada tahun 2024 mencapai 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) kasus.

Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam pengendalian dan penemuan kasus *tuberculosis* di Kutai Kartanegara, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan kesehatan, program pencegahan, dan efektivitas sistem deteksi dini. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi tahunan yang signifikan, peningkatan penemuan kasus *tuberculosis* pada tahun 2024 memberikan harapan dalam upaya pengendalian penyakit ini. Untuk itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan, pengobatan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan perawatan untuk mencapai tujuan eliminasi *tuberculosis* di masa depan.

Tabel 2.29. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Perkiraan penemuan Kasus	Penemuan Kasus	Cakupan penemuan
2020	995	637	64,02
2021	1.045	713	68,23
2022	1.076	1.018	94,61
2023	1.642	1.196	72,84
2024	2.135	1.329	62,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

f. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Selama 5 (lima) tahun terakhir, data Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan pencapaian yang stabil. Pada periode tahun 2020- 2024, target dan realisasi cakupan JKN tampak mengalami fluktuasi, namun cenderung memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan.

Pada tahun 2021, tercatat realisasi cakupan yang melebihi target yaitu 100,52 % (seratus koma lima puluh dua persen). Hal ini menunjukkan efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan akses kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan perlunya terus-menerus memperbaiki strategi untuk mencapai target secara konsisten dan meningkatkan aksesibilitas, serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.30.
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2020	705.170	696.468	98,77
2021	765.280	769.281	100,52
2022	778.100	771.890	99,20
2023	782.630	797.719	101,93
2024	806.964	819.063	101,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

Secara keseluruhan, pencapaian cakupan JKN di Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik. Evaluasi terus-menerus terhadap faktor-faktor seperti: efisiensi administrasi, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam program JKN, menjadi kunci dalam menjamin kelangsungan dan keberhasilan program ini di masa depan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Isu tentang pendidikan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Secara umum, kedua indikator tersebut tampak ada peningkatan setiap tahun, di mana angka HLS pada tahun 2024 meningkat hingga 0,6 % (nol koma enam persen). Namun

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

demikian, intensitas kenaikan HLS sebelum 2024 tampak cukup rendah setiap tahun. Pada tahun 2020, angka HLS mencapai 13,59 (tiga belas koma lima puluh sembilan) tahun, kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) tahun.

Pencapaian RLS juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 angkanya mencapai 9,22 % (sembilan koma dua puluh dua persen(, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 9,27 (sembila koma dua puluh tujuh) tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata masyarakat berusia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh tahun) atau lulus SMP.

Tabel 2.31.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,59	13,60	13,63	13,64	13,65
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

b. Angka Literasi/Numerasi

Data tentang persentase satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode tahun 2021-2024 menunjukkan tren menarik, terutama dalam *item* literasi membaca dan numerasi.

Untuk literasi membaca, baik di tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), terdapat peningkatan setiap tahun. Di tingkat SD, proporsinya pada tahun 2021 meningkat dari 56,61 % (lima puluh enam koma enam puluh satu persen) menjadi 65,35 % (enam puluh lima koma tiga puluh lima persen) pada tahun 2022, dan pada tahun 2024 mencapai 70,98 % (tujuh puluh koma sembilan puluh delapan persen). Tren serupa terlihat di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), dengan persentase kenaikan dari 60,57 (enam puluh koma lima puluh tujuh persen) pada tahun 2021, menjadi 72,48 % (tujuh puluh koma empat puluh delapan persen) pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 81,45 % (delapan puluh satu koma empat puluh lima persen) pada tahun 2024.

Untuk *item* numerasi, terjadi peningkatan proporsi satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum. Di tingkat SD, persentase ini

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

meningkat dari 31,47 % (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh persen) pada tahun 2021, menjadi 50,32 % (lima puluh koma tiga puluh dua persen) pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 63,42 % (enam puluh tiga koma empat puluh dua persen) pada tahun 2024. Di tingkat SMP, terjadi peningkatan dari 42,79 % (empat puluh dua koma tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2021 menjadi 47,60 % (empat puluh tujuh koma enam puluh persen) pada tahun 2022, namun kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2024 yaitu mencapai 75,82 % (tujuh puluh lima koma delapan puluh dua persen).

Peningkatan dalam literasi membaca menunjukkan keberhasilan upaya pendidikan dalam meningkatkan kemampuan membaca di sekolah-sekolah. Secara keseluruhan, data tersebut mencerminkan kemajuan positif dalam kompetensi literasi dan numerasi Daerah, dengan perhatian khusus diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif tersebut, terutama dalam bidang numerasi. Secara rinci, angka-angka pencapaian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Persentase Satuan Pendidikan
yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021-2024

Item	2021	2022	2023	2024
i) Literasi Membaca				
- SD	56,61	65,35	70,68	70,98
- SMP	60,57	72,48	77,34	81,45
ii) Numerasi				
- SD	31,47	50,32	58,85	63,42
- SMP	42,79	47,60	72,79	75,82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, 2024

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator strategis dalam mengukur kualitas SDM dari sisi kapasitas literasi. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap sumber informasi, kemampuan membaca dan memahami informasi, serta keterlibatan dalam aktivitas literasi, baik di tingkat individu maupun komunitas.

IPLM dikategorikan ke dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. sangat rendah dengan skor indeks 9,9–29,9 (sembilan koma sembilan sampai dengan dua puluh sembilan koma sembilan);
2. rendah dengan skor indeks 30–49,9 (tiga puluh sampai dengan empat puluh sembilan koma sembilan);
3. sedang dengan skor indeks 50–79,9 (lima puluh sampai dengan tujuh puluh sembilan koma sembilan);
4. tinggi dengan skor indeks 80–89,9 (delapan puluh sampai dengan delapan puluh sembilan koma sembilan); dan
5. sangat tinggi 90–100 (sembilan puluh sampai dengan seratus).

Semakin tinggi skor indeks, maka semakin baik kualitas literasi masyarakat di suatu daerah.

Pada tahun 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatatkan nilai IPLM sebesar 77,49 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh sembilan). Capaian tersebut menempatkan kabupaten ini pada kategori sedang, namun berada di ambang batas menuju kategori tinggi. Capaian tersebut mencerminkan adanya upaya yang keras dalam membangun budaya literasi, baik melalui penyediaan fasilitas perpustakaan, kegiatan literasi komunitas, maupun integrasi program literasi di sektor pendidikan formal dan nonformal.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam capaian IPLM Daerah yaitu menjadi 57,28 (lima puluh tujuh koma dua puluh delapan). Meski tetap berada dalam kategori sedang, penurunan ini menjadi sinyal peringatan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk kembali mengevaluasi strategi pembangunan literasi. Penurunan skor ini dapat mencerminkan berbagai dinamika, seperti menurunnya akses terhadap layanan perpustakaan.

Gambar 2.25.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Provinsi Kalimantan Timur, 2022 – 2023

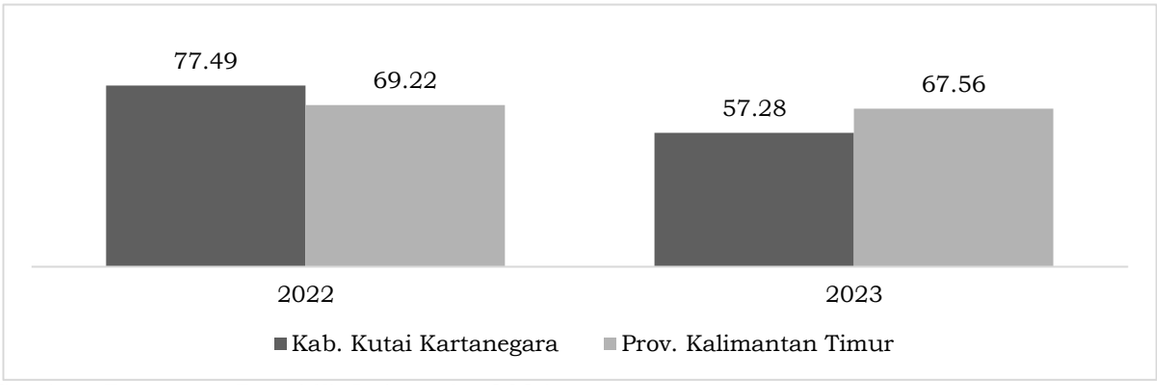

Sumber: Bappenas Republik Indonesia, 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. Penduduk Berusia 15 (lima belas) Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi

Data dalam tabel di bawah menunjukkan tren penurunan proporsi penduduk berpendidikan SD atau lebih rendah selama periode tahun 2020-2023. Pada tahun 2020, sebanyak 36,03 % (tiga puluh enam persen) penduduk masih berada di kategori ini. Namun demikian, pada tahun 2024 angkanya menurun menjadi 30,77 % (tiga puluh koma tujuh puluh tujuh persen). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses atau partisipasi dalam pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, proporsi penduduk berpendidikan SMP atau sederajat masih mengalami fluktuasi. Naik dari 22,48 % (dua puluh dua koma empat puluh delapan persen) pada tahun 2020 kemudian menurun menjadi 20,63 % (dua puluh koma enam puluh tiga persen) pada tahun 2024.

Sementara itu, proporsi penduduk berpendidikan SMA/SMK atau sederajat cenderung meningkat, dari 33,06 % (tiga puluh tiga koma nol enam persen) pada tahun 2020 menjadi 38,07 % (tiga puluh delapan koma nol persen) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah atas.

Selain itu, ada peningkatan kecil yang konsisten dalam proporsi penduduk dengan pendidikan diploma dan universitas. Pada 2020, proporsi penduduk berpendidikan Diploma I/II/III sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen), dan proporsi berpendidikan universitas atau D-IV sebesar 6,68 % (enam koma enam puluh delapan persen). Angka proporsi penduduk berpendidikan perguruan tinggi meningkat menjadi 10,54 % (sepuluh koma lima puluh empat persen) pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam tingkat pendidikan Daerah, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan lebih lanjut.

Tabel 2.32.

Proporsi Penduduk

Berusia 15 Tahun Ke atas menurut Pendidikan Tertinggi

di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/ke bawah	36,03	36,05	35,06	30,42	30,77
SMP/Sederajat	22,48	21,93	19,79	22,42	20,63
SMA/SMK/Sederajat	33,06	33,50	37,78	36,94	38,07

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Diploma I/II/III	1,75	1,86	1,14	2,10	10,54
Universitas/D IV	6,68	6,66	6,22	8,11	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Dalam konteks pembangunan Daerah, sistem perlindungan sosial yang adaptif bukan hanya berfungsi sebagai jaring pengaman *(safety net)* pada saat masyarakat menghadapi krisis sosial maupun ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesetaraan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjamin bahwa tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan akibat kemiskinan, disabilitas, bencana, atau tekanan ekonomi lainnya.

Pembangunan perlindungan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang konsisten dan mengarah pada penguatan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tercatat stabil pada angka 100 % (seratus persen) sepanjang periode tersebut, menandakan akses yang merata bagi pekerja terhadap perlindungan dasar ketenagakerjaan. Kinerja perlindungan sosial juga tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti. Persentasenya mencapai 100 % (seratus persen) pada tahun 2024, sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah memastikan kelompok rentan mendapatkan layanan minimal sesuai standar pelayanan. Jumlah individu yang terlayani pada kelompok ini memang berfluktuasi tiap tahun misalnya penyandang disabilitas terlantar terlayani sebanyak 8.358 (delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan orang) pada tahun 2020 dan 2.521 (dua ribu lima ratus dua puluh satu) orang pada tahun 2024 namun angka tersebut mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.

Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga ditunjukkan melalui capaian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sosial (PMKS). Persentase PMKS yang menerima bantuan meningkat signifikan dari 70,37 % (tujuh puluh koma tiga puluh tujuh persen) pada tahun 2020 menjadi 97,68 % (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan persen) pada tahun 2024. Jumlah PMKS penerima bantuan mencapai 175.849 (seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan) orang pada tahun 2020 dan tetap berada pada kisaran puluhan ribu pada tahun-tahun berikutnya, menggambarkan skala intervensi yang luas dan adaptif terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial di Kutai Kartanegara semakin inklusif, responsif, dan mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus mendukung agenda nasional dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 2.33.
Pembangunan Perlindungan Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	100	100	100	100	100
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)	100	98.73	97,63	100	100
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	8358	1567	2967	2932	2521
Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi	15464	18809	11143	347	445

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti					
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	2816	3856	7218	11909	3476
Jumlah Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	289	58	84	0	20
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar	8358	1707	2569	2932	2521
Jumlah Anak Terlantar	15464	22151	11221	347	445
Jumlah Lanjut Usia Terlantar	2816	694	8057	11909	3476
Jumlah Gelandangan Pengemis	289	50	84	0	20
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	70,37	90,02	97,04	98,72	97,68
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	175849	23947	21275	15188	11981
Jumlah PMKS	249893	26603	21932	15385	12266

Sumber: Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara, 2025

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.2.5 Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberi gambaran terkait kemajuan pembangunan kebudayaan. Indeks ini mencakup tujuh dimensi: pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan *gender*.

Pada tahun 2022, nilai IPK Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional, yaitu sebesar 49,08 (empat puluh sembilan koma nol delapan). Nilai ini mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu 7,42 (tujuh koma empat puluh dua). Tabel di bawah menyajikan nilai untuk masing-masing dimensi pada IPK Daerah.

Tabel 2.34.

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2022 – 2024

Wilayah	2022	2023	2024
Kabupaten Kutai Kartanegara	49,08	53,23	57,42
Provinsi Kalimantan Timur	54,81	57,56	57,56*
Nasional	55,13	57,13	57,13*

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2024

Berdasarkan data dalam tabel di bawah, nilai indeks untuk masing-masing indikator periode tahun 2022-2024 secara umum menunjukkan peningkatan. Namun, nilai indeks pada indikator pendidikan justru mengalami penurunan dari 74,25 (tujuh puluh empat koma dua puluh lima) pada tahu 2022 menjadi 73,66 (tujuh puluh tiga koma enam puluh enam) pada tahun 2024. Nilai indeks tertinggi terjadi pada tahun 2024 pada indikator ketahanan sosial budaya 82,29 (delapan puluh dua koma dua puluh sembilan), sedangkan nilai indeks terendah terjadi pada indikator budaya literasi dengan nilai 38,80 (tiga puluh delapan koma delapan puluh).

Tabel 2.35.

Dimensi Pengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022-2024

Indikator	Nilai Indeks		
	2022	2023	2024
Ekonomi Budaya	21,00	34,00	39,00
Pendidikan	74,25	72,23	73,66

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Indikator	Nilai Indeks		
	2022	2023	2024
Ketahanan Sosial Budaya	73,28	75,96	82,29
Warisan Budaya	58,92	67,43	69,74
Ekspresi Budaya	32,70	34,96	45,08
Budaya Literasi	36,60	39,00	38,80
Gender	46,84	49,00	53,38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Tabel 2.36.

Jumlah Kejadian Konflik yang Diselesaikan

di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah konflik yang diselesaikan	28	31	26	14	14

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Pelestarian budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin dari bertambahnya jumlah karya budaya yang berhasil didokumentasikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Berbagai karya budaya tersebut mencakup tradisi lisan, upacara adat, kesenian, kerajinan, serta praktik budaya masyarakat yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Selain itu, upaya perlindungan warisan budaya juga diperkuat melalui pendataan cagar budaya, di mana Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki sejumlah cagar budaya yang terverifikasi dan tercatat secara resmi. Keberadaan karya budaya dan cagar budaya ini tidak hanya menunjukkan kekayaan khazanah budaya Daerah, tetapi juga menjadi basis penting dalam pengembangan kebijakan pelestarian, pendidikan budaya, dan penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal di masa mendatang.

Tabel 2.37.

Nama Karya Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Tahun Pencatatan	No. Pencatatan	Nama Karya Budaya	Tahun Ditetapkan	Kab/Kota	Provinsi
1	2011	2011001197	Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panji Selaten)	2015	Kukar	Kaltim

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Tahun Pencatatan	No. Pencatatan	Nama Karya Budaya	Tahun Ditetapkan	Kab/Kota	Provinsi
2	2011	2011001205	Erau Kartanegara	2016	Kukar	Kaltim
3	2011	2011001600	Tari Ganjur	2019	Kukar	Kaltim
4	2018	2018008594	Tari Gong	2019	Kukar	Kaltim
5	2018	2018008590	Suliikng Dewa	2019	Kukar	Kaltim
6	2018	2018008592	Tari Dewa Memanah	2019	Kukar	Kaltim
7	2010	2010000390	Tari Datun Ngentau	2020	Kukar	Kaltim
8	2019	2019009341	Tari Topeng Kemindu	2020	Kukar	Kaltim
9	2019	2019009183	Belian Namang	2021	Kukar	Kaltim
10	2020	2020009668	Kanjet Lasan	2021	Kukar	Kaltim
11	2020	2020009667	Punan Leto	2021	Kukar	Kaltim
12	2021	2021010545	Naek Ayun	2022	Kukar	Kaltim
13	2014	2014004877	Tarsul Kutai	2022	Kukar	Kaltim
14	2013	2013004023	Gasing Kutai	2022	Kukar	Kaltim
15	2011	2011001209	Muang Kutai Adat Lawas	2022	Kukar	Kaltim
16	2021	2021011005	Nutuk Beham	2022	Kukar	Kaltim
17	2020	2020009731	Mecaq Undat	2023	Kukar	Kaltim
18	2021	2021011013	Kuda Gepang	2023	Kukar	Kaltim
19	2021	2021010732	Jatung Utang	2023	Kukar	Kaltim
20	2024	2.024.022.400.002	Sangkoh Kab. Kukar	2024	Kukar	Kaltim
21	2024	2.024.021.900.003	Gambus Kab. Kukar	2024	Kukar	Kaltim
22	2019	2019009334	Tingkilan Kab. Kukar	2024	Kukar	Kaltim
23	2024	2.024.030.700.002	Tari Topeng Penembe	2025	Kukar	Kaltim
24	2024	2.024.022.400.004	Jajak Juragan Mabok	2025	Kukar	Kaltim
25	2025	2.025.080.100.002	Bedandeng	2025	Kukar	Kaltim

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.38.

Data Cagar Budaya yang Terdata di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Regrestasi	Nama Benda	Lokasi CB	Status
1	PO2015112500248	Tugu Pembantaian jepang (Struktur)	Loa Kulu	Ditetapkan
2	PO2015112500246	Benteng Awang Long Senopati (Situs)	Kota Bangun	
3	PO2015112200826	Bangsal Distrik IV C5 (Bangunan)	Sanga-Sanga	
4	PO2015112200821	Bangsal Hutan B11 (Bangunan)	Sanga-Sanga	
5	PO2015112200814	Bangsal Distrik IV B21 (Bangunan)	Sanga-Sanga	
6	PO2015112200804	Rumah Bahari (Bangunan)	Sanga-Sanga	
7	PO2015112200787	Rumah cina (Bangunan)	Sanga-Sanga	
8	PO2015112200724	Bangsal Hutan C131 (Bangunan)	Sanga-Sanga	
9	PO2015112200712	Bangsal Huran C132 (Bangunan)	Sanga-Sanga	
10	PO2015112200697	Bangsal Hutan 56 (Bangunan)	Sanga-Sanga	
11	PO2015112200685	Bangsal Hutan 53 (Bangunan)	Sanga-Sanga	
12	PO2015112200556	Goa Belanda (Situs)	Sanga-Sanga	
13	PO2015112200521	Goa Jepang (Situs)	Sanga-Sanga	
14	PO2015112200464	Monumen Perjuangan (Struktur)	Sanga-Sanga	
15	PO2015112200409	tugu pembantaian pejuang merah putih Sang sanga (Struktur)	Sanga-Sanga	Ditetapkan
16	PO2015112200308	Gedung Sandisa (Bangunan)	Sanga-Sanga	
17	PO2015112200239	Makam Syech Tunggang Parangan (Situs)	Anggana	Ditetapkan
18	PO2015112200198	Makam Sultan Aji Dilanggar (Situs)	Anggana	
19	PO2015112200157	Makam Sultan Aji Raja Mahkota (Situs)	Anggana	
20	PO2015112102084	Makam A.P.Mangkunegoro (Situs)	Tenggarong	
21	PO2015112102062	Makam Al Banjari (Situs)	Tenggarong	
22	PO2015112101638	Monumen Jam Nirum (Struktur)	Tenggarong	
23	PO2015112101532	Mesjid Jami Adji Amir Hasanuddin (Bangunan)	Tenggarong	Ditetapkan
24	PO2015112101453	Makam Pahlawan Awang Long Senopati (Situs)	Tenggarong	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Regrestasi	Nama Benda	Lokasi CB	Status
25	PO2015112100796	Makam Sultan A.M. Alimuddin (Situs)	Tenggarong	
26	PO2015112100713	Makam Sultan A.M. Sulaiman (Situs)	Tenggarong	
27	PO2015112100236	Makam Sultan A.M. Parikesit (Situs)	Tenggarong	
28	PO2015112100437	Makam Sultan A.M.Muslihuddin (Aji Imbut) (Situs)	Tenggarong	
29	PO2015112100653	Makam Sultan A.M. Salehuddin (Situs)	Tenggarong	
30	PO2016102201380	Gedung Atap Lengkung (Bangunan)	Loa Kulu	Ditetapkan
31	PO2016102201267	Kantor Magazijn (Bangunan)	Loa Kulu	Ditetapkan
32	PO2016102201171	Rumah Belanda Loa Kulu (Bangunan)	Loa Kulu	
33	PO2016102200977	Rumah Belanda Panji (Bangunan)	Tenggarong	
34	PO2016102200908	Bekas Masjid Kuno Sri Bangun (Situs)	Kota Bangun	
35	PO2016102200853	Suling Belanda Anggana (Struktur)	Anggana	Ditetapkan
36	PO2016102200762	Gardu Belanda Anggana (Bangunan)	Anggana	
37	PO2016102200588	Rumah Belanda 1 Anggana (Bangunan)	Anggana	
38	PO2016102200522	Penjara Sangasanga (Bangunan)	Sanga-Sanga	Ditetapkan
39	PO2016102200436	Monumen Minyak Sangasanga (Struktur)	Sanga-Sanga	
40	PO2016102200393	Bangsal Hutan C17 51(Bangunan)	Sanga-Sanga	
41	PO2016102200322	Bangsal Hutan C18 52(Bangunan)	Sanga-Sanga	
42	PO2016102200255	Bangsal Hutan C132 (Bangunan)	Sanga-Sanga	
43	PO2016102200137	Kantor Pertamina Sangasanga (Bangunan)	Sanga-Sanga	
44	PO2016102200080	Rumah Belanda 49 Distrik IV (Bangunan)	Sanga-Sanga	
45	PO2016102200049	Rumah Belanda C24 Distrik IV (Bangunan)	Sanga-Sanga	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Regrestasi	Nama Benda	Lokasi CB	Status
46	PO2016102101511	Klinik Pertamina (Bangunan)	Sanga-Sanga	
47	PO2016102101441	Bangsal Distrik VI 29(Bangunan)	Sanga-Sanga	
48	PO2016102101336	Tiang Telephone Panji (Struktur)	Tenggarong	
49	PO2016072100736	Kantor Pos Sanga-sanga (Bangunan)	Sanga-Sanga	Ditetapkan
50	PO2016102101378	Menara Pengeboran Minyak Belanda (Struktur)	Sanga-Sanga	
51	PO2016102101441	Bangsal Distrik VI 29 (Bangunan)	Sanga-Sanga	
52	PO2016102101378	Menara Pengeboran Minyak Belanda (Struktur)	Anggana	
53	PO2017090800683	Yupa Lesung Batu (Situs)	Muara Kaman	
54	PO2017030600002	Situs Gunung Selendang (Situs)	Sanga-Sanga	Ditetapkan
55	PO2017090800650	Arca Ghanesa (Benda)	Loa kulu	
56	PO2018071200440	Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa (Situs)	Loa Kulu	Ditetapkan
57	PO2018071200414	Monumen Penyerahan Kedaulatan RIS (Struktur)	Sanga-Sanga	
58	PO2018071200394	Tugu Merah 1945 (Struktur)	Tenggarong	
59	PO2018071200326	Gedung Wanita (Bangunan)	Tenggarong	
60	PO2018071200193	Makam Kelambu Kuning (Situs)	Tenggarong	
61	PO2018071200663	Makam Sultan & Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara (Situs)	Tenggarong	Ditetapkan
62	P02018071100660	Jembatan Besi (Struktur)	Tenggarong	
63	PO2018071100543	Bungker Jepang (Struktur)	Loa Kulu	
64	PO2018071100314	Situs Sejarah Lebak Mantan (Situs)	Kota Bangun	
65	PO2018071100273	Situs Makam Gunung Martapura (Situs)	Muara Kaman	
66	PO2018071100129	Situs Pemandian Kolam Noto Igomo (Situs)	Tenggarong	
67	PO2018071100088	Situs Batu Gelap (Situs)	Tenggarong Seberang	
68	PO2018071100043	Situs Makam Panjang (Situs)	Loa Kulu	
69	PO2018040601649	Pelabuhan Jembatan 3 (Struktur)	Tenggarong	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Regrestasi	Nama Benda	Lokasi CB	Status
70	PO2018040601609	Pelabuhan Jembatan 2 (Struktur)	Tenggarong	
71	PO2018040601595	Pelabuhan Jembatan 1 (Struktur)	Sanga-Sanga	
72	PO2018090600587	Panca Puntu Mang Pihit (Situs)	Kota Bangun	
73	PO2018071200725	Meriam VOC (Benda)	Tenggarong	
74	PO2018071200540	Kawasan Situs Lesung Batu (Benda)	Muara Kaman	Ditetapkan
75	PO2019082200012	Mariem Belnda 6 (Benda)	Tenggarong	
76	PO2019082200011	Mariem Belnda 5 (Benda)	Tenggarong	
77	PO2019082200010	Mariem Belnda 4 (Benda)	Tenggarong	
78	PO2019082200009	Mariem Belnda 3 (Benda)	Tenggarong	
79	PO2019082200008	Mariem Belnda 2 (Benda)	Tenggarong	
80	PO2019082200007	Mariem Belnda 1 (Benda)	Tenggarong	
81	PO2019080700008	Kapal Kertanegara (Benda)	Tenggarong	
82	PO2019080700005	Arca Nandi (Benda)	Kota Bangun	
83	PO2019080700003	Kerajaan Kutai di Jembayan (Situs)	Loa Kulu	
84	PO2019080700002	Rumah Belanda 4 (Bangunan)	Loa Kulu	
85	PO2019080700001	Rumah Belanda 3 (Bangunan)	Loa Kulu	
86	PO2019080600007	Rumah Belanda 2 Loa Kulu (Bangunan)	Loa Kulu	
87	PO2019080600006	Sumur Mas (Struktur)	Loa Kulu	
88	PO2019080600005	Rumah Belanda 1(Bangunan)	Loa Kulu	
89	PO2019080600004	Banker Pengintaian tentara Jepang (Struktur)	Loa Kulu	
90	PO2019080600003	Banker Pertahanan Jepang (Struktur)	Loa Kulu	
91	PO2019080600001	Bekas Terowongan Tambang Batu Bara (Struktur)	Loa Kulu	
92	PO2019080600008	Rumah Kutai Bahari Kota Bangun (Bangunan)	Kota Bangun	
93	PO2019080600002	Lubang Angin terowongan ex tambang Batu Bara (Struktur)	Loa Kulu	
94	PO2019062600037	Komplek Makam Kuno Sebulu Hilir (Situs)	Sebulu	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Regrestasi	Nama Benda	Lokasi CB	Status
95		Tajau 30.Tajau 31 dan Tajau 32 Situs kubur gunung selendang sanga2	Sangasanga	Ditetapkan
96		Rumah Besar (Bangunan)	Tenggarong	Ditetapkan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga *(iBangga)* adalah ukuran kualitas keluarga yang mencerminkan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. *iBangga* menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas keluarga. Berdasarkan *iBangga* wilayah dapat diklasifikasikan menjadi tiga status: tangguh, berkembang, dan rentan.

Nilai *iBangga* berkisar antara 0-100 (nol sampai dengan seratus), dengan rincian:

1. kategori rentan nilainya di bawah 40 (empat puluh);
2. kategori berkembang nilainya antara 40-70 (empat puluh sampai dengan tujuh puluh); dan
3. kategori tangguh nilainya di atas 70 (tujuh puluh).

Tabel berikut merupakan nilai *iBangga* Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan nasional.

Tabel 2.39.
Indeks Pembangunan Keluarga *(iBangga)*
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
dan Nasional, 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kutai Kartanegara	n.a	54,90	58,60	63,34	66,96
Prov. Kalimantan Timur	n.a	54,91	56,72	64,54	65,50
Nasional	n.a	54,01	56,07	61,43	62,40

Sumber: BKKBN, 2024

Pada tahun 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki nilai *iBangga* yaitu 54,90 (lima puluh empat koma sembilan puluh), lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur yaitu 54,91 (lima puluh empat koma sembilan puluh satu). Pada tahun 2024 nilai *iBangga* Daerah terus meningkat hingga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mencapai 66,96 (enam puluh enam koma sembilan puluh enam), yang lebih tinggi dibandingkan angka provinsi maupun angka nasional. Berdasarkan klasifikasi *iBangga*, dapat disimpulkan bahwa kondisi pembangunan keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk kategori berkembang selama periode 2021-2024.

b. Pembangunan Gender

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan terus meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan Daerah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

IPG Daerah pada tahun 2024 sebesar 81,20 (delapan puluh satu koma dua puluh), meningkat 2,3 (dua koma tiga) poin dibanding tahun 2020 yang sebesar 78,90 (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh). Sedangkan pada IPG yang melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, terlihat dari capaian saat ini, yang sudah mulai mengalami peningkatan dibanding dengan capaian tahun 2020. Meskipun masih perlu upaya meningkatkan jumlah perempuan yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun pada tahun 2024 pencapaian IPG mencapai 72,29 (tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan), dengan capaian yang masih di bawah angka nasional yang sebesar 77,62 (tujuh puluh tuju koma enam puluh dua).

Komponen penyusun IPG Daerah menunjukkan tren perbaikan pada seluruh dimensi, khususnya kesehatan dan pendidikan. UHH perempuan meningkat dari 74,36 (tujuh puluh empat koma tiga puluh enam) tahun pada pada tahun 2020 menjadi 75,01 (tujuh puluh lima koma nol satu) tahun pada tahun 2024, sedangkan laki-laki naik dari 70,39 (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan) tahun menjadi 70,96 (tujuh puluh koma sembilan puluh enam) tahun. Pada dimensi pendidikan, baik Harapan Lama Sekolah (HLS)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

maupun Rata-rata Lama Sekolah mengalami kenaikan untuk kedua gender. HLS perempuan meningkat dari 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) tahun menjadi 13,97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) tahun, sedikit lebih tinggi dari laki-laki, sementara RLS perempuan naik dari 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) tahun menjadi 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) tahun meski masih di bawah capaian laki-laki yang mencapai 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) tahun. Perbaikan ini mencerminkan meningkatnya akses perempuan terhadap layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan. Serta pada dimensi ekonomi yang diukur melalui pengeluaran per kapita, perempuan juga menunjukkan peningkatan dari 4.477 (empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) pada tahun tahun 2020 menjadi 5.410 (lima ribu empat ratus sepuluh pada tahun 2024. Namun, capaian ini masih mencerminkan adanya ketimpangan dibandingkan laki-laki, sehingga berpengaruh pada nilai IPG Daerah secara keseluruhan. Meskipun kesenjangan gender masih terlihat pada aspek ekonomi dan rata-rata lama sekolah, tren peningkatan seluruh komponen penyusun IPG menegaskan bahwa kualitas hidup perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami kemajuan. Perbaikan berkelanjutan pada ketiga dimensi tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah.

Tabel 2.40.

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	78,90	79,12	79,80	80,64	81,20
Umur Harapan Hidup (menggunakan UHH SP2010) Perempuan	74,36	74,50	74,51	74,81	75,01
Umur Harapan Hidup (menggunakan UHH SP2010) Laki-laki	70,39	70,67	70,69	70,78	70,96
Harapan Lama Sekolah Perempuan	13,65	13,66	13,67	13,96	13,97
Harapan Lama Sekolah Laki-laki	13,53	13,54	13,57	13,58	13,59
Rata-rata Lama Sekolah Perempuan	8,63	8,64	8,81	8,82	8,83
Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki	9,57	9,58	9,59	9,61	9,62

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran per Kapita Perempuan	4.477,00	4.625,00	4.900,00	5.133,00	5.410,00
Indeks Pemberdayaan Gender	61,43	62,76	63,40	63,55	72,29
Indeks Ketimpangan Gender	0,556	0,511	0,540	0,490	0,491

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2021-2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan gender yang disebabkan oleh ketimpangan gender. Indikator ini dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia yaitu reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Selama periode tahun 2020-2024, secara umum ketimpangan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan. Pada 2029, capaian IKG mencapai 0,556 (nol koma lima ratus lima puluh enam) dan menurun hingga tahun 2024 menjadi 0,431 (nol koma empat ratus tiga puluh satu). Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara telah semakin mengecil.

c. Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, nilai IPA mencapai 60,00 (enam puluh) dan terus mengalami perbaikan bertahap menjadi 60,09 (enam puluh koma nol sembilan) pada tahun 2021, 60,86 (enam puluh koma delapan puluh enam) pada tahun 2022, 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) pada tahuh 2023, hingga mencapai 62,09 (enam puluh dua koma nol sembilan) pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Peningkatan nilai IPA mencerminkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi hak-hak anak melalui kebijakan, program, dan intervensi yang lebih terfokus, termasuk penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Meskipun peningkatannya bersifat gradual, capaian tersebut memperlihatkan bahwa sistem perlindungan anak mulai bergerak ke arah yang lebih responsif dan inklusif. Dibutuhkan penguatan kolaborasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

antarsektor serta pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak, agar akselerasi capaian IPA dapat lebih signifikan. Hal tersebut penting untuk mendorong terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh dan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang ramah anak dan berkelanjutan.

Tabel 2.41.

Indeks Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Nilai
2020	60,00
2021	60,09
2022	60,86
2023	61,79
2024	62,09

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu alat ukur penting untuk menilai perkembangan dan kualitas hidup pemuda dalam berbagai aspek pembangunan. IPP memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sejumlah aspek, seperti pendidikan formal dan informal, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial dan inklusivitas, beserta kesetaraan mempengaruhi kondisi pemuda.

IPP Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi dalam 4 (empat) tahun terakhir. Penyebab fluktuasi karena nilai komponen partisipasi dan kepemimpinan ikut berfluktuasi. Nilai IPP tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 60,91 (enam puluh koma sembilan puluh satu).

Gambar 2.26.

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2023

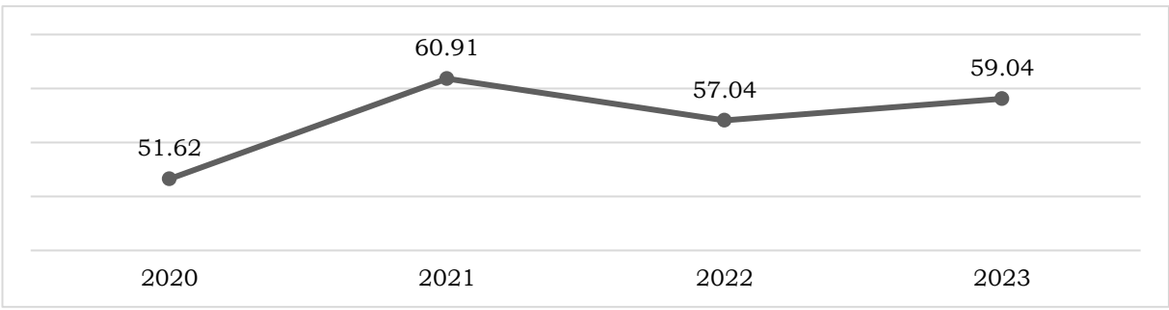

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Selanjutnya dalam hal keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peningkatan. Jumlah atlet laki-laki dan perempuan relatif stabil pada periode tahun 2020–2022, masing-masing berada pada angka 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) untuk laki-laki dan 576 (lima ratus tujuh puluh enam) untuk perempuan. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan atlet laki-laki menjadi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dan atlet perempuan menjadi 715 (tujuh ratus lima belas), dan angka tersebut kembali bertahan pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan meningkatnya minat dan pembinaan olahraga di Daerah, serta semakin luasnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Perkembangan juga terlihat pada jumlah atlet NPC serta prestasi medali. Jumlah atlet NPC meningkat dari 40 (empat puluh) laki-laki dan 35 (tiga puluh lima) perempuan pada tahun 2020 menjadi 60 (enam puluh) laki-laki dan 40 (empat puluh) perempuan pada tahun 2022–2024. Pada aspek prestasi, perolehan medali didominasi atlet laki-laki, yang meningkat dari 30 (tiga puluh) medali pada tahun 2020 menjadi 175 (seratus tujuh puluh lima) medali pada tahun 2024, sementara atlet perempuan belum menunjukkan perolehan medali pada periode tersebut. Jumlah atlet junior menunjukkan tren yang stabil hingga meningkat, dari 525 (lima ratus dua puluh lima) laki-laki dan 415 (empat ratus lima belas) perempuan pada tahun 2020 menjadi 715 (tujuh ratus lima belas) laki-laki dan 475 (empat ratus tujuh puluh lima) perempuan pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan penguatan pembinaan keolahragaan di Daerah, baik dari sisi jumlah atlet, peningkatan prestasi, maupun keterlibatan atlet perempuan dan junior dalam kegiatan olahraga Daerah.

Tabel 2.42.

Pembangunan Keolahragaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Uraian	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Jumlah Atlit Laki-Laki dan Perempuan	875	576	875	576	875	576	975	715	975	715
2	Jumlah Atlet NPC Laki-Laki dan Perempuan	40	35	55	40	60	40	60	40	60	40
3	Jumlah Perolehan Medali	30	0	26	0	17	0	36	0	175	0
4	Jumlah Atlet Junior	525	415	525	415	675	410	715	475	715	475

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kutai Kartanegara, 2025

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Berdasarkan data tahun 2020- 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah, angka ketergantungan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,91 % (nol koma sembilan puluh satu) persen per tahun. Pada tahun 2020, angka ketergantungan sebesar 46,35 (empat puluh enam koma tiga puluh lima), kemudian terus menurun yaitu 45,65 (empat puluh lima koma enam puluh lima) pada tahun 2021, 44,83 (empat puluh empat koma delapan puluh tiga) pada tahun 2022, 44,10 (empat puluh empat koma sepuluh) pada tahun 2023, hingga mencapai 42,73 (empat puluh dua koma tujuh puluh tiga) pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan penurunan angka ketergantungan Daerah.

Tabel 2.43.

Angka Ketergantungan

di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Angka Ketergantungan	
	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
2020	46,35	44,33
2021	45,65	41,72
2022	44,83	43,20
2023	44,10	43,14
2024	42,73	41,16

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2020-2024

Jika melihat tren angka ketergantungan di Kalimantan Timur, polanya tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun penurunannya lebih lambat dengan rata-rata penurunan sebesar 0,39 % (nol koma tiga puluh sembilan persen) per tahun. Penurunan angka ketergantungan ini memberikan sinyal positif, di mana jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non-produktif, sehingga berpotensi untuk meraih bonus demografi. Namun demikian, untuk memastikan bahwa potensi bonus demografi dapat dioptimalkan, maka diperlukan kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.3.2 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pemanfaatan Iptek dan inovasi tidak hanya menjaga stabilitas produktivitas di berbagai sektor ekonomi, tetapi juga mempercepat transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif. Dalam jangka panjang, integrasi teknologi dan inovasi akan mampu meningkatkan efisiensi produksi, serta mendorong diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Daerah.

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dan pendapatan Daerah. Perkembangan industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan lahan yang luas dan berkualitas, tenaga kerja yang tersedia, cara hidup penduduk dalam pertanian, transfer teknologi, dan pengembangan teknologi lainnya.

Tidak dapat dimungkiri, sektor industri adalah motor penggerak perekonomian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor penting untuk meningkatkan perekonomian. Rasio PDRB industri pengolahan mengalami penurunan pada periode tahun 2020-2022, di mana pada tahun 2020 capaian sebesar 4,49 % (empat koma empat puluh sembilan persen) menurun menjadi 4,24 % (empat koma dua puluh empat persen pada tahun 2021, dan menurun lagi pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,47 % (tiga koma empat puluh tujuh persen). Rasio PDRB industri pengolahan berhasil membaik pada tahun 2023, meningkat menjadi 4,16 % (empat koma enam belas persen), dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,04 % (lima koma nol persen).

Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat kontribusi pembangunan perekonomian yang meningkat, walaupun masih di bawah rasio PDRB industri pengolahan. Capaian rasio PDRB sektor tersebut sebesar 0,34 % (nol koma tiga puluh empat persen) pada tahun 2020, dan meningkat hingga mencapai 0,37 % nol koma tiga puluh tujuh persen pada tahun 2024.

Peningkatan itu mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam sektor penyediaan akomodasi (hotel dan penginapan) serta makan minum,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang dapat berkaitan dengan meningkatnya kunjungan, konsumsi lokal, serta inovasi pelayanan di bidang pariwisata dan kuliner.

Tabel 2.44.

Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Lapangan Usaha	Rasio PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	4,49	4,24	3,47	4,16	5,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,29	0,23	0,32	0,37

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2020–2024. Kunjungan wisatawan mancanegara yang sempat menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 46 (empat puluh enam) orang, kembali mengalami pemulihan setelah pandemi. Pada tahun 2022 angka tersebut meningkat menjadi 632 (enam ratus dua puluh tiga) orang, lalu melonjak menjadi 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) orang pada tahun 2023, dan mencapai 3.803 (tiga ribu delapan ratus tiga) orang pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya mobilitas internasional serta semakin dikenalnya destinasi wisata Daerah di pasar global.

Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan nusantara tetap menjadi penyumbang terbesar dengan fluktuasi yang dipengaruhi kondisi sosial ekonomi dan kebijakan perjalanan nasional. Pada tahun 2020 tercatat 692.689 (enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan) kunjungan, sedikit menurun menjadi 617.018 (enam ratus tujuh belas ribu delapan belas) pada tahun 2021, namun meningkat pesat menjadi 1.041.254 (satu juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat) kunjungan pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya di 1.530.444 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh empat) kunjungan pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan tercatat 1.215.549 (satu juta dua ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh sembilan), tetap menunjukkan tingginya minat wisatawan domestik terhadap destinasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa sektor pariwisata Daerah terus tumbuh dan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.45.

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	557	46	632	1.530	3.803
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	692.689	617.018	1.041.254	1.530.444	1.215.549

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Return on Assets (ROA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dengan aset total yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui tingkat ROA, maka perusahaan dapat mengetahui tingkat produktivitasnya jika dibandingkan dengan perusahaan lain, sehingga dapat dimanfaatkan untuk rencana strategis dalam mencapai sasaran pembangunan Daerah.

Berikut ini merupakan data ROA BUMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode tahun 2020-2023. Pada periode tahun 2020-2023, ROA BUMD menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Pada tahun 2020, BUMD mencatat ROA negatif sebesar -1,77 % (minus satu koma tujuh puluh tujuh persen), kemudian mengalami penurunan tajam pada 2021 dengan ROA negatif sebesar -11,92 % (minus sebelas koma sembilan puluh dua persen). Hal ini menunjukkan adanya kerugian signifikan dan masalah inefisiensi dalam penggunaan aset. Pada tahun 2023 ROA BUMD berhasil meningkat menjadi 12,76 % (dua belas koma tujuh puluh enam persen).

Tabel 2.46.

Return on Asset BUMD

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Laba Bersih (Rp)	Aset Total (Rp)	ROA (%)
2020	-9.712.365.395	548.084.298.154	-1,77
2021	-57.264.404.103	480.466.173.402	-11,92
2022	51.839.994.612	567.901.723.358	9,13
2023	78.685.315.262	616.447.112.823	12,76
2024	69,921,075,763	618,802,509,942	11,00

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan untuk mengidentifikasi penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam aktivitas produktif. Menurut BPS, TPAK dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. tinggi, jika TPAK ≥ 70 (tujuh puluh ke atas);
2. sedang, jika 50 < TPAK < 70 (antara lima puluh dan tujuh puluh); dan
3. rendah, jika TPAK ≤ 50 (lima puluh ke bawah).

Gambar di bawah menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Daerah periode tahun 2020-2024. TPAK mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, termasuk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. TPAK Daerah pada tahun 2020 mencapai 61,98 % (enam puluh satu koma sembilan puluh delapan persen) akibat pandemi *Covid-19*, kemudian pulih dan meningkat kembali hingga pada tahun 2023 yang mencapai angka 65,32 % (enam puluh lima koma tiga puluh dua persen). Namun pada tahun 2024 menurun menjadi 65,19 % (enam puluh lima koma sembilan belas persen).

Gambar 2.27.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

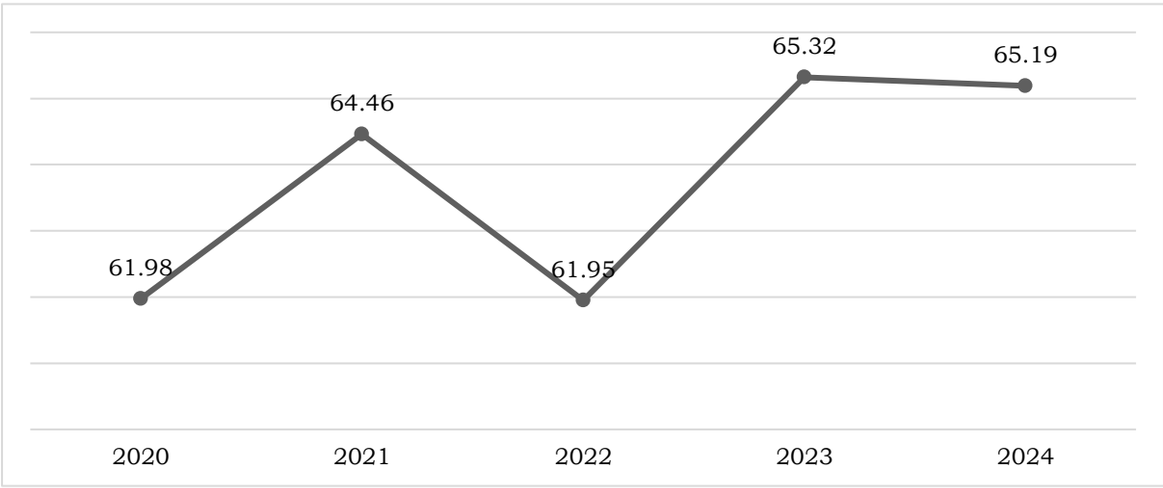

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2024

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah alat untuk mengukur tingkat inovasi dan kemajuan di suatu wilayah seperti provinsi, atau kabupaten/kota. Tujuan perhitungan dari indeks ini adalah untuk menilai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam mengembangkan inovasi di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik.

Indeks tersebut dapat membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mendorong inovasi pembangunan Daerah. Capaian IID dapat dibedakan dalam empat kategori sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.47.

Kategori Penilaian Indeks Inovasi Daerah

Range Nilai	Kategori
0	Tidak Dapat Dinilai
0,01 - 34,99	Kurang Inovatif
35,00 - 60,00	Inovatif
60,01 - 100,00	Sangat Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, IID Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang positif. Pada periode tahun 2021-2024, IID Kutai Kartanegara masuk dalam kategori Inovatif. IID tersebut terus meningkat dengan rincian sebagimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.48.

Indeks Inovasi Daerah (IID)

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021-2024

Uraian	Indeks Inovasi Daerah			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kutai Kartanegara	41,38	55,83	58,69	58,59
Kategori	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021-2024

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif menggambarkan besaran partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan nilai tambah. Data realisasi menunjukkan peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang signifikan, dari 870 (delapan ratus tujuh puluh) orang pada tahun 2021, kemudian naik menjadi 1.501 (seribu lima ratus satu orang) pada tahun 2022, pada tahun 2023 naik lagi menjadi 2.531 (dua ribu lima ratus tiga puluh satu) orang dan pada tahun 2024 menjadi 4.385 (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima) orang. Hal tersebut menunjukkan mulai terbangunnya ekosistem ekonomi kreatif yang lebih terstruktur yang didorong oleh dukungan kebijakan, program pelatihan, serta akses pasar yang membaik.

Sementara itu, Rasio Kewirausahaan merupakan indikator yang mengukur proporsi jumlah wirausahawan terhadap jumlah penduduk produktif. Meskipun pada periode tahun 2020–2021 datanya belum tersedia, namun rasionya tercatat sebesar 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pada tahun 2022, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2023 yaitu 10,45 (sepuluh koma empat puluh lima), dan mengalami peningkatan menjadi 14,62 (empat belas koma enam puluh dua) pada tahun 2024. Tren peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengindikasikan adanya pertumbuhan kewirausahaan secara riil, yang sangat penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Kutai Kartanegara terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian Daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tetap berkelanjutan. Capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan terlihat dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kondisi sektor ekonomi pertanian dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam periode tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mencapai 0,54 % (nol koma lima puluh empat persen), kemudian meningkat menjadi 1,11 % (satu koma sebelas persen) pada tahun 2021. Terjadi peningkatan kembali menjadi 1,91 % (satu koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 2,91 % (dua koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai puncaknya sebesar 2,94 % (dua koma sembilan puluh empat persen) pada tahun 2024. Dari sisi kontribusi pertanian terhadap perekonomian, distribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebesar 14,91 % (empat belas koma sembilan puluh satu persen) menurun menjadi 13,49 % (tiga belas koma empat puluh sembilan persen) pada tahun 2021, kemudian menurun drastis pada tahun 2022 yaitu 10,72 % (sepuluh koma tujuh puluh dua persen), dan berhasil mengalami pemulihan pada tahun 2023 sebesar 13,12 % (tiga belas koma dua belas persen) dan 14,48 % (empat belas koma empat puluh delapan persen) pada tahun 2024.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.49.
Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	14,91	13,49	10,72	13,12	14,48
2	LPE PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,54	1,11	1,91	2,91	2,94

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui *e-commerce, fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem *telemedicine*. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Perwujudan transformasi digital suatu daerah antara lain dapat ditinjau dari pencapaian ekonomi sektor informasi dan komunikasi. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pertumbuhan ekonomi sektor tersebut cukup baik dan secara umum berada di atas pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian pertumbuhan ekonomi kategori informasi dan komunikasi pada tahun 2024 sebesar 8,31 % (delapan koma tiga puluh satu persen), dengan struktur ekonomi sebesar 0,87 % (nol koma delapan puluh tujuh persen).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.50.
Capaian Perekonomian Sektor Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	8,94	8,76	6,98	7,74	8,31
Distribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	0,86	0,79	0,63	0,79	0,87

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan Daerah mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang berdaya saing, serta memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok global. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, arah pembangunan ini tercermin melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB menurut pengeluaran.

Kontribusi PMTB dalam struktur ekonomi Daerah tetap menjadi salah satu penopang utama pembangunan, meskipun mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, kontribusi PMTB tercatat sebesar 38,41 % (tiga puluh delapan koma empat puluh satu persen), meningkat menjadi 44,83 % (empat puluh empat koma delapan puluh tiga persen) pada tahun 2024. Dari sisi pertumbuhan, PMTB mengalami peningkatan signifikan yaitu 8,16 % (delapan koma enam belas persen) pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,80 % (nol koma delapan persen), mengalami penurunan bahkan mencapai angka 4,12 % (empat koma dua belas persen) pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya penurunan investasi dan pembangunan fisik pasca pandemi.

Sementara itu, kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi, namun cenderung membaik. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 45,12 % (empat puluh lima koma dua belas persen), menurun tajam menjadi 38,00 % (tiga puluh delapan persen) pada tahun 2024. Terjadi fluktuasi juga pada pertumbuhan net ekspor barang dan jasa, pada tahun 2020 sebesar 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen) kemudian menurun tajam pada tahun 2021 menjadi 0,16 % (nol koma enam belas persen), kembali meningkat menjadi 6,23 % (enam koma dua puluh tiga persen) pada tahun 2024.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.51.
Pembentukan Modal Tetap Bruto
dan Net Ekspor Barang dan Jasa
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,80	8,16	7,75	10,53	4,12
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	6,73	0,16	1,29	0,19	6,23
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,41	36,29	30,48	41,52	44,83
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	45,12	49,60	58,28	43,17	38,00

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Perkembangan investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup baik. Kabupaten Kutai Kartanegara kini semakin menarik perhatian investor berkat posisinya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kemudahan iklim usaha yang ditawarkan.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) meningkat, angka realisasi terakhir pada tahun 2024 sebesar Rp16.410.000.000.000,00 (enam belas triliun empat ratus sepuluh miliar rupiah). Selain itu, realisasi investasi sektor ekonomi non ekstraktif, yang menjadi basis perekonomian, yang menjadi sektor unggulan juga meningkat, dengan realisasi terakhir pada tahun 2024 sebesar Rp5.390.000.000.000,00 (lima triliun tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Tabel 2.52.
Capaian Investasi
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	1,69	36,22	90,63	51,38	-29,18
Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	1,69	36,22	90,63	51,38	10,85
Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (juta rupiah)	3.704.869	5.131.879	9.782.835	14.809.258.	16.415.888
Pertumbuhan realisasi investasi sektor ekonomi non ekstraktif	- 36,63	- 59,08	467,87	55,16	39,34

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi investasi sektor ekonomi non ekstraktif (juta rupiah)	1.073.438	439.297	2.494.655	3.870.777	5.393.734
Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu	88,73	90,04	91,35	91,96	91,96

Sumber: DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara, 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana infrastruktur mampu memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien.

Secara umum, nilai IKLI komposit pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 79,15 (tujuh puluh sembilan koma lima belas) menjadi 76,24 (tujuh puluh enam koma lima belas). Terjadi penurunan nilai pada setiap sektor tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut terjadi antara lain karena sub komponen penyusun IKLI seperti kontribusi penyerapan tenaga kerja lokal yang masih minim, sehingga untuk meningkatkan nilai IKLI dibutuhkan perencanaan penggunaan tenaga kerja lokal sebagai SDM yang dapat digunakan secara optimal.

Tabel 2.53.
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023–2024

No	Sektor dan Sub-Sektor Pelayanan	Unsur IKLI					Nilai IKLI	2024
		U1	U2	U3	U4	U5	2023	
1	Pendidikan						92,78	-
	PAUD	18,28	17,97	18,16	18,35	18,35	91,10	-
	SD	18,98	18,76	18,90	19,04	19,06	94,74	-
	SLTP	18,81	18,76	18,84	18,99	18,91	94,32	-
	SLTA	18,12	18,12	18,25	18,29	18,20	90,97	-
2	Kesehatan						83,43	-
	Posyandu	18,35	18,14	18,42	18,57	18,56	92,04	-
	Pustu	16,94	16,85	16,71	16,73	16,82	84,05	-
	Puskesmas	18,39	18,36	18,32	18,30	18,22	91,58	-
	Klinik	14,67	14,59	14,60	14,61	14,46	72,93	-
	Rumah Sakit	15,26	15,35	15,31	15,40	15,26	76,56	-
3	Pekerjaan Umum						70,14	-
	Jalan Desa	15,74	14,80	15,25	15,44	15,38	76,61	-
	Jalan Usahatani	12,81	12,50	12,63	12,76	12,84	63,54	-
	Jalan ke Kecamatan	17,36	16,94	17,15	17,30	17,31	86,07	-
	Jalan ke Kabupaten	17,27	16,64	16,83	17,19	17,06	84,99	-

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Sektor dan Sub-Sektor Pelayanan	Unsur IKLI					Nilai IKLI	2024
		U1	U2	U3	U4	U5	2023	
	Jembatan	16,17	15,95	16,12	16,18	16,21	80,62	-
	Embung	9,37	9,27	9,33	9,35	9,29	46,62	-
	Irigasi	10,74	10,44	10,48	10,49	10,40	52,54	-
4	Perumahan dan Permukiman						83,02	-
	Air Bersih	17,97	17,71	17,84	17,87	17,93	89,33	-
	Drainase	11,97	11,73	11,85	11,93	11,96	59,44	-
	Persampahan	14,73	14,58	14,64	14,66	14,51	73,12	-
	Listrik	20,12	20,06	20,03	20,07	20,10	100,00	-
	Telekomunikasi	18,63	18,42	18,51	18,62	18,63	92,81	-
5	Sektor Pendukung						66,13	-
	Pasar	16,06	15,72	16,01	16,12	16,34	80,25	-
	Pariwisata	14,45	14,40	14,41	14,43	14,48	72,17	-
	Bumdes	13,02	12,99	12,91	12,82	12,73	64,47	-
	Koperasi	9,71	9,53	9,52	9,60	9,29	47,63	-
6	Sektor Infrastruktur Transportasi	-	-	-	-	-	-	-
	IKLI Komposit						79,15	76,24

Sumber : Dokumen IKLI Kutai Kartanegara, 2023

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah Indeks Komposit yang terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM dikembangkan berdasarkan konsep bahwa untuk mencapai desa yang maju dan mandiri, diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang saling melengkapi dan memperkuat potensi serta kemampuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa.

IDM Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, nilai IDM sebesar 0,6840 (nol koma enam ribu delapan ratus empat puluh) kemudian pada tahun 2024 nilainya menjadi 0,7969 (nol koma tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan). Jumlah desa yang menyandang predikat mandiri meningkat pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pada tahun 2024, tercatat sudah 87 (delapan puluh tujuh) dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) desa atau 45,07 % (empat puluh lima koma nol tujuh persen) berstatus desa mandiri. Sisanya adalah 43 % (empat puluh tiga persen) berstatus maju, dan 11,91 % (sebelas koma sembilan puluh satu persen) berstatus berkembang. Peningkatan ini juga terjadi pada predikat desa maju, sehingga saat ini proporsi desa maju dan desa mandiri telah mencapai 88,08 % (delapan puluh delapan koma nol delapan persen). Jika

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tren peningkatannya bertahan untuk tahun-tahun berikutnya, ada kemungkinan di tahun-tahun berikutnya hampir seluruh desa di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berstatus maju atau mandiri.

Tabel 2.54.

Pembangunan Desa

di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Mandiri	12	24	46	76	87
Jumlah Desa Maju	47	64	73	69	83
Jumlah Desa Berkembang	113	98	74	48	23
Jumlah Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
Jumlah Desa	193	193	193	193	193
Persentase Desa Mandiri	6,22	12,44	23,83	39,38	45,07
Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri	30,57	45,60	61,66	75,13	88,08
Nilai IDM	0,6840	0,6846	0,7465	0,7759	0,7969
Status IDM	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju

Sumber: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2024

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi berdasarkan statusnya yaitu jalan kabupaten sepanjang 2.193,02 km (dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma nol dua kilometer) di tahun 2020, jalan provinsi sepanjang 246,19 km (dua ratus empat puluh enam koma sembilan belas kilometer) berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 622 Tahun 2018, dan jalan nasional sepanjang 335,95 km (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh lima kilometer) berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 290 Tahun 2015.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proporsi jalan dalam kondisi mantap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, proporsinya mencapai 57,52 % (lima puluh tujuh koma lima puluh dua persen) atau 1.261,44 km (seribu dua ratus enam puluh satu koma empat puluh empat kilometer). Kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 65,50 % (enam puluh lima koma lima puluh persen) atau 2.193 km (dua ribu seratus sembilan puluh tiga kilometer). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 proporsi jalan dalam kondisi mantap menurun menjadi 63,20 % (enam puluh tiga koma dua puluh persen) atau 2.196,94 km (dua ribu seratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat kilometer). Hal ini mencerminkan pentingnya infrastruktur dasar untuk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

meningkatkan konektivitas dan pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemantapan jalan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020- 2021, terjadi penurunan, yang kemudian diikuti dengan kenaikan kembali pada periode tahun 2022-2023, serta kembali menurun pada tahun 2024.

Tabel 2.55.
Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Uraian Indikator Jalan	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (%)	63,39	57,52	61,49	65,50	63,20
Jumlah Panjang Jalan Kewenangan Kab/Kota dalam Kondisi Mantap (kilometer)	1.390,34	1.261,44	1.348,54	2.193,00	2.196,94

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2024

Status jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten dengan panjang jalan 2.196,94 km (dua ribu seratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat kilometer), Jalan Provinsi dengan panjang jalan 246,19 km (dua ratus empat puluh enam koma sembilan belas kilometer), dan Jalan Nasional dengan panjang jalan 335,95 km (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh lima kilometer). Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun. Artinya, dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, maka kepadatan lalu-lintas semakin bertambah.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada periode tahun 2023-2024 sebesar 1,82 % (satu koma delapan puluh dua persen), sehingga rasionya menjadi sebesar 0,00382 (nol koma nol nol tiga ratus delapan puluh dua).

Tabel 2.56.
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan	2.196,94	2.196,94	2.196,94	2.196,94	2.196,94
2	Jumlah Kendaraan	513.935	522.913	713.369	586.007	575.368
3	Rasio	0,00427	0,00420	0,00308	0,00375	0,00382

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Kebutuhan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara berasal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dari Sungai Mahakam. Proporsi rumah tangga yang menggunakan air bersih dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah.

Sumber air bersih di antaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air ledeng, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga atau masyarakat suatu daerah.

Menurut data terbaru yaitu data tahun 2025, jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rumah tangga total di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.57.
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	87,90	70,85	89,328	82,18	80,20
Jumlah Total Rumah Tangga Berakses Air Minum	117.198	121.926	131.920	161.911	156.924
Jumlah Rumah Tangga Total	185.433	185.433	172.099	197.028	185.433
Penduduk Berakses Air Minum	468.792	487.704	527.680	647.645	627.696
Jumlah Penduduk	729.382	733.626	738.189	788.113	789.767
Rasio (%)	64,27	66,48	71,48	82,18	79,48

Sumber: Dinas Perumahan & Pemukiman / PDAM, 2025

Berdasarkan data *Backlog* Perumahan tahun 2025 yang bersumber dari Aplikasi Lentera Hijau, total *backlog* di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) unit, yang terdiri atas 405 (empat ratus lima) *backlog* hunian dan 447 (empat ratus empat puluh tujuh) backlog kepemilikan. Data yang tersedia saat ini mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, dan Loa Janan. Pada Kecamatan Tenggarong Seberang, *backlog* tercatat di Desa Manunggal Jaya, Bangun Rejo, dan Karang Tunggal. Di Kecamatan Muara Jawa, *backlog* teridentifikasi di Desa Muara Jawa Ulu, Muara Jawa Ilir, dan Muara Jawa Tengah. Sementara itu, Kecamatan Anggana meliputi Desa Sungai Meriam dan Sidomulyo, serta Kecamatan Muara Badak mencakup Desa Badak Baru dan Gas Alam. Adapun pada Kecamatan Loa Janan, *backlog* tercatat di Desa Loa Janan Ulu. Mengingat data baru mencakup sebagian wilayah, pemutakhiran dan perluasan pendataan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penting untuk memperoleh gambaran *backlog* perumahan yang lebih

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

komprehensif dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan perumahan ke depan.

2.1.3.7 Ekonomi Makro

Secara umum kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari PDRB komponen pengeluaran yang dihitung berdasarkan nilai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Data PDRB dapat menggambarkan pola konsumsi rumah tangga, peran pemerintah dalam mendukung pembangunan, tingkat investasi daerah serta daya saing perdagangan daerah. Hal ini dapat terlihat dari distribusi proporsi PDRB menurut komponen pengeluaran yang menunjukkan proporsi masing-masing komponen pengeluaran terhadap PDRB total.

Laju inflasi menjadi ukuran untuk menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, tarikan dari sisi permintaan *(demand pull inflation)*, dan dari ekspektasi inflasi.

Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah *(administered price)*, dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya.

Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total *(aggregate demand)* yang lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dalam rangka pengendalian inflasi Daerah, maka dapat dilakukan perhitungan indikator *proxy* inflasi, indikator yang biasa digunakan adalah Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH Daerah pada periode tahun 2020-2022 cenderung naik, IPH Daerah pada tahun 2020 sebesar 1,04 % (satu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

koma nol empat persen). Pada tahun 2021 dan 2022 terus naik menjadi 2,05 % (dua koma nol lima persen) dan 5,13 % (lima koma tiga belas persen).

Pada tahun 2023 kembali turun menjadi 2,83 % (dua koma delapan puluh tiga persen) dan terus menurun hingga 1,53 % (satu koma lima puluh tiga persen) pada tahun 2024. Selama 4 (empat) tahun, kondisi IPH di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik. Jika dilihat kondisi per tahun, maka IPH cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

Gambar 2.28.
Indeks Perkembangan Harga
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

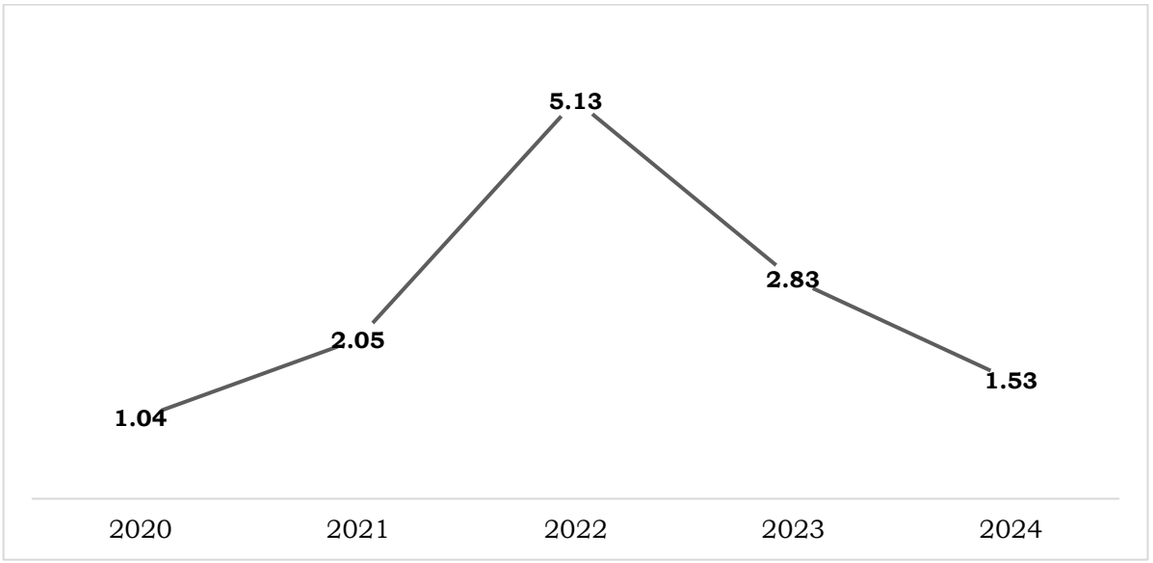

Sumber: Diskominfo dan BPS, 2020-2024

Data rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Daerah periode 2020-2023 menunjukkan fluktuasi yang dalam. Pada tahun 2020, rasio ini meningkat tajam menjadi 0,07 % (nol koma nol tujuh persen). Pada tahun 2021, rasio turun menjadi 0,06 % (nol koma nol enam persen) meskipun penerimaan Pajak Daerah meningkat, karena PDRB juga mengalami peningkatan signifikan.

Pada tahun 2022, rasio masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu 0,06 % (nol koma nol enam persen) meskipun PDRB meningkat tajam, karena peningkatan penerimaan Pajak Daerah tidak cukup besar untuk mempertahankan rasio yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, rasio sedikit naik menjadi 0,07 % (nol koma nol tujuh persen) dan pada tahun 2024 rasio juga meningkat menjadi 0,08 % (nol koma nol delapan persen) bersamaan dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

peningkatan pada penerimaan Pajak Daerah dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk PDRB pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini mencerminkan variasi dalam kontribusi pajak terhadap ekonomi Daerah, yang dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan pajak, efisiensi pemungutan pajak, dan perubahan dalam basis ekonomi Daerah. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB, yang bisa mencerminkan pengelolaan pendapatan Daerah yang lebih baik atau peningkatan dalam kepatuhan pajak.

Tabel 2.58.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (juta rupiah)	PDRB (juta rupiah)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2020	110.440	149.043.577,93	0,07
2021	114.970	177.416.584,16	0,06
2022	142.750	240.392.589,80	0,06
2023	133.990	204.876.164,54	0,07
2024	165.807	204.700.140,77	0,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pertumbuhan PDRB ekonomi non-ekstraktif di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren positif sepanjang periode tahun 2020–2024. Setelah mengalami kontraksi -0,30 % (minus nol koma tiga puluh persen) pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, kinerja ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 2,87 % (dua koma delapan puluh tujuh persen) pada tahun 2021 dan meningkat signifikan menjadi 5,32 % (lima koma tiga puluh dua persen) pada tahun 2022. Perbaikan ekonomi semakin kuat pada tahun 2023 dengan pertumbuhan mencapai 7,21 % (tujuh koma dua puluh satu persen), dan terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian *baseline* sebesar 7,88 % (tujuh koma delapan puluh delapan persen). Tren ini menunjukkan bahwa sektor-sektor non-ekstraktif seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa semakin berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.59.
Pertumbuhan PDRB Ekonomi Non Ekstraktif
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Indikator	Satuan	Realisasi				*Baseline* (2024)
		2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDRB Ekonomi Non Ekstraktif	Persen	-0,30	2,87	5,32	7,21	7,88

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, diolah, 2025

Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN di Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis selama tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan investasi tercatat relatif rendah sebesar 1,69 % (satu koma enam puluh sembilan persen), namun melonjak drastis menjadi 36,22 % (tiga puluh enam koma dua puluh dua persen) pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 90,63 % (sembilan puluh koma enam puluh tiga persen). Kondisi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi Daerah setelah masa pemulihan ekonomi. Namun pada 2023, pertumbuhan menurun ke angka 51,38 % (lima puluh satu koma tiga puluh delapan persen) dan kembali mengalami kontraksi pada tahun 2024 dengan *baseline* -29,18 % (minum dua puluh sembilan koma delapan belas persen). Penurunan ini menunjukkan perlunya penguatan kembali strategi promosi investasi, penyederhanaan perizinan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan penunjang untuk menjaga keberlanjutan arus investasi di Daerah.

Tabel 2.60.
Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Indikator	Satuan	Realisasi				*Baseline* (2024)
		2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	Persen	1,69	36,22	90,63	51,38	-29,18

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi birokrasi adalah usaha untuk memperbarui dan mengubah secara mendasar atas sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sumber daya manusia aparatur. Seiring perkembangannya, reformasi birokrasi menjadi standar bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menilai tata kelola organisasi secara umum.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks ini juga mencerminkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan oleh instansi tersebut, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, bebas dari kolusi-korupsi-nepotisme (KKN), dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan pemerintahan, serta semakin bersih dari KKN dan berkualitas pelayanan publiknya. Penilaian IRB dapat dibedakan dalam tujuh kategori berikut.

Tabel 2.61.

Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

Range Nilai	Kategori	Keterangan
> 90 - 100	AA	Istimewa
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	C	Cukup Memadai
> 30 - 50	C-	Kurang
> 0 - 30	D	Sangat Kurang

Sumber: Kementerian PAN-RB

Perkembangan IRB di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung tidak mengalami banyak peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, selalu masuk dalam kategori nilai B (Baik). Tabel berikut menunjukkan perkembangan IRB di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data tersebut menggambarkan bahwa tingkat reformasi birokrasi berkembang dengan cukup baik. Namun, untuk tata kelola pemerintahan secara umum, IRB tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengembangan Daerah agar lebih baik. Skor IRB dapat ditingkatkan seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan di Daerah secara umum.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.62.

Indeks Reformasi Birokrasi

di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi	Keterangan
2020	61,09	B (Baik)
2021	60,95	B (Baik)
2022	62,74	B (Baik)
2023	60,12	B (Baik)
2024	71,51	BB (Sangat Baik)

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indikator untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia, berdasarkan pada berbagai aspek seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme sdm, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Indikator-indikator dalam indeks ini disusun dengan menggabungkan enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas) dengan enam aspek penilaian kinerja instansi.

Hasil akhir dari IPP dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kondisi pelayanan publik di berbagai instansi. Nilai akhir ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan, dengan menunjukkan aspek-aspek yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki. Capaian IPP dapat dibedakan dalam sembilan kategori sebagai berikut.

Tabel 2.63.

Kategori Penilaian Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Keterangan
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51 – 2,00	D	Buruk
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
0 – 1,00	F	Gagal

Sumber: Kementerian PAN-RB

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Menurut data Kementerian PANRB, IPP Nasional menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2020-2022. Nilainya menunjukkan tren yang meningkat dengan keterangan B (Baik). Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan nilai akhir 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh). Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, sejak tahun 2020, rata-rata capaian IPP berada pada kategori B- (Baik Dengan Catatan) dan B (Baik), dengan rentang nilai antara 3,25 (tiga koma dua puluh lima) hingga 4,00 (empat). Data tersebut menunjukkan perkembangan IPP di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan IPP yang sangat positif dibandingkan dengan tingkat nasional maupun provinsi. Rata-rata capaian IPP Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun selalu di atas IPP nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2020, capaian IPP Kutai Kartanegara cukup fluktuatif, namun cenderung membaik, dengan nilai 4,09 (A-, Sangat Baik) pada tahun 2020, meningkat menjadi 4,59 (A, Pelayanan Prima) pada tahun 2021, dan 4,56 (A, Pelayanan Prima) pada tahun 2022. Namun, ada sedikit penurunan pada tahun 2023 dengan nilai 4,24 (A-, Sangat Baik) menjadi 4,35 (A-, Sangat Baik) pada tahun 2024.

Tabel 2.64.
Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional
Tahun 2020–2024

Tahun	Kabupaten Kutai Kartanegara
2020	4,09
2021	4,59
2022	4,56
2023	4,24
2024	4,35

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

Secara keseluruhan, data di atas menunjukkan bahwa tingkat pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkembang dengan sangat baik. Nilai IPP yang selalu berada di kategori A (Pelayanan Prima) dan A- (Sangat Baik) mencerminkan kinerja yang optimal dalam aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Penilaian baik buruknya kinerja atas pengelolaan keuangan daerah bisa terlihat melalui penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi sebuah hal yang sangat penting agar uang negara dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan.

BPK biasa melakukan penilaian dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP adalah opini audit yang dikeluarkan oleh BPK terkait dengan pengelolaan keuangan suatu lembaga pemerintah yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dikelola secara akuntabel.

Tabel 2.65.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Opini BPK	
Tahun	Predikat
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP
2024	WTP

Sumber: RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Selama 5 (lima) tahun berturut-turut, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Terhitung sejak tahun 2020, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapatkan opini WTP dan berlanjut di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2024. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah semakin baik. Artinya, dalam pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui pengaturan pendapatan yang teratur, pengelolaan belanja yang tertib, serta pengelolaan aset daerah yang disiplin.

Kualitas pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat juga melalui beberapa indikator. Berdasarkan LKE-RB Kutai Kartanegara pada 2024, tingkat maturitas SPIP sebesar 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh), nilai SAKIP sebesar 65,93 (enam puluh lima koma sembilan puluh tiga), indeks reformasi hukum sebesar 87,86 (delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam), indeks sistem merit sebesar 222 (dua ratus dua puluh dua), indeks SPBE sebesar 3,09 (tiga koma nol sembilan), serta survei penilaian integritas sebesar 67,14 (enam puluh tujuh koma empat belas).

Tabel 2.66.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Data LKE-RB

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	65,6	66,35	67,4	67,86	65,93
2	Indeks SPBE	2,97	2,48	1,94	2,54	3,09
3	Indeks Reformasi Hukum	n.a	n.a	n.a	66,65	87,86
4	Indeks Sistem Merit	n.a	n.a	n.a	215	222
5	Survei Penilaian Integritas	n.a	72,06	67,22	67,69	67,14

Sumber: LKE RB, 2020-2024

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode satu tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya.

Data angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka semakin aman. Dalam masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi.

Diukur dengan menggunakan pendekatan perhitungan risiko tindak kejahatan per 100.000 (seratus ribu) penduduk *(crime rate)*, tren angka *crime rate* Daerah pada tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2022 angka *crime rate* sebesar 56 (lima puluh enam) dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 82 (delapan puluh dua), kemudian kembali menurun menjadi 33 (tiga puluh tiga) pada tahun 2024. Berikut perkembangan *crime rate* Daerah tahun 2020-2024.

Tabel 2.67.

Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	734.485	753.862	765.284	788.113	789.767
Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total)	460	n.a	430	646	728

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Crime Rate/100.000 Penduduk	72	126	71	70	106
Persentase Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, 2024

2.1.4.3 Ketangguhan Pemerintah Daerah

Untuk melihat tingkat daya saing Daerah, digunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks ini merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks ini, mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum*. IDSD terdiri dari 4 (empat) komponen pembentuk yaitu, lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem investasi yang diterjemahkan ke dalam 12 (dua belas) pilar. Adapun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

Tabel 2.68.

Skor Indeks Daya Saing Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Institusi	4,29	4,21	4,43
Pilar Infrastruktur	2,70	2,56	3,87
Pilar Adopsi TIK	2,82	3,85	3,90
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	4,10	3,61	4,51
Pilar Kesehatan	4,08	4,05	3,98
Pilar Keterampilan	3,30	3,81	4,15
Pilar Pasar Produk	0,64	0,59	1,93
Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,03	3,78	3,29
Pilar Sistem Keuangan	2,60	1,11	1,58
Pilar Ukuran Pasar	5,00	5,00	5,00
Pilar Dinamisme Bisnis	5,00	2,94	3,81
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,87	1,55	1,75
Indeks Daya Saing Daerah	3,20	3,09	3,52

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Tabel 2.69.

Data Indeks Daya Saing Daerah

se-Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024

Nama Daerah	2022	2023	2024
Provinsi Kalimantan Timur	3,27	3,3	3,37
Paser	2,87	2,86	3,31
Kutai Barat	-	2,75	3,44
Kutai Kartanegara	3,20	3,09	3,52

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kutai Timur	3,02	2,78	3,17
Berau	-	2,92	3,47
Penajam Paser Utara	2,76	2,99	3,33
Mahakam Ulu	-	2,37	2,83
Kota Balikpapan	3,71	3,6	4,07
Kota Samarinda	3,6	3,79	4,15
Kota Bontang	3,13	3,19	3,58

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

2.1.4.4 Evaluasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, dapat disimpulkan:

a. Kinerja makro pembangunan Daerah periode tahun 2019–2024 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 2,89% (dua koma delapan puluh sembilan persen), dari 73,78 (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh delapan) pada tahun 2019 menjadi 75,91 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh satu) pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan sedikit naik dari 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) pada tahun 2019 menjadi 7,28% (tujuh koma dua puluh delapan persen) pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yaitu 9,03 % (sembilan koma nol tiga persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun signifikan, dari 5,79 % (lima koma tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2019 menjadi 4,05% (empat koma nol lima persen) pada tahun 2023, lebih rendah dari rata- rata provinsi yaitu 5,31 % (lima koma tiga puluh satu persen) dan nasional yaitu 5,32 % (lima koma tiga puluh dua persen). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sedikit menurun dari 3,92 % (tiga koma sembilan puluh dua persen) pada tahun 2019 menjadi 3,86 % (tiga koma delapan puluh enam persen) pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yaitu 4,95 % (empat koma sembilan puluh lima persen) dan provinsi yaitu 7,26% (tujuh koma dua puluh enam persen). Indeks Gini meningkat dari 0,278 (nol koma dua ratus tujuh puluh delapan) pada tahun 2019 menjadi 0,284 (nol koma dua ratus delapan puluh empat) pada tahun 2023. PDRB per kapita mengalami kenaikan signifikan, dengan PDRB per kapita ADHB meningkat 27,24 % (dua puluh tujuh koma dua puluh empat persen) dan PDRB per kapita ADHK meningkat 7,96 % (tujuh koma sembilan puluh enam persen).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Capaian Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Tahun 2022-2026:

1) Pada tahun 2022, beberapa indikator kinerja mencapai hasil yang sangat tinggi, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 101,19% (seratus satu koma sembilan belas persen), Indeks Pembangunan Manusia sebesar 99,11 % (sembilan puluh sembilan koma sebelas persen), Tingkat Kebahagiaan sebesar 111,03% (seratus sebelas koma nol tiga persen), Laju Pertumbuhan PDRB Non-migas dan Batubara sebesar 143,05% (seratus empat puluh tiga koma nol lima persen), Indeks Kesulitan Geografis sebesar 100,00% (seratus persen), Persentase Penurunan Emisi GRK sebesar 183,20% (seratus delapan puluh tiga koma dua puluh persen), Tingkat Kemiskinan tercatat pada angka 84,64% (delapan puluh empat koma enam puluh empat persen). Namun demikian, capaian Persentase Kawasan Kumuh tidak dapat dianalisis karena perbedaan metode perhitungan antara target dan realisasi.

2) Pada tahun 2023, beberapa indikator kinerja menunjukkan hasil sangat tinggi, seperti Indeks Reformasi Birokrasi 95,43% (sembilan puluh lima koma empat puluh tiga persen), Indeks Pembangunan Manusia 99,27% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh persen), Tingkat Kebahagiaan 101,42% (seratus satu koma empat puluh dua persen), Laju Pertumbuhan PDRB Non-migas dan Batubara 140,84% (seratus empat puluh koma delapan puluh empat persen), Indeks Kesulitan Geografis 154,80% (seratus lima puluh empat koma delapan puluh persen), dan Persentase Penurunan Emisi GRK 120,20% (seratus dua puluh koma dua puluh persen), Tingkat Kemiskinan tercatat 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen). Namun demikian, capaian Persentase Kawasan Kumuh tidak dapat dievaluasi akibat perbedaan metode perhitungan (untuk tahun 2022).

c. Proyeksi capaian kinerja RPJMD 2026 menunjukkan beberapa indikator yang akan mencapai kategori tercapai, antara lain: Laju Pertumbuhan PDRB Non-migas dan Batubara 130,56 % (seratus tiga puluh koma lima puluh enam persen), Indeks Kesulitan Geografis 149,11 % (seratus empat puluh sembilan koma sebelas persen), dan Persentase Penurunan Emisi GRK 120,20 % (seratus dua puluh koma dua puluh persen). Untuk 4 (empat) indikator lainnya diproyeksikan masuk kategori akan tercapai, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi 85,86% (delapan puluh lima koma

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

delapan puluh enam persen), Indeks Pembangunan Manusia 98,32% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua persen), Tingkat Kebahagiaan 97,36% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh enam persen), dan Tingkat Kemiskinan 80,16% (delapan puluh koma enam belas persen). Namun demikian, capaian pada Persentase Kawasan Kumuh tidak dapat dievaluasi karena perbedaan metode perhitungan antara target yang direncanakan dan realisasi yang tercapai.

d. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026:

1) Pada tahun 2022, sejumlah indikator kinerja pada 16 (enam belas) sasaran menunjukkan hasil sangat tinggi, antara lain: Nilai SAKIP 100,76 % (seratus koma tujuh puluh enam persen), Indeks Persepsi Anti Korupsi 134,08 % (seratus tiga puluh empat koma nol delapan persen), Indeks Persepsi Pelayanan Publik 110,85 % (seratus sepuluh koma delapan puluh lima persen), Indeks Pendidikan 99,13 % (sembilan puluh sembilan koma tiga belas persen), Indeks Pembangunan Kebudayaan 94,84 % (sembilan puluh empat koma delapan puluh empat persen), Indeks Kesehatan 99,88 % (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen), Indeks Pembangunan Gender 101,01 % (seratus satu koma nol satu persen), Indeks Gini 107,24 % (seratus tujuh koma dua puluh empat persen), Indeks Desa Membangun 105,89 % (seratus lima koma delapan puluh sembilan persen), Tingkat Pengangguran Terbuka 116,19 % (seratus enam belas koma sembilan belas persen), PDRB Per Kapita 172,04 % (seratus tujuh puluh dua koma nol empat persen), Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata 162,39 % (seratus enam puluh dua koma tiga puluh sembilan persen), Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 113,91 % (seratus tiga belas koma sembilan puluh satu persen), Tingkat Pertumbuhan Investasi 5,3 % (lima koma tiga persen), Persentase Rumah Layak Huni 103,36 % (seratus tiga koma tiga puluh enam persen), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 98,13 % (sembilan puluh delapan koma tiga belas persen), dan Indeks Risiko Bencana 173,53 % (seratus tujuh puluh tiga koma lima puluh tiga persen). Dua indikator lainnya berada pada kategori tinggi, yaitu Cakupan Layanan Air Bersih 85,84 % (delapan puluh lima koma delapan puluh empat persen) dan Indeks Aksesibilitas Wilayah 89,87 % (delapan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen). Namun demikian, laju

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat sangat rendah, dengan capaian hanya 33,57 % (tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh persen).

2) Pada tahun 2023, beberapa indikator kinerja pada 16 (enam belas) sasaran mencatatkan hasil sangat tinggi, antara lain: Nilai SAKIP 96,94 % (sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat persen), Indeks Persepsi Anti Korupsi 135,85 % (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh lima persen), Indeks Persepsi Pelayanan Publik 110,22 % (seratus sepuluh koma dua puluh dua persen), Indeks Pendidikan 98,71 % (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh satu persen), Indeks Pembangunan Kebudayaan 105,41 % (seratus lima koma empat puluh satu persen), Indeks Kesehatan 99,75 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen), Indeks Pembangunan Gender 102,57 % (seratus dua koma lima puluh tujuh persen), Indeks Gini 98,57 % (sembilan puluh delapan koma lima puluh tujuh persen), Indeks Desa Membangun 107,45 % (seratus tujuh koma empat puluh lima persen), Tingkat Pengangguran Terbuka 112,90 % (seratus dua belas koma sembilan puluh persen), PDRB Per Kapita 141,41 % (seratus empat belas koma empat puluh satu persen), Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata 262,95 % (dua ratus enam puluh dua koma sembilan puluh lima persen), Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 103,82% (seratus tiga koma delapan puluh dua persen), Tingkat Pertumbuhan Investasi 2.969,94 % (dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen), Cakupan Layanan Air Bersih 107,44 % (seratus tujuh koma empat puluh empat persen), Persentase Rumah Layak Huni 103,17 % (seratus tiga koma tujuh belas persen), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 98,56 % (sembilan puluh delapan koma lima puluh enam persen), dan Indeks Risiko Bencana 107,40 % (seratus tujuh koma empat puluh persen). Satu indikator, yaitu Indeks Aksesibilitas Wilayah, berada pada kategori tinggi dengan capaian 89,80 % (delapan puluh sembilan koma delapan puluh persen). Namun demikian, laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih sangat rendah, hanya mencapai 47,32 % (empat puluh tujuh koma tiga puluh dua persen).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3) Proyeksi capaian kinerja RPJMD tahun tahun 2026 menunjukkan beberapa indikator kinerja berhasil mencapai kategori tercapai, antara lain: Indeks Persepsi Anti Korupsi 126,14 % (seratus dua puluh enam koma empat belas persen), Indeks Persepsi Pelayanan Publik 108,40 % (seratus delapan koma empat puluh persen), Indeks Pembangunan Kebudayaan 100,43 % (seratus koma empat puluh tiga persen), Indeks Pembangunan Gender 102,37 % (seratus dua koma tiga puluh tujuh persen), Tingkat Pengangguran Terbuka 101,22 % (seratus satu koma dua puluh dua persen), PDRB Per Kapita 132,26 % (seratus tiga puluh dua koma dua puluh enam persen), Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata 156,03 % (seratus lima puluh enam koma nol tiga persen), Tingkat Pertumbuhan Investasi 2.870,39 % (dua ribu delapan ratus tujuh puluh koma tiga puluh sembilan persen), Cakupan Layanan Air Bersih 102,62 % (seratus dua koma enam puluh dua persen), Persentase Rumah Layak Huni 102,24 % (seratus dua koma dua puluh empat persen), dan Indeks Risiko Bencana 114,30 % (seratus empat belas koma tiga puluh persen).

e. Relevansi Tujuan Terhadap Misi RPJMD Tahun 2022-2026:

1) Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Capaian kinerja Tujuan 1, yang fokus pada peningkatan manajemen birokrasi, berkontribusi signifikan terhadap Misi 1. Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan hasil tinggi, yaitu 101,19 % (seratus satu koma sembilan belas persen) pada tahun 2022 dan 95,43 % (sembilan puluh lima koma empat puluh tiga persen) pada tahun 2023, dengan proyeksi 85,86 % (delapan puluh lima koma delapan puluh enam persen) pada tahun 2026. Reformasi ini meningkatkan efisiensi, percepatan, dan efektivitas pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan publik. Tantangan yang perlu diatasi meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan infrastruktur digital, dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi layanan birokrasi.

2) Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya. Capaian kinerja Tujuan 2 menunjukkan peningkatan IPM, yakni 99,11 % (sembilan puluh sembilan koma sebelas persen) pada tahun 2022 dan 99,27 % (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh persen) pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tahun 2023, dengan proyeksi 98,32 % (sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua persen) pada tahun 2026, yang mendukung daya saing masyarakat. Tantangan utama adalah pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Tujuan 3, yang fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan, tercermin dari peningkatan Tingkat Kebahagiaan (111,03% pada 2022, 101,42% pada 2023) dan penurunan Tingkat Kemiskinan yaitu 84,64 % (delapan puluh empat koma enam puluh empat persen) pada tahun 2022, 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) pada tahun 2023). Tantangan untuk tujuan ini adalah penguatan program berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

3) Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Capaian kinerja Tujuan 4, yang fokus pada perekonomian sektor terbarukan, berkontribusi signifikan terhadap Misi 3 dengan Laju Pertumbuhan PDRB Non-Migas dan Batubara mencapai 143,05 % (seratus empat puluh tiga koma nol lima persen pada tahun 2022 dan 140,84 % (seratus empat puluh koma delapan puluh empat persen) pada tahun 2023, serta proyeksi 130,56 % (seratus tiga puluh koma lima puluh enam persen) pada tahun 2026, yang meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
4) Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah. Capaian kinerja Tujuan 5, yang fokus pada pemerataan infrastruktur dan penataan wilayah, berkontribusi signifikan terhadap Misi 4. Hal ini terlihat dari Indeks Kesulitan Geografis yang mencapai 154,80 % (seratus lima puluh empat koma delapan puluh persen) pada tahun 2023 dan proyeksi 149,11 % (seratus empat puluh sembilan koma sebelas persen) pada tahun 2026, yang menunjukkan peningkatan konektivitas dan pemerataan ekonomi. Penataan wilayah mengurangi disparitas antar kawasan, sementara indikator Kawasan Kumuh tidak dianalisis karena perbedaan metode perhitungan.
5) Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan. Capaian kinerja Tujuan 6, yang berfokus pada pembangunan berwawasan lingkungan, berkontribusi signifikan terhadap Misi 5. Persentase Penurunan Emisi GRK

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tercatat 183,20 % (seratus delapan puluh tiga koma dua puluh persen) pada tahun 2022 dan 120,20 % (seratus dua puluh koma dua puluh persen) pada tahun 2023, dengan proyeksi 120,20 % (seratus dua puluh koma dua puluh tiga persen) pada tahun 2026. Pencapaian ini mendukung pengurangan emisi GRK, keberlanjutan ekosistem, dan peningkatan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

f. Pelaksanaan program prioritas untuk mendukung target sasaran telah dilakukan dengan baik oleh perangkat daerah, hal ini didukung dengan ketersediaan ABPD Kutai Kartanegara. Namun beberapa indikator kinerja dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan wilayah. Pada program prioritas yang berkenaan dengan pengelolaan pertanian dan perkebunan berbasis potensi unggulan daerah memerlukan dukungan lahan, infrastruktur berupa sarana dan prasarana pertanian.

g. Capaian RPJMD Tahun 2021-2026 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikualifikasikan ke dalam faktor pendorong dan faktor penghambat.

1) Terdapat 11 (sebelas) faktor yang mendorong dan 8 (delapan) faktor yang menghambat capaian misi memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani.
2) Terdapat 8 (delapan) faktor yang mendorong dan 15 (lima belas) faktor yang menghambat capaian misi meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.
3) Terdapat 15 (lima belas) faktor yang mendorong dan 16 (enam belas) faktor yang menghambat capaian misi memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
4) Terdapat 10 (sepuluh) faktor yang mendorong dan 6 (enam belas) faktor yang menghambat capaian misi meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.
5) Terdapat 5 (lima) faktor yang mendorong dan 6 (enam) faktor yang menghambat capaian misi meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
6) Terdapat 23 (dua puluh tiga) program dedikasi Bupati yang dirancang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

di berbagai sektor. Secara umum, pelaksanaan dari 23 (dua puluh tiga) program dedikasi Bupati terlaksana dengan baik. Namun begitu, masih ditemukan beberapa permasalahan yang secara potensial dapat menghambat tujuan akhir dari berbagai program tersebut.

a) Terdapat 7 (tujuh) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA).
b) Terdapat 6 (enam) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Aparatur Negara Bahagia.
c) Terdapat 13 (tiga belas) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Kukar Bebaya.
d) Terdapat 4 (empat) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program 1.000 Guru Sarjana.
e) Terdapat 3 (tiga) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Kukar Berkah.
f) Terdapat 8 (delapan) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Kukar Idaman.
g) Terdapat 6 (enam) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Peduli Kesehatan.
h) Terdapat 6 (enam) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Kukar Siap Kerja.
i) Terdapat 5 (lima) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Berbudaya.
j) Terdapat 4 (lima) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN).
k) Terdapat 2 (dua) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Kesejahteraan Sosial Idaman.
l) Terdapat 11 (sebelas) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan.
m) Terdapat 4 (empat) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Hilirisasi Produk Pertanian.
n) Terdapat 14 (empat belas) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

o) Terdapat 9 (sembilan) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Usaha Kecil IDAMAN.

p) Terdapat 5 (lima) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Kukar Kreatif IDAMAN.

q) Terdapat 3 (tiga) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Pemantapan Konektivitas Wilayah.

r) Terdapat 4 (empat) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Fasilitasi Perumahan Rakyat.

s) Terdapat 4 (empat) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Air Bersih Desa.

t) Terdapat 2 (dua) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Terang Kampongku.

u) Terdapat 6 (enam) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Desa Ramah Lingkungan.

v) Terdapat 4 (empat) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Kukar Peduli Lingkungan.

w) Terdapat 5 (lima) permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program Dunia Usaha Ramah Lingkungan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen dan pelaksanaan RPJMD periode berikutnya:

a) Diperlukan langkah penguatan terhadap sistem informasi dan pembaharuan basis data secara berkala untuk menunjang pengambilan keputusan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah.

b) Diperlukan langkah penguatan terhadap pola koordinasi antar Perangkat Daerah lintas urusan pemerintahan yang memiliki keterkaitan kewenangan dalam mewujudkan capaian misi.

c) Diperlukan peta jalan dan implementasi pemenuhan kebutuhan SDM aparatur pemerintahan sesuai dengan jumlah dan kualifikasi kompetensi teknis, khususnya pada bidang kesehatan dan gizi serta tenaga pendidik dan kependidikan serta disinkronkan dengan rencana pengembangan/pertumbuhan pusat pertumbuhan ekonomi baru baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d) Diperlukan upaya harmonisasi pada berbagai produk hukum Daerah terhadap regulasi di level pemerintah pusat menyangkut kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau bidang yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pelayanan publik.

e) Diperlukan upaya perluasan jejaring dan penguatan mekanisme kolaborasi antar Perangkat Daerah dengan komponen pemangku kepentingan dan mitra pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

f) Mempertimbangkan struktur pembangunan Daerah yang memiliki ketergantungan yang cukup signifikan pada sektor ekonomi ekstraktif (pertambangan migas dan batubara), Pemerintah Daerah perlu rencana transformasi pembangunan ekonomi, sosial budaya serta tata kelola secara terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

2.1.4.5 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan Daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan setiap urusan pemerintahan Daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan Daerah dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70.

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
a. Pendidikan								
1	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	79,30	77,99	62,80	62,79	74,34	
2	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	8,14	8,19	8,24	18,1	42,81	
3	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	NA	NA	NA	NA	60,51	
4	Persentase jamban dalam kondisi baik	%	80,57	85,57	87,47	89,57	90,57	
5	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	52,18	57,18	62,18	67,18	72,18	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Angka Literasi/Numerasi^							
	Literasi Membaca^							
	SD^	Persen	NA	56,61	65,35	70,68	70,98	
	SMP^	Persen	NA	60,57	72,48	77,34	81,45	
	Numerasi^							
	SD^	Persen	NA	31,47	50,32	58,85	63,42	
	SMP^	Persen	NA	42,79	47,60	72,79	75,82	
b. Kesehatan								
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	30	38	24	12	13	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	14,33	17,08	17,64	16,39	14,63	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	95,17	84,42	91,96	91,36	93,75	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	103,71	92,40	94,53	95,46	90,19	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	105,46	94,08	97,24	93,13	98,22	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	48,21	59,14	84,39	87,66	95,16	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	97,89	100,00	100,00	99,01	97,94	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	56,20	12,62	91,94	94,24	91,88	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	34.15	67.62	90.59	100.00	87,83	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	22,20	34,63	100,00	100,00	100,00	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	82,42	31,16	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	84,20	85,66	100,84	100,00	100,00	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	51,25	83,96	138,38	100,00	100,00	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	94,36	88,13	108,98	100,00	100,00	
15	Cakupan imunisasi Bayi Lengkap	%	NA	NA	NA	NA	80,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA	NA	NA	NA	NA	
17	Jumlah Kematian Balita	Orang	NA	NA	NA	NA	167	
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	NA	14,10	43,06	64,09	70,11	
2	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	NA	45,81	61,49	65,50	63,20	
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	69,90	71,48	77,37	82,18	80,20	
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman di kabupaten/kota	%	68,37	69,80	76,14	83,48	0,304	
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	N/A	0,23	0,00	16,29	17,24	
6	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi kewenangan Kabupaten/Kota	%	N/A	0,00	0,00	2,77	2,77	Realisasi 2020-2022 tidak ada kegiatan abrasi
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	N/A	100,00	98,64	100,00	100,00	
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	45,87	77,42	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	0,00	0,19	4,01	10,69	43,59	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	16,03	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	NA	22,03	34,69	75,00	61,67	
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	26,07	3,06	100,00	49,22	100,00	2023 menurun karena sasaran layanan kesiapsiagaan lebih banyak, terbatasnya kapasitas pengelola teknis kegiatan, perlengkapan kesiapsiagaan masyarakat masih kurang
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	NA	NA	91,00	87,72	
f. Sosial								
1	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	NA	91,31	97,63	100,00	100,00	
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
a. Tenaga Kerja								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	17,85	41,18	44,44	100,00	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	28,17	92,73	83,47	36,03	52,44	
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak								
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
c. Pangan								
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	128,82	128,72	118,00	118,46	200,00	Menyesuaikan dengan target Peraturan Badan Pangan Nasional 15/ 2023
d. Pertanahan								
1	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	5,86	6,30	6,66	7,60	7,87	
e. Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	68,76	71,58	71,77	72,41	73,59	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	80,50	54,23	37,98	40,37	45,37	
3	Jumlah sampah yang tertangani	%	22,45	59,14	69,91	70,14	54,63	
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	NA	94,80	95,64	98,79	99,68	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	NA	44,40	42,93	55,58	68,39	
3	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	NA	2,00	2,00	2,00	2,00	
4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	NA	NA	NA	NA	7,39	
5	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100,00	99,00	100,00	100,00	
6	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	91,54	94,65	100,00	70,46	
7	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	18,88	3,63	0	0	0	Tidak ada desa tertinggal sejak 2022 di Kutai Kartanegara
2	Persentase desa mandiri	%	6,22	12,44	23,83	39,38	45,08	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0,00	0,00	0,00	83,33	33,33	
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,24	2,53	2,39	2,13	2,24	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive* (mCPR)	%	76,41	74,62	61,13	66,91	71,70	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	14,55	14,72	24,97	12,79	7.93	
i. Perhubungan								
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	0,511	0,623	0,070	0,378	1	
2	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Perusahaan	0	0	0	1	1	
j. Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	96,61	100,00	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	NA	NA	NA	NA	NA	
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	96,61	100,00	
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-3,11	88,88	-17,75	74,58	108,28	2023 proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual sehingga cakupannya kecil tahun 2024 sudah menggunakan online data system sehingga dapat meningkatkan pengumpulan data

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
								secara signifikan
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	17,20	65,83	72,62	73,62	74,21	
l. Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1,69	36,22	90,63	51,38	-29,18	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	NA	NA	139,49	109,17	105,84	Tahun 2020 dan 2021 belum ada target dari provinsi
m. Kepemudaan dan Olahraga								
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/*training* dan memperoleh sertifikat	%	0,00	0,16	0,18	0,30	0,31	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	0	0	0	3,70	4,07	Pon dilaksanakan 4 tahun sekali pada tahun 2024, 2023 Popnas dan Peparpenas
n. Statistik								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	0,00	0,00	0,00	1,84	2,31	
o. Persandian								
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	0,00	0,00	39,22	54,88	62,17	
p. Kebudayaan								
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	NA	11,11	11,11	25,00	17,89	
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	NA	NA	NA	4,83	6,95	
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	NA	NA	NA	NA	100	
q. Perpustakaan								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	0,00	38,05	52,55	62,52	68,17	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	0,00	0,00	20,15	59,99	62,52	
r. Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	0,00	75,00	75,00	75,00	83,05	
3. Urusan Pilihan								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
a. Kelautan dan Perikanan								
1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	%	202.277,3	207.521,2	210.4730	281.950,6	323,178	
2	Angka Konsumsi ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/Kap/Th	NA	NA	NA	NA	67,13	Baru ada di tahun 2024, penetapan target berdasarkan arahan provinsi
b. Pariwisata								
1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0,059	0,005	0,006	0,408	0,356	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	-87,494	-91,741	1273,913	142,089	148,562	
3	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	0,115	0,110	0,830	0,479	
c. Pertanian								
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-13,89	-7,78	-2,13	3,92	-5,86	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	24,33	19,93	-34,93	-33,69	16,41	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	12,09	4,56	0,07	17,08	14,00	
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis (diperoleh dari *surveylance* penyakit dari 5 PHMS)	%	60,00	52,50	46,67	47,78	50,00	
d. Kehutanan								
e. Energi dan Sumber Daya Mineral								
f. Perdagangan								
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	NA	71,80	95,80	51,40	62,68	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	19,11	18,51	23,30	34,40	41,99	
g. Perindustrian								
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	NA	NA	NA	NA	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota							
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Nilai	NA	90	90	60	65	
3	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	%	NA	1,43	7,17	2,38	1,00	
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	NA	0,44	0,21	14,67	0,97	
h. Transmigrasi								
4. Urusan Pemerintahan Umum								
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	3,23	4,28	4,61	5,71	6,84	
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	2,05	2,37	2,90	3,99	5,22	
5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a. Perencanaan								
1	Kesesuaian antara RKP dengan APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
b. Keuangan								
1	Persentase Belanja pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	%	26,52	42,16	30,82	20,84	19,50	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	18,85	15,92	7,63	9,49	6,20	
3	Persentase alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total belanja APBD Tahun N	%	NA	57,65	51,99	57,90	61,53	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	NA	28,77	27,76	33,98	52,89	
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	33,40	34,03	36,63	49,77	49,77	
d. Penelitian dan Pengembangan								

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	%	NA	NA	NA	58,62	63,79	
e. Fungsi Pengawasan								
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	0	2,986	3,043	3,202	3,371	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	0	0	3	3	3	
3	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	0	2,910	3,019	3,175	3,400	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	71,41	86,67	87,32	89,22	90,11	
f. Fungsi Pengadaan								
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	NA	40,00	40,00	40,00	40,00	
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	NA	27,60	22,70	26,61	26,90	
3	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	NA	18,75	18,10	18,13	9,67	
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah								
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	48,15	28,13	24,00	34,78	58,06	
h. Pelayanan Publik								
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	NA	98.59 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	82.84 Zona: Hijau Kategori: B Opini: Kualitas Tinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	

2.1.4.6 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar setiap warga negara untuk hidup layak, sehat, aman, dan berpendidikan. Melalui perwujudan SPM, Pemerintah Daerah dituntut untuk tidak lagi sekadar menyediakan layanan, tetapi menjamin mutu dan pemerataan layanan dasar. Hal ini adalah transformasi besar dari orientasi birokrasi administratif menuju birokrasi yang responsif, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat paling mendasar. Tabel berikut menunjukkan capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah periode 2020-2024.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.71.

Capaian Standar Pelayanan Minimal

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Pendidikan							
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	SD = 100,99 SMP = 100,02	SD = 100,10 SMP = 100,01	97,55	92,58	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	48,13	56,12	66,74	80,37	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	93,83	93,21	78,72	68,33	99,87
Bidang Kesehatan							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	95,17	84,42	91,96	91,79	87,06
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	103,71	92,40	94,53	95,92	85,54
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	105,46	94,08	97,24	93,59	88,55
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	48,21	59,14	84,39	86,12	85,82
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	97,89	100,00	100,00	99,15	96,20
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	56,20	13,28	91,94	95,32	93,77
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	56,20	67,40	90,59	91,54	93,10
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	22,20	38,86	100,00	100	96,13

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020	2021	2022	2023	2024
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	82,42	34,22	100,00	100	94,85
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	84,20	85,66	100,00	100	97,78
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	51,25	82,48	100,00	100	95,64
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	94,36	87,79	100,00	100	96,19
Bidang Pekerjaan Umum							
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok-pokok air minum sehari-hari	100,00	70,85	76,68	80,32	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100,00	75,02	2,79	60,78	100
Bidang Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	100	98,57	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	10,64	100	100	100
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	0	0	100	100	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	57,70	0,17	3,70	78,21	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	26,07	3,06	100	49,22	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	79,37	100,00	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	35,55	100,00	81,66	95,16	100
Bidang Sosial							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100,00	91,80	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100,00	84,91	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100,00	143,13	51	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar Tuna sosial	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan	100,00	116,00	100	100	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020	2021	2022	2023	2024
	khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti					
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah korban Bencana skala Kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca	100,00	141,33	100	100	100

Sumber : LPPD, 2020-2024

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Kondisi keuangan Daerah merupakan salah satu aspek strategis yang sangat menentukan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Keuangan daerah tidak hanya berperan sebagai instrumen pendukung, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.

Apabila sistem pemerintahan daerah diibaratkan sebagai suatu organisme, maka keuangan daerah berfungsi layaknya jantung yang memompa sumber daya ke seluruh sektor strategis, untuk memastikan keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efisien, dan akuntabel menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD.

Gambaran umum keuangan Daerah ini disajikan sebagai dasar untuk memahami kapasitas fiskal Daerah, tantangan pembiayaan, serta ruang fiskal yang tersedia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, untuk memastikan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan Pemerintah Daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara *revenue dan expenditure*. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal *(fiscal sustainability)* Daerah, serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah 5 (Lima) Tahun Terakhir

Gambaran kinerja keuangan Daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca Daerah, serta pendekatan rasio keuangan Daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan Daerah, seperti kapasitas fiskal, ruang fiskal, dan *tax ratio.*

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Gambaran kinerja keuangan Daerah secara komprehensif dapat diukur melalui dinamika pertumbuhan serta struktur proporsional dari komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan selama periode tertentu. Selain itu, kinerja fiskal Daerah juga dapat ditelaah lebih mendalam melalui analisis pertumbuhan aset dan kewajiban dalam neraca Daerah, serta evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Daerah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih tajam, berbagai pendekatan berbasis rasio keuangan sering digunakan, seperti rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi, serta rasio ketergantungan terhadap transfer pusat.

Tidak kalah penting, dua indikator kunci yang menjadi fokus dalam evaluasi keberlanjutan fiskal Daerah adalah kapasitas fiskal dan ruang fiskal. Kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan riil Pemerintah Daerah dalam menghimpun pendapatan dari sumber-sumber yang sah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara ruang fiskal menunjukkan fleksibilitas keuangan yang dimiliki untuk membiayai program prioritas di luar belanja wajib dan mengikat. Kombinasi antara pertumbuhan komponen APBD dan indikator-indikator rasional tersebut menjadi dasar penting dalam menilai ketahanan fiskal, kemandirian Daerah, dan kualitas tata kelola keuangan publik secara menyeluruh.

Tabel di bawah menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode tahun 2020-2024. Tren realisasi pendapatan Daerah memperlihatkan pola yang bervariasi. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan total mencapai Rp4.450.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah). Pendapatan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rp4.440.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah). Namun demikian kondisi berbalik drastis pada tahun 2022, di mana realisasi pendapatan Daerah menunjukkan peningkatan signifikan menjadi Rp7.440.000.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah). Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana realisasi pendapatan kembali meningkat mencapai Rp7.780.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah), dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan Rp12.580.000.000.000,00 (dua belas triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah). Peningkatan drastis pada tahun 2022-2024 ini didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan signifikan pada Pendapatan Transfer.

Secara spesifik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari Rp450.590.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp787.600.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah) pada tahun tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas Daerah dalam menghimpun sumber daya mandiri. Pendapatan Transfer menjadi komponen paling dinamis, menurun dari Rp3.880.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh miliar rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp3.610.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus sepuluh miliar rupiah) pada tahun 2021, lalu melonjak signifikan hingga Rp11.710.000.000.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus sepuluh miliar rupiah) pada tahun 2024.

Fluktuasi Pendapatan Transfer ini menegaskan kerentanan terhadap kebijakan transfer pemerintah pusat atau kondisi ekonomi makro, khususnya pada komoditas ekstraktif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan penurunan tajam dari Rp120.170.000.000,00 (seratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2020 menjadi hanya Rp12.520.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2023 sebelum sedikit meningkat kembali ke Rp80.930.000.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2024.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.72.

Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	4.456.587,09	4.443.234,73	7.443.525,13	7.787.223,82	12.586.549,87
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	450.599,69	707.307,16	567.757,28	651.136,41	787.600,56
Pendapatan Transfer	3.885.815,45	3.615.376,63	6.764.448,48	7.123.560,92	11.718.016,36
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	120.171,95	120.550,95	111.319,37	12.526,49	80.932,96
Belanja	4.944.693,38	4.714.130,50	5.475.960,55	10.191.449,27	12.692.749,95
Belanja Operasi	3.249.757,09	3.283.287,43	3.672.269,13	5.796.771,04	6.274.425,81
Belanja Modal	1.131.607,58	1.026.367,43	1.171.734,72	3.513.607,65	5.298.641,63
Belanja Tak Terduga	164.040,82	84.714,81	10.717,07	0,00	0,00
Belanja Transfer	399.287,88	319.760,82	621.239,62	881.070,58	1.119.682,51
Surplus / (Defisit)	-488.106,29	-270.895,76	1.967.564,58	-2.404.225,45	-106.200,08
Pembiayaan	1.625.755,99	1.113.261,95	838.571,88	2.700.199,50	271.928,46
Penerimaan Pembiayaan	1.645.755,99	1.137.661,95	842.321,88	2.806.073,50	295.973,79
Pengeluaran Pembiayaan	20.000,00	24.400,00	3.750,00	105.874,00	24.045,32
Pembiayaan Netto	1.625.755,99	1.113.261,95	838.571,88	2.700.199,50	271.928,46
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	1.137.649,70	842.366,18	2.806.136,46	295.974.053,39	165.728.382,21

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Selain pendapatan, realisasi belanja Daerah juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan substansial. Realisasi belanja total meningkat dari Rp4.940.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat puluh miliar rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp12.690.000.000.000,00 (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik.

Dari aspek realisasi pembiayaan, indikator Pembiayaan *Netto* menunjukkan pola yang fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan signifikan. Setelah mencapai Rp1.620.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh miliar rupiah) pada tahun 2020, menurun menjadi Rp838.570.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2022, lalu melonjak drastis hingga Rp2.700.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar rupiah) pada tahun 2023, sebelum kembali turun menjadi Rp271.920.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2024. Peningkatan ini utamanya didukung oleh Penerimaan Pembiayaan, yang didominasi oleh SiLPA dari tahun sebelumnya.

Aspek krusial dalam analisis APBD adalah pola perimbangan antara pendapatan dan belanja Daerah, yang menentukan kondisi surplus atau defisit anggaran. Selama periode tahun 2020-2024, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan pola yang bergantian antara defisit dan surplus.

Pada tahun 2020, APBD mencatat defisit anggaran sebesar Rp488.100.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus juta rupiah). Defisit ini berlanjut pada tahun 2021 dengan nilai Rp270.890.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Defisit di 2 (dua) tahun tersebut sejalan dengan realisasi pendapatan yang relatif rendah dibandingkan belanja. Gambaran positifnya, pada tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil membalikkan keadaan dengan mencatat surplus anggaran yang signifikan sebesar Rp1.960.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh miliar rupiah). Surplus ini merupakan indikasi kuat dari pemulihan pendapatan yang drastis pada tersebut.

Namun demikian, pada tahun 2023, terjadi lagi defisit anggaran yang sangat besar, mencapai Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah). Defisit ini, meskipun pendapatan juga meningkat,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kemungkinan besar disebabkan karena lonjakan realisasi belanja yang jauh lebih tinggi pada tersebut. Pada tahun 2024, defisit berkurang drastis menjadi Rp106.200.000.000,00 (seratus enam miliar dua ratus juta rupiah).

Pola surplus dan defisit yang silih berganti ini menyoroti perlunya perencanaan anggaran yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan fiskal, serta manajemen belanja yang efektif untuk menjaga keberlanjutan keuangan Daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menunjukkan angka yang fluktuatif namun tetap positif, yaitu dari Rp1.130.000.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh miliar rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp165.920.000.000,00 (seratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2024, dengan puncak mencapai Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) pada tahun 2022. SiLPA ini berfungsi sebagai *buffer* bagi keuangan Daerah, yang dapat digunakan untuk menutupi defisit atau mendanai program prioritas pada berikutnya.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kategorisasi pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.73.

Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN	4.456.587,09	4.443.234,73	7.443.525,13	7.787.223,82	12.586.549,87	29,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.599,69	707.307,16	567.757,28	651.136,41	787.600,56	14,98
Pendapatan Pajak Daerah	110.441,52	114.967,28	142.751,50	141.989,02	165.870,57	10,70
Pendapatan Retribusi Daerah	4.106,22	4.008,70	5.332,18	6.282,21	5.879,73	9,39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.244,43	19.768,62	21.232,14	63.147,80	88.368,26	48,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	317.807,53	568.562,55	398.441,46	439.717,38	527.481,99	13,50
PENDAPATAN TRANSFER	3.885.815,45	3.615.376,63	6.764.448,48	7.123.560,92	11.718.016,36	31,78
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.547.936,25	3.215.256,83	6.153.698,02	6.258.065,05	11.071.161,84	32,91
Dana Perimbangan	3.522.602,10	3.174.738,84	5.976.853,75	6.038.157,86	10.841.265,77	32,45
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	952.892,10	2.375.059,17	5.193.110,97	5.100.817,92	9.840.984,24	79,27
Dana Alokasi Umum	440.463,49	443.413,04	443.970,39	493.817,23	608.978,15	8,44
Dana Alokasi Khusus	359.715,72	356.266,62	339.772,38	443.522,71	391.303,38	2,13
Dana Insentif Daerah	25.334,16	40.517,99	0,00	27.486,72	34.790,32	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	176.844,27	192.420,47	195.105,76	0,00
TRANSFER ANTAR DAERAH	337.879,20	400.119,80	610.750,46	865.495,88	646.854,51	17,63
Pendapatan Bagi Hasil	240.421,70	318.277,30	568.635,58	827.375,88	588.414,51	0,00
Bantuan Keuangan	97.457,50	81.842,50	42.114,88	38.120,00	58.440,00	-12,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	%
Bantuan Keuangan dari Pemda Prov	97.457,50	81.842,50	42.114,88	38.120,00	58.440,00	-12,00
Bantuan Keuangan dari Pemda Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	120.171,95	120.550,95	111.319,37	12.526,49	80.932,96	-9,41
Pendapatan Hibah	120.171,95	4.626,00	3.033,00	3.567,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	115.924,95	108.286,37	8.959,49	80.932,96	-8,59

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan data realisasi dan target pendapatan, terlihat bahwa selama periode tahun 2020-2024, pendapatan total Daerah menunjukkan tren meningkat yang signifikan setelah sempat stabil di awal periode. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp4.450.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) dan sedikit menurun menjadi Rp4.440.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah) pada tahun 2021. Namun demikian, pendapatan melonjak tajam pada tahun 2022 hingga mencapai Rp7.440.000.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah), atau meningkat sebesar 67,52 % (enam puluh tujuh koma lima puluh dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp7.780.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah). Untuk tahun 2024, pendapatan meningkat drastis hingga mencapai Rp12.580.000.000.000,00 (dua belas triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah). Dari sisi distribusi, struktur pendapatan Daerah masih sangat didominasi oleh Pendapatan Transfer. Secara keseluruhan, sumber pendapatan terbesar masih berasal dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang pada tahun 2024 mencapai Rp9.840.000.000.000,00 (sembilan triliun delapan ratus empat puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih ditopang oleh dana dari sektor ekstraktif yang menjadi basis perekonomian Daerah, sekaligus membuatnya rentan terhadap dinamika harga komoditas global.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai indikator kemandirian fiskal, menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Setelah mencapai Rp450.590.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2020, PAD melonjak menjadi Rp707.300.000.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2021, yang didorong oleh kenaikan signifikan pada komponen Lain-lain PAD yang Sah. Namun demikian, capaiannya sempat turun menjadi Rp567.750.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022, sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi Rp651.136.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) pada tahun 2023. Peningkatan pada tahun 2023 terutama didorong oleh lonjakan Lain-lain PAD Yang Sah dari Rp317.800.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus juta rupiah) menjadi Rp527.480.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

empat ratus delapan puluh juta rupiah). Selama periode realisasi tahun 2020-2024, komponen Lain-lain PAD yang Sah tetap menjadi sumber penerimaan dominan dengan kontribusi rata-rata 73 % (tujuh puluh tiga persen) terhadap total PAD.

Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

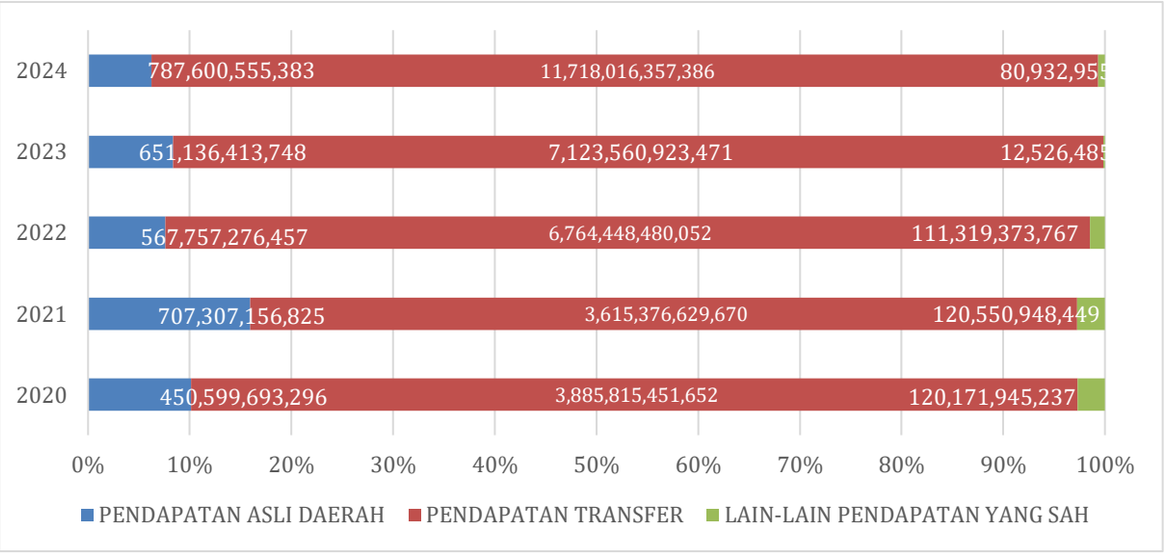

Sumber:LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, upaya peningkatan PAD melalui potensi pajak dan retribusi perlu terus dioptimalkan, salah satunya melalui digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas. Selain itu, inovasi pada sumber penerimaan seperti optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melalui kinerja BUMD dan penyertaan modal menjadi strategi penting, mengingat potensinya yang terus meningkat. Struktur pendapatan Daerah menunjukkan dominasi Pendapatan Transfer sebagai komponen terbesar selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, Pendapatan Transfer menyumbang 87,19 % (delapan puluh tujuh koma sembilan belas persen) dari pendapatan total, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10,11 % (sepuluh koma sebelas persen), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 2,70 % (dua koma tujuh puluh persen). Tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan kontribusi Pendapatan Transfer menjadi 81,37 % (delapan puluh satu koma tiga puluh tujuh persen), sementara PAD meningkat menjadi 15,92 % (lima belas koma sembilan puluh dua persen) dan Lain-Lain Pendapatan tetap di sekitar 2,71 % (dua koma tujuh puluh satu persen).

Namun demikian pada 2022 ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer kembali naik signifikan hingga mencapai 90,88 % (sembilan puluh koma delapan puluh delapan persen), dengan PAD turun menjadi 7,63 %

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(tujuh koma enam puluh tiga persen) dan Lain-Lain Pendapatan 1,50 % (satu koma lima puluh persen). Kondisi ini berlanjut pada tahun 2023, ketika Pendapatan Transfer mencapai 91,48 % (sembilan puluh satu koma empat puluh delapan persen), sementara PAD hanya 8,36 % (delapan koma tiga puluh enam persen) dan Lain-Lain Pendapatan menurun drastis menjadi 0,16 % (nol koma enam belas persen). Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana Pendapatan Transfer mencapai 93,10 % (sembilan koma sepuluh persen), sedangkan PAD dan Lain-Lain Pendapatan masing-masing hanya menyumbang 6,26 % (enam koma dua puluh enam persen) dan 0,64 % (nol koma enam puluh empat persen). Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan Daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kemandirian fiskal Daerah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 15,92 % (lima belas koma sembilan puluh dua persen), kemudian menurun tajam menjadi 7,63 % (tujuh koma enam puluh tiga persen) pada tahun 2022, sedikit naik ke 8,36 % (delapan koma tiga puluh enam persen) pada tahun 2023, namun kembali turun hingga 6,26 % (enam koma dua puluh enam persen) pada 2024. Penurunan ini berjalan beriringan dengan peningkatan proporsi Pendapatan Transfer, yang cenderung mengisi kekosongan saat kontribusi PAD menurun. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, dari 2,70 % (dua koma tujuh puluh persen) pada tahun 2020 menjadi hanya 0,64 % (nol koma enam puluh empat persen) pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi sumber pendapatan non-PAD lainnya juga semakin mengecil. Kondisi ini menegaskan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal Daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Upaya diversifikasi sumber PAD, peningkatan efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi Daerah, serta optimalisasi potensi pendapatan lainnya menjadi langkah krusial untuk mendorong kemandirian fiskal yang lebih berkelanjutan.

b. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Selama periode tahun 2020-2024, realisasi target pendapatan Daerah fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian realisasi pendapatan terhadap anggaran telah mencapai di atas 100 % (seratus persen). Realisasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 156,25 % (seratus lima puluh enam koma dua puluh lima persen). Pada tahun 2020, realisasi pendapatan Daerah sebesar 78,20 % (tujuh puluh delapan koma dua puluh persen).

Gambar 2.29.
Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

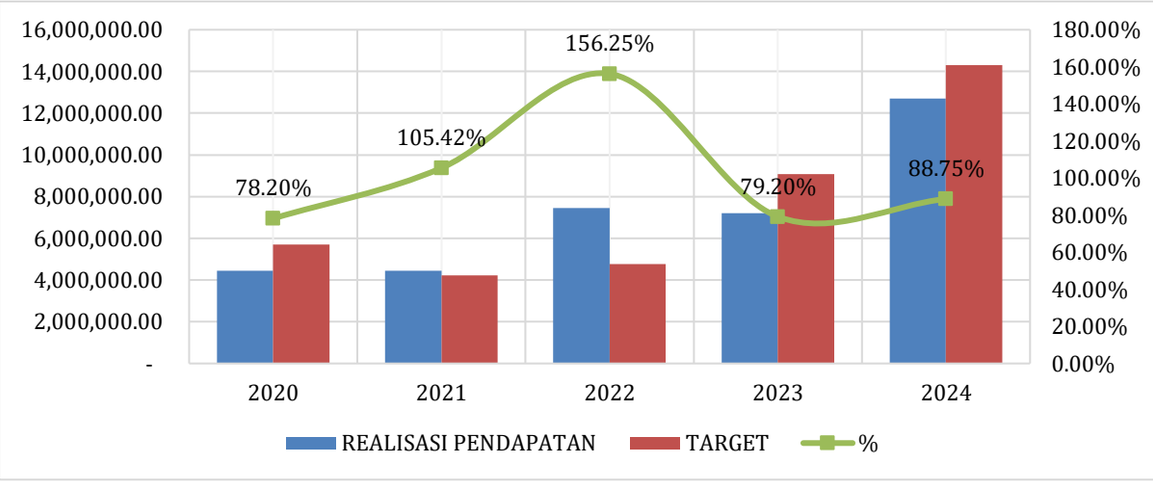

Sumber:LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

c. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan dari kemandirian finansial suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sumber utama PAD umumnya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan Daerah, semakin mandiri pula suatu daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada keberlanjutan dan akselerasi pembangunan Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 2.30.
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

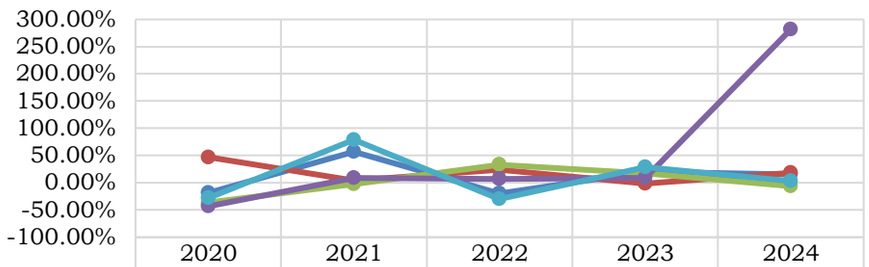

	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	-18.43%	56.97%	-19.73%	20.33%	15.29%
Pendapatan Pajak Daerah	47.00%	4.10%	24.17%	-1.53%	18.00%
Pendapatan Retribusi Daerah	-36.30%	-2.37%	33.02%	17.42%	-6.09%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-43.20%	8.35%	7.40%	9.05%	281.74%
Lain-lain PAD Yang Sah	-27.56%	78.90%	-29.92%	28.80%	2.78%

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Berdasarkan grafik pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2020-2024, terlihat dinamika yang bervariasi antar komponen. Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, PAD mengalami kontraksi sebesar -18,43 % (minus delapan belas koma empat puluh tiga persen), kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 56,97 % (lima puluh enam koma sembilan puluh tujuh persen).

Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022 sebesar -19,73 % (minus sembilan belas koma tujuh puluh tiga persen), sebelum akhirnya menunjukkan tren positif pada tahun 2023 dan 2024 dengan pertumbuhan masing-masing 20,33 % (dua puluh koma tiga puluh tiga persen) dan 15,29 % (lima belas koma dua puluh sembilan persen). Pergerakan ini sebagian besar dipengaruhi oleh volatilitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Secara rinci Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan yang paling ekstrem. Setelah terjadi kontraksi -43,20 % (minun empat puluh tiga koma dua puluh persen) pada tahun 2020, komponen ini meningkat drastis hingga 281,74 % (dua ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2024, menjadi pendorong utama pertumbuhan PAD pada tersebut.

Sementara itu, Pendapatan Pajak Daerah menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih stabil dibandingkan komponen lainnya, dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pertumbuhan positif di sebagian besar tahun, kecuali penurunan kecil pada tahun 2023 sebesar -1,53 (minus satu koma lima puluh tiga persen).

Pendapatan Retribusi Daerah cenderung mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif di sebagian besar periode, khususnya pada tahun 2020 sebesar -36,30 % (tiga puluh enam koma tiga puluh persen) dan tahun 2024 sebesar -6,09 % (minus enam koma nol sembilan persen), yang menandakan tantangan dalam pengelolaannya. Komponen Lain-lain PAD yang Sah juga menunjukkan pola fluktuatif, dengan pertumbuhan positif signifikan pada tahun 2021 sebesar 78,90 % (tujuh puluh delapa koma sembilan puluh persen) dan tahun 2023 sebesar 28,80 % (dua puluh delapan koma delapan puluh persen), namun juga mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan 2022.

Gambar 2.31.

Struktur Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

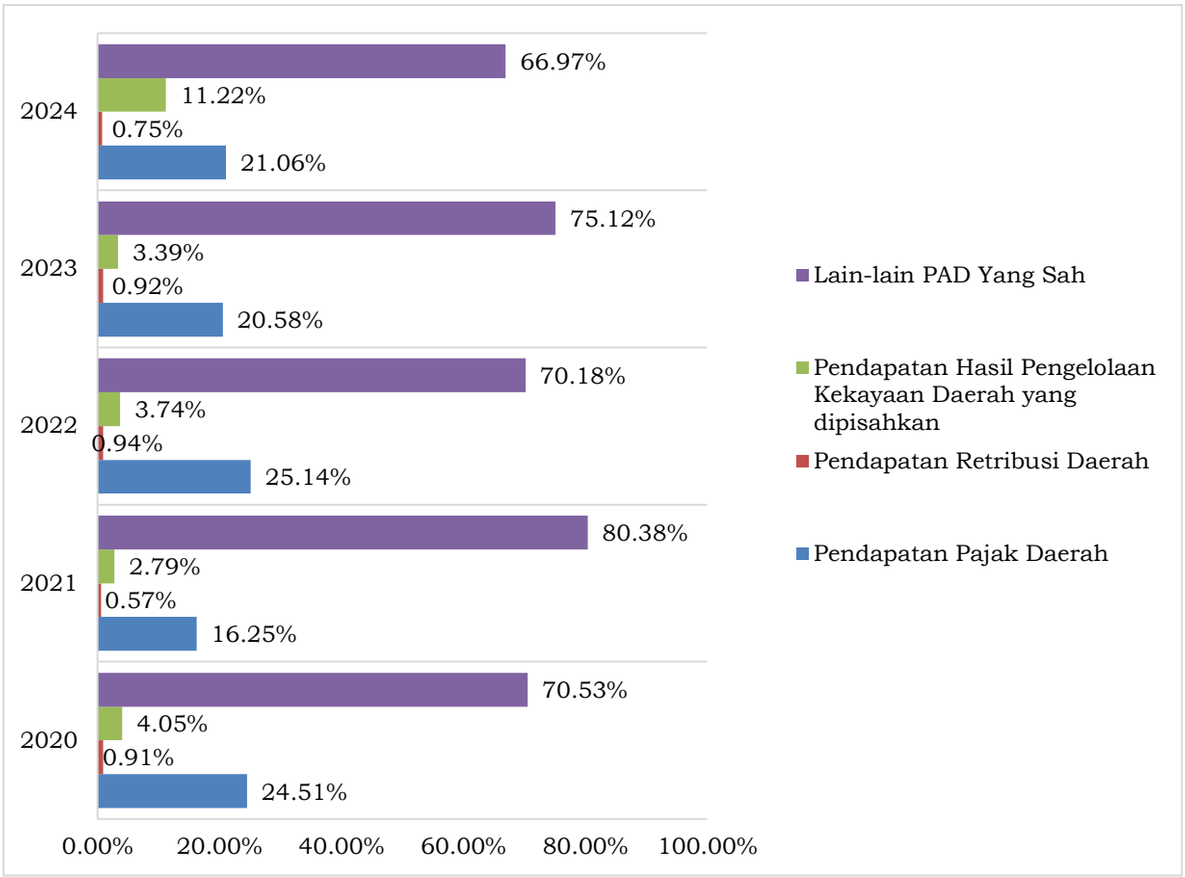

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Gambar di atas yang menunjukkan Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2024. Di sana terlihat jelas bahwa Lain-lain PAD Yang Sah merupakan komponen penyumbang terbesar dan paling dominan dalam struktur PAD sepanjang periode tersebut.

Pada tahun 2020, kontribusi Lain-lain PAD Yang Sah mencapai 70,53 % (tujuh puluh koma lima puluh tiga persen), dan mengalami peningkatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pada tahun 2021 menjadi 80,38 % (delapan puluh koma tiga puluh delapan persen), proporsinya jauh di atas komponen PAD lainnya. Proporsi ini sedikit berfluktuasi namun tetap mendominasi, dengan 70,18 % (tujuh puluh koma delapan belas persen) pada tahun 2022, 75,12 % (tujuh puluh lima koma dua belas persen) pada tahun 2023, dan 66,97 % (enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak berasal dari pajak atau retribusi daerah secara langsung, melainkan dari kategori lain-lain PAD yang sah khususnya dari pendapatan BLUD.

Sementara itu, Pendapatan Pajak Daerah menempati posisi kedua sebagai penyumbang terbesar PAD, namun dengan kontribusi yang jauh lebih kecil dibandingkan Lain-lain PAD Yang Sah. Kontribusi Pajak Daerah berfluktuasi dari 24,51 % (dua puluh empat koma lima puluh satu persen) pada tahun 2020, turun menjadi 16,23 % (enam belas koma dua puluh tiga persen) pada tahun 2021, kemudian meningkat kembali ke 25,14 % (dua puluh lima koma empat belas persen) pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 20,58 % (dua puluh koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2023 dan 21,06 % (dua puluh satu koma nol enam persen) pada tahun 2024.

Adapun Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki kontribusi yang sangat minim, bahkan cenderung di bawah satu persen dalam beberapa tahun. Pendapatan Retribusi Daerah hanya berkisar antara 0,57 % (nol koma lima puluh tujuh persen) hingga 0,94 % (nol koma sembilan puluh empat persen) sepanjang periode.

Demikian pula, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga menunjukkan persentase yang sangat kecil hingga 2023, berkisar antara 2,79 % (dua koma tujuh puluh sembilan persen) hingga 4,05 % (empat koma lima persen), kemudian meningkat hingga mencapai 11,22 % (sebelas koma dua puluh dua persen) pada thaun 2024. Dominasi Lain-lain PAD Yang Sah dan rendahnya kontribusi retribusi serta hasil pengelolaan kekayaan daerah perlu menjadi perhatian dalam upaya diversifikasi dan peningkatan kualitas sumber PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, modal, dan belanja tak terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Sedangkan, Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer daerah meliputi transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah realisasi belanja Daerah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.940.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat puluh miliar rupiah), kemudian meningkat signifikan hingga mencapai Rp12.690.000.000.000,00 (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh miliar rupiah) pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,58 % (dua puluh enam koma lima puluh delapan persen) per tahun. Uraian secara lengkap per jenis belanja dalam realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.77.

Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	%
BELANJA	4.944.693,38	4.714.130,50	5.475.960,55	10.191.449,27	12.692.749,95	26,58
BELANJA OPERASI	3.249.757,09	3.283.287,43	3.672.269,13	5.796.771,04	6.274.425,81	17,88
Belanja Pegawai	1.551.917,26	1.666.499,77	1.660.706,85	1.684.249,24	2.031.277,59	6,96
Belanja Barang dan Jasa	1.548.467,84	1.557.300,92	1.904.457,46	3.795.753,56	3.971.759,72	26,55
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	146.632,39	58.453,25	90.036,58	275.810,46	246.099,47	13,82
Belanja Bantuan Sosial	2.739,60	1.033,50	16.974,05	40.893,38	25.188,00	74,13
Belanja keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	1.131.607,58	1.026.367,43	1.171.734,72	3.513.607,65	5.298.641,63	47,10
Belanja Tanah	27.094,42	15.358,49	22.828,25	48.525,31	62.606,65	23,29
Belanja Peralatan dan Mesin	233.494,52	234.889,07	273.027,32	1.186.122,19	1.286.285,84	53,20
Belanja Bangunan dan Gedung	213.248,60	221.986,62	187.440,89	884.289,33	1.646.496,07	66,69
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	623.480,05	548.105,07	672.563,91	1.351.028,78	2.281.781,60	38,31
Belanja Aset Tetap Lainnya	34.290,00	6.028,19	15.874,35	42.977,98	5.811,54	-35,84
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	664,05	15.659,93	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	164.040,82	84.714,81	10.717,07	0,00	0,00	-100,00
Belanja Tak Terduga	164.040,82	84.714,81	10.717,07	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	399.287,88	319.760,82	621.239,62	881.070,58	1.119.682,51	29,41
Belanja Transfer Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,28	
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,28	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	%
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	399.287,88	319.760,82	621.239,62	881.070,58	1.102.928,23	28,92
Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	0,00	9.600,00	621.239,62	0,00	0,00	
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	397.984,99	310.160,82	0,00	881.070,58	1.102.928,23	29,02
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	-488.106,29	-270.895,76	1.967.564,58	-2.404.225,45	-106.200,08	-31,70

Sumber:LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Peningkatan tersebut didominasi oleh Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi secara konsisten menjadi komponen terbesar dalam belanja total, meskipun proporsinya terhadap belanja total mengalami fluktuasi. Kenaikan terbesar dalam Belanja Operasi terlihat pada Belanja Barang dan Jasa, yang meningkat dari Rp1.540.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp3.970.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar rupiah) pada tahun 2024. Sementara itu, Belanja Pegawai juga menunjukkan peningkatan substansial, mencapai Rp2.030.000.000.000,00 (dua triliun tiga puluh miliar rupiah) pada tahun 2024 dengan kenaikan rata-rata 6,84 % (enam koma delapan puluh empat persen). Di sisi lain, Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Dari Rp1.130.000.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh miliar rupiah) pada tahun 2020, Belanja Modal melonjak menjadi Rp5.290.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh miliar rupiah) pada tahun 2024. Peningkatan signifikan pada Belanja Modal ini mencerminkan fokus Pemerintah Daerah pada investasi infrastruktur dan aset jangka panjang, yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di masa depan yang bisa mengindikasikan semakin baiknya perencanaan anggaran atau minimnya kejadian tak terduga yang memerlukan alokasi dana khusus.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 2.32.
Struktur Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

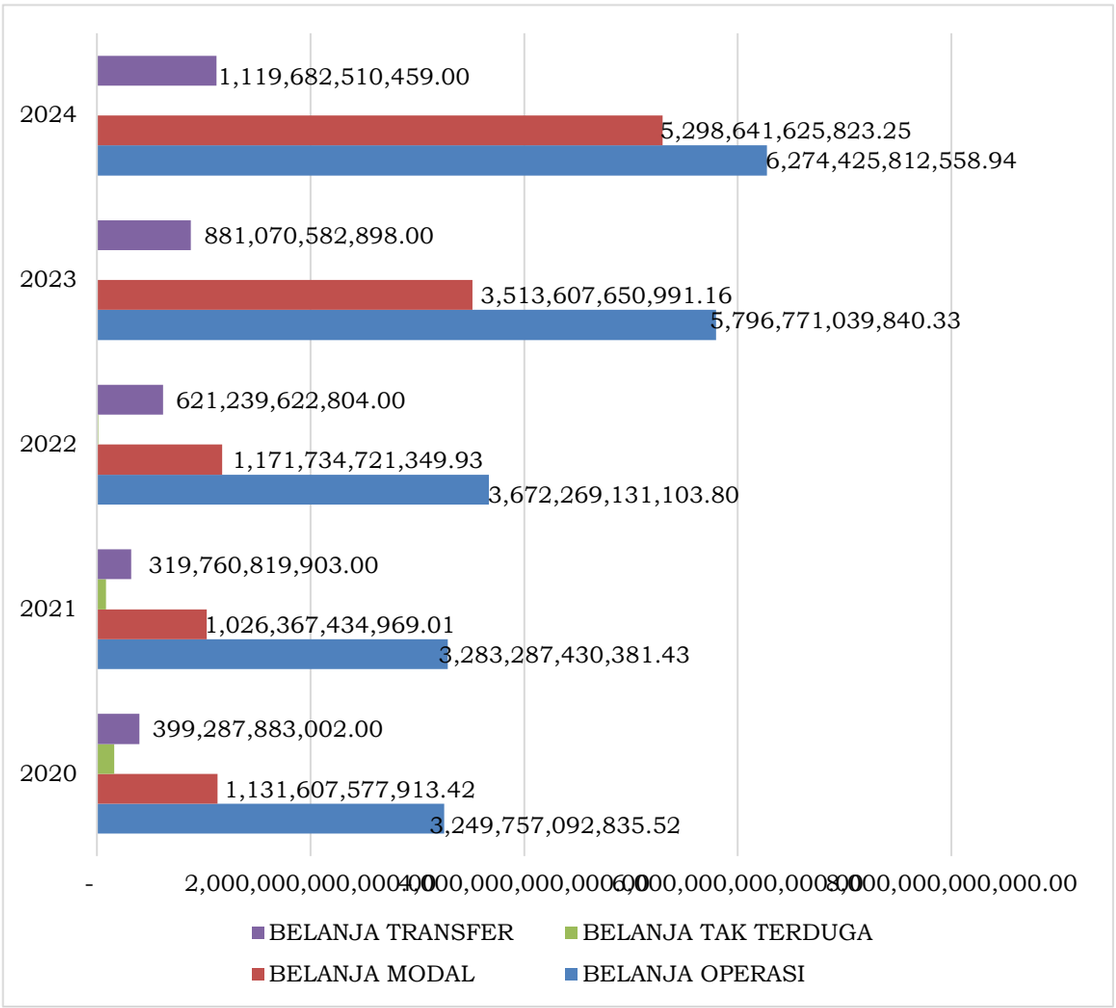

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Gambar di atas menunjukkan Struktur Belanja Daerah periode tahun 2020–2024, terlihat bahwa Belanja Operasi selalu menjadi komponen terbesar dalam belanja total Daerah. Pada 2020, Belanja Operasi mendominasi dengan proporsi 65,72 % (enam puluh lima koma tujuh puluh dua persen), dan meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 69,65 % (enam puluh sembilan persen). Namun, proporsi Belanja Operasi mulai menurun pada-tahun berikutnya, yakni 67,06 % (enam puluh tujuh koma nol enam persen) pada tahun 2022, turun signifikan menjadi 56,88 % (lima puluh enam koma delapan puluh delapan persen) pada tahun 2023, dan semakin berkurang hingga 49,43 % (empat puluh sembilan koma empat puluh tiga persen) pada tahun 2024. Meski demikian, Belanja Operasi tetap menjadi alokasi pengeluaran terbesar.

Sebaliknya, Belanja Modal menunjukkan tren peningkatan dalam struktur belanja daerah. Dari 22,89 % (dua puluh dua koma delapan puluh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sembilan persen) pada tahun 2020, proporsinya sempat turun menjadi 21,77 % (dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2021, namun kembali meningkat menjadi 21,40 % (dua puluh satu koma empat puluh persen) pada tahun 2022. Kenaikan substansial terjadi pada tahun 2023 dengan proporsi 34,48 % (tiga puluh empat koma empat puluh delapan persen), dan mencapai puncaknya di 41,75 % (empat puluh satu koma tujuh puluh lima persen) pada tahun 2024. Peningkatan Belanja Modal ini mencerminkan pergeseran prioritas anggaran menuju investasi jangka panjang, khususnya pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset modal, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik.

Sementara itu, Belanja Transfer menunjukkan fluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 11,34 % (sebelas koma tiga puluh empat persen), lalu berada pada kisaran 8–9 % (delapan sampai dengan sembilan persen) pada tahun lainnya. Sementara itu, Belanja Tak Terduga semakin kecil peranannya, dari 3,32 % (tiga koma tiga puluh dua persen) pada tahun 2020 hingga tidak lagi muncul dalam realisasi tahun tahun 2023 dan 2024.

e. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Selama periode tahun 2020-2024, target belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD secara umum belum terpenuhi 100 % (seratus persen). Hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang kurang dari 100 % (seratus persen) selama periode tahun 2020-2024. Selama periode tahun 2020-2024 capaian realisasi berkisar pada 82,77 %- 88,48 % (delapan puluh dua koma tujuh puluh tujuh persen sampai dengan delapan puluh delapan koma empat puluh delapan persen) dari anggaran. Realisasi belanja Daerah tertinggi pada tahun 2021 sebesar 88,48 % (delapan puluh delapan koma empat puluh delapan persen) .

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 2.33. Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

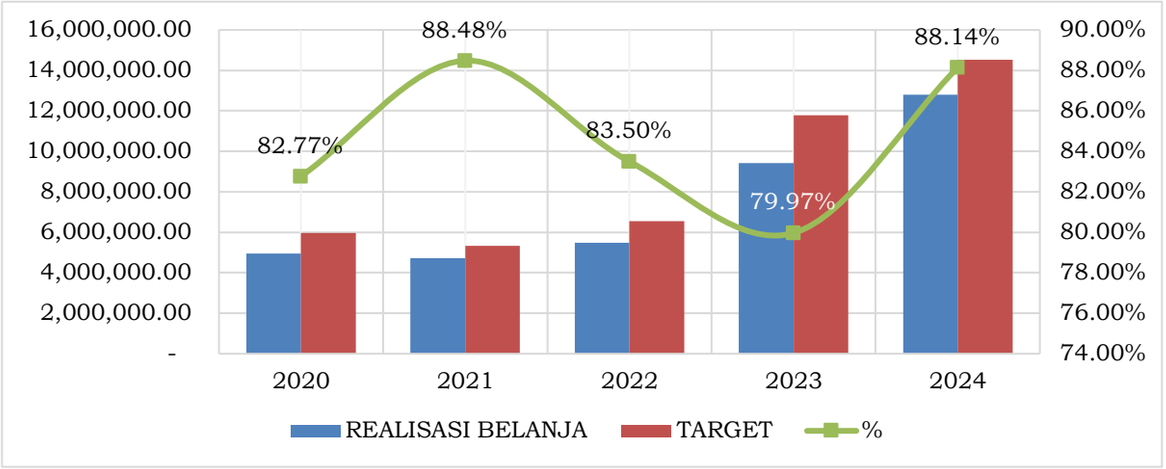

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

f. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada anggaran yang berjalan maupun pada-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang berjalan maupun pada-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan Daerah periode tahun 2020-2024. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencarian dana cadangan. Adapun pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal mengalami fluktuasi. Peningkatan tertinggi penyertaan modal Daerah pada tahun 2024 dengan nilai Rp24.045.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat puluh lima juta rupiah).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.78.

Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	%
PEMBIAYAAN	1.625.755,99	1.113.261,95	838.571,88	2.700.199,50	271.928,46	-36,05
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.645.755,99	1.137.661,95	842.321,88	2.806.073,50	295.973,79	-34,88
Penggunaan SiLPA	1.645.755,99	1.137.661,95	842.321,88	2.806.073,50	295.973,79	-34,88
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000,00	24.400,00	3.750,00	105.874,00	24.045,32	4,71
Pembayaran cicilan pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penyertaan modal daerah	20.000,00	24.400,00	3.750,00	105.874,00	24.045,32	
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO	1.625.755,99	1.113.261,95	838.571,88	2.700.199,50	271.928,46	-36,05
SILPA Tahun Berkenaan	1.137.649,70	842.366,18	2.806.136,46	295.974,05	165.728,38	-38,22

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tabel 2.79.

Perkembangan Rincian SILPA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020		2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	1.645.755,99	100%	1.137.649,70	100%	842.366,18	100%	2.806.136,46	100%	295.974,05	100%	165.936,42	100%
Pelampauan Penerimaan PAD	-		89.471,89	8%	334.609,92	40%	61.655,74	2%	-		5.870,57	4%
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan				0%			1.554.710,36	55%				
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			21.552,25	2%	115.160,95	14%	107.569,37	4%	2.488,75	1%		
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	1.645.755,99	100%	1.026.625,56	90%	392.595,31	47%	1.082.200,99	39%	293.485,30	99%	160.065,85	96%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-			
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-			

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

g. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu Pemerintah Daerah.

Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas. solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat, nilai aset Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2020-2024 relatif mengalami pertumbuhan sebesar 9,47 % (sembilan koma empat puluh tujuh persen) per tahun, dari Rp17.520.000.000.000,00 (tujuh belas triliun lima ratus dua puluh miliar rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp25.160.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun seratus enam puluh miliar) pada tahun 2024. Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah aset lancar yaitu -30,76 (minus tiga puluh koma tujuh puluh enam persen), dan investasi jangka panjang 9,11 % (sembilan koma sebelas persen), aset tetap 11,14 % sebelas koma empat belas persen). Aset lainnya yang mengalami peningkatan nilai dengan rata-rata sebesar 30,70 % (tiga puluh koma tujuh puluh persen).

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek mengalami tren menurun cukup signifikan sebesar -7,85 % (minun tujuh koma delapan puluh lima persen) per tahun dari Rp637.500.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp459.730.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2024. Jika ditinjau lebih dalam, maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang belanja yang trennya juga relatif meningkat dari Rp61.290.000.000,00 (enam puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2021 menjadi Rp458.970.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2024.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki Pemerintah Daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara agregat mengalami sedikit perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,81 & (sembilan koma delapan puluh satu persen) per tahun. Pada tahun 2020, ekuitas tercatat sebesar Rp16.885.000.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar rupiah), menurun menjadi Rp24.550.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah) pada tahun 2024.

Nilai ekuitas dapat berdampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek baru, atau mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu. manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang cermat menjadi penting untuk memitigasi risiko penurunan ekuitas. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menekan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penurunan nilai ekuitas yaitu mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mengelola operasional dengan efisien untuk mencegah penurunan pendapatan atau peningkatan biaya. Secara keseluruhan, Neraca Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.80.

Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET	17.522.696.016.692,50	16.717.859.590.430,90	19.140.842.870.852,80	23.224.165.464.618,10	25.168.341.085.266,30	9,47
Aset Lancar	1.706.751.203.408,48	1.251.626.335.344,57	3.121.141.709.030,80	535.626.624.203,81	392.206.638.241,10	(30,76)
Investasi Permanen	725.971.224.603,07	688.604.488.989,78	857.538.077.444,13	1.013.224.271.858,78	1,037,269,596,632,78	9,33
Investasi Jangka Panjang	745.271.661.175,07	707.925.027.316,78	876.720.265.492,13	1.032.352.289.883,78	1,056,242,578,826,78	9,11
Aset Tetap	14.548.663.379.759,70	14.244.683.014.330,60	14.342.267.371.718,00	17.141.453.256.661,30	22,196,483,872,624,40	11,14
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Aset Lainnya	522.009.772.349,18	513.625.213.438,86	800.713.524.611,89	4.514.733.293.869,21	1.523.407.995.573,95	30,70
PROPERTI INVESTASI						
KEWAJIBAN	637.591.018.666,63	251.525.594.372,98	214.056.444.156,66	551.376.524.420,86	459.730.824.477,88	(7,85)
Kewajiban Jangka Pendek	637.591.018.666,63	251.525.594.372,98	214.056.444.156,66	551.376.524.420,86	459.730.824.477,88	(7,85)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
EKUITAS	16.885.104.998.025,80	16.466.333.996.057,90	18.926.786.426.696,10	22.672.788.940.197,20	24.554.795.854.420,20	9,81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.522.696.016.692,50	16.717.859.590.430,90	19.140.842.870.852,80	23.224.165.464.618,10	25.014.526.678.898,10	9,31

Sumber: BPKAD, diolah 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

h. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran, yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja yang bersifat wajib.

Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji pegawai, dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Semakin besar ruang fiskal daerah, maka semakin besar dana yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD. Secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut.

Ruang Fiskal	=	(Total Pendapatan + SiLPA) – Pendapatan Mengikat – Belanja Wajib Daerah
Pendapatan Mengikat	=	DAK + Pendapatan Hibah + Dana Insentif Daerah + Dana Desa
Belanja Mengikat	=	Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil + Belanja Adum + Alokasi Dana Desa
Belanja Wajib	=	Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Belanja Infrastruktur

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya ruang fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD memegang peranan sangat penting.

Stephen S. Heller (*IMF Policy Discussion Paper*, 2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu, dalam rangka mencapai suatu tujuan, tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.81.

Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN	6.102.343,08	5.580.896,68	8.285.847,01	10.004.307,03	12.998.121,7
PENDAPATAN MENGIKAT	393.840,90	426.323,99	662.847,27	471.009,42	736.796,89
DAK	364.050,00	381.180,00	482.970,00	443.522,71	506.900,82
Hibah	4.456,75	4.626,00	3.033,00	-	-
Dana Insentif Daerah	25.334,16	40.517,99	-	27.486,72	34.790,32
Dana Desa	-	-	176.844,27	-	195.105,75
BELANJA MENGIKAT	2.164.652,19	2.223.389,33	2.568.591,66	3.167.369,61	3.716.676,67
Belanja Pegawai	1.578.675,13	1.666.499,77	1.660.597,65	1.674.450,61	2.031.277,59
Belanja Bunga	-	-	-	-	
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Belanja Adum (5%*belanja)	267.199,06	251.694,57	304.860,01	553.625,99	640.402,85
Alokasi Dana Desa (10% DAU + DBH)	318.778,00	305.195,00	603.134,00	939.293,00	1.044.996,24
BELANJA WAJIB	1.096.677,42	1.017.963,13	1.296.624,69	2.449.381,03	3.385.278,34
Belanja Pendidikan 20%*(belanja-gaji)	673.203,65	609.526,15	763.072,58	1.550.617,81	2.155.355,87
Belanja Kesehatan 10%*(belanja-gaji)	336.601,82	304.763,07	381.536,29	775.308,91	1.077.677,94
Belanja Infrastruktur (25%*DAU)	86.871,95	103.673,91	152.015,82	123.454,31	152.244,54
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	3.655.170,52	3.667.676,45	4.528.063,62	6.087.760,06	7.838.751,9
RUANG FISKAL	2.447.172,56	1.913.220,23	3.757.783,40	3.916.546,97	5.159.368,80
%	40,10%	34,28%	45,35%	39,15%	39,69%

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (diolah)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel di atas menyajikan Ruang Fiskal Daerah periode tahun 2020-2024 yang menggambarkan selisih antara total pendapatan dan belanja mengikat, serta belanja wajib.

Secara umum, Ruang Fiskal Daerah menunjukkan tren meningkat dengan nominal yang signifikan, dari Rp2.450.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar) pada tahun 2020 menjadi Rp5.160.000.000.000,00 (lima triliun seratus enam puluh miliar rupiah) pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan Daerah untuk memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar, untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang tidak terikat atau wajib. Namun, dalam persentase terhadap pendapatan total dan belanja mengikat serta belanja wajib, Ruang Fiskal menunjukkan fluktuasi, sempat menurun dari 40,10 % (empat puluh koma sepuluh persen) pada tahun 2020 menjadi 34,28 % (tiga puluh empat koma dua puluh delapan persen) pada tahun 2021, sebelum melonjak ke 45,35 % (empat puluh tiga koma tiga puluh lima persen) pada tahun 2022 dan kembali menurun ke 39,15 % (tiga puluh sembilan koma lima belas persen) pada tahun 2023.

Peningkatan nominal Ruang Fiskal Daerah ini didukung oleh pertumbuhan yang konsisten pada sektor Penerimaan, yang naik dari Rp6.100.000.000.000,00 (enam triliun seratus miliar rupiah) pada 2020 menjadi Rp12.990.000.000.000,00 (dua belas triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah) pada tahun 2024. Kontribusi terbesar dalam Penerimaan berasal dari Pendapatan Mengikat (DAK, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Hibah), yang menunjukkan tren peningkatan.

Di sisi belanja, Belanja Mengikat dan Belanja Wajib juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Belanja Mengikat meningkat dari Rp2.160.000.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh miliar rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp3.720.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) pada tahun 2024, didorong oleh Belanja Pegawai. Sementara itu, Belanja Wajib juga melonjak dari Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp3.390.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah) pada tahun 2024, dengan Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan menjadi pendorong utama.

Meskipun Ruang Fiskal secara nominal terus bertumbuh, fluktuasi persentasenya mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan pendapatan dan belanja mengikat serta wajib tidak selalu seimbang. Peningkatan Pendapatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Mengikat dan kenaikan Belanja Wajib (terutama pendidikan dan kesehatan) menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap sektor-sektor esensial.

Namun, penting untuk terus mengelola Belanja Mengikat dan Wajib secara efisien agar tidak terlalu membebani anggaran dan tetap memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan belanja non-wajib yang mendukung pembangunan inovatif dan prioritas strategis daerah. Keberlanjutan Ruang Fiskal yang sehat akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat yang berkembang.

i. Indeks Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD untuk membiayai tugas pemerintahan. Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada pasal 1 Peraturan Kementerian Keuangan No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Tabel 2.82.
Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
dan Rasio Kapasitas Fiskal
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2024

Uraian	Tahun	Nilai	Kategori
Indeks KFD	2019	3,683	Sangat Tinggi
	2020	2,642	Sangat Tinggi
	2021	2,738	Sangat Tinggi
Rasio KFD	2022	1,832	Sedang
	2023	2,757	Sangat Tinggi
	2024	2,122	Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2019-2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut.

$$KFD_{kabupaten'/kota-i} = Y - [Y_a + X]$$

Keterangan

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah

Y = Pendapatan

Y_a = Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan

X = Belanja tertentu

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$IKFD_{kabupaten'/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten'/kota-i}}{\Sigma KFD_{kabupaten'/kota-i}/508}$$

Berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori kapasitas fiskal daerah sebagai berikut untuk tahun 2021:

Tabel 2.83.

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Rentang IKFD 2021	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,530	Sangat rendah
0,530 < IKFD < 0,727	Rendah
0,727 ≤ IKFD < 1,053	Sedang
1,053 ≤ IKFD < 1,838	Tinggi
IKFD ≥1,838	Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2019-2024

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahun yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka dapat dikemukakan bahwa nilai kapasitas fiskal daerah (IKFD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019-2021 selalu menunjukkan kategori sangat tinggi.

Sejak 2022 terdapat perubahan metode penghitungan kapasitas fiskal oleh kementerian keuangan yaitu dengan menggunakan indikator rasio kapasitas fiskal daerah. Terkait dengan perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kapasitas fiskal yang dikaitkan langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada pasal 1 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 193/PMK.07/2022 tentang *peta kapasitas fiskal daerah* disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah, yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Adapun Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut.

$$KFD_{kabupaten'/kota-i} = Y - [Y_a + X]$$

Keterangan:

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah

Y = Pendapatan

Y_a = Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan

X = Belanja tertentu

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$RKFD_{kabupaten'/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten'/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten'/kota-i}}$$

Berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut untuk tahun tahun 2022:

Tabel 2.84.

Kapasitas Fiskal Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

Rentang RKFD 2022	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,171	Sangat rendah
1,171 < RKFD < 1,504	Rendah
1,504 ≤ RKFD < 1,838	Sedang
1,838 ≤ RKFD < 2,171	Tinggi
RKFD ≥ 2,171	Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2019-2024

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah oleh Kementerian Keuangan RI, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, capaian RKFD Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peningkatan daripada periode sebelumnya,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dengan capaian tahun 2022-2024 berturut-turut adalah kategori sedang dan sangat tinggi.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan

Proyeksi pendapatan Daerah selama periode 2020-2024, dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam periode 5 (lima) tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.

Hal tersebut juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dari para *stakeholders* pengelolanya. Pada tahun 2023-2024 diasumsikan dengan telah terbentuknya penyesuaian masyarakat terhadap masa pemulihan ekonomi, maka akan mendorong kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat, sehingga dapat memasuki momentum pasca pemulihan ekonomi.

Metode proyeksi menggunakan data tren realisasi APBD selama 5 (lima) tahun terakhir, serta data pada RKPD tahun 2026. Selain itu, turut mempertimbangkan rencana kebijakan makro ekonomi daerah dalam lima tahun mendatang. Selanjutnya, potensi pajak dan retribusi menjadi tolak ukur tambahan, khususnya pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.85.

Proyeksi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2030 (Juta Rupiah)

URAIAN	APBD	RKPD	PROYEKSI				r (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PENDAPATAN	11.500.000,00	7.352.883,26	7.640.074,50	7.784.529,78	7.959.266,82	8.195.436,96	2,75%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	953.088,45	737.494,50	1.129.182,94	1.370.177,90	1.633.895,00	1.951.863,56	28,29%
Pendapatan Pajak Daerah	364.451,98	277.500,00	690.372,94	927.485,02	1.187.296,47	1.501.335,47	59,40%
Pendapatan Retribusi Daerah	487.820,48	356.319,55	369.825,83	371.404,27	372.982,71	374.561,15	1,27%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	44.145,89	80.045,00	59.877,43	61.726,53	63.575,64	65.424,75	-4,05%
Lain-lain PAD Yang Sah	56.670,10	23.629,95	9.106,74	9.562,08	10.040,18	10.542,19	-11,62%
PENDAPATAN TRANSFER	10.296.911,55	6.534.000,00	6.412.350,00	6.298.657,50	6.192.524,63	6.093.573,39	-1,73%
	-						
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.597.752,67	5.659.000,00	5.499.850,00	5.348.657,50	5.205.024,63	5.068.573,39	-2,72%
Bagi Hasil Pajak	-	5.024.000,00	4.864.850,00	4.713.657,50	4.570.024,63	4.433.573,39	-3,08%
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	0,00%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

URAIAN	APBD	RKPD	PROYEKSI				r (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-	-	-	-	-	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Dana Insentif Daerah	-						
Dana Desa	-						
Insentif Fiskal	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	699.158,88	850.000,00	887.500,00	925.000,00	962.500,00	1.000.000,00	4,15%
Pendapatan Bagi Hasil	-	850.000,00	887.500,00	925.000,00	962.500,00	1.000.000,00	4,15%
Bantuan Keuangan	-						
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.000,00	81.388,76	98.541,57	115.694,38	132.847,19	150.000,00	16,55%
Pendapatan Hibah	-						
Pendapatan Lainnya	-						
BELANJA	12.000.000,00	7.502.883,26	7.863.021,66	8.012.419,07	8.196.704,71	8.401.622,32	2,88%
BELANJA OPERASI	7.011.186,85	5.335.270,09	5.591.704,83	5.841.765,92	5.689.759,77	5.874.135,63	2,48%
Belanja Pegawai	2.470.351,10	2.435.670,56	2.552.742,06	2.570.311,00	2.617.197,49	2.702.010,39	2,64%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

URAIAN	APBD	RKPD	PROYEKSI				r (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Belanja Barang dan Jasa	4.431.801,62	2.848.512,70	2.985.427,63	3.218.730,37	3.017.742,50	3.116.122,85	2,41%
Belanja Subsidi	140,7	150	150	150	200	200	8,33%
Belanja Hibah	105.602,87	48.076,03	50.386,83	49.653,74	51.206,04	52.865,42	2,43%
Belanja Bantuan Sosial	3.290,55	2.860,80	2.998,31	2.920,81	3.413,74	2.936,97	1,28%
BELANJA MODAL	3.749.518,32	1.373.831,30	1.439.863,21	1.320.399,15	1.596.407,42	1.594.408,24	4,32%
Belanja Modal Tanah	80.059,49	23.415,89	24.541,35	26.407,98	28.735,33	28.699,35	5,28%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.128,41	152.997,47	160.351,15	145.243,91	167.622,78	167.412,87	2,67%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.155.012,55	547.304,76	573.610,45	528.159,66	606.634,82	605.875,13	2,90%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.736.639,78	644.607,87	675.590,35	615.902,20	787.749,68	786.681,03	5,93%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.320,17	4.751,80	4.980,19	3.961,20	4.789,22	4.783,22	1,28%
Belanja Modal Aset Lainnya	89.357,91	753,51	789,72	724,2	875,58	956,64	6,67%
BELANJA TAK TERDUGA	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Belanja Tak Terduga	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
BELANJA TRANSFER	1.189.294,84	783.781,87	821.453,61	840.254,00	900.537,52	923.078,46	4,19%

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

URAIAN	APBD	RKPD	PROYEKSI				r (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	36.928,96	63.381,96	66.428,35	67.220,32	72.043,00	73.846,28	3,92%
Transfer Bantuan Keuangan	1.152.365,88	720.399,92	755.025,26	773.033,68	828.494,52	849.232,18	4,22%
SURPLUS / (DEFISIT)	-500.000,00	-150.000,00	-222.947,15	-227.889,29	-237.437,89	-206.185,37	10,47%
PEMBIAYAAN	-						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	500.000,00	150.000,00	268.347,15	273.289,29	282.837,89	251.585,37	18,30%
Penggunaan SiLPA	500.000,00	150.000,00	268.347,15	273.289,29	282.837,89	251.585,37	18,30%
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-		45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-		45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-						
PEMBIAYAAN NETTO	500.000,00	150.000,00	222.947,15	227.889,29	237.437,89	206.185,37	10,47%

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

URAIAN	APBD	RKPD	PROYEKSI				r (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Bappeda Kab. Kutai Kartanegara, 2025

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan tabel di atas Proyeksi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2025-2030 terlihat bahwa pendapatan total diproyeksikan akan menurun signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp11.500.000.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus miliar rupiah), dari Rp12.590.000.000.000,00 (dua belas triliun lima ratus sembilan puluh miliar rupiah) pada tahun 2024 (sebagai *baseline*). Namun demikian, setelah itu pendapatan diproyeksikan akan menunjukkan pertumbuhan bertahap hingga mencapai Rp8.200.000.000.000,00 (delapan triliun dua ratus miliar rupiah) pada tahun 2030.

Fluktuasi dan penurunan ini terutama disebabkan oleh dinamika pada komponen Dana Transfer yang sangat dominan dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Proyeksi pada tahun 2025 dan 2026 menunjukkan penurunan drastis pada Dana Transfer dibandingkan dengan tahun tahun2024, yang secara langsung berdampak pada total penerimaan.

Lebih lanjut, analisis proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang positif dan menjadi kunci dalam strategi kemandirian fiskal Daerah. Dari Rp953.090.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2025, PAD diharapkan akan tumbuh secara konsisten dan signifikan hingga mencapai Rp1.950.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) pada tahun 2030. Peningkatan PAD ini didorong oleh pertumbuhan yang substansial pada Pajak Daerah, yang diproyeksikan melonjak dari Rp364.450.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2025 menjadi Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus juta rupiah) pada tahun 2030. Retribusi Daerah juga menunjukkan kenaikan, meskipun lebih moderat. Pertumbuhan PAD yang kuat ini sangat krusial untuk mengimbangi potensi penurunan pada Dana Transfer dan mengurangi ketergantungan Daerah.

Di sisi lain, Dana Transfer, yang saat ini merupakan komponen terbesar dalam pendapatan Daerah, diproyeksikan akan mengalami penurunan pada 2026. Dana Transfer diproyeksikan menurun menjadi Rp6.090.000.000.000,00 (enam triliun sembilan puluh miliar rupiah) pada tahun 2030. Penurunan ini terutama disebabkan oleh proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan relatif stabil pada Rp635.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar) setiap tahun dan Transfer Antar Daerah menunjukkan tren peningkatan dari Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

lima puluh miliar rupiah) di RKPD tahun 2026 menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada tahun 2030, penurunan DBH yang substansial menjadi faktor dominan yang menekan total Dana Transfer.

Kondisi proyeksi ini juga menyoroti urgensi bagi Pemerintah Daerah agar secara agresif mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Pertumbuhan yang diproyeksikan pada Pajak Daerah, sebagai tulang punggung PAD, harus didukung dengan kebijakan yang efektif dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selain itu, eksplorasi potensi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan perlu terus dilakukan, mengingat kontribusi keduanya masih relatif kecil namun memiliki potensi untuk ditingkatkan. Dengan adanya proyeksi penurunan Dana Transfer, kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan stabilitas keuangan Daerah di masa mendatang.

Selain dari sisi pendapatan, dari sisi Belanja tahun 2026-2030 juga diproyeksikan ke rata-rata periode sebelumnya. Belanja total Daerah tahun 2025 ditetapkan Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun), pada tahun 2026-2030 diproyeksikan dengan rata-rata rata-rata 2,88 % (dua koma delapan puluh delapan persen) per tahun. Anggaran belanja juga diselaraskan dengan proyeksi pendapatan yang menurun pada tahun 2026, karena adanya efisiensi dari pemerintah pusat.

Belanja terbesar pada tahun 2026-2030 sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Operasi pada tahunn 2030 sebesar Rp5.870.000.000.000,00 (lima triliun delapan ratus tujuh puluh miliar rupiah) atau 69,88 % (enam puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen) dari belanja total, di mana Belanja Pegawai mencapai Rp2.700.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar rupiah) dan Belanja Barang/Jasa Rp3.110.000.000.000,00 (tiga triliun seratus sepuluh miliar rupiah). Belanja Modal dialokasikan Rp1.590.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 18,92 % (delapan belas koma sembilan puluh dua persen), dengan fokus pada infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan yang mencapai Rp786.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar rupiah). Alokasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) konsisten tiap tahun. APBD Kutai Kartanegara 2025 mengalami defisit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan, seluruhnya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tren defisit menurun pada tahun berikutnya, bahkan berpotensi berkurang signifikan pada tahun 2030.

a. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan Pendapatan Daerah ke depan, prioritas utama difokuskan pada penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Hal ini menjadi krusial mengingat proyeksi tren penurunan pada Dana Transfer dari pemerintah pusat, yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas utama seperti minyak dunia dan batubara.

Oleh karena itu, strategi utama akan bergeser dari ketergantungan pada sumber eksternal menjadi pendorong pertumbuhan internal yang berkelanjutan dan lebih stabil. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keberlanjutan fiskal daerah, tetapi juga untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam alokasi anggaran untuk program-program pembangunan strategis yang selaras dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Peningkatan PAD secara signifikan akan didorong oleh intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah. Asumsi dasar yang mendasari proyeksi ini adalah adanya peningkatan rasio pajak daerah, sejalan dengan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Undang-undang itu memberikan ruang lebih besar dan landasan hukum yang kuat bagi Daerah untuk menggali potensi pajaknya secara mandiri dan efektif. Identifikasi dan penarikan pajak dari sektor-sektor yang belum tergali secara maksimal akan menjadi fokus utama, mengingat masih banyaknya potensi pendapatan pajak yang belum terserap secara optimal, terutama jika dibandingkan dengan PDRB di setiap sektor lapangan usaha yang beragam dan dinamis di kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah-langkah ini akan mencakup perbaikan sistem administrasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta ekstensifikasi objek dan subjek pajak yang baru.

Peningkatan *local tax ratio* menjadi landasan fundamental dalam arah kebijakan peningkatan pendapatan Daerah, sejalan dengan semangat yang diusung oleh undang-undang HKPD. Dalam konteks Daerah, upaya peningkatan rasio pajak Daerah akan difokuskan pada optimalisasi jenis-jenis pajak yang ada dan eksplorasi potensi pajak baru sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang HKPD.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Target spesifik akan ditetapkan untuk mencapai peningkatan yang terukur, misalnya dengan target peningkatan *local tax ratio* yang saat ini masih di bawah 1 % (satu persen) menjadi minimal 1,3 % (satu koma tiga persen) pada tahun 2030. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi sektor ekonomi yang tumbuh pesat namun belum berkontribusi optimal pada penerimaan pajak Daerah, serta perbaikan sistem administrasi pajak agar lebih efisien dan transparan, termasuk percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain pajak Daerah, optimalisasi pendapatan dari retribusi Daerah juga akan menjadi agenda penting. Proyeksi didasarkan pada asumsi bahwa potensi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang saat ini belum 100 % (seratus persen) terserap akan dapat terserap penuh hingga tahun tahun 2030.

Contoh spesifik yang selama ini belum terkelola secara optimal adalah retribusi parkir tepi jalan umum, yang memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Untuk mencapai target ini, akan dilakukan perbaikan regulasi retribusi, peningkatan pengawasan, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban retribusi. Upaya ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran pendapatan dan meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi secara menyeluruh.

Untuk memperkuat diversifikasi sumber PAD dan mengurangi dominasi pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan akan didorong secara proaktif. Peningkatan ini akan utamanya berasal dari dividen penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan fokus utama pada Bankaltimtara.

Pemerintah Daerah akan konsisten mengalokasikan pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal setiap tahun, sejalan dengan target Bankaltimtara untuk mencapai aset atau target keuangan tertentu, dengan target penempatan modal hingga Rp747.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar) pada tahun 2030, yang diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan dividen yang signifikan bagi pendapatan Daerah. Selain itu, peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga akan menjadi fokus, melalui peningkatan efisiensi layanan, inovasi dalam pengelolaan keuangan BLUD, dan pengembangan unit-unit usaha yang potensial dalam lingkup BLUD.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah yang memiliki celah fiskal tinggi diberikan ruang untuk pengalokasian Dana Abadi Daerah pada pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya dapat menghasilkan kembali sebagai penerimaan pembiayaan bagi pemenuhan belanja layanan dasar yang diatur secara spesifik sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyiapkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjalankan kebijakan Dana Abadi Daerah.

Sementara itu, komponen Dana Transfer, meskipun diproyeksikan akan mengalami tren penurunan dan gejolak harga komoditas global, tetap menjadi bagian yang diperhitungkan dalam proyeksi pendapatan Daerah. Asumsi yang digunakan adalah adanya peningkatan yang moderat dari Dana Transfer. Namun, proporsi Dana Transfer diharapkan akan berangsur-angsur mengecil seiring dengan penguatan PAD. Kebijakan ini menegaskan pergeseran paradigma dari ketergantungan menjadi kemandirian, mempersiapkan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menghadapi tantangan fiskal di masa depan dengan fondasi ekonomi lokal yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Selain kebijakan pendapatan, kebijakan dari sisi belanja juga memegang peran penting sebagai instrumen keuangan daerah. Belanja daerah merupakan pendekatan yang dirancang dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran dengan berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta asas kepatutan dan kewajaran.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana anggaran yang matang, mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Dengan demikian, seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dapat didanai melalui APBD.

Kebijakan pengalokasian belanja Daerah diawali dengan penetapan belanja wajib di luar pagu Perangkat Daerah (PD), meliputi belanja transfer, belanja tidak terduga, serta pengeluaran pembiayaan yang wajib direalisasikan pada anggaran bersangkutan. Selisih antara perkiraan penerimaan Daerah dengan belanja wajib tersebut menjadi potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap PD.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Perencanaan pagu indikatif PD diarahkan pada belanja yang diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Daerah, yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan pemerintahan dengan fungsi penunjang, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial dan umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan belanja Perangkat Daerah mencakup pengalokasian kebutuhan rutin untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD, serta pendanaan kegiatan yang mendukung program pembangunan prioritas dan unggulan kepala Daerah. Pengalokasian tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, dan pencapaian sasaran strategis Daerah.

Dalam rangka mendorong pencapaian target makro Daerah, Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada upaya pengembangan ekonomi nonekstraktif, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, serta memperkuat ketahanan ekonomi Daerah.

Untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah yang fokus, tertib dan berkesinambungan maka kegiatan-kegiatan yang melewati tahun anggaran dapat di desain dalam skema belanja *multiyears*. Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus dapat mengidentifikasi kegiatan/proyek yang dapat dilaksanakan dalam skema *multiyears*, dengan syarat harus ditetapkan dalam peraturan Daerah, analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah, tidak mengganggu program prioritas yang bersifat wajib, dan dituangkan di dalam dokumen perencanaan (RKPD, KUA-PPAS, APBD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan Daerah selama periode RPJMD. Perhitungan proyeksi kapasitas riil direncanakan bersumber dari pendapatan Daerah dan penerimaan Daerah. Penggunaan alokasi kapasitas riil kemampuan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

keuangan Daerah dikelompokkan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni:

a. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja Daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
b. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah melalui pendanaan program unggulan Bupati;
c. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Adapun proyeksi pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.86.

Proyeksi Kapasitas Rill Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)

URAIAN	RKPD	PROYEKSI			
	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	7.352.883,26	7.640.074,50	7.784.529,78	7.959.266,82	8.195.436,96
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150.000,00	268.347,15	273.289,29	282.837,89	251.585,37
PENDAPATAN NETTO	7.502.883,26	7.908.421,65	8.057.819,07	8.242.104,71	8.447.022,33
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BELANJA TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	63.381,96	66.428,35	67.220,32	72.043,00	73.846,28
Transfer Bantuan Keuangan	720.399,92	755.025,26	773.033,68	828.494,52	849.232,18
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya					
BELANJA NETTO	793.781,88	876.853,61	895.654,00	955.937,52	978.478,46
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN DAEARAH	6.709.101,38	7.031.568,04	7.162.165,07	7.286.167,19	7.468.543,87

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

URAIAN	RKPD	PROYEKSI			
	2026	2027	2028	2029	2030
PEMANFATAAN KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	6.709.101,38	7.031.568,04	7.162.165,07	7.286.167,19	7.468.543,87
PRIORITAS I					
BELANJA MANDATORY DAN SPM	360.511,42	1.828.207,69	1.862.162,92	1.894.403,47	1.941.821,41
PRIORITAS II					
BELANJA PENCAPAIAN VISI, MISI, PROGRAM PRIORITAS	1.872.957,33	2.416.647,09	2.557.125,80	2.507.500,96	2.502.616,97
PRIORITAS III					
BELANJA PENYTELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH LAINNYA	4.475.632,63	2.786.713,26	2.742.876,35	2.884.262,76	3.024.105,49

Sumber : Bappeda Kab. Kutai Kartanegara, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3. Permasalahan dan Isu Strategi Daerah

Permasalahan dan isu strategis memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Identifikasi yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif.

Memahami hal tersebut dalam pembangunan Daerah, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap permasalahan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis tersebut harus diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah. Proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk menjamin bahwa dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, permasalahan dan isu strategis juga harus menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan dan pencapaian tujuan pembangunan, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD juga penting untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berada pada jalur yang benar dan memberikan hasil yang diharapkan. Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Daerah, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan.

Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu internasional, nasional, regional, dan isu lokal dalam lingkup Daerah, serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan demikian, permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada segmen Gambaran Umum Daerah, maka dalam perumusan permasalahan pembangunan Daerah dapat diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan (atau kegagalan) kinerja pembangunan Daerah.

Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi Daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan Daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut.

(1) Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara belum menunjukkan performa yang optimal, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama dari sektor pertambangan, migas, dan kehutanan, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan cenderung belum merata dan belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan masih terjadi, terutama antara masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara masyarakat lokal dan pelaku ekonomi besar yang berasal dari luar daerah. Sektor informal dan UMKM juga belum mampu berkembang secara optimal akibat minimnya akses permodalan, teknologi, dan pasar.

Di sisi lain, ketergantungan ekonomi Daerah terhadap sektor ekstraktif seperti batu bara dan migas menyebabkan struktur ekonomi Daerah menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Ketika harga komoditas turun, dampaknya langsung terasa pada penerimaan Daerah, penyerapan tenaga kerja, dan stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Daerah masih menjadi tantangan besar karena masih minim diversifikasi ekonomi yang kuat, terutama penguatan pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri hilir yang berbasis potensi lokal.

Pertumbuhan ekonomi Daerah pada 2024 tercatat 5,62 % (lima koma enam puluh dua persen), berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,17 % (enam koma tujuh belas) persen. Kemudian, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur, LPE Kabupaten Kutai Kartanegara masih di bawah Kabupaten Berau dan Kutai Barat.

Kesenjangan ini mencerminkan bahwa kontribusi ekonomi Daerah masih belum optimal dalam mendukung dinamika pertumbuhan regional, terutama di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah penyangga Ibukota Nusantara Negara (IKN) Nusantara.

Kondisi ini menunjukkan perlunya akselerasi penguatan sektor-sektor produktif non ekstraktif, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, serta peningkatan investasi dan inovasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.35.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Se-Provinsi Kalimantan Timur, 2024

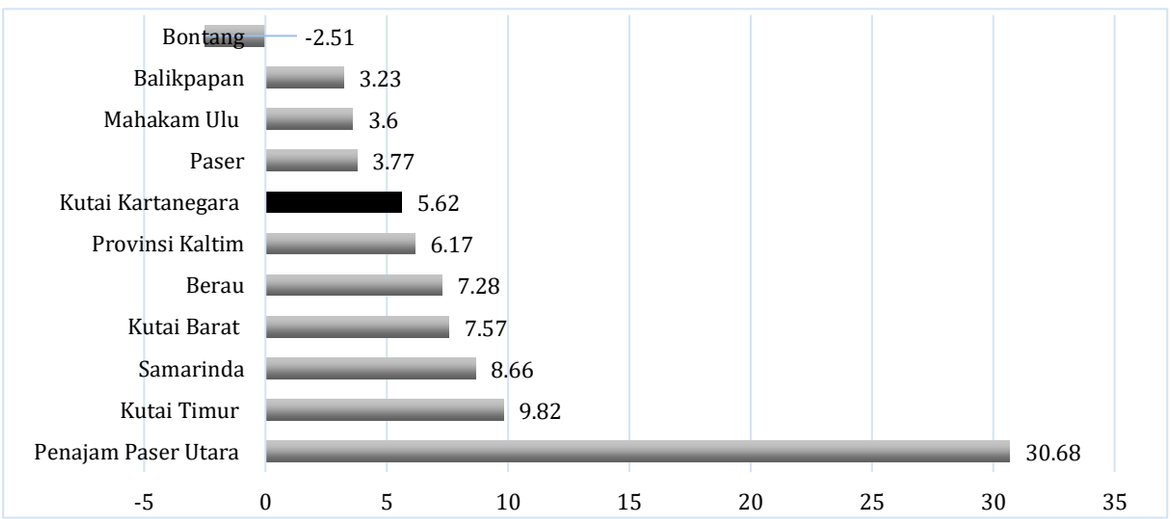

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti mendorong pembangunan ekonomi berbasis wilayah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan potensi desa, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi rakyat, serta memperkuat kemitraan antara swasta, UMKM, dan masyarakat lokal. Selain itu, diperlukan pula regulasi yang mendorong investasi berwawasan lingkungan dan sosial, agar pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan.

(2) Belum Meratanya Pelayanan Infrastruktur Dasar

Pelayanan infrastruktur dasar Daerah masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan, terutama di wilayah-wilayah terpencil, perdesaan, dan kawasan pinggiran. Akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat secara adil.

Hal tersebut menyebabkan ketimpangan antar-wilayah dalam menikmati manfaat pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan akses terhadap layanan publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagian besar infrastruktur masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sementara desa-desa di wilayah pedalaman dan pesisir mengalami keterbatasan akses yang cukup signifikan.

Kondisi jalan yang rusak dan belum beraspal, terbatasnya pasokan listrik yang stabil, serta kesulitan memperoleh air bersih, menjadi masalah riil yang masih dihadapi masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat pergerakan barang dan jasa, tetapi juga memperlemah konektivitas sosial dan ekonomi antar-wilayah di dalam Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri.

Meskipun pembangunan Daerah terus mengalami kemajuan, namun belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya 6,51 % (enam koma lima puluh satu persen) penduduk yang belum memiliki rumah layak huni. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi tempat tinggal yang kurang memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan.

Kondisi tersebut menandakan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya di sektor perumahan, yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

semestinya menjadi bagian integral dari upaya pembangunan inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Daerah perlu memperkuat intervensi melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah agar seluruh warga dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 65,50 % (enam puluh lima koma lima puluh persen), menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari panjang total jalan di wilayah ini masih berada dalam kondisi rusak dan atau rusak berat. Hal ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas dan konektivitas antar-wilayah, khususnya ke daerah-daerah terpencil atau kawasan pengembangan ekonomi baru, masih terganggu.

Infrastruktur jalan yang belum layak tersebut berpotensi menghambat distribusi barang dan jasa, memperlambat mobilitas masyarakat, serta mengurangi efisiensi pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan percepatan program perbaikan dan peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah serta menjamin pemerataan hasil pembangunan hingga ke pelosok desa.

Selain permasalahan di sektor perumahan dan infrastruktur jalan, capaian pelayanan dasar terkait akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara juga masih belum optimal.

Data menunjukkan bahwa rumah tangga pengguna air bersih baru mencapai 80,20 % (delapan puluh koma dua puluh persen), sementara rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak baru sebesar 89,10 % (delapan puluh sembilan koma sepuluh persen). Kondisi ini menunjukkan 1 (satu) dari 5 (lima) rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih yang memadai, atau hampir 10,90 % (sepuluh koma sembilan puluh persen) rumah tangga belum menikmati fasilitas sanitasi yang layak.

Keterbatasan akses ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan atau kawasan padat penduduk. Pemerintah Daerah perlu memperluas cakupan infrastruktur air bersih dan sanitasi dengan pendekatan kolaboratif antara

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pemerintah pusat, Daerah, dan masyarakat, agar seluruh warga dapat terpenuhi hak dasarnya atas lingkungan hidup yang sehat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan pendekatan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan, dengan memperkuat perencanaan berbasis data spasial dan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta dalam membiayai dan membangun infrastruktur dasar yang berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, perlu dikembangkan skema inovatif seperti infrastruktur berbasis komunitas, padat karya, dan digitalisasi layanan, agar pembangunan dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

(3) Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini tercermin dari berbagai permasalahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan, praktik-praktik administrasi pemerintahan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi lintas Perangkat Daerah, tumpang-tindih kewenangan, serta rendahnya kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Hal tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi penggunaan anggaran dan lambatnya respons terhadap kebutuhan masyarakat. Masih terdapat disparitas dalam kualitas pelayanan publik antarwilayah dan antarinstansi, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, dan kepastian pelayanan.

Selain itu, implementasi prinsip keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten, sehingga masyarakat masih kesulitan mengakses data dan informasi yang seharusnya terbuka. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan juga memperlemah legitimasi dan efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Kondisi ini menjadi hambatan serius dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, bersih, dan melayani.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mengalami peningkatan pada 2024 menjadi 71,51 (tujuh puluh satu koma lima puluh satu), angka tersebut mengalami kenaikan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dibanding pada tahun 2023 yakni sebesar 60,12 (enam puluh koma dua belas). Meskipun demikian tantangan serius dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Terlebih lagi, capaian IRB tersebut masih terpaut cukup jauh dibandingkan dengan IRB Provinsi Kalimantan Timur yaitu 85,16 (delapan puluh lima koma enam belas) pada yang tahun sama. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam mempercepat reformasi birokrasi Daerah, khususnya dalam hal penyederhanaan prosedur pelayanan, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara berbasis digitalisasi dan kinerja.

Pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara juga masih belum optimal. Dengan nilai 67,86 (enam puluh tujuh koma delapan puluh enam) pada tahun 2023 atau kategori B dan mengalami penurunan menjadi 65,93 (enam puluh lima koma sembilan puluh tiga pada tahun 2024 akibat adanya perubahan mekanisme penilaian, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal konsistensi antara perencanaan program dan hasil capaian kinerja.

Jika dibandingkan dengan capaian SAKIP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 yaitu 78,74 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh empat), Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki kesenjangan yang cukup besar dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM perencana, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta integrasi sistem pelaporan kinerja menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan.

Untuk mendorong perwujudan tata kelola yang lebih baik, Pemerintah Daerah perlu memperkuat sistem integritas birokrasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta penerapan sistem pengawasan internal yang ketat dan independen. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan juga harus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mendukung sistem pemerintahan digital *(e-government)* harus dioptimalkan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

(4) Belum Optimalnya Pembangunan SDM yang Merata

Pembangunan SDM yang merata di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah pada tahun 2024 yang masih berada di angka 76,57 (tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh). Capaian itu menempatkannya Kabupaten Kutai Kartanegara pada peringkat ke-5 (lima) dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Meskipun tergolong tinggi dalam klasifikasi nasional, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Timur 78,79 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pendapatan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal, terutama di wilayah perdesaan, pesisir, dan terpencil.

Belum optimalnya pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan IPM, juga tampak dari terbatasnya infrastruktur dan kualitas layanan publik dasar di sejumlah kecamatan. Tantangan lain adalah masih tingginya ketimpangan kualitas tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan antarwilayah, serta belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Untuk mendorong pemerataan pembangunan SDM, Pemerintah Daerah perlu mengadopsi pendekatan yang berbasis wilayah dan data mikro, termasuk memperluas program afirmatif seperti beasiswa pendidikan tinggi untuk pelajar daerah, pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan terpadu di Daerah tertinggal, serta peningkatan kapasitas tenaga medis dan guru melalui pelatihan berkelanjutan. Strategi ini penting agar seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menikmati manfaat pembangunan secara setara dan berkelanjutan.

(5) Belum Optimalnya Ketahanan Sosial dan Pelestarian Budaya dalam Upaya Menuju Masyarakat Berkebudayaan Maju

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional, saat ini

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan sosial dan pelestarian budayanya. Proses modernisasi, urbanisasi, dan masuknya arus globalisasi telah membawa dampak terhadap perubahan pola hidup masyarakat, yang sering kali menyebabkan tergerusnya identitas budaya lokal.

Nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, serta praktik-praktik budaya warisan leluhur mulai terpinggirkan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar budaya digital dan konsumtif. Ketahanan sosial masyarakat pun menjadi rentan terhadap konflik sosial, intoleransi, dan disintegrasi nilai-nilai kebangsaan.

Di sisi lain, upaya pelestarian budaya seperti seni tradisional, bahasa daerah, ritual adat, dan warisan sejarah belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai, baik dari segi kebijakan, pendanaan, maupun regenerasi pelaku budaya. Banyak komunitas adat yang mengalami marginalisasi, dan kegiatan budaya lokal kerap hanya bersifat seremonial tanpa proses dokumentasi dan revitalisasi yang berkelanjutan.

Selain itu, lemahnya integrasi antara sektor pendidikan dan kebudayaan menyebabkan nilai-nilai lokal tidak terinternalisasi secara kuat dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya karakter dan jati diri masyarakat.

Permasalahan ini dapat dilihat dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada tahun 2024 baru mencapai 57,42 (lima puluh tujuh koma empat puluh dua). Menelisik lebih mendalam, penilaian mandiri dari Indeks Pembangunan Kebudayaan, dimensi ekonomi budaya masih berada pada nilai 39,00 (tiga puluh sembilan), sehingga perlu adanya peningkatan dalam optimalisasi ketahanan sosial dan pelestarian budaya, dalam upaya menuju masyarakat berkebudayaan maju di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, ketahanan sosial juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Keluarga *(iBangga)* Daerah menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 58,60 (lima puluh delapan koma enam puluh) pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 meningkat sebesar 63,34 (enam puluh tiga koma tiga puluh empat), dan pada tahun 2024 menjadi 66,96 (enam puluh enam koma sembilan puluh enam).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Capaian tersebut berada di atas *iBangga* Provinsi Kalimantan Timur yaitu 65,50 (enam puluh lima koma lima puluh), serta berada di atas capaian nasional yaitu 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh). Namun demikian, dari capain pada tahun 2024 tersebut, aspek kemandirian masih masuk dalam kategori paling rendah untuk perhitungan komposit pembentuknya yaitu 59,01 (lima puluh sembilan koma nol satu), jika dibandingkan dengan aspek ketenteraman yaitu 65,71 (enam puluh lima koma tujuh puluh satu) dan aspek kebahagiaan yaitu 76,16 (tujuh puluh enam koma enam belas).

Capaian Daerah pada tahun 2024 masih termasuk dalam kategori cukup baik (berkembang), belum mencapai kategori baik (tangguh). Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencakup dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, masih menghadapi tantangan dalam hal penguatan peran keluarga, akses terhadap layanan sosial dasar, dan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Upaya intensif diperlukan melalui sinergi lintas sektor untuk memperkuat program pemberdayaan keluarga, peningkatan literasi pengasuhan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan agar pembangunan keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berkualitas dan inklusif.

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkebudayaan maju, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan strategi ketahanan sosial berbasis budaya lokal, memperkuat program pendidikan karakter berbasis nilai kearifan lokal, serta menyediakan ruang-ruang kreatif bagi komunitas seni dan budaya.

Dukungan regulasi yang mendorong perlindungan budaya lokal, pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan, serta sinergi antara lembaga adat, akademisi, dan pemerintah juga menjadi kunci untuk menjamin bahwa kekayaan budaya Daerah tidak hanya dipertahankan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dalam membentuk masyarakat yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing dalam konteks budaya.

(6) Belum Optimalnya Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat

Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan kesejahteraan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tantangan serius yang memerlukan perhatian strategis. Meskipun Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur, namun manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan kesejahteraan antara-wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara masyarakat di pusat kegiatan ekonomi dengan di daerah pesisir dan pedalaman, masih cukup tinggi. Kondisi ini ditandai dengan masih adanya kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja produktif.

Faktor lain yang memperparah kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat literasi finansial, terbatasnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, serta belum optimalnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan struktural.

Di sisi lain, pendekatan program masih cenderung bersifat karitatif daripada transformatif, sehingga tidak menciptakan perubahan mendasar dalam struktur kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis data mikro, melalui intervensi langsung terhadap kelompok rentan, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, serta dukungan terhadap pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal yang mampu membuka lapangan kerja secara berkelanjutan.

Gambar 2.36.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

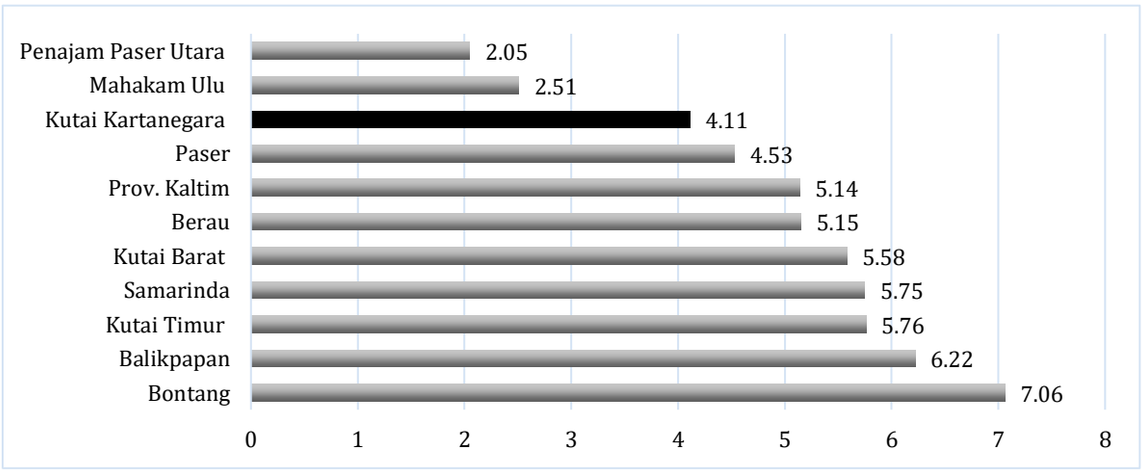

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,11 % (empat koma sebelas) persen, berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu 5,14 % (lima koma empat belas persen). Angka tersebut menempatkan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam posisi relatif lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain seperti Bontang sebesar 7,06 % (tujuh koma nol enam persen), Balikpapan sebesar 6,22 % (enam koma dua puluh dua persen), maupun Kutai Timur sebesar 5,76 % (lima koma tujuh puluh enam persen). Meski demikian, tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap signifikan, terutama menyangkut kualitas penyerapan tenaga kerja lokal terhadap sektor formal yang produktif dan berkelanjutan. Dengan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertambangan dan industri ekstraktif, Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mendorong diversifikasi sektor ekonomi dan peningkatan keterampilan angkatan kerja, agar penurunan pengangguran tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga berkelanjutan dalam aspek kesejahteraan.

Gambar 2.37.
Tingkat Kemiskinan
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

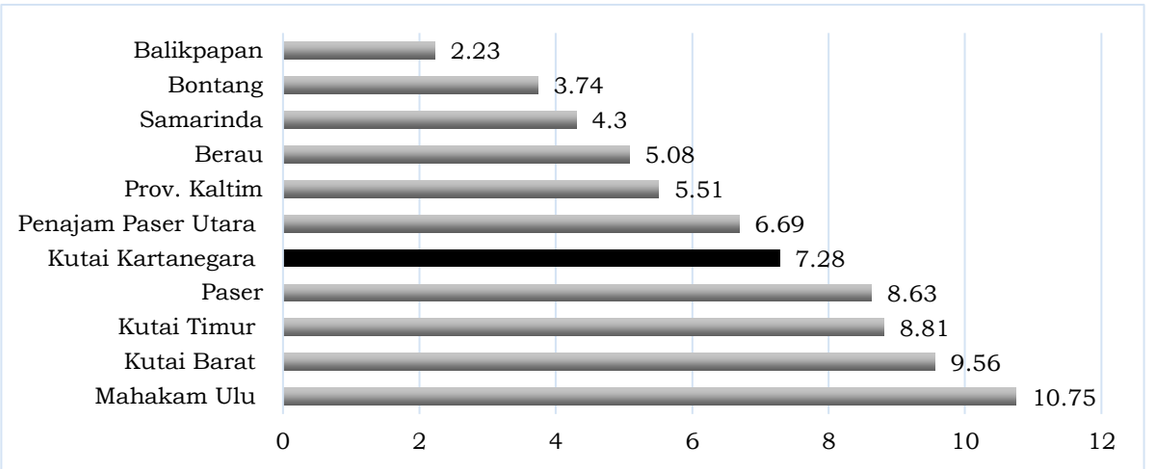

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Tingkat kemiskinan Daerah pada Maret 2024 tercatat sebesar 7,28 % (tujuh koma dua puluh delapan persen), berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 5,51 % (lima koma lima puluh satu persen) dan juga melampaui angka nasional yaitu sebesar 8,57 % (delapan koma lima puluh tujuh persen). Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Kalimantan Timur seperti Balikpapan sebesar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2,23 % (dua koma dua puluh tiga persen), Bontang 3,74 % sebesar (tiga koma tujuh puluh empat persen), dan Samarinda sebesar 4,30 % (empat koma tiga puluh persen), maka tingkat kemiskinan Daerah masih cukup tinggi, mencerminkan adanya ketimpangan kesejahteraan antar-wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan meskipun Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekayaan sumber daya alam dan kontribusi besar terhadap ekonomi provinsi, distribusi hasil pembangunan belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin, khususnya di daerah pedalaman dan pesisir. Upaya strategis untuk menurunkan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan akses ekonomi produktif, pelayanan dasar, serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Gambar 2.38.

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur, 2024

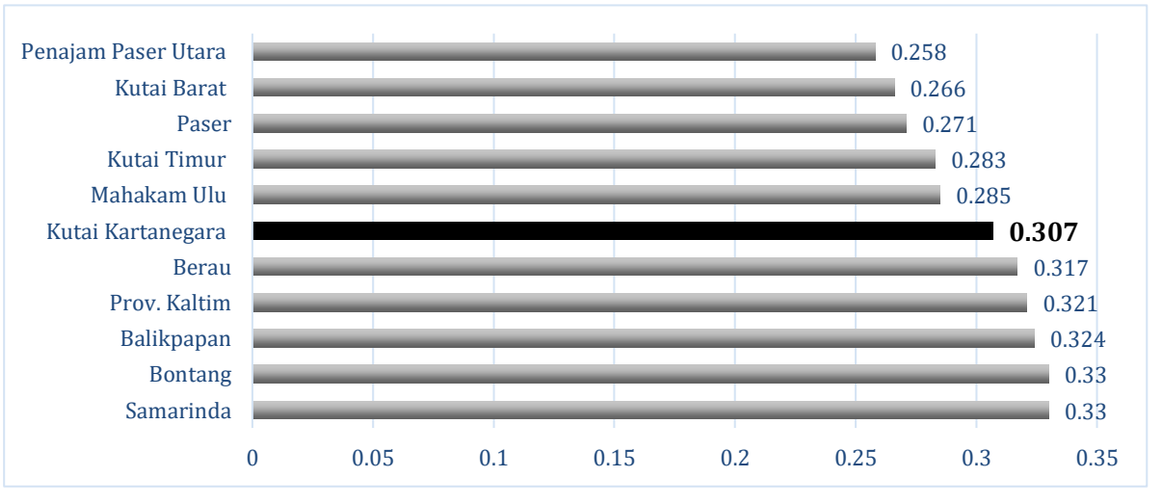

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Indeks Gini Daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,307 (nol koma tiga ratus tujuh), berada di bawah Kabupaten Berau sebesar 0,317 (nol koma tiga ratus tujuh belas). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Kartanegara relatif lebih rendah dibanding Berau, meskipun masih berada dalam kategori sedang menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik.

Meskipun demikian, angka tersebut tetap menandakan adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan masyarakat, di mana kelompok berpenghasilan tinggi masih memiliki porsi ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok bawah. Untuk itu, upaya pengurangan ketimpangan perlu terus diperkuat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, akses layanan dasar yang merata, serta

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

peningkatan keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam aktivitas ekonomi produktif.

(7) Meningkatnya Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai Dampak Aktivitas Ekonomi dan Resiliensi Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara sedang menghadapi peningkatan potensi kerusakan lingkungan hidup yang signifikan, sebagai akibat dari aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.

Ekspansi lahan untuk keperluan industri ekstraktif dan pertanian berskala besar seringkali dilakukan tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai, sehingga memicu deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta menurunnya kualitas keanekaragaman hayati. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan di berbagai wilayah mengalami penurunan drastis, yang turut mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, resiliensi terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya sistem mitigasi bencana, keterbatasan infrastruktur tanggap darurat, serta rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko lingkungan. Perubahan iklim juga menjadi faktor yang memperparah kondisi, dengan meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang berdampak pada ketahanan pangan, sumber air bersih, dan stabilitas ekonomi lokal. Daerah-daerah dengan infrastruktur dan tata ruang yang tidak adaptif menjadi sangat rentan terhadap kerugian ekologis dan sosial-ekonomi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 tercatat sebesar 73,59 (tujuh puluh tiga koma lima puluh sembilan), menunjukkan kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu 76,63 (tujuh puluh enam koma enam puluh tiga). Selisih ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong cukup baik, namun masih ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, pengelolaan limbah, pencemaran air dan udara, serta perlindungan terhadap kawasan lindung.

Rendahnya IKLH juga bisa menjadi refleksi dari tingginya tekanan aktivitas ekonomi, khususnya dari sektor ekstraktif seperti

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pertambangan dan perkebunan yang cukup dominan di wilayah ini. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan sinergi kebijakan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan, termasuk melalui penguatan pengawasan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian.

Perekonomian Daerah hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 57,73 % (lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga persen). Ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor ini mencerminkan struktur ekonomi yang belum beranjak ke arah diversifikasi dan keberlanjutan, mengingat sektor pertambangan merupakan sumber daya tak terbarukan yang rentan terhadap fluktuasi harga global serta berdampak besar terhadap lingkungan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, perlu didorong pengembangan sektor ekonomi alternatif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif agar ketahanan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Daerah perlu memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan lingkungan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, serta penerapan pendekatan ekonomi hijau.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana harus menjadi prioritas, termasuk melalui edukasi kebencanaan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan penyusunan tata ruang berbasis risiko. Dengan demikian, daerah ini dapat membangun resiliensi lingkungan yang kuat sebagai fondasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Secara detail, permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara per urusan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Permasalahan Tiap Bidang Urusan

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Bidang Urusan	Permasalahan
Urusan Pendidikan	1) Ketidakmerataan kualitas pendidikan
	2) Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	3) Kurangnya aksesibilitas ke jenjang pendidikan terapan
	4) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan
	5) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan dasar
Urusan Kesehatan	1) Ketidakmerataan distribusi sumber daya kesehatan
	2) Peran lintas sektor yang belum maksimal dalam mendukung kesehatan
	3) Belum optimalnya penuntasan prevalensi stunting
	4) Kurangnya keterbukaan masyarakat terkait TBC
	5) Ketidakstabilan kontinuitas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Kurang memadainya kondisi jalan dan jembatan
	2) Penurunan kualitas sarana irigasi
	3) Kurang memadainya infrastruktur dan sarana sanitasi
	4) Belum meratanya infrastruktur air siap minum perpipaan
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1) Terbatasnya pendataan dan pembaruan informasi kawasan kumuh
	2) Tidak adanya kegiatan pencegahan terhadap kawasan kumuh
	3) Belum optimalnya penataan permukiman tepi sungai
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1) Pos pemadam kebakaran belum sesuai standar sebagaimana peraturan perundang-undangan
	2) Kuantitas dan kualitas personil serta sarana prasarana pemadam kebakaran masih kurang
	3) Penataan ruang dan tata kelola DAS yang belum berbasis pengurangan risiko bencana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang Urusan	Permasalahan
	4) Belum terbangunnya sistem kesiapsiagaan bencana
	5) Belum terintegrasinya kajian risiko bencana di dalam RTRW
	6) Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah
Urusan Sosial	1) Perlambatan laju penurunan kemiskinan
	2) Kurangnya optimalisasi peran Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam pembaruan DTKS di desa
	3) Kekurangan tenaga kesejahteraan sosial untuk pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	4) Belum optimalnya komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada kelompok PSKS
Urusan Tenaga Kerja	1) Kurangnya akses pencari kerja ke program pelatihan
	2) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal
	3) Terbatasnya kesempatan kerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak
Urusan Pangan	2) Masih rendahnya skor pola pangan harapan ketersediaan dan konsumsi 3) Masih adanya desa rawan pangan
Urusan Pertanahan	1) Masih terkendalanya pembebasan lahan pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian dalam program strategis kepala daerah
Urusan Lingkungan Hidup	1) Tingginya Indeks Pencemaran Air 2) Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca 3) Belum terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 4) Belum terbentuknya taman keanekaragaman hayati di luar hutan 5) Rendahnya ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6) Terbatasnya TPS dan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Belum terintegrasi pelayanan penerbitan KIA di tingkat desa dan kecamatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang Urusan	Permasalahan
	2) Belum optimalnya sosialisasi persyaratan dan penggunaan layanan berbasis teknologi informasi
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Masih rendahnya kualitas SDM Perangkat Desa, BPD, dan Kelembagaan Masyarakat 2) Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat 3) Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA 2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana (KB)
Urusan Perhubungan	1) Belum optimalnya layanan jasa transportasi antar kecamatan baik darat maupun perairan 2) Belum adanya konektivitas atau akses jalan yang memadai bagi wilayah-wilayah Kutai Kartanegara ke wilayah IKN
Urusan Komunikasi dan Informatika	1) Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi 2) Strategi komunikasi publik yang belum menyeluruh dan terpadu
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1) Belum memadainya kompetensi SDM pengelola koperasi 2) Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro
Urusan Penanaman Modal	1) Belum adanya kepastian hukum terkait penetapan kawasan industri 2) Belum tersedianya dukungan regulasi tentang fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha di Kutai Kartanegara 3) Belum memadainya infrastruktur pendukung investasi pada kawasan yang diperuntukkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang Urusan	Permasalahan
	4) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan potensi hilirisasi pertanian dalam arti luas
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1) Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda 2) Kurangnya tenaga keolahragaan bersertifikasi 3) Belum meratanya pelaksanaan kejuaraan olahraga di daerah 4) Kurangnya fasilitas olahraga yang mudah diakses 5) Aspek finansial yang menghambat partisipasi dalam kegiatan olahraga
Urusan Statistik	1) Belum optimalnya capaian indeks pembangunan statistik 2) Belum optimalnya pemanfaatan Satu Data Indonesia
Urusan Persandian	1) Belum optimalnya jaminan keamanan informasi
Urusan Kebudayaan	1) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya 2) Terkendalanya pemeliharaan cagar budaya yang terhambat oleh status kepemilikan aset 3) Belum optimalnya kolaborasi dan kemitraan dengan stakeholder 4) Belum adanya dokumen kajian terkait penetapan cagar budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara
Urusan Perpustakaan	1) Kurangnya sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pembudayaan kegemaran membaca dan pengembangan literasi masyarakat
Urusan Kearsipan	1) Terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur teknologi kearsipan 2) Sistem manajemen arsip yang belum efisien
Urusan Kelautan dan Perikanan	1) Rendahnya kesadaran pelaku usaha tentang penangkapan ikan berkelanjutan 2) Perlu peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil kelautan 3) Sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya belum memadai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang Urusan	Permasalahan
Urusan Pariwisata	1) Masih kurangnya pengembangan destinasi wisata baru maupun revitalisasi objek wisata yang sudah ada 2) Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung usaha pariwisata lokal 3) Belum optimalnya amenitas pariwisata 4) Belum optimalnya potensi wisata alam dan budaya di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)
Urusan Pertanian	1) Tingginya biaya produksi dan cara produksi yang masih manual 2) Belum optimalnya mitigasi terhadap risiko perubahan iklim, banjir, dan kekeringan 3) Keterbatasan solar, pupuk, dan benih bersubsidi 4) Alih profesi petani dan menurunnya jumlah peternak produktif 5) Serangan wabah penyakit ternak endemis
Urusan Kehutanan	1) Gangguan pada kawasan TAHURA yang menghambat pengelolaan dan penataan blok 2) Belum terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup terkait perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan 3) Belum optimalnya perlindungan habitat orangutan di TAHURA
Urusan Perkebunan	1) Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2) Rendahnya minat masyarakat dan petani dalam budidaya tanaman perkebunan, antara lain: kopi, aren, dan kakao
Urusan Perdagangan	1) Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan
Urusan Perindustrian	1) Masih belum aktifnya sentra IKM berbasis hilirisasi produk pertanian dalam arti luas
Urusan Pemerintahan Daerah	1) Belum optimalnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi 2) Pengukuran dan pemanfaatan kinerja yang belum optimal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang Urusan	Permasalahan
	3) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang memadai
Perencanaan	1) Terbatasnya basis data yang valid dan terbaru untuk Pembangunan 2) Kurangnya kompetensi perangkat daerah dalam perencanaan daerah 3) Perubahan regulasi yang tidak sinkron dengan tata kelola perencanaan pembangunan daerah 4) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan
Penelitian dan Pengembangan	1) Jumlah peneliti yang terbatas 2) Sarana dan prasarana riset yang belum memadai 3) Kurangnya dukungan regulasi 4) Pengendalian dan evaluasi hasil riset yang belum optimal
Keuangan	1) Belum optimalnya capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2) Belum optimalnya proses administrasi dan penagihan pajak daerah 3) Belum tersedianya database potensi pajak daerah dan retribusi 4) Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah
Kepegawaian	5) Masih belum optimalnya pelaksanaan sistem merit 6) Kurang optimalnya pengembangan kompetensi ASN 7) Belum terlaksananya manajemen talenta
Pengawasan	1) Keterbatasan tenaga pengawas yang kompeten 2) Lemahnya respon terhadap pengaduan prioritas
Pemerintahan Umum	1) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 2) Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik 3) Pendidikan politik belum menjangkau wilayah perdesaan 4) Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan yang menyimpang dari ideologi Pancasila

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Bidang Urusan	Permasalahan
Kewilayahan	1) Belum optimalnya layanan publik di kecamatan

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun, 2025, diolah

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis mencakup berbagai urgensi yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal, karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan Daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu lokal yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan Daerah.

2.3.2.1 Isu Global

Isu strategis internasional menjadi isu RPJMN yang penting dalam pembangunan nasional, yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Daerah. Isu global ini akan menjadi *warning action* dalam pembangunan secara menyeluruh, yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Geopolitik Dan Geoekonomi

Perubahan dinamika geopolitik dan geoekonomi global berdampak semakin nyata terhadap pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketegangan antar-negara besar, disrupsi rantai pasok global akibat konflik Rusia-Ukraina, maupun ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, serta perubahan arah kebijakan ekonomi negara-negara maju dalam transisi energi bersih, mempengaruhi pasar ekspor komoditas strategis Indonesia-khususnya batu bara dan minyak bumi yang menjadi tulang punggung perekonomian Daerah. Ketergantungan Daerah terhadap pasar global untuk komoditas tersebut menjadikannya sangat rentan terhadap gejolak harga dunia, kebijakan dekarbonisasi, serta hambatan perdagangan internasional.

Selain itu, transformasi ekonomi dunia menuju energi terbarukan dan ekonomi hijau, turut menekan daerah yang masih mengandalkan sektor ekstraktif. Kabupaten Kutai Kartanegara perlu bersiap menghadapi potensi penurunan permintaan global terhadap energi fosil, termasuk batu bara, yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jika tidak diantisipasi dengan strategi diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor baru seperti industri hijau, pertanian modern, serta pariwisata berbasis budaya dan alam, maka Daerah dapat mengalami tekanan ekonomi yang serius dalam beberapa tahun ke depan.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan Daerah perlu diorientasikan untuk adaptif terhadap dinamika global tersebut, serta memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi lokal agar tidak terlalu bergantung pada situasi geoekonomi dunia yang sangat dinamis.

b. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global berdampak nyata dan semakin terasa terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan, menjadi ancaman serius bagi ketahanan wilayah ini.

Aktivitas pertambangan, deforestasi, serta alih fungsi lahan yang masif memperburuk daya dukung lingkungan dan mempercepat laju kerusakan ekosistem lokal. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat, tetapi juga berisiko terhadap ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, serta kelangsungan pembangunan ekonomi secara umum.

Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang terletak di jalur sungai besar dan memiliki kawasan pesisir, turut menghadapi risiko peningkatan permukaan air laut dan erosi pantai akibat perubahan iklim global. Ketahanan infrastruktur dasar terhadap bencana hidrometeorologi masih terbatas, sehingga kerentanan masyarakat semakin tinggi, terutama di wilayah perdesaan.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terpadu, seperti rehabilitasi hutan, pengendalian emisi karbon, tata ruang berbasis risiko bencana, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Investasi dalam pendidikan lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks dan berdampak lintas sektor.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi telah menjadikan transformasi digital sebagai isu global yang juga berdampak nyata bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Daerah terus memacu adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *Smart City*, dan kebijakan Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola serta efisiensi layanan publik. Upaya digitalisasi mencakup pelatihan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat program *Government Transformation Academy* (GTA), pembekalan teknis keamanan siber, hingga penguatan kapasitas digital di internal PD dan kecamatan.

Pendekatan menyeluruh ini bertujuan menghadirkan birokrasi yang cepat, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap tantangan modern. Inovasi teknologi juga merambah ke layanan desa, hal ini terlihat dari di bidang pendidikan Pemerintah Daerah dengan meluncurkan *Sekolah Google* sebagai percontohan pembelajaran digital interaktif yang menjadikan siswa lebih siap menghadapi kompetisi global. Transformasi digital ini membuka peluang baru bagi pemberdayaan masyarakat lokal, UMKM, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi.

d. Industri 5.0

Perkembangan konsep Industri 5.0 yang menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin cerdas, teknologi berorientasi keberlanjutan, serta ketahanan sistem industri menjadi tantangan sekaligus peluang strategis bagi kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara nasional, Indonesia telah mulai mengintegrasikan teknologi seperti AI, *cobots*, IoT, *digital twins*, dan *big data analytics* dalam sektor manufaktur guna meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja dan lingkungan. Namun, realisasi penerapan di daerah masih perlu dipercepat, apalagi ketika infrastruktur digital, kesiapan SDM, dan skema regulasi di sektor industri belum merata dan sering tertinggal dibanding kawasan prioritas nasional.

Khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara, transformasi menuju Industri 5.0 dapat menjadi titik tolak diversifikasi ekonomi dari ketergantungan sektor ekstraktif batu bara dan migas ke industri manufaktur lokal yang lebih canggih, hijau, dan inklusif.

Dengan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, akademisi, swasta, dan pelaku industri serta meningkatkan akses pelatihan teknis dalam teknologi digital dan otomasi daerah ini berpeluang menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi sekaligus meningkatkan daya saing produk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

lokal. Namun demikian, tantangan seperti biaya investasi awal yang tinggi, teman keterampilan pekerja lokal yang minim, dan integrasi sistem teknologi menjadi hambatan utama yang perlu ditangani secara strategis.

e. Adanya Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa dampak besar terhadap pola hidup, nilai-nilai sosial, dan budaya masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Digitalisasi dan akses luas terhadap media sosial, internet, serta perangkat komunikasi modern telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, belajar, bekerja, bahkan mengekspresikan identitas budaya.

Di satu sisi, kemajuan ini membuka ruang positif bagi penyebaran informasi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya lokal yang signifikan, seperti menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi, bahasa daerah, serta nilai-nilai adat yang sebelumnya menjadi dasar kohesi sosial masyarakat Kutai.

Fenomena globalisasi informasi ini menciptakan budaya konsumtif, instan, dan individualistik yang kian menggantikan budaya kolektif dan kearifan lokal. Tradisi lisan, seni pertunjukan, serta kearifan-kearifan lokal mulai terpinggirkan oleh budaya populer global yang mudah diakses melalui internet. Bahkan, dalam konteks pendidikan dan keluarga, nilai-nilai budaya lokal mulai luntur karena kurangnya integrasi antara teknologi dan pelestarian budaya dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Daerah adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi secara bijak untuk mendukung pelestarian budaya lokal misalnya melalui digitalisasi arsip budaya, promosi seni daerah melalui platform digital, dan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal agar budaya Kutai tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkembang di era digital.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merupakan isu yang berpotensi menghambat pembangunan nasional, sehingga perlu antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Dalam konteks isu jangka menengah nasional, penguatan resiliensi ekonomi dan pemanfaatan prospek pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi agenda penting yang juga sangat relevan dengan kondisi Daerah. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan dan migas, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan perekonomian nasional.

Namun demikian, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif juga menjadikan struktur ekonomi Daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan tekanan kebijakan transisi energi hijau di tingkat internasional. Oleh karena itu, penguatan daya tahan ekonomi Daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pembangunan jangka menengah di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah Daerah memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara, yang secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai katalis pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran IKN dapat mendorong tumbuhnya sektor jasa, konstruksi, logistik, UMKM, serta pariwisata budaya dan alam Daerah, sekaligus menjadi peluang diversifikasi ekonomi yang selama ini didominasi sektor tambang.

Dengan meningkatkan konektivitas infrastruktur dan integrasi antarwilayah, serta memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal, Kabupaten Kutai Kartanegara berpotensi menjadi daerah penyangga ekonomi yang tangguh bagi pengembangan kawasan metropolitan baru di Kalimantan.

Namun demikian, untuk mewujudkan prospek ekonomi yang positif tersebut, dibutuhkan kebijakan Daerah yang terarah, khususnya dalam mendukung iklim investasi, penguatan ekonomi hijau, pengembangan SDM lokal, dan digitalisasi sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu mengadopsi strategi pembangunan jangka menengah yang adaptif dan resilien terhadap perubahan, termasuk risiko krisis global, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam menciptakan ketahanan ekonomi yang tidak hanya mampu bertahan dari guncangan, tetapi juga tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati serta potensi lingkungan yang sangat besar. Kawasan ini mencakup hutan tropis, sungai-sungai besar, dan ekosistem rawa serta gambut yang menjadi habitat berbagai spesies flora dan fauna endemik, termasuk bekantan, orangutan, dan berbagai jenis burung langka.

Keanekaragaman ini tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai basis ekonomi hijau melalui ekowisata, penelitian konservasi, dan jasa lingkungan. Dalam kerangka pembangunan nasional jangka menengah, pelestarian kekayaan hayati ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem di tengah tekanan pembangunan.

Namun demikian, keanekaragaman hayati dan potensi lingkungan Daerah saat ini berada dalam kondisi yang rentan akibat eksploitasi sumber daya alam yang masif, seperti aktivitas pertambangan terbuka, pembukaan lahan skala besar, dan pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan.

Fragmentasi habitat, pencemaran sungai, serta konversi kawasan lindung menjadi lahan industri telah mengancam keberadaan spesies langka dan menurunkan fungsi ekosistem alami. Di sisi lain, perubahan iklim dan bencana ekologis juga semakin memperburuk daya tahan lingkungan, menjadikan isu pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi adaptasi nasional.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati dalam rencana pembangunan Daerah jangka menengah, sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti penguatan kawasan konservasi, penegakan hukum lingkungan, pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan, serta edukasi masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian alam perlu diperluas.

Dukungan pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk mengelola potensi lingkungan secara bijak, agar dapat menjadi pilar ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga warisan hayati bangsa Indonesia di masa depan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi SDM yang besar, didukung oleh jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat. Kondisi ini menjadi peluang strategis dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan daerah dan pencapaian target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan kualitas pendidikan, rendahnya keterampilan kerja, serta minimnya akses terhadap pelatihan vokasional dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri modern.

Masih tingginya angka pengangguran terbuka, khususnya pada lulusan SMA/SMK, menjadi indikator perlunya intervensi yang lebih serius dalam pembangunan modal manusia. Secara nasional, pembangunan modal manusia diarahkan untuk menciptakan SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu bersaing ditingkat global.

Di tingkat Daerah, hal ini memerlukan perbaikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, serta penciptaan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, dukungan terhadap pengembangan karakter, literasi digital, dan kewirausahaan juga menjadi aspek penting agar SDM daerah tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan hadirnya IKN di kawasan yang berdekatan, kebutuhan SDM berkualitas akan semakin meningkat dan dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat lokal jika disiapkan dengan baik.

Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan kebijakan pembangunan SDM dengan prioritas nasional, termasuk memperluas kerja sama dengan sektor swasta, dunia pendidikan, dan lembaga pelatihan. Penyediaan insentif pendidikan, pembangunan pusat-pusat pelatihan kerja, serta digitalisasi layanan pendidikan dan ketenagakerjaan perlu diperkuat untuk mempercepat peningkatan daya saing SDM lokal. Dengan strategi yang tepat, potensi sumber daya manusia Daerah dapat diubah menjadi modal manusia yang produktif dan inovatif, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pergeseran struktur kelas masyarakat di Indonesia, termasuk di Daerah, merupakan fenomena signifikan yang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi. Dalam beberapa dekade terakhir, kita melihat mobilitas vertikal yang cukup signifikan, di mana sebagian orang dari kelompok berpendapatan rendah berhasil beralih ke kelas menengah. Proses ini didorong oleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, lapangan kerja yang lebih terbuka, dan peningkatan pendapatan. Namun, perlu dicatat bahwa perubahan ini tidak merata di seluruh masyarakat.

Kesenjangan sosial-ekonomi yang masih mendalam antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta antara sektor formal dan informal, menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Banyak masyarakat di perdesaan yang masih terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit, dengan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan teknologi yang modern sangat terbatas. Akibatnya, laju transformasi sosial menuju ke inklusi yang lebih baik menjadi terhambat.

Dalam konteks pembangunan nasional jangka menengah, pergeseran kelas masyarakat menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan erat dengan stabilitas sosial di masyarakat, pertumbuhan konsumsi domestik, dan pemerataan kesejahteraan.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, meskipun sektor pertambangan dan energi berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ini secara adil. Kelas pekerja dan masyarakat perdesaan sering kali menjadi kelompok yang paling tertinggal, disebabkan oleh keterbatasan modal, kurangnya keterampilan, dan minimnya kesempatan. Fenomena ini berisiko menghasilkan peningkatan jumlah kelompok rentan yang mengalami stagnasi sosial, terutama ketika terjadi guncangan ekonomi.

Menyikapi tantangan ini, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan kebijakan yang inklusif, tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama. Ini mencakup penguatan perlindungan sosial untuk masyarakat yang paling rentan, peningkatan keterampilan kerja agar masyarakat memiliki daya saing, serta akses terhadap pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan program-program pengembangan masyarakat yang berbasis pada wilayah dan budaya lokal. Dengan demikian, transformasi struktur kelas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keadilan antar-wilayah. Pertumbuhan yang inklusif akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan Daerah dan merasakan manfaatnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan struktur kelas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat bergerak ke arah yang lebih seimbang dan adil. Kebijakan yang tepat dan terarah akan menjadi kunci dalam menciptakan sosial yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam jangka panjang, ini akan mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membawa manfaat bagi semua warga Kabupaten Kutai Kartanegara.

e. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah

Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah merupakan agenda strategis yang sangat penting bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi, efisiensi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun sistem birokrasi yang profesional, responsif, dan bebas dari praktik korupsi.

Meskipun berbagai upaya reformasi birokrasi telah dilakukan, tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, masih menemui berbagai kendala. Beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain adalah lemahnya pengawasan internal, adanya tumpang tindih regulasi, serta rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

Di tingkat nasional, pemerintah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data, dan penguatan pengawasan oleh lembaga eksternal serta partisipasi masyarakat sipil. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa inisiatif seperti digitalisasi layanan, pemanfaatan *e-planning* dan *e-budgeting*, serta penerapan sistem pengaduan daring sedang dikembangkan sebagai bagian dari transformasi tata kelola

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pemerintahan. Meskipun demikian, keberhasilan dari semua inisiatif ini sangat bergantung pada kapasitas SDM aparatur, komitmen politik dari pimpinan daerah, serta dukungan infrastruktur digital yang merata hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Tanpa adanya percepatan dalam reformasi sistemik, tata kelola yang lemah akan terus menghambat efektivitas program pembangunan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat regulasi internal, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan budaya kerja yang berbasis kinerja dan pelayanan, serta kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dari strategi jangka menengah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dengan tata kelola yang baik, Daerah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan sekaligus mendukung target nasional dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan terpercaya.

Dengan langkah-langkah yang konsisten dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dan mendorong kemajuan yang lebih baik bagi seluruh warga.

f. Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas merupakan isu strategis jangka menengah yang dihadapi secara nasional dan juga sangat relevan dengan kondisi pembangunan Daerah. Meskipun Daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertambangan, migas, dan kehutanan, nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut masih relatif rendah. Kegiatan ekonomi cenderung berorientasi pada eksploitasi bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan di Daerah, sehingga menciptakan ketergantungan pada sektor primer dan membuat produktivitas tenaga kerja serta daya saing ekonomi Daerah menjadi stagnan. Hal ini diperparah oleh rendahnya adopsi teknologi, kurangnya pelatihan keterampilan kerja, serta lemahnya inovasi dan riset yang berbasis kebutuhan lokal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, produktivitas juga belum optimal. Banyak pelaku usaha kecil yang masih menggunakan metode konvensional, akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan pasar, serta belum terhubung ke ekosistem digital. Akibatnya, kontribusi sektor-sektor ini terhadap PDRB daerah belum signifikan, dan masyarakat lokal belum mendapatkan manfaat optimal dari potensi ekonomi yang ada. Selain itu, produktivitas birokrasi pemerintahan juga masih menjadi catatan penting, di mana pelayanan publik belum seluruhnya efisien, terukur, dan berbasis hasil, yang pada akhirnya memperlambat laju pembangunan.

Untuk meningkatkan produktivitas Daerah secara menyeluruh, Pemerintah Daerah perlu mengarahkan strategi pembangunan ke peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi tepat guna, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang mendorong hilirisasi dan inovasi. Kebijakan afirmatif terhadap sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, serta kemitraan antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam membangun ekonomi Daerah yang lebih produktif dan berdaya saing. Dengan demikian, Daerah tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam, tetapi juga mampu mengembangkan kekuatan manusianya untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"* mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029.

Prioritas Nasional berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada prioritas nasional tersebut, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional, dengan 8 (delapan) Asta Cita sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN juga menyebutkan 17 (tujuh belas) program prioritas sebagai berikut.

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara, dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik, untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Selain itu, telah dirumuskan pula 8 (delapan) *quick wins* sebagai berikut.

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23 persen.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

Salah satu isu penting yang dihadapi Daerah adalah melakukan telaahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan isu regional secara menyeluruh. Telaah ini meliputi telaah arahan RPJMN terhadap wilayah Kalimantan, dan telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), agar mampu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Integrasi semua aspek ini akan menjamin bahwa RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan secara komprehensif dan berkelanjutan, mendukung pengembangan Daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah.

a. Telaah Arahan RPJMN terhadap Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 menjamin keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Proses ini bertujuan untuk mendukung kebijakan yang terintegrasi dan efektif dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Adapun isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara, mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Masih besarnya ketergantungan perekonomian Daerah terhadap sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.
2. Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.
3. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan.
5. Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria.
6. Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan talenta, tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
7. Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik (orangutan dan bekantan), serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.

Di tingkat nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 dalam buku IV memuat arah pembangunan kewilayahan di antaranya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ikut andil dalam *highlight* indikasi intervensi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.87.

Highlight Intervensi Nasional

untuk Kabupaten Kutai Kartanegara

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
Kawasan *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan kawasan *superhub* ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui:
	▪ Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan *output* pembangunan SPAM Regional Kaltim.
	▪ Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar IKN.
	▪ Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar IKN.
	▪ Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar IKN.
	▪ Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
	rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu.
	▪ Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar).
	▪ Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki).
	▪ Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil.
	▪ Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil.
	▪ Peningkatan produksi pangan nabati.
	▪ Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik.
	▪ Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut.
Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan *output*: klaster revitalisasi tambak udang dan bandeng, irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP), kampung perikanan budidaya air payau yang dikembangkan, klaster komoditas unggulan air tawar berbasis kawasan, klaster komoditas unggulan air payau berbasis kawasan dan revitalisasi tambak budidaya ikan air payau.
Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Agroekowisata Kutai Kartanegara, melalui:
	▪ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan *output*: pemenuhan akses layanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
	kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, sarana dan prasarana perdagangan desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan.
	▪ Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan *output*: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, OM BTS 4G/*Lastmile*, dan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan.
	▪ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, pendampingan desa dan pengembangan BUMDesa.
	▪ Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya), dengan *output*: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan dan pengembangan, penguatan tata kelola desa wisata dan penguatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
	tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim.
	▪ Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa, dengan *output*: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa dan integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD.
	▪ Peningkatan produktivitas desa wisata, dengan *output*: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan.
Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk *Heart of Borneo* di wilayah Kalimantan Timur disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui:
	▪ Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan *output*: penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat dan udara, kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta area penanganan dampak.
	▪ Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan *output*: lahan gambut yang dipulihkan dan direstorasi serta data dan informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
	▪ Rehabilitasi ekosistem mangrove, dengan *output*: lahan rusak yang dipulihkan, pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
	▪ Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan *output*: inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
	▪ Pengendalian banjir di kawasan perkotaan dan daerah berisiko tinggi.
	▪ Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 dilakukan untuk menjamin sinkronisasi pembangunan antara tingkat nasional, provinsi, dan Daerah.

Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan strategis seperti ketergantungan pada sektor hulu, minimnya pusat pertumbuhan baru, keterbatasan infrastruktur layanan dasar, tingginya kemiskinan dan pemerataan pendapatan, serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti arahan RPJMN melalui kawasan *Superhub* IKN, sentra perikanan Kalimantan Timur, kawasan perdesaan prioritas agroekowisata, dan kawasan strategis nasional jantung Kalimantan. *Highlight* intervensi nasional untuk Kabupaten Kutai Kartanegara akan ditindaklanjuti dengan dukungan daerah terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam buku IV RPJMN.

b. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Dengan memperhatikan Dokumen Rancanagan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur maka dijabarkan beberapa telaah substansi yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Permasalahan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, diperoleh 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

1. Belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. Masih lambatnya transformasi ekonomi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi.
4. Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah.
5. Tingginya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup.
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Isu Strategis Daerah

Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, serta KLHS, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Timur sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM.
2. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.
3. Transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif.
4. Pemerataan pembangunan wilayah.
5. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi.
6. Peluang pembangunan *superhub* ekonomi dan mitra IKN.
7. Kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi GRK.
8. Kemandirian pangan.
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

"Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas"

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut.

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera.

Misi 2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah.

Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan.

Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi.

Misi 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal.

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tahapan pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:

A. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2026)

Tahap 1 pembangunan daerah Kalimantan Timur berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi diarahkan pada penguatan industri berbasis komoditas unggulan dan hilirisasi, didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, reformasi tata kelola pemerintahan, pelestarian budaya lokal, dan pembangunan berwawasan lingkungan turut menjadi prioritas.

B. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 2 (Tahun 2027)

Tahap 2 pembangunan daerah Kalimantan Timur menekankan pada penguatan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kualitas serta daya saing SDM. Perekonomian diarahkan pada pengembangan sektor inklusif dan peningkatan investasi, didukung oleh reformasi birokrasi berbasis elektronik. Aspek budaya, kehidupan beragama, dan pelestarian lingkungan juga semakin diperkuat dalam seluruh proses pembangunan.

C. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 3 (Tahun 2028)

Tahap 3 pembangunan Kalimantan Timur fokus pada optimalisasi kawasan ekonomi strategis untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru dan peningkatan daya saing SDM melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Pengembangan ekonomi diarahkan pada perluasan industri berbasis komoditas unggulan dan sektor berkelanjutan, didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi. Pemerintahan diperkuat melalui peningkatan kapasitas ASN, digitalisasi, serta penegakan regulasi, dengan tetap menekankan pelestarian budaya, kehidupan beragama, dan keberlanjutan lingkungan.

D. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 4 (Tahun 2029)

Tahap 4 pembangunan Kalimantan Timur menandai tercapainya infrastruktur yang optimal, SDM unggul dan sejahtera, serta ekonomi inklusif berbasis industrialisasi. Pemerintahan semakin profesional dan berbasis teknologi dengan layanan publik yang efisien dan transparan. Nilai-nilai kearifan lokal, keberagaman budaya, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan semakin diperkuat.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

E. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 5 (Tahun 2030)

Tahap 5 pembangunan Kalimantan Timur menekankan kesinambungan pembangunan pada masa transisi pemerintahan, dengan menjaga kualitas SDM melalui sistem pendidikan dan kesehatan yang unggul. Ekonomi terus dibangun secara inklusif dengan peningkatan daya saing industri, serta optimalisasi infrastruktur untuk efisiensi. Tata kelola pemerintahan makin efektif berbasis teknologi, kehidupan sosial-budaya diperkuat, dan pembangunan berkelanjutan dijadikan landasan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Arahan Provinsi Kalimantan Timur dalam Pembangunan Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan pariwisata, yang diiringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi. Berikut data capaian indikator makro beserta *highlights* indikasi kebijakan provinsi untuk Daerah.

Tabel 2.88.

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Makro	Capaian 2024	*Baseline* 2025	Target 2030
IPM	76,57	76,86	79,41
LPE (persen)	5,62	5,63-5,70	7,50-7,71
Tingkat Kemiskinan (persen)	7,28	6,50-6,95	4,80-5,24
Indeks Gini	0,307	0,285-0,301	0,265-0,282
TPT (persen)	4,11	3,85-4,00	3,00-3,18

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Sinkronisasi dengan rencana tata ruang perlu dilakukan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Selain untuk menjamin bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di Kalimantan Timur. *Highlights* indikasi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 2.39.
Peta *Highlights* Indikasi Kebijakan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025–2029

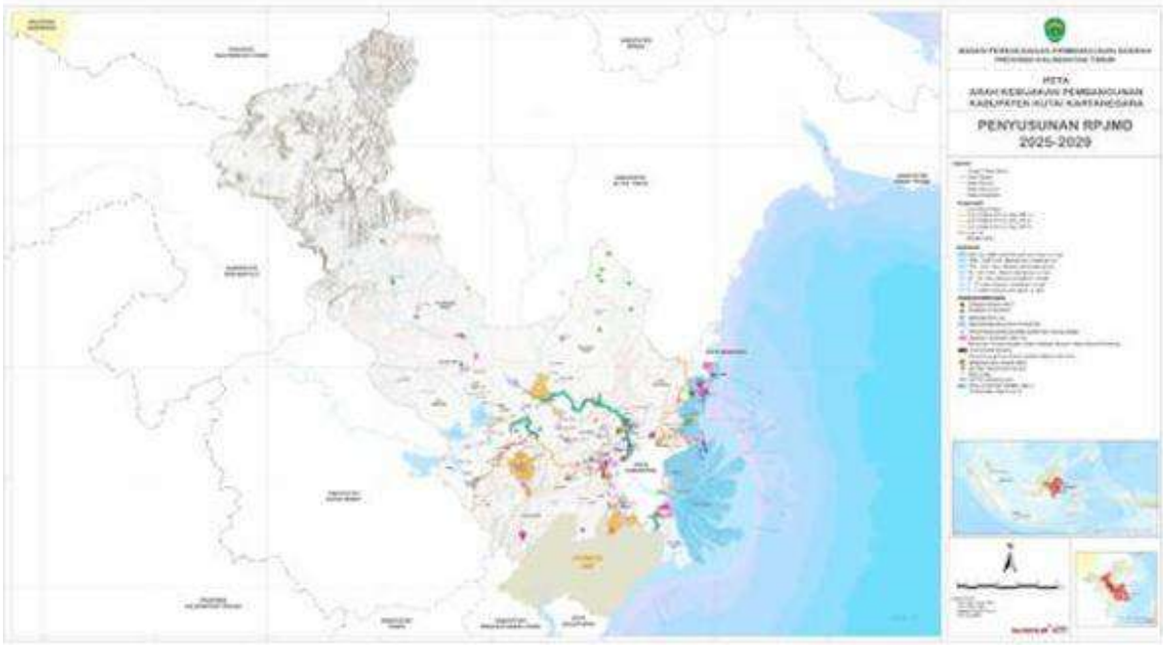

Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Adapun *highlights* Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

1. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi.
2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antar-daerah.
3. Penyediaan afirmasi akses pendidikan.
4. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat.
5. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting.
6. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan.
7. Pengembangan ekonomi.
8. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
9. Pengembangan diversifikasi pangan.
10. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
11. Pengelolaan terminal timbau penumpang tipe B.
12. Pengembangan pelabuhan angkutan sungai Tenggarong.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

13. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dan digital.
14. Pengembangan sentra IKM terintegrasi.
15. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif.
16. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi.
17. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.
18. Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan alam.
19. Penghijauan lingkungan.
20. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial.
21. Pemantauan sampah laut.
22. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi.
23. Penyelenggaraan SPAM regional Marangkayu.
24. Penanganan kawasan kumuh.
25. Rehabilitasi rumah tidak layak huni.
26. Pengendalian banjir.
27. Penyelenggaraan jalan provinsi.
28. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.
29. Penyediaan PSU permukiman.
30. Penyiapan penyelenggaraan SPAM regional sistem Mahakam.
31. Penyediaan internet gratis di setiap desa.
32. Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 3 Tenggarong Seberang).
33. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan utamanya kawasan perdesaan Agromina Pastoral.

c. Telaah RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045

Memahami bahwa RPJMD 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara terutama pada Tahap I, maka beberapa arahan RPJPD yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis
   a) Pembangunan berwawasan lingkungan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan.
   b) Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, terutama di wilayah terpencil, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan secara merata.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c) Mengatasi ketidaksetaraan dan memperkuat lembaga demokrasi dengan tujuan untuk penguatan pembangunan layanan dan informasi publik secara berkeadilan.

d) Memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, dengan fokus pada pembangunan pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, transparan, adaptif, dan kolaboratif melalui sinergitas dan kesinambungan pembangunan berbasis digital.

e) Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor non ekstraktif, khususnya pembangunan ekonomi terbarukan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang produktif dan berorientasi hulu-hilir.

f) Mendorong pembangunan regional yang merata, dengan peningkatan investasi di wilayah terpencil dan interkonektivitas yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

g) Pengembangan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan ramah lingkungan, serta penyediaan infrastruktur berkualitas berbasis fungsi keruangan.

h) Pelestarian sosial dan budaya lokal, dengan pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang harmoni dan terintegrasi dengan pengembangan pariwisata daerah.

2. Visi RPJPD

Visi RPJPD mempertimbangkan secara matang posisi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peta perencanaan nasional, mandat provinsi, hingga nilai historis yang dimiliki oleh daerah yang identik dengan Sungai Mahakam. Demikian pula dengan modal dasar maupun pengaruh eksternal yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah cita-cita jangka panjang sebagai *KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan.* Dengan beberapa pokok visi di atas, maka masing-masing pokok visi dijabarkan sebagai berikut.

3. Kutai Kartanegara Maju

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah dengan potensi perekonomian tertinggi di Indonesia. Hal ini harus mampu dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, dalam rangka menuju kemajuan Kutai Kartanegara dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka makna *Kutai Kartanegara Maju* diadopsi sebagai representasi masyarakat Kutai Kartanegara yang memiliki pendapatan tinggi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

setara dengan negara maju, sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing tingkat nasional, karena ditopang oleh bonus demografi sampai 2045, ditambah potensi migrasi tenaga terampil sebagai dampak dari keberadaan IKN.

3. Kutai Kartanegara Tangguh

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah penopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta penopang perekonomian nasional yang dapat diandalkan.

Kutai Kartanegara Tangguh merupakan representasi dari wilayah yang memiliki ketangguhan ekonomi, yang diwujudkan dengan kondisi perekonomian stabil dan kuat, karena adanya pergeseran struktur ekonomi menuju perekonomian yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam ekstraktif, melainkan perekonomian nonekstraktif, yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kutai Kartanegara sebagai daerah yang tangguh juga memiliki resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

4. Kutai Kartanegara Berbudaya

Merupakan representasi dari identitas daerah yang berdiri di atas sejarah panjang peradaban dua kerajaan hingga menjadi seperti hari ini dengan tetap berdampingan dengan alam dan sangat menjunjung tinggi keberagaman.

Komitmen Kutai Kartanegara Berbudaya terletak pada pelestarian, pengembangan, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam proses pembangunan yang memperhatikan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan manusia yang berakhlak mulia.

Upaya tersebut dimaksudkan untuk melindungi warisan budaya, mempromosikan keanekaragaman budaya, dan konservasi kekayaan biologis. Pembangunan berbudaya harus menjamin bahwa pembangunan ekonomi berlangsung dengan menghormati dan memperkaya identitas budaya lokal, *mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal* sembari menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa melupakan jati diri daerah, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terus melaju mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam pembangunan yang berkelanjutan pada 2045.

5. Kutai Kartanegara sebagai Pusat Pangan

Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi, distribusi, dan pengembangan industri pangan yang berkelanjutan dan inovatif. Langkah strategis yang diambil mencakup pengembangan pertanian terintegrasi hulu-

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

hilir, modernisasi pertanian melalui skema *smart farming* dan *smart fishing*, intensifikasi pertanian, pengembangan infrastruktur logistik, dan promosi industri pengolahan pangan yang ramah lingkungan.

Selain itu, visi ini juga mencakup aspek kedaulatan pangan dan pengembangan agrowisata *(agrotourism)* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pariwisata perdesaan yang khas.

6. Kutai Kartanegara sebagai Pusat Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan beragam untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mencakup pengembangan atraksi wisata alam, budaya, dan sejarah yang mempromosikan kekayaan dan keunikan Daerah, serta penguatan infrastruktur pariwisata dan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan sektor. Selain atraksi dan infrastruktur, perlu diperhatikan terkait pembangunan aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi yang juga menjadi faktor esensial terhadap kualitas pariwisata yang ditawarkan, sekaligus sebagai pemicu pertumbuhan sektor jasa.

Pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata harus menjadi bagian dari skema pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pariwisata, khususnya terkait dengan pariwisata ekologis yang berbasis konservasi keanekaragaman hayati hujan hutan tropis dan didukung oleh kekayaan sosial-budaya masyarakat Kalimantan.

7. Kutai Kartanegara sebagai Pusat Industri Hijau

Posisi geografis yang strategis, serta kepemilikan cadangan sumber daya alam yang tinggi, maka harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki nilai tambah yang tinggi, maka diperlukan hilirisasi pemanfaatan sumber daya tersebut melalui skema industrialisasi. Akan tetapi industrialisasi tersebut juga harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ramah lingkungan.

Hal tersebut dilakukan dengan mendorong perkembangan industri yang ramah lingkungan dengan prinsip keberlanjutan. Fokus pada penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, dan inovasi teknologi hijau. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya ekonomis maju tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Kutai Kartanegara yang Sejahtera

Prinsip pada visi ini merupakan perwujudan mandat konstitusi yaitu keadilan sosial. Oleh karena itu, pada visi ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh elemen, dengan meminimalisir kemiskinan, khususnya dapat menghilangkan kemiskinan ekstrem. Di samping itu, pendapatan masyarakat wilayah ini pada 2045 harus setara dengan wilayah-wilayah pada negara maju. Di samping itu, seluruh hak dasar warga negara dapat terpenuhi baik secara Pendidikan, Kesehatan, maupun hak untuk hidup layak dan bermartabat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Kutai Kartanegara yang Berkelanjutan

Maksud dari visi berkelanjutan adalah segala arah pembangunan yang memanfaatkan sumber daya wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu dikelola secara arif dan bijaksana, agar dapat pula dinikmati oleh generasi penerus selanjutnya.

Hal tersebut sangat terkait dengan pengelolaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan kapasitas lingkungan hidup wilayah Kutai Kartanegara dalam mendukung aktivitas manusia. Oleh karena itu, visi ini menjadi penyeimbang bagi berbagai aktivitas sosial-ekonomi dengan aktivitas konservasi lingkungan.

10. Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien.
4. Mewujudkan demokrasi substansial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh.
5. Mewujudkan ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal.
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau.
8. Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

11. Arahan Tahap I RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Periode pertama RPJPD berlangsung selama periode 2025-2029. Pada periode pertama ini, agenda pembangunan Daerah dititikberatkan pada penguatan fondasi transformasi. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting di dalam *roadmap* pembangunan.

Hal tersebut dapat terjadi karena pada tahapan ini, seluruh fondasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi mulia daerah dipersiapkan. Fondasi ini terdiri atas berbagai aspek dan komponen yang memiliki dampak dan penentu keberhasilan pembangunan pada periodisasi berikutnya.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwasanya fondasi dalam hal ini difungsikan sebagai sebuah pijakan atau batu loncatan bagi keberhasilan pembangunan. Apabila fondasi transformasi tidak kokoh maka bisa jadi upaya implementasi rencana pembangunan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, penguatan fondasi transformasi menjadi hal paling utama dilakukan pada periode pertama RPJPD.

Upaya pengokohan fondasi transformasi secara umum tersusun atas perwujudan aspek transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang ditopang oleh landasan transformasi berupa stabilitas ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ekologi.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempersiapkan kebutuhan dasar yang diperlukan seperti fasilitas pelayanan, infrastruktur dasar, SDM yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dalam periode ini pula, berbagai terobosan inovatif mulai diimplementasikan seperti diversifikasi ekonomi nonekstraktif, implementasi *smart government,* sinkronisasi perencanaan pembangunan, dan sebagainya, sehingga nantinya akan dapat memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan rencana pembangunan berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, melalui fondasi yang kuat, tangguh, dan kokoh, Kabupaten Kutai Kartanegara siap untuk melanjutkan perjalanan pembangunan di periode berikutnya, serta siap untuk dapat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang.

d. Telaah KLHS Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan 120 (seratus dua puluh) indikator atau 54,55 % (lima puluh empat koma lima puluh lima persen) sudah dilaksanakan dan sudah tercapai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(SS), dan meningkat menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) indikator atau 58,18 % (lima puluh delapan persen) berdasarkan proyeksi tahun 2029.

Pada tahun 2022, indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) indikator atau 22,27 % (dua puluh dua persen), berdasarkan proyeksi capaiannya menurun menjadi 41 (empat puluh satu) indikator atau 18,64 % (delapan belas koma enam puluh empat persen) pada tahun 2029.

Pada tahun 2022, indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 7 (tujuh) indikator atau 3,18 % (tiga koma delapan belas persen), dan indikator TPB yang belum ada data (NA) sebanyak 44 (empat puluh empat) indikator atau 20 % (dua puluh persen).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD, Dinas Kesehatan bertanggung jawab paling banyak atas indikator 42 (empat puluh dua) indikator, diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 15 (lima belas) indikator, Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebanyak 15 (lima belas) indikator, Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 15 (lima belas) indikator, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 14 (empat belas) indikator, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 13 (tiga belas) indikator.

Berdasarkan telaah beberapa data yang telah dikaji, maka dihasilkan beberapa isu strategis yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Isu Strategis: Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana.
2. Isu Strategis: Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat.
3. Isu Strategis: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).
4. Isu Strategis: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN.
5. Isu Strategis: Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat.
6. Isu Strategis: Penanggulangan Kekerasan Seksual.
7. Isu Strategis: Peningkatan Penggunaan Telepon Genggam (HP).
8. Isu Strategis: Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar.
9. Isu Strategis: Peningkatan Layanan Jasa Keuangan.
10. Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM.
11. Isu Strategis: Peningkatan Kesempatan Kerja.
12. Isu Strategis: Peningkatan Kepariwisataan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

13. Isu Strategis: Peningkatan Fasilitas Pelabuhan.
14. Isu Strategis: Peningkatan Anggaran Riset Pemerintah dan Swasta.
15. Isu Strategis: Rehabilitasi Lahan Kritis dan Penanganan Satwa Langka.
16. Isu Strategis: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
17. Isu Strategis: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
18. Isu Strategis: Keuangan Daerah

e. Telaah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara

1) Tujuan Penataan Ruang

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2023-2042 menjelaskan arah perencanaan wilayah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah serta sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan utama terkait penggunaan ruang. Dalam upaya menggerakkan pembangunan Daerah, melibatkan RTRW untuk membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam konteks RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan penataan ruang Kabupaten tersebut dirinci sebagai berikut.

> "Mewujudkan daerah mitra Ibukota Negara (IKN) yang handal dan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah daerah, berbasis kawasan andalan dengan mengembangkan sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan."

Prinsip pelaksanaan tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan.

Prinsip implementasi tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah, yang perlu dirancang secara holistik dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kota. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya bergantung pada aspek spasial, melainkan juga memperhatikan aspek sektoral sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dijelaskan sebagai berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. Pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi:
   a. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki; dan
   b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis.
2. Pengembangan sistem jaringan prasarana dengan strategi meliputi :
   a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
   b. mengembangkan sistem transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya;
   c. mengembangkan bandar udara bertaraf nasional dan internasional sebagai penunjang IKN dan mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan;
   d. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang terdapat di kawasan perkotaan dan perdesaan;
   e. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
   f. mengembangkan sistem jaringan limbah di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
   g. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
   h. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan perkotaan.
3. Pemantapan fungsi dan kedudukan daerah dalam kawasan andalan dengan strategi meliputi:
   a. Memantapkan kedudukan daerah sebagai kawasan andalan;
   b. memantapkan fungsi daerah sebagai pusat pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata;
   c. mengoptimalisasi kawasan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
   d. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
   e. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antarkota dan antardesa; dan
   f. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan strategi meliputi :
   a. Melakukan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya pertambangan dan migas;
   b. melakukan reklamasi terhadap kegiatan pascapertambangan;
   c. mengalokasikan pemanfaatan lahan pascatambang yang disesusaikan dengan potensi lokal; dan
   d. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan.
5. Pengembangan dan optimalisasi kawasan pertanian dengan strategi meliputi:
   a. Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
   b. menetapkan dan mengembangkan kawasan agromina industri;
   c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
   d. mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   e. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian; dan
   f. melakukan tata kelola ulang kawasan perkebunan.
6. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya dengan strategi meliputi:
   a. Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensi sejarah yang tinggi dan alam yang khas dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
   b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
   c. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata;
   d. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat;
   e. mewujudkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab untuk memperkuat identitas sebagai destinasi dengan nilai sejarah tinggi dan alam yang khas.
   f. membangun industri pariwisata berbasis sumber daya lokal yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing; dan
   g. mengembangkan usaha ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Pengembangan kegiatan perikanan dengan strategi meliputi:
   a. Menetapkan kawasan minapolitan;
   b. mengembangkan kawasan minapolitan;
   c. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan
   d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
8. Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:
   a. Mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   b. meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
   c. menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
   d. mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
   e. meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
   f. meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
9. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi :
   a. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
   b. memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
   c. mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   d. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan dengan luas paling sedikit 30 persen dengan ketentuan RTH publik minimal 20 persen dan RTH privat paling sedikit 10 persen dari luas wilayah perkotaan; dan
   e. membatasi kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

10. Pengoptimalan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam dengan strategi meliputi:
    a. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal; dan
    b. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
11. Pengembangan kawasan industri dengan strategi meliputi pengembangan sektor hilirisasi industri.
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi :
    a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
    b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
    c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan, dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
    d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

1. Pusat kegiatan lingkungan (PKL) terdapat di:
    a. Kecamatan Muara Badak;
    b. Kecamatan Kembang Janggut;
    c. Kecamatan Kota Bangun; dan
    d. Kecamatan Loa Kulu.
2. Pusat pelayanan kawasan terdapat di:
    a. Pusat pelayanan kawasan Anggana di Kecamatan Anggana;
    b. Pusat pelayanan kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan;
    c. Pusat pelayanan kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat;
    d. Pusat pelayanan kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan;
    e. Pusat pelayanan kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

f. Pusat pelayanan kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa;
g. Pusat pelayanan kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
h. Pusat pelayanan kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
i. Pusat pelayanan kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis;
j. Pusat pelayanan kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga;
k. Pusat pelayanan kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu;
l. Pusat pelayanan kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan
m. Pusat pelayanan kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang.

3. Kawasan Perkotaan Tenggarong memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Rencana pola ruang wilayah kota merujuk pada rencana distribusi penggunaan lahan di wilayah kota, mencakup alokasi lahan untuk fungsi lindung dan budidaya yang ditargetkan hingga akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.

Rencana tersebut memberikan gambaran tentang penggunaan lahan di wilayah kota ke depan. Diketahui bahwa alokasi pola ruang dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsi aktivitas: Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.

Alokasi rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas:

Kawasan Lindung terdiri atas :

1. Kawasan Badan Air.
2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya.
3. Kawasan Konservasi meliputi :
   a. Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam Muara Kaman Sedulang terdapat di Kecamatan Muara Kaman.
   b. Kawasan Pelestarian Alam berupa berupa Taman Nasional Kutai yang terdapat di Kecamatan Muara Kaman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

c. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil berupa Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu terdapat di Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, dan Kecamatan Muara Wis.

4. Kawasan Ekosistem Mangrove berupa pantai dengan hutan bakau Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga Sanga.

Kawasan Budi Daya terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Produksi.
2. Kawasan Pertanian.
3. Kawasan Perikanan.
4. Kawasan Pertambangan dan Energi.
5. Kawasan Peruntukan Industri terdapat di kecamatan: Kembang Janggut, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Sanga Sanga, Sebulu, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang.
6. Kawasan Pariwisata terdapat di kecamatan: Anggana, Loa Janan, Marang Kayu, Muara Badak, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang.
7. Kawasan Permukiman.
8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
9. Kawasan Transportasi.

3) Kawasan Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara

Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting. Kawasan strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

Kawasan Strategis Provinsi terdiri dari:

1. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa kawasan peruntukkan industri di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Danau Kaskade Mahakam dan Kawasan Delta Mahakam.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri dari:

1. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pertumbuhan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ekonomi meliputi:

a. Kawasan Strategis Kekembangan di Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.
b. Kawasan Strategis Mitra IKN.
c. Kawasan Strategis Perikanan Terpadu Muara Badak.
d. Kawasan Strategis Pertanian Terpadu Kota Bangun.
e. Kawasan Strategis Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu.

2. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial dan budaya meliputi:
   a. Kawasan Museum Mulawarman.
   b. Kawasan Strategis Muara Kaman.
   c. Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Lekaq Kidau, Kedang Ipil, dan Sungai Bawang.
3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: Kawasan Strategis Konservasi Pesut di Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman, dan Muara Wis.

f. Telaah Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RPIJPID) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

Berdasarkan hasil telaah RIPJ-PID, dirumuskan strategi riset dan inovasi daerah dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan kemajuan dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi melalui berbagai kebijakan, peraturan, dan infrastruktur yang bertujuan mendukung pengembangan kapasitas riset dan inovasi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2) Ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup berbagai elemen strategis, seperti kebijakan berbasis bukti, kapasitas kelembagaan, kemitraan riset, budaya inovasi, keterpaduan ekosistem, serta keselarasan dengan perkembangan global. Namun demikian, beberapa tantangan seperti terbatasnya SDM bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), kurangnya infrastruktur riset, serta lemahnya sistem basis data terintegrasi,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi untuk memperkuat ekosistem inovasi ini.

3) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek (RIP-PID) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 telah diinisiasi untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan riset dan inovasi, dengan tujuan menciptakan inovasi berbasis bukti, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta menghasilkan solusi yang tepat bagi penyelesaian masalah pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4) Implementasi peta jalan ini juga diharapkan akan mampu meningkatkan kolaborasi lintas sektoral, memfasilitasi komersialisasi dan monetisasi hasil riset, dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengembangan inovasi.

Upaya strategis dan progresif yang menjadi inti dalam menggerakkan riset dan inovasi Daerah bertujuan untuk merangkum strategi dan langkah-langkah konkret yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah, *stakeholders*, dan masyarakat dalam mendorong riset dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan serta pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

   Strategi untuk memberikan kebijakan berbasis bukti adalah dengan menyajikan rekomendasi yang tepat untuk menentukan ekosistem riset dan inovasi yang akan dijadikan acuan bagi Daerah.
2) Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah

   Kapasitas kelembagaan riset dan inovasi Daerah sangat bergantung pada kemitraan yang efektif antara BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara selaku penyelenggara utama riset dan inovasi dengan Perangkat Daerah terkait. Kolaborasi ini sangat penting karena memungkinkan sinergi yang lebih baik dalam mengelola, merencanakan, melaksanakan, dan menerapkan hasil riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah. Namun demikian, untuk mendorong dampak positif dan relevansi riset serta inovasi yang dilakukan, perlu meningkatkan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam berbagai kegiatan riset yang dikelola BRIDA.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dalam tataran praktis, rekomendasi pengembangan dan pemasaran produk-produk unggulan daerah tersebut antara lain sebagai berikut.

a) Pemetaan rantai nilai *(value chain)* setiap komoditas untuk mengidentifikasi titik lemah dan peluang tambah nilai.
b) Perkuatan sertifikasi mutu (misalnya sertifikat organik untuk lada, *Hazard Analysis and Critical Control Point-HACCP* untuk produk sarang burung walet) agar mudah menembus pasar ekspor.
c) Membangun kemitraan klaster antar petani dan pelaku UMKM agar tercipta skala produksi yang lebih besar dan lebih efisien.
d) Inisiasi branding terpadu (misalnya) Produk Asli Kutai Kartanegara dengan materi promosi digital dan fisik (pameran, *e-commerce*).
e) Koordinasi lintas sektor untuk percepatan fasilitas pelabuhan dan logistik, sehingga biaya distribusi turun dan daya saing meningkat.

Adapun Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang diarahkan untuk dikembangkan ke depan antara lain:

1) Sarang Burung Walet;
2) Padi;
3) Lada;
4) Karet;
5) Kopi Luwak Prangat Baru;
6) Buah Naga Batuah;
7) Buah Elai Batuah;
8) Cokelat Lung Anai;
9) Ikan Air Tawar;
10) Kerupuk Kota Bangun;
11) Ikan Asin;
12) Klinik Kepiting;
13) Udang dan ikan air asin;
14) Produk Multikultural/*handicraft;*
15) Bruwun Geulis;
16) Pesta Adat Erau Pelas Benua;
17) *Car Free Night* Simpang Odah Etam;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

18) Pulau Kumala;
19) pantai Pemedas;
20) Pantai Pulau Pengempang; dan
21) Desa Wisata Pela.

3) Strategi Akselerasi Penyelesaian Permasalahan Prioritas

Riset dan inovasi mencakup berbagai aspek yang kompleks dan untuk pelaksanaannya juga memerlukan alokasi sumber daya yang cukup besar. Oleh karena itu, sejak dulu BRIN telah memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan riset dan inovasi melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, baik lembaga swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum yang kemudian dikoordinasikan oleh BRIDA.

Hingga saat ini, Kabupaten Kutai Kartanegara masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan prioritas yang relatif mendesak untuk segera dipecahkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih terus mencari formulasi yang paling efektif dan efisien untuk dapat mengatasi permasalahan prioritas tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menggalakkan pendekatan kolaboratif, dengan cara menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak (lembaga riset swasta, institusi akademik, dan masyarakat).

Namun demikian, untuk mengoptimalkan hasil riset dan inovasi, intensitas kemitraan ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian swasta. Peningkatan intensitas kemitraan ini bisa diwujudkan melalui mekanisme pendanaan eksternal yang lebih efektif, seperti program matching fund dari kementerian atau lembaga (K/L) yang membawahi sektor pendidikan, kebudayaan, dan ristek, serta platform Kedaireka yang mempertemukan antara inovator dengan mitra potensialnya. Selain itu, penguatan kemitraan juga difokuskan pada upaya implementasi hasil riset dan inovasi, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu merumuskan kebijakan yang lebih didasarkan pada hasil riset dan inovasi untuk memastikan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Mekanisme kolaborasi ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar berbagai stakeholder

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

untuk mempercepat pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam konteks ini, perguruan tinggi dan pihak swasta tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang dapat berkontribusi dalam pendanaan dan penerapan hasil riset. Dengan mengoptimalkan kemitraan ini, hasil riset dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan publik yang lebih efektif, serta menghasilkan inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam siklus riset dan inovasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan penerapan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret yang mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat perangkat daerah maupun di lembaga riset yang terlibat. Perangkat daerah perlu dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan riset dan inovasi, baik sebagai penyelenggara, mitra, maupun pengguna akhir. Dengan upaya bersama ini, diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi role model bagi kabupaten/kota lain dalam pengembangan riset dan inovasi berbasis kolaborasi. Hal tersebut akan memperkuat posisi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pengem bangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat regional (Kalimantan) dan nasional. Selain itu, dengan meningkatnya kualitas riset dan inovasi, Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat lebih siap menghadapi tantangan-tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan sosial, dengan solusi yang berbasis data dan pengetahuan.

Dalam implementasi rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara direkomendasikan beberapa poin sebagai berikut.

a) Penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur riset dengan cara meningkatkan kompetensi SDM dalam riset dan inovasi melalui pelatihan berkelanjutan, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta dukungan terhadap program magang dan beasiswa. Program ini mencakup pelatihan keterampilan dasar sampai dengan penguasaan teknologi terbaru, untuk menunjang kemampuan riset berbasis teknologi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b) Pengembangan dan integrasi basis data riset dan inovasi akan memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung pengambilan Keputusan dengan berbasis data. Pengelolaan data riset yang terpusat (centralized) akan memudahkan proses diseminasi dan pemanfaatan hasil riset oleh berbagai pemangku kepentingan.
c) Kolaborasi antar pihak dalam mendukung inovasi dengan cara mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara BRIDA, lembaga riset, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk memperluas jaringan inovasi.
d) Penguatan kebijakan inovasi yang responsif dan adaptif, harus disesuaikan dengan kondisi daerah akan mendorong fleksibilitas dalam pelaksanaan riset serta inovasi di daerah. Melalui reformasi kebijakan, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global, serta tantangan yang muncul dalam pembangunan wilayah.
e) Diseminasi dan publikasi hasil riset dan inovasi, melalui berbagai platform publikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan urgensi dalam pembangunan Daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, isu KLHS, Isu Global, Nasional dan Regional maka diidentifikasi isu strategis yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 2.89.

Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara

Potensi	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Daerah
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM	Geopolitik Dan Geoekonomi	Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif	Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non-ekstraktif
		Peningkatan Kesempatan Kerja	Industri 5.0		Kemandirian Pangan	Penguatan Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional
Memiliki posisi yang strategis (dekat dengan IKN)		Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN		Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN
Pengembangan Pariwisata Lokal		Peningkatan Kepariwisataan				
Komitmen tinggi Pemda dalam	Belum meratanya pelayanan	Peningkatan Sanitasi dan				Pemerataan pelayanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Potensi	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Daerah
pembangunan pemerataan Infrastruktur daerah	infrastruktur dasar	Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat Peningkatan fasilitas pelabuhan Peningkatan Penggunaan Telepon Genggam (HP)			Pemerataan Pembangunan Wilayah Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi	infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal
Dukungan penerapan *Smart Regency* & Infrastruktur Digital	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Layanan Jasa Keuangan Keuangan Daerah Peningkatan Anggaran Riset Pemerintah dan Swasta	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi	Belum optimalnya pembangunan SDM yang merata	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia		Potensi Sumber Daya Manusia Dan	Peningkatan Kualitas dan	Akselerasi peningkatan daya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Potensi	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Daerah
tinggi sebagai pusat pendidikan yang strategis, dengan infrastruktur lebih baik dan potensi penyerapan lulusan oleh perusahaan lokal		Dini, Pendidikan Dasar	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Modal Manusia	Daya Saing SDM	saing SDM yang sehat dan cerdas
		Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat		
		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan				
		Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana				
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya dalam upaya menuju masyarakat berkebudayaan maju	Penanggulangan Kekerasan Seksual			Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural
Desa Mandiri sebagai Pilar	Belum optimalnya pengentasan					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Potensi	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Daerah
Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	kemiskinan dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat					
Ekosistem Pesisir sebagai "Karbon Biru" & Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi dan resiliensi bencana daerah	Rehabilitasi Lahan Kritis dan Penanganan Satwa Langka	Dampak Perubahan Iklim Global	Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana
Penguatan Regulasi Lingkungan Terbaru						
fondasi kebijakan pemda terkait lingkungan hidup untuk mengarahkan program-program konkret—mulai dari penguatan kelembagaan Dinas LH hingga pelibatan		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Potensi	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Daerah
masyarakat dan pendanaan						
Pelaksanaan dan komitmen Pemda terkait pengendalian abrasi dan suplai air bersih di wilayah pesisir						

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun, 2025, diolah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu-isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan ditangani dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non-ekstraktif

   Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini sangat bergantung pada sektor ekonomi ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara dan minyak bumi, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB daerah. Namun, model ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap fluktuasi harga komoditas global.

   Peluang ini menjadi semakin penting mengingat Kutai Kartanegara berada di wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan mendorong tumbuhnya permintaan terhadap produk pangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah perlu mengarahkan kebijakan pembangunan pada penguatan sektor-sektor tersebut melalui peningkatan infrastruktur pendukung, penyediaan akses pembiayaan untuk UMKM, pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, serta promosi produk-produk unggulan lokal ke pasar regional dan nasional.

   Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara nantinya akan difokuskan pada pembangunan sektor non-ekstraktif yang berarti Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi adanya *green jobs*. Dengan ini Pemerintah Daerah perlu adanya internalisasi kebijakan pembangunan Daerah khususnya terkait *green jobs*, untuk mempersiapkan *skill* dan kualitas SDM untuk mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap dalam dunia usaha yang nantinya akan terbangun. Sehingga pengembangan ekonomi berkelanjutan pada sektor ekonomi non ekstraktif mampu membangun perekonomian daerah secara inklusif dan berdaya saing tinggi.

2. Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan andal

   Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan merupakan isu strategis yang krusial bagi Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat luas wilayahnya yang mencakup daerah pesisir, pedalaman, dan perbukitan. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pembangunan infrastruktur harus tidak hanya difokuskan pada wilayah-wilayah strategis atau padat penduduk, tetapi juga diarahkan ke wilayah pinggiran dan tertinggal yang memiliki potensi ekonomi dan kebutuhan pelayanan dasar yang mendesak.

3. Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi

Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun transformasi digital mulai diimplementasikan melalui berbagai sistem seperti *e-government, e-planning*, dan layanan administrasi daring, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan sering kali terbentur oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah terpencil.

Selain itu, penguatan kehidupan demokrasi lokal juga menjadi bagian penting dalam tata kelola yang baik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan anggaran, dan pengambilan keputusan publik perlu diperluas agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga. Di saat yang sama, stabilitas keamanan dan ketertiban harus dijaga secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat.

4. Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas

Peningkatan daya saing SDM menjadi isu strategis yang sangat penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara di era pasca-ekstraktif dan menjelang beroperasinya IKN. Saat ini, kualitas SDM di Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pendidikan, keterampilan kerja, maupun kesehatan masyarakat.

Untuk mempercepat peningkatan daya saing SDM, dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih progresif dan terintegrasi. Pemerintah Daerah perlu memperkuat ekosistem pendidikan dan pelatihan berbasis

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kebutuhan dunia usaha dan industri, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi.

5. Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya

Ketahanan sosial dan pelestarian budaya merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat di tengah arus globalisasi, migrasi, serta kemajuan teknologi yang semakin masif. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tantangan ketahanan sosial terlihat dari masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi antar-wilayah, meningkatnya urbanisasi, serta potensi konflik sosial akibat perebutan lahan, dampak pembangunan besar, dan perbedaan latar belakang etnis.

Di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekayaan budaya lokal yang luar biasa, termasuk tradisi Kesultanan Kutai, adat Dayak, dan warisan budaya tak benda lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai-nilai budaya ini menghadapi tantangan erosi karena kurangnya regenerasi, minimnya dokumentasi, dan belum terintegrasinya pelestarian budaya dalam sistem pendidikan maupun pariwisata Daerah.

6. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural

Kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural menjadi tantangan strategis yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama pada wilayah-wilayah perdesaan, pesisir, dan komunitas adat terpencil.

Kemiskinan ekstrem ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sementara itu, kemiskinan kultural mencerminkan kondisi keterbelakangan sosial yang dipengaruhi oleh cara pandang, pola hidup, dan nilai-nilai lokal yang belum selaras dengan prinsip pembangunan modern.

7. Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana

Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Jika tidak segera dikendalikan, kerusakan ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak perubahan iklim.

Pengarusutamaan isu lingkungan ke dalam kebijakan Daerah, penerapan prinsip ekonomi hijau, serta edukasi publik tentang gaya hidup ramah lingkungan akan menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkelanjutan, adaptif, dan tangguh terhadap bencana.

8. Penguatan Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya lahan yang luas dan subur, serta ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai pilar ketahanan pangan daerah. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal akibat masih terbatasnya infrastruktur pendukung, seperti irigasi, akses jalan produksi, sarana pascapanen, serta minimnya inovasi teknologi pertanian dan kapasitas kelembagaan petani.

Di tengah peningkatan kebutuhan pangan secara nasional, Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan produktivitas, menjamin keberlanjutan produksi, serta memperkuat akses pasar yang kompetitif agar mampu menjadi lumbung pangan andalan di Kalimantan Timur.

9. Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dan menjadi wilayah strategis penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki posisi geo-ekonomi dan geo-strategis yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN.

Selain itu, pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan migrasi ke wilayah sekitar IKN diproyeksikan akan meningkatkan tekanan terhadap permukiman, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memerlukan respons pembangunan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

Dalam rangka menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang strategis tersebut, akselerasi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga IKN harus diarahkan pada penguatan infrastruktur kawasan, revitalisasi ekonomi berbasis potensi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas sumber daya manusia.

Diperlukan sinkronisasi lintas sektor dan lintas wilayah, baik dengan Pemerintah Pusat, Otorita IKN, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di sekitar, untuk menjamin integrasi rencana tata ruang dan konektivitas pembangunan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang melimpah.

Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal dengan sumber daya alamnya yang kaya, termasuk tambang, pertanian, dan pariwisata, yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, maka visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

3.1.1 Visi.

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, di mana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.

Visi pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai *(desired future)* dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang di Kabupaten Kutai Kartanegara, visi yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KUKAR IDAMAN TERBAIK

"Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan,
Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok yaitu "Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan". Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD dijelaskan sebagai berikut.

1. Maju, pokok visi ini berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, infrastruktur dan tata kelola. Pemerintah Daerah berupaya menciptakan perekonomian yang inklusif dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan.

   Dengan mengoptimalkan potensi Daerah, meningkatkan investasi, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat secara merata, sehingga akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong terciptanya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

   Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memfokuskan diri untuk memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki.

   Pembangunan Daerah juga diimbangi dengan penguatan infrastruktur daerah seperti penyediaan akses jalan dan penataan ruang yang baik sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

   Selain itu, birokrasi pemerintahan sebagai penanggung jawab pembangunan Daerah juga menjadi perhatian agar tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

2. Sejahtera, pokok visi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dilandasi dengan budaya kearifan lokal.

   Pokok visi sejahtera juga diwujudkan dengan pengembangan SDM melalui penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penyediaan hunian yang layak, sehingga tercipta kondisi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sehat, berdaya saing, dan memiliki karakter budaya yang kuat.

3. Berkelanjutan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pembangunan jangka panjang.

   Pemerintah Daerah berkomitmen menerapkan praktik ramah lingkungan melalui pengembangan industri hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Program rehabilitasi lahan kritis, pelestarian hutan, dan mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas penting dalam menjaga ekosistem.

3.1.2 Misi.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut.

1) MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

   Misi ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada pemerataan akses di seluruh wilayah.

2) MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan.

3) MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan Daerah.

4) MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Pendidikan karakter merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berusaha memberikan pendidikan karakter masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi kelestarian lingkungan untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dengan lingkungan.

5) MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Misi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun wilayah secara menyeluruh dan merata, dengan mengedepankan prinsip keadilan spasial dan pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing pokok visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan visi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
(2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
(3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
(4) memenuhi kriteria *SMART-C*.

Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut.

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan"					
Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Pembangunan	
				2025	2030
Maju	Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,63 - 5,70	7,50-7,71
		PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	271,53-271,71	402,83 - 404,53
	Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,34	82,50

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan"					
Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Pembangunan	
				2025	2030
	yang baik dan berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,58	3,88
Sejahtera	Tujuan 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	6,50-6,95	4,80-5,24
Berkelanjutan	Tujuan 4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah	Penurunan Intensitas Emisi GRK*	%	17,59	53,45

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun, 2025

Pokok visi yang pertama yaitu Maju yang terdiri dari fokus perekonomian dan tata kelola pemerintahan. Pokok visi maju dengan fokus perekonomian memiliki tujuan untuk meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat penting karena merupakan landasan utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tepat jika laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan. Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini banyak bergantung pada sektor pertambangan, minyak dan gas (migas), yang bersifat tidak terbarukan dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Dengan membangun fondasi ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan sasaran peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor unggulan Daerah, yang diharapkan mengoptimalkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri hijau. Potensi lokal yang dipilih sebagai fokus ekonomi menjadi ukuran keberhasilan yang tertuang dalam indikator pertumbuhan PDRB ekonomi non-ekstraktif, yang merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang tidak bergantung pada pengambilan langsung sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pengembangan sektor-sektor ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi investor. Seiring dengan berkembangnya sektor unggulan, investasi Daerah pun meningkat, baik dari investor domestik maupun asing. Masuknya investasi ini memperkuat struktur ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong inovasi dan alih teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh, ukuran keberhasilan investasi adalah pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

diperlukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah yang terencana dan berkelanjutan yang dapat diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Infrastruktur yang merata, baik jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, maupun konektivitas digital, akan membuka akses antarwilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar-kecamatan, serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

Tujuan dari pokok visi maju selanjutnya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing, dengan ukuran keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Daya Saing. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan stabilitas kondusivitas Daerah merupakan dua elemen yang saling menguatkan, dan menjadi indikator penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat dan daya saing Daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Salah satu sasaran keberhasilan tata kelola tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan indikatornya Indeks Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP. Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya mencerminkan reformasi birokrasi yang berjalan efektif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini, pada gilirannya, berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan kondusivitas Daerah, karena masyarakat merasa dilayani secara adil dan partisipatif, sehingga potensi konflik sosial dapat ditekan dan harmoni sosial dapat terjaga yang dapat diukur melalui indikator Angka Kriminalitas. Sebaliknya, stabilitas dan kondusivitas daerah menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif memungkinkan proses pelayanan berjalan lancar tanpa gangguan, serta menciptakan suasana kerja yang produktif bagi aparatur pemerintah. Kondisi ini juga mendukung tumbuhnya iklim investasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.

Pokok visi Sejahtera tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui indikator tingkat kemiskinan yang semakin menurun. peningkatan kualitas SDM, terbukanya lapangan kerja, dan penurunan ketimpangan merupakan komponen yang saling mendukung dan tidak dapat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dipisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan saling terintegrasi, dengan fokus pada pembangunan manusia dan penciptaan peluang ekonomi yang merata. Salah satu pilar utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berkarakter, yang dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya akses pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, serta penguatan nilai-nilai karakter dan etika kerja, SDM yang unggul dan sehat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, sekaligus mendorong produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. SDM yang berkualitas dan siap kerja secara langsung berkontribusi terhadap meningkatnya kesempatan kerja yang diukur melalui indikator tingkat pengangguran terbuka. Tingginya kesempatan kerja berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun tumbuhnya wirausaha lokal di sektor informal dan UMKM. Hal ini membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Seiring dengan meningkatnya kesempatan kerja, akan terjadi penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat yang tercermin dari indeks gini. Pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan inilah yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan inklusif.

Pokok visi selanjutnya adalah Berkelanjutan dengan fokus pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta meningkatnya potensi bencana alam, Pemerintah Daerah menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan yang diukur dengan indikator penurunan emisi GRK yang penting bagi Daerah karena merupakan fondasi utama bagi kelangsungan hidup masyarakat. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, yang dapat diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pelestarian ekosistem penting seperti hutan, sungai, dan kawasan pesisir. Kualitas lingkungan hidup yang terjaga tidak hanya menjadi dasar bagi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kehidupan masyarakat yang sehat, tetapi juga merupakan komponen penting dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana daerah yang diukur melalui indeks risiko bencana. Lingkungan yang baik dapat berperan dalam memitigasi risiko bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang terjadi di Daerah. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, dan perencanaan tanggap darurat yang matang, juga mendukung terjaganya kelestarian lingkungan. Masyarakat yang siaga dan sadar risiko akan lebih peduli dalam menjaga lingkungan sekitar, sehingga tercipta siklus positif antara ketangguhan wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Daerah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada setiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. T1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan.

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan Daerah, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan Daerah.
   - Meningkatnya investasi di Daerah.
   - Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah.

2. T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan Daerah, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
   - Meningkatnya stabilitas kondusivitas di Daerah.

3. T3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter.
- Meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan.

4. T4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah.
- Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana di Daerah.

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3.2

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan" MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan	Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,63-5,70	5,98-6,05	6,30-6,37	6,67-6,74	7,06-7,13	7,50-7,71
			PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	259,19	271,53-271,71	287,89 - 288,27	308,51 - 309,12	333,93 - 334,81	364,91 - 366,11	402,83 - 404,53
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	7,88	8,07 - 8,14	9,08 - 9,15	10,05-10,13	10,96 – 11,03	12,06-12,14	13,35-13,45
		Sasaran 1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-29,18	0,00	0,80	1,00	1,10	1,15	1,20
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,24	78,66	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00
	Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,51	73,34	75,17	77,01	78,84	80,67	82,50
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52	3,58	3,64	3,70	3,76	3,82	3,88
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54
			Nilai SAKIP	Nilai	65,93	68,28	70,62	72,97	75,32	77,66	80,01
		Sasaran 2.2 Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	106	100	95	90	85	80	75

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	7,28	6,72	6,14 - 6,56	5,62 - 6,19	5,30 - 5,72	5,00 - 5,47	4,80 - 5,24
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41
		Sasaran 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,11	3,85 - 4,00	3,67 - 3,83	3,50 - 3,66	3,33 - 3,49	3,16 - 3,33	3,00 - 3,18
			Rasio Gini	Indeks	0,307	0,285 - 0,301	0,281 - 0,299	0,277 - 0,295	0,272 - 0,290	0,268 - 0,287	0,265 - 0,282
	Tujuan 4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	30,82	17,59	34,91	41,52	47,7	47,03	53,45
		Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,59	73,78	73,90	74,03	74,16	74,29	74,41
		Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	118,80	115,80	112,80	109,80	106,80	103,80	100,80

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun, 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan Daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan.

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah KUKAR IDAMAN TERBAIK , Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kepala Daerah dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses *cascading* kinerja, dimulai dari visi hingga capaian *outcome*, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

a. Strategi.

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan.

Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai bagian dari strategi implementatif RPJMD, Pemerintah Daerah menetapkan tema pembangunan tahunan yang menjadi pijakan dalam penyusunan rencana kerja setiap tahunnya.

Penetapan tema ini bertujuan untuk memberikan fokus arah pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Setiap tema menggambarkan prioritas yang ingin dicapai pada tahun berjalan, sekaligus menjadi instrumen untuk mengkonsentrasi berbagai program lintas sektor agar selaras dengan tujuan pembangunan.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat landasan transformasi struktural dan mempercepat realisasi visi pembangunan jangka menengah daerah secara bertahap. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 3.1
Tema Pembangunan Per Tahun RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3.3
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan	Perwujudan fondasi transformasi dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan
Ekonomi	- Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan - Pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis berbasis penguatan pasar domestik	- Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat - Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif	Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis	Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau	Penguatan rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan keanekaragaman hayati guna meningkatkan daya saing, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan
Infrastruktur	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi yang mendukung ketahanan wilayah	Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Penguatan sistem transportasi dan logistik serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, inklusif dan berdaya saing	Perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan	Pemantapan infrastruktur untuk menuju akselerasi transformasi pembangunan
Tata kelola	Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Sosial Budaya	Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan	Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian	Peningkatan mutu pendidikan,	Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan	Pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas,

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	2026	2027	2028	2029	2030
	dasar dan gizi masyarakat serta penguatan eksistensi budaya lokal sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat	kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan	kesehatan, perlindungan sosial dan kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat	berdaya saing serta ikatan sosial masyarakat yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya	inklusif, berkeadilan dan berbudaya menuju akselerasi transformasi pembangunan
Lingkungan	Pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan partisipasi multi pihak dalam perlindungan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Perwujudan peran serta multi pihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan dan pengembangan potensi energi ramah lingkungan	Penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun, 2025

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Adapun penahapan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui strategi berikut:

1. Pemenuhan Fondasi Infrastruktur Wilayah dan Penataan Kelembagaan.

Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing Daerah. Melalui pembangunan prasarana konektivitas yang terintegrasi yang mendukung ketahanan wilayah, diharapkan mampu mendorong terciptanya kawasan ekonomi potensial yang produktif dan berkelanjutan. Keterpaduan infrastruktur dengan kelembagaan yang efektif akan menciptakan ekosistem pembangunan yang sinergis, sehingga mampu meningkatkan arus barang, jasa, dan investasi di wilayah ini.

Selain itu, penguatan regulasi, tata kelola, dan pemanfaatan infrastruktur digital menjadi fondasi dalam membangun pelayanan publik yang adaptif, konsisten, dan implementatif. Digitalisasi pelayanan akan meningkatkan transparansi, mempercepat proses birokrasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi kelembagaan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung penguatan daya tarik kawasan ekonomi strategis.

Pembangunan Daerah juga tidak terlepas dari pemenuhan layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan dasar yang memadai, serta pemenuhan gizi masyarakat merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada saat yang sama, penguatan eksistensi budaya lokal sebagai identitas daerah menjadi pondasi penting bagi pembangunan sosial yang berkeadaban. Seluruh upaya ini berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui sistem pengelolaan yang berkualitas dan partisipasi aktif berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologi.

Dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Daerah, strategi pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis berbasis penguatan pasar domestik menjadi sangat penting. Pusat-pusat logistik

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang terintegrasi dengan jaringan transportasi regional akan memperlancar distribusi komoditas unggulan, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan sistem manajemen logistik berbasis digital yang mampu menyediakan data pergerakan barang secara real-time, sehingga mempermudah koordinasi antara pelaku usaha, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Optimalisasi pasar domestik sebagai tulang punggung ekonomi nasional dilakukan melalui penguatan kemitraan antara produsen, UMKM, dan sektor distribusi agar nilai tambah ekonomi dapat tercipta di dalam negeri. Dengan demikian, pengembangan pusat logistik tidak hanya mendukung stabilitas suplai dan harga komoditas strategis, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem perdagangan Daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan kompetitif.

2. Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan.

Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan menjadi landasan penting dalam mendorong terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah. Upaya ini dilakukan melalui perluasan pengembangan perekonomian tematik yang sesuai dengan potensi lokal, sehingga mampu memberdayakan pelaku usaha masyarakat secara lebih optimal. Dengan memperkuat basis ekonomi wilayah melalui sektor unggulan yang khas, pembangunan tidak hanya terfokus pada pusat pertumbuhan, tetapi juga merata ke wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi strategis. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar diarahkan untuk mendukung pemerataan transformasi pembangunan, sehingga konektivitas antar wilayah semakin terbuka dan masyarakat dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap berbagai peluang pembangunan.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur, serta penguatan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, menjadi prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif. Aparatur yang kompeten mampu mengimplementasikan kebijakan pembangunan secara efektif, sementara kelembagaan yang kuat memastikan koordinasi dan sinergi lintas sektor berjalan dengan baik. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi transformasi pembangunan berbasis kewilayahan yang tidak hanya mengedepankan pembangunan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

fisik, tetapi juga memperkuat aspek kelembagaan sebagai motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

Transformasi pembangunan juga perlu ditopang dengan perluasan akses terhadap pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan sosial, yang dibarengi dengan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas. Hal ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan sosial masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan nilai-nilai budaya sebagai identitas daerah. Sejalan dengan itu, peningkatan ketahanan lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengelolaan limbah terpadu yang bertanggung jawab menjadi prioritas, guna memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berwawasan lingkungan dan mendukung keseimbangan ekologi.

Sebagai bagian dari strategi penguatan potensi wilayah, integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya, dan agrowisata produktif menjadi langkah penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi Daerah. Pendekatan ini dilakukan melalui pengembangan destinasi yang saling terhubung, dikemas dalam paket wisata terpadu yang memadukan kekayaan alam, warisan budaya, dan aktivitas pertanian produktif. Integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memperluas peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam rantai nilai pariwisata, mulai dari pengelolaan *homestay*, penyediaan produk UMKM, hingga jasa pendukung lainnya. Selain itu, penguatan sarana prasarana penunjang pariwisata, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi, serta peningkatan kapasitas pelaku wisata menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi sektor ekonomi yang menjanjikan, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat identitas daerah dan pemerataan kesejahteraan berbasis potensi lokal.

3. Peningkatan Kemanfaatan Transformasi Pembangunan.

Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan inovatif yang mendorong lahirnya produk lokal masyarakat serta hilirisasi sektor-sektor strategis daerah. Dengan menumbuhkan iklim usaha yang adaptif terhadap

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perubahan dan berbasis inovasi, diharapkan potensi lokal dapat diolah menjadi nilai tambah yang berdaya saing tinggi, baik di tingkat regional maupun nasional. Upaya ini sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memberdayakan masyarakat secara luas, dan membuka peluang kerja yang lebih besar.

Selain itu, penguatan sistem transportasi, logistik, dan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi menjadi prasyarat bagi terciptanya konektivitas ekonomi yang merata. Infrastruktur yang inklusif dan berdaya saing akan memperlancar distribusi barang, jasa, dan informasi, sehingga mendukung efisiensi perekonomian Daerah. Sejalan dengan itu, penerapan digitalisasi layanan publik serta penguatan sistem pengawasan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Transformasi pembangunan juga ditopang oleh peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta pelestarian kebudayaan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Upaya tersebut diiringi dengan pengendalian pencemaran dan optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan, guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan ekologi. Dengan demikian, pembangunan Daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi pembangunan yang berkemanfaatan nyata bagi semua.

4. Perwujudan fondasi transformasi dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK.

Perwujudan fondasi transformasi dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK diarahkan pada pembangunan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan Daerah sebagai landasan transformasi menuju pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau. Dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan mendorong hilirisasi sektor strategis, Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Upaya ini tidak hanya menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sekaligus

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menjadi pondasi bagi terciptanya lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan identitas Daerah.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur kewilayahan ditujukan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pembangunan yang merata. Infrastruktur yang terintegrasi dan modern akan memperkuat konektivitas antar wilayah, mendukung arus distribusi barang dan jasa, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi Daerah. Pencapaian tujuan tersebut diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif, konsisten, dan implementatif, serta sistem evaluasi pembangunan yang efektif sebagai instrumen peningkatan kinerja. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan dapat berjalan terarah, terukur, dan mampu menjawab dinamika serta tantangan masa depan.

Fondasi transformasi juga diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, berdaya saing, dan berkarakter, sekaligus memperkuat ikatan sosial masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berbudaya. Hal ini didukung oleh peran serta multi pihak dalam mengendalikan ancaman kerusakan lingkungan serta mengembangkan potensi energi ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, KUKAR IDAMAN TERBAIK tidak hanya menjadi visi pembangunan, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Daerah yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.

5. Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan.

Pemantapan menuju akselerasi transformasi pembangunan diarahkan pada penguatan rantai nilai dan percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan. Langkah ini menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara bijak serta mengedepankan prinsip keberlanjutan, hilirisasi komoditas unggulan diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan usaha lokal.

Strategi penguatan rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan Daerah semakin diperkuat dengan pengembangan lapangan usaha yang berbasis pada prinsip ramah lingkungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Penguatan ini dilakukan melalui penerapan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

praktik produksi berkelanjutan, inovasi teknologi hijau, serta peningkatan efisiensi proses usaha untuk memastikan komoditas unggulan mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Selain memberikan nilai tambah ekonomi, pendekatan ini juga mendukung konservasi ekosistem lokal dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hayati berlangsung secara bertanggung jawab. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya mendorong peningkatan daya saing, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari transformasi pembangunan yang holistik.

Dalam mendukung hal tersebut, pemantapan infrastruktur menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya akselerasi transformasi pembangunan. Pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, energi, dan layanan dasar secara terintegrasi akan memperkuat konektivitas, menurunkan biaya distribusi, serta menciptakan efisiensi pembangunan. Di samping itu, penguatan kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci dalam tata kelola pembangunan yang partisipatif. Sinergi lintas sektor ini akan memastikan bahwa setiap program pembangunan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Akselerasi transformasi pembangunan juga ditopang oleh pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berbudaya. Hal ini diwujudkan melalui penguatan solidaritas sosial, pelestarian nilai budaya lokal, serta penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon menjadi prioritas untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup. Dengan fondasi sosial yang kuat, dukungan energi berkelanjutan, serta tata kelola yang kolaboratif, transformasi pembangunan daerah akan bergerak lebih cepat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

6. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan Daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kebijakan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, ketahanan ekologi yang berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Pembangunan

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar dan gizi masyarakat serta penguatan eksistensi budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat	1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat
		2. Penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara
		3. Identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal
	Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan	4. Ekspansi program beasiswa, pelatihan dan pendampingan untuk kelompok rentan
		5. Penguatan kelembagaan budaya lokal (sanggar, komunitas adat)
		6. Perlindungan sosial kelompok rentan
		7. Penyediaan hunian layak dan terjangkau
		8. Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia
	Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat	9. Peningkatan mutu SDM melalui sekolah vokasi dan pelatihan kerja
		10. Transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi dan pariwisata
	Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing serta ikatan sosial masyarakat yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya	11. SDM unggul dan adaptif: kolaborasi dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha
		12. Revitalisasi nilai-nilai lokal dalam transformasi sosial
	Pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya menuju akselerasi transformasi pembangunan	13. Peningkatan daya saing SDM dan budaya di tingkat nasional
		14. Promosi identitas budaya daerah secara luas
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan)
		2. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif		3. Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro
	Pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis berbasis penguatan pasar domestik	4. Penetapan lokasi sentra logistik berbasis kawasan produksi unggulan daerah yang didukung oleh infrastruktur pergudangan, penyimpanan, pengolahan awal, dan distribusi barang
		5. Peningkatan efisiensi tata niaga, memperpendek rantai distribusi, serta memperluas akses produsen lokal terhadap pasar regional dan nasional guna menjaga stabilitas pasokan dan harga
		6. Penguatan fasilitas pascapanen, pengolahan, pengemasan, standarisasi mutu, serta sertifikasi produk
	Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif	7. Pengelompokkan destinasi wisata alam, budaya dan agrowisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan yang saling terhubung, berbasis potensi lokal dan keunikan sumber daya alam dan budaya Kutai Kartanegara
		8. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi pariwisata secara terintegrasi dan tematik
		9. Peningkatan kualitas amenitas dan layanan pariwisata, melalui penyediaan fasilitas pendukung yang layak, ramah lingkungan, inklusif, dan berstandar internasional
	Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat	10. Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan
		11. Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan
		12. Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya
		13. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif
	Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis	14. Inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif
		15. Pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (link dan match)
		16. Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital
	Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau	17. Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah
		18. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN
		19. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan
	Penguatan rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan keanekaragaman hayati guna meningkatkan daya	20. Industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan Kawasan Strategis hijau
		21. Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan kreatif
		22. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon
		23. Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
	saing, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan	mencakup pengetahuan tentang energi terbarukan, manajemen sumber daya alam, teknologi bersih, efisiensi energi, dan keberlanjutan
Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	1. Penyusunan sistem perencanaan-penganggaran terpadu
		2. Penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan pembangunan baru
	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	3. Peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik
		4. Penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja
	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	5. Digitalisasi layanan publik
		6. Penguatan sistem pengaduan
	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	7. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
		8. Aplikasi dashboard lintas sektor
	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan	9. Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan
		10. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal	Pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan partisipasi multi pihak dalam perlindungan lingkungan hidup	1. Penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana
		2. Penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara
	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab	3. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis
		4. Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat
	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	5. Penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana
	Perwujudan peran serta multi pihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan dan pengembangan potensi energi ramah lingkungan	6. Skema insentif perlindungan lingkungan swadaya
		7. Penguatan tata ruang ekologis dan zonasi konservasi
	Penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	8. Implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif
		9. Perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dan infrastruktur kewilayahan	1. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	yang terintegrasi yang mendukung ketahanan wilayah	
	Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan
		3. Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN
	Penguatan sistem transportasi dan logistik serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, inklusif dan berdaya saing	4. Modernisasi desa melalui smart village (internet, sistem layanan digital, energi alternatif)
		5. Penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan
	Perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan	6. Pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antar wilayah
		7. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke IKN
	Pemantapan infrastruktur untuk menuju akselerasi transformasi pembangunan	8. Pembangunan infrastruktur cerdas: transportasi massal, energi bersih, kawasan hijau
		9. Implementasi infrastruktur terintegrasi Kawasan Strategis

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun, 2025

7. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Pencapaian misi pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah pada setiap misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, sebagai berikut:

a. Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar dan gizi masyarakat serta penguatan eksistensi budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Strategi ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, penyediaan fasilitas kesehatan dasar yang memadai, serta program gizi masyarakat yang berkesinambungan. Dengan memperkuat layanan dasar tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat secara signifikan, sehingga mampu menjadi modal utama pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan misi yang menekankan pemerataan akses layanan dasar sebagai hak fundamental seluruh warga.

Selain itu, penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara menjadi strategi penting dalam menanamkan identitas, nilai, serta kearifan lokal kepada generasi muda. Melalui integrasi kurikulum berbasis budaya daerah ke dalam sistem pendidikan, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali pemahaman akan akar budaya dan sejarah yang membentuk karakter daerah. Hal ini merupakan pondasi yang kuat untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas daerah di tengah arus globalisasi.

Strategi lainnya adalah melakukan identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal sebagai langkah awal dalam memperkuat eksistensi budaya daerah. Pemetaan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pelestarian budaya yang lebih tepat sasaran, serta memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk berperan aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, pemenuhan layanan dasar tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkokoh eksistensi budaya lokal sebagai bagian integral dari pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat.

   Arah kebijakan peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat difokuskan pada upaya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mewujudkan pelayanan dasar yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui pemenuhan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, serta penguatan ketahanan gizi sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penguatan eksistensi budaya lokal menjadi pondasi penting dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan, dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai inspirasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Seluruh arah kebijakan ini sejalan dengan misi Terbaik untuk mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang bermartabat, berdaya saing, serta berakar pada kekuatan budaya masyarakat.

2. Penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara.

   Arah kebijakan penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, memperkuat identitas Daerah, serta membangun karakter peserta didik yang berakar pada budaya setempat namun tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui integrasi budaya dan sejarah Kutai Kartanegara dalam kurikulum pendidikan, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kebanggaan terhadap warisan budayanya. Kebijakan ini selaras dengan strategi pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan kontekstual, di mana penguatan eksistensi budaya lokal menjadi pondasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan yang berkarakter, berbudaya, dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara.

3. Identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal.

Arah kebijakan identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal diarahkan untuk menggali, mendokumentasikan, dan memperkuat potensi budaya serta struktur sosial masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pemetaan yang komprehensif, pemerintah dapat mengenali karakteristik, kebutuhan, serta kekuatan masing-masing komunitas lokal sehingga intervensi pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat dapat disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat. Kebijakan ini menjadi bagian integral dari strategi penguatan eksistensi budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat, di mana pelestarian budaya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal serta memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas.

b. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan.

Perluasan akses pelayanan dasar menjadi strategi utama untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat menikmati hak-haknya secara adil. Melalui ekspansi program beasiswa, pelatihan, dan pendampingan, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda dan kelompok marjinal untuk berdaya. Strategi ini diperkuat dengan penyediaan hunian layak dan terjangkau sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan budaya lokal seperti sanggar seni dan komunitas adat menjadi bagian penting dalam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menjaga identitas Daerah dan memperkokoh ketahanan sosial. Dengan melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama, pelestarian kebudayaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga ruang aktualisasi diri yang mampu mempererat solidaritas sosial. Langkah ini sejalan dengan misi yang menempatkan perlindungan sosial sebagai pilar utama pembangunan, karena ketahanan sosial tidak hanya dibangun melalui layanan dasar, tetapi juga dengan memperkuat nilai-nilai budaya sebagai perekat kehidupan masyarakat.

Selain itu, strategi transformasi pembangunan diwujudkan melalui peningkatan kualitas keluarga serta pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Perlindungan sosial yang terarah akan memperkuat fondasi masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Dengan sinergi pelayanan dasar, penguatan budaya lokal, serta perlindungan kelompok rentan, Kutai Kartanegara dapat mewujudkan transformasi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sosial. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Ekspansi program beasiswa, pelatihan dan pendampingan untuk kelompok rentan.

   Arah kebijakan ekspansi program beasiswa, pelatihan, dan pendampingan bagi kelompok rentan difokuskan untuk membuka akses yang lebih luas terhadap kesempatan pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi maupun sosial. Melalui pemberian beasiswa yang berkeadilan, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta pendampingan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian dan daya saing kelompok rentan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Upaya ini sejalan dengan strategi perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai bentuk penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Seluruh arah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, dengan menjadikan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Penguatan kelembagaan budaya lokal (sanggar, komunitas adat).

   Arah kebijakan penguatan kelembagaan budaya lokal, seperti sanggar seni, komunitas adat, dan lembaga pelestari tradisi, diarahkan untuk memperkuat peran dan kapasitas lembaga budaya sebagai pusat pengembangan nilai, pengetahuan, dan identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Melalui dukungan terhadap kelembagaan budaya ini, diharapkan terjadi revitalisasi peran komunitas dalam menjaga warisan budaya sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi berbasis kearifan lokal. Kebijakan ini selaras dengan strategi perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas, yang menempatkan budaya sebagai kekuatan sosial dalam memperkuat ketahanan masyarakat menuju transformasi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat serta berakar pada kekayaan budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan bersama.

3. Perlindungan sosial kelompok rentan.

   Arah kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok rentan difokuskan pada upaya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak. Melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan berbasis komunitas, kebijakan ini bertujuan memperluas akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan bantuan sosial yang berkeadilan, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Pendekatan pelestarian kebudayaan lokal dalam program perlindungan sosial juga menjadi strategi penting dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan masyarakat, karena nilai-nilai gotong royong dan solidaritas yang hidup dalam budaya daerah menjadi modal sosial menuju transformasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara secara berkeadilan dan bermartabat.

4. Penyediaan hunian layak dan terjangkau.

   Arah kebijakan penyediaan hunian layak dan terjangkau difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang aman, sehat, dan sesuai standar kehidupan yang bermartabat. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik perumahan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam penataan permukiman berbasis komunitas. Melalui strategi perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal, penyediaan hunian dirancang untuk memperkuat kohesi sosial serta mendukung ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga identitas budaya daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, di mana penyediaan hunian layak menjadi bagian integral dari pembangunan manusia yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

5. Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Arah kebijakan peningkatan kualitas keluarga serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia diarahkan untuk membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya melalui penguatan peran keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam menopang kesejahteraan bersama. Kebijakan ini menitikberatkan pada penyediaan layanan dasar yang mudah diakses, pemberdayaan kelompok rentan, serta penciptaan lingkungan sosial yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Pendekatan ini dikaitkan dengan strategi perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas, di mana nilai-nilai gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial yang hidup dalam budaya Kutai Kartanegara menjadi fondasi dalam memperkuat ketahanan sosial dan mendorong transformasi pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial secara berkelanjutan, dengan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

c. Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Kebudayaan yang Dapat Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat.

Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebudayaan diarahkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Strategi ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penyelenggaraan sekolah vokasi dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan memperkuat kompetensi masyarakat, terutama generasi muda, Daerah akan memiliki tenaga kerja yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan serta dinamika ekonomi global.

Selain itu, transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan langkah strategis dalam menghubungkan pelestarian kebudayaan dengan penguatan perekonomian masyarakat. Melalui inovasi dan pengembangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

produk berbasis budaya lokal, nilai-nilai tradisi tidak hanya terjaga, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sekaligus memperkuat identitas daerah, meningkatkan daya tarik pariwisata, dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.

Dengan sinergi antara peningkatan mutu layanan dasar dan pemanfaatan budaya sebagai sumber ekonomi, strategi ini memperkuat misi terbaik yang menempatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama. Strategi ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya lokal sebagai pondasi sosial dan ekonomi Daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu SDM melalui sekolah vokasi dan pelatihan kerja.

   Arah kebijakan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penguatan sekolah vokasi dan pelatihan kerja difokuskan pada pengembangan kompetensi dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja serta berkontribusi dalam pembangunan Daerah. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, dunia usaha, dan industri untuk menciptakan sistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus menumbuhkan jiwa kemandirian dan inovasi di kalangan generasi muda. Upaya ini selaras dengan strategi peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebudayaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya saing. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara berkelanjutan, guna melahirkan sumber daya manusia Kutai Kartanegara yang unggul, produktif, dan berkarakter.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi dan pariwisata.

Arah kebijakan transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi dan pariwisata diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kekayaan budaya lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus sarana pelestarian identitas daerah. Melalui pengembangan industri kreatif, ekonomi berbasis budaya, serta pariwisata yang berwawasan kearifan lokal, kebijakan ini berupaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kebanggaan terhadap warisan budaya Kutai Kartanegara. Upaya ini sejalan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan menempatkan budaya sebagai elemen penting dalam pembangunan manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, melalui pendekatan pembangunan berbasis budaya yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

d. Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing serta Ikatan Sosial Masyarakat yang Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan, dan Berbudaya.

Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing menjadi salah satu kunci akselerasi pembangunan Daerah. Strategi ini ditempuh melalui penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia kerja, dan dunia usaha, sehingga tercipta ekosistem yang mampu menghasilkan SDM unggul, adaptif, serta relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat melalui pendidikan formal, sekolah vokasi, serta pelatihan yang terarah, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencetak generasi yang siap bersaing di tingkat regional maupun nasional. Upaya ini sejalan dengan misi terbaik yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai pondasi pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Selain peningkatan kapasitas SDM, strategi transformasi pembangunan juga menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai lokal dalam memperkuat ikatan sosial masyarakat. Nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam dinamika pembangunan sosial sehingga masyarakat tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki karakter yang berkeadilan, inklusif, dan berbudaya. Revitalisasi nilai-nilai lokal ini menjadi instrumen dalam membangun solidaritas sosial, memperkokoh identitas daerah, dan menjaga keberlanjutan pembangunan yang berakar pada kekuatan masyarakat.

Dengan sinergi antara peningkatan kualitas SDM dan penguatan ikatan sosial berbasis nilai budaya lokal, strategi ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih inovatif, produktif, dan sejahtera. Pada saat yang sama, pembangunan tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan budaya, sehingga transformasi yang terjadi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. SDM unggul dan adaptif: kolaborasi dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha.

   Arah kebijakan pengembangan SDM unggul dan adaptif melalui kolaborasi antara dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha difokuskan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran dan ketenagakerjaan yang saling terhubung, relevan, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan industri modern. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan sektor industri dalam merancang kurikulum berbasis kompetensi, program magang, serta pelatihan vokasi yang mampu melahirkan tenaga kerja terampil, inovatif, dan berdaya saing global.

   Kolaborasi ini juga memperkuat ikatan sosial masyarakat yang inklusif dan berkeadilan melalui pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Perwujudan Sumber Daya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing serta Ikatan Sosial Masyarakat yang Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan, dan Berbudaya, serta mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Revitalisasi nilai-nilai lokal dalam transformasi sosial.

Arah kebijakan revitalisasi nilai-nilai lokal dalam transformasi sosial diarahkan untuk menghidupkan kembali dan mengintegrasikan kearifan budaya Daerah sebagai landasan moral, etika, dan sosial dalam pembangunan masyarakat yang modern dan berdaya saing. Kebijakan ini menekankan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai modal sosial yang memperkuat karakter sumber daya manusia di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Melalui penguatan peran lembaga adat, pendidikan berbasis budaya, serta kegiatan sosial kemasyarakatan, nilai-nilai lokal diaktualisasikan menjadi kekuatan transformatif yang menjaga keharmonisan dan memperkokoh identitas Daerah.

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing serta ikatan sosial masyarakat yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berbudaya, serta mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, dengan menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkarakter, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

e. Pemantapan Ketahanan Sosial yang Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan dan Berbudaya Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan.

Pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berbudaya merupakan pilar penting dalam mendorong akselerasi transformasi pembangunan. Strategi ini diarahkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

budaya di tingkat nasional, melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan yang memperkuat kompetensi sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya lokal. Dengan membangun masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter, Kutai Kartanegara mampu menempatkan diri sebagai daerah yang tidak hanya unggul dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam kualitas sosial dan budaya. Hal ini sejalan dengan misi yang menekankan pemenuhan pelayanan dasar sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Selain penguatan kapasitas SDM, strategi ketahanan sosial juga diwujudkan melalui promosi identitas budaya Daerah secara luas. Warisan budaya lokal perlu diangkat menjadi bagian dari kebanggaan bersama sekaligus sebagai daya tarik di kancah nasional maupun internasional. Promosi budaya ini dapat dilakukan melalui festival, pameran, maupun platform digital, sehingga identitas daerah semakin dikenal dan menjadi modal sosial dalam memperkokoh solidaritas masyarakat. Dengan demikian, budaya bukan hanya warisan yang dilestarikan, tetapi juga aset strategis dalam membangun ketahanan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Melalui kombinasi peningkatan daya saing SDM dan promosi identitas budaya daerah, strategi ini akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kutai Kartanegara. Ketahanan sosial yang kokoh akan memastikan transformasi pembangunan berjalan lebih cepat, merata, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing SDM dan budaya di tingkat nasional.

   Arah kebijakan peningkatan daya saing sumber daya manusia dan budaya di tingkat nasional difokuskan pada upaya membangun SDM yang unggul, kreatif, serta berkarakter kuat dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas daerah. Kebijakan ini mendorong pengembangan kapasitas individu melalui pendidikan berkualitas, pelatihan berbasis kompetensi, dan pemberdayaan komunitas budaya agar mampu bersaing dalam skala nasional tanpa kehilangan akar kearifan lokalnya. Selain itu, pelestarian dan promosi budaya daerah dilakukan secara

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

strategis sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan dan penguatan citra daerah di tingkat nasional.

Langkah ini sejalan dengan strategi pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berbudaya menuju akselerasi transformasi pembangunan, di mana pembangunan manusia dan budaya menjadi dua pilar utama dalam memperkuat kohesi sosial dan daya saing daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini turut mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, dengan menjadikan SDM dan budaya sebagai penggerak utama menuju kesejahteraan dan kemajuan Kutai Kartanegara.

2. Promosi identitas budaya daerah secara luas.

Arah kebijakan promosi identitas budaya daerah secara luas diarahkan untuk memperkuat kebanggaan dan kesadaran masyarakat terhadap jati diri budaya Kutai Kartanegara sekaligus memperkenalkan kekayaan nilai, tradisi, dan seni lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui kegiatan promosi budaya yang terintegrasi seperti festival daerah, pertukaran budaya, dan pemanfaatan media digital kebijakan ini bertujuan memperluas apresiasi publik terhadap warisan budaya lokal serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangannya.

Upaya ini juga berperan dalam memperkokoh ketahanan sosial melalui penguatan identitas kolektif yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada kearifan lokal. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan strategi pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berbudaya menuju akselerasi transformasi pembangunan, serta mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, di mana budaya menjadi kekuatan pemersatu dan pendorong utama pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru nonekstraktif, sebagai berikut:

a. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi baru non-ekstraktif. Strategi ini diwujudkan melalui penetapan kawasan strategis pembangunan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), serta kawasan pangan, perikanan, perkotaan, dan perdesaan. Dengan perencanaan yang matang dan penataan ruang yang tepat, kawasan-kawasan tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, penguatan potensi usaha di sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata diarahkan untuk menciptakan basis ekonomi rakyat yang kokoh dan inklusif. Melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan akses pasar, pelaku usaha lokal dapat lebih berdaya saing serta berkontribusi signifikan dalam hilirisasi sektor strategis Daerah. Pengembangan sektor-sektor unggulan ini juga didorong dengan integrasi program lintas sektor agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan parsial, melainkan saling melengkapi.

Sebagai penopang keberhasilan strategi tersebut, peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro menjadi prioritas dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan memperkuat UMKM. Dengan dukungan akses permodalan yang lebih mudah serta pemahaman manajemen usaha yang lebih baik, masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan misi yang menempatkan hilirisasi pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak transformasi ekonomi Daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berdaya saing tinggi. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan).

   Arah kebijakan penetapan kawasan strategis pembangunan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), serta kawasan pangan, perikanan, perkotaan, dan perdesaan diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing, berkelanjutan, dan saling terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan potensi unggulan daerah melalui pengembangan sektor-sektor produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang mendorong investasi dan kesejahteraan masyarakat.

   Pendekatan ini sejalan dengan strategi pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan, di mana sinergi antara sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi motor utama transformasi ekonomi Daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara merata.

2. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.

   Arah kebijakan penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan rantai nilai dan hilirisasi produk agar mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Sektor pertanian dan perikanan diarahkan menjadi basis

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ketahanan pangan daerah, sementara UMKM dan pariwisata dikembangkan sebagai penggerak ekonomi kreatif yang memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Upaya ini selaras dengan strategi pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang menekankan kolaborasi lintas sektor dan wilayah untuk menciptakan sistem ekonomi yang tangguh dan inklusif. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang berorientasi pada keberlanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat Kutai Kartanegara.

3. Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro.

Arah kebijakan peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, khususnya petani, nelayan, pelaku UMKM, dan wirausaha muda, agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran digital, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan mikro dan lembaga keuangan inklusif, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi rakyat yang tangguh dan berdaya saing.

Langkah ini juga menjadi bagian penting dari strategi pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan menumbuhkan wirausaha lokal yang berkontribusi terhadap penguatan ekonomi berbasis potensi Daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang berorientasi pada kemandirian, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan daya saing ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis berbasis penguatan pasar domestik

Pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis berbasis penguatan pasar domestik merupakan langkah krusial dalam memperkuat fondasi ekonomi baru non-ekstraktif, khususnya melalui hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dalam konteks kewilayahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada dalam satu koridor pembangunan strategis dengan Kutai Kartanegara, keberadaan pusat logistik yang terintegrasi menjadi semakin penting untuk mendukung suplai kebutuhan IKN sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah. Upaya ini diarahkan pada penetapan lokasi sentra logistik yang terhubung dengan kawasan produksi unggulan daerah dan jaringan distribusi menuju IKN, sehingga aktivitas penyimpanan, pengolahan awal, dan distribusi barang dapat berjalan lebih efisien dan terkoordinasi. Dengan terbangunnya jaringan logistik yang kuat dan sesuai karakteristik produksi lokal, nilai tambah komoditas pertanian, hasil industri kreatif, hingga produk pendukung pariwisata dapat meningkat signifikan, sekaligus memperkuat daya saing daerah di pasar domestik, regional, maupun kebutuhan baru yang muncul dari IKN.

Sejalan dengan itu, penguatan pusat logistik juga berperan besar dalam meningkatkan efisiensi tata niaga dan memperpendek rantai distribusi, terutama dalam memenuhi permintaan pasar IKN yang diproyeksikan tumbuh pesat. Akses produsen lokal terhadap pasar regional dan nasional, termasuk pasar strategis IKN sebagai pusat pemerintahan baru, akan semakin terbuka sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat lebih terjaga. Efisiensi ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani, pelaku UMKM kreatif, serta komunitas pariwisata yang selama ini menghadapi tantangan biaya distribusi tinggi dan fluktuasi harga. Dengan sistem distribusi yang lebih ringkas, modern, dan transparan, pusat logistik berfungsi sebagai penghubung strategis antara daerah produksi, pasar konsumsi, dan kebutuhan logistik IKN, sekaligus memperkuat ekosistem hilirisasi yang sedang dikembangkan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Di sisi lain, penguatan fasilitas pascapanen, pengolahan, pengemasan, standarisasi mutu, dan sertifikasi produk menjadi kunci dalam memastikan bahwa komoditas unggulan daerah mampu memenuhi standar pasar yang semakin kompetitif, termasuk standar tinggi yang diterapkan dalam rantai pasok IKN. Melalui peningkatan kualitas layanan logistik dan pemenuhan standar mutu yang lebih baik, pelaku usaha di sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat menghasilkan produk yang konsisten, bernilai tinggi, dan siap masuk ke berbagai segmen pasar, mulai dari masyarakat lokal hingga pasar strategis IKN dan kawasan regional. Dengan demikian, strategi pengembangan pusat logistik tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah yang mendorong hilirisasi berkelanjutan, memperkuat pasar domestik, memperluas jejaring kewilayahan hingga IKN, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi sentra logistik berbasis kawasan produksi unggulan daerah yang didukung oleh infrastruktur pergudangan, penyimpanan, pengolahan awal, dan distribusi barang.

   Arah kebijakan penetapan lokasi sentra logistik berbasis kawasan produksi unggulan daerah menjadi landasan strategis dalam pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis yang berpijak pada penguatan pasar domestik. Dengan menghadirkan infrastruktur pergudangan, fasilitas penyimpanan, pengolahan awal, serta sistem distribusi yang terintegrasi di dekat pusat produksi, proses tata niaga dapat berlangsung lebih efisien dan berbiaya rendah.

   Kebijakan ini mendorong terciptanya rantai pasok yang lebih kuat dan reliabel, sehingga mampu mendukung percepatan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif. Sentra logistik yang terencana dengan baik tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk lokal, tetapi juga memperluas akses pasar, memperkuat daya saing daerah, dan memastikan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif berbasis potensi wilayah.

2. Peningkatan efisiensi tata niaga, memperpendek rantai distribusi, serta memperluas akses produsen lokal terhadap pasar regional dan nasional guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

   Arah kebijakan peningkatan efisiensi tata niaga, pemangkasan rantai distribusi, serta perluasan akses produsen lokal ke pasar regional dan nasional menjadi pilar penting dalam strategi pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis berbasis penguatan pasar domestik. Melalui perbaikan sistem distribusi yang lebih singkat, transparan, dan terkoordinasi, biaya logistik dapat ditekan, stabilitas pasokan terjaga, dan fluktuasi harga dapat diminimalkan.

   Kebijakan ini sekaligus memperkuat fondasi hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, karena produk yang dihasilkan pelaku usaha lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan kualitas terjaga dan daya saing lebih tinggi. Dengan demikian, efisiensi tata niaga bukan hanya meningkatkan posisi tawar produsen, tetapi juga menjadi penggerak utama terbentuknya ekonomi baru non-ekstraktif yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah.

3. Penguatan fasilitas pascapanen, pengolahan, pengemasan, standarisasi mutu, serta sertifikasi produk.

   Arah kebijakan penguatan fasilitas pascapanen, pengolahan, pengemasan, standarisasi mutu, dan sertifikasi produk merupakan elemen kunci dalam strategi pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis berbasis penguatan pasar domestik. Dengan menyediakan fasilitas yang mampu menjaga kualitas produk sejak pascapanen hingga siap dipasarkan, nilai tambah komoditas unggulan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus memastikan konsistensi mutu yang dibutuhkan pasar regional maupun nasional.

   Kebijakan ini memperkuat proses hilirisasi di sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, karena produk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

lokal tidak hanya memiliki daya saing yang lebih tinggi, tetapi juga memenuhi standar yang diperlukan untuk menembus pasar yang lebih luas. Melalui penguatan fasilitas dan jaminan mutu ini, pembangunan ekonomi non-ekstraktif dapat berkembang lebih kokoh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan keberlangsungan rantai pasok yang mendukung kesejahteraan masyarakat daerah.

c. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif

Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya, dan agrowisata produktif merupakan strategi penting dalam memperkuat transformasi ekonomi non-ekstraktif yang berkelanjutan. Melalui pengelompokkan destinasi wisata yang memadukan kekayaan alam, keunikan budaya, dan aktivitas pertanian berbasis agrowisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan, Kutai Kartanegara dapat menciptakan daya tarik wisata yang lebih kuat, tematik, dan bernilai tambah tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan upaya hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, karena integrasi antar destinasi membuka peluang besar bagi pengembangan produk turunan, jasa pendukung pariwisata, serta kreativitas lokal yang turut menggerakkan ekonomi masyarakat secara lebih inklusif.

Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi menjadi komponen kunci dalam keberhasilan integrasi kawasan pariwisata. Dengan menyediakan jaringan transportasi yang terhubung secara tematik baik antara pusat kota, sentra budaya, kawasan alam, maupun lokasi agrowisata arus wisatawan dapat mengalir lebih lancar dan memberikan dampak ekonomi yang lebih merata. Infrastruktur dan akses yang terintegrasi ini tidak hanya memudahkan pergerakan wisatawan, tetapi juga memperkuat rantai nilai pariwisata, termasuk pemasaran produk pertanian lokal, kerajinan kreatif, dan layanan pendukung lainnya. Dengan demikian, konektivitas yang efektif menjadi fondasi terciptanya ekosistem pariwisata yang mampu mendukung hilirisasi sektor unggulan Daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas amenitas dan layanan pariwisata berperan penting dalam memastikan bahwa kawasan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pariwisata unggulan mampu bersaing secara regional maupun internasional. Penyediaan fasilitas pendukung yang layak, ramah lingkungan, inklusif, dan berstandar internasional akan meningkatkan pengalaman wisatawan, sekaligus memperpanjang lama tinggal mereka di destinasi. Upaya ini memperkuat peran pariwisata sebagai sektor penggerak ekonomi non-ekstraktif, karena kualitas layanan yang baik mendorong berkembangnya usaha lokal seperti *homestay,* kuliner berbasis hasil pertanian, pertunjukan budaya, serta produk ekonomi kreatif. Melalui integrasi kawasan, konektivitas yang solid, dan amenitas berkualitas, Kutai Kartanegara dapat membangun fondasi ekonomi baru yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengelompokkan destinasi wisata alam, budaya dan agrowisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan yang saling terhubung, berbasis potensi lokal dan keunikan sumber daya alam dan budaya Kutai Kartanegara**.**

   Arah kebijakan pengelompokkan destinasi wisata alam, budaya, dan agrowisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan yang saling terhubung menjadi langkah strategis dalam mewujudkan integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis potensi lokal Kutai Kartanegara. Dengan menggabungkan keunikan sumber daya alam, kekayaan budaya, dan aktivitas pertanian produktif dalam satu jaringan destinasi yang terpadu, kawasan pariwisata tidak hanya menawarkan pengalaman wisata yang lebih menarik dan tematik, tetapi juga menciptakan peluang hilirisasi yang lebih luas bagi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Integrasi ini mendorong terbentuknya rantai nilai pariwisata yang kuat, di mana produk pertanian lokal, kerajinan kreatif, dan atraksi budaya dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi baru non-ekstraktif yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi pariwisata secara terintegrasi dan tematik.

   Arah kebijakan penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi pariwisata secara terintegrasi dan tematik merupakan kunci dalam strategi integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya, dan agrowisata produktif. Dengan membangun jaringan transportasi dan jalur wisata yang saling terhubung baik antara kawasan pertanian produktif, pusat budaya, maupun destinasi alam arus wisatawan dapat bergerak lebih lancar, efisien, dan berpengaruh langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

   Konektivitas yang kuat ini mendukung hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif karena memperluas akses pasar bagi produk lokal, membuka peluang usaha baru, dan memperkuat rantai nilai berbasis potensi wilayah. Dengan demikian, aksesibilitas yang terintegrasi tidak hanya meningkatkan daya tarik pariwisata, tetapi juga memperkuat pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Peningkatan kualitas amenitas dan layanan pariwisata, melalui penyediaan fasilitas pendukung yang layak, ramah lingkungan, inklusif, dan berstandar internasional.

   Arah kebijakan peningkatan kualitas amenitas dan layanan pariwisata melalui penyediaan fasilitas pendukung yang layak, ramah lingkungan, inklusif, dan berstandar internasional menjadi fondasi penting dalam strategi integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya, dan agrowisata produktif. Dengan menghadirkan amenitas berkualitas mulai dari akomodasi, pusat informasi, jalur wisata, hingga fasilitas pendukung aktivitas budaya dan agrowisata kawasan pariwisata akan mampu memberikan pengalaman yang nyaman dan berkesan bagi wisatawan, sekaligus memperkuat citra destinasi.

   Penyempurnaan layanan ini tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata, tetapi juga mendorong hilirisasi produk pertanian, budaya, dan ekonomi kreatif melalui peningkatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

permintaan, pengembangan paket wisata tematik, serta penciptaan peluang usaha berbasis potensi lokal. Dengan demikian, peningkatan amenitas menjadi penggerak penting dalam membangun ekonomi baru non-ekstraktif yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

d. Perluasan Pengembangan Perekonomian Kewilayahan Tematik untuk Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat.

Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik diarahkan untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Strategi ini dimulai dengan penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan yang terintegrasi, sehingga potensi lokal dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan daya dukung wilayah. Dengan perencanaan ruang yang adaptif, kawasan-kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendukung hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan menjadi fokus utama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya ini diperkuat dengan penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya, yang tidak hanya menggerakkan sektor ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan nilai tradisi sebagai identitas daerah. Dengan demikian, pelaku usaha masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk berinovasi, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas jangkauan pasar.

Sebagai langkah inovatif, penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif akan menjadi laboratorium pembangunan berkelanjutan yang melibatkan multi pihak. Diarahkan untuk memperkuat model usaha yang ramah lingkungan, berbasis inovasi, dan mampu menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Dengan kombinasi antara penguatan sektor pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, strategi ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi non-ekstraktif yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kesejahteraan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan.

   Arah kebijakan penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan difokuskan pada penataan dan optimalisasi pemanfaatan ruang yang berorientasi pada potensi unggulan Daerah serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui perencanaan yang terintegrasi, kebijakan ini bertujuan memastikan setiap kawasan memiliki fungsi dan arah pengembangan yang jelas sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

   Pendekatan ini selaras dengan strategi perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat, yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi kawasan secara produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, melalui pengelolaan ruang yang cerdas, inklusif, dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan.

   Arah kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengelolaan sektor pertanian yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan produktivitas, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan sistem distribusi yang mampu menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan antarwilayah. Selain itu, pengembangan kawasan sentra pangan juga mendorong pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal melalui penerapan teknologi pertanian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

modern, akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas.

Upaya ini sejalan dengan strategi perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat, yang menekankan pembangunan ekonomi dari bawah melalui pemanfaatan potensi wilayah secara tematik dan inklusif. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, dengan menjadikan sektor pangan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

3. Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya.

Arah kebijakan penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi Daerah yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan sektor pertanian, pengolahan hasil bumi, dan pariwisata berbasis budaya lokal. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan skala lokal, promosi produk unggulan daerah, serta pengembangan destinasi wisata yang menonjolkan identitas dan kearifan masyarakat Kutai Kartanegara. Melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan infrastruktur ekonomi kreatif, kebijakan ini memperkuat ketahanan ekonomi berbasis komunitas.

Langkah ini sejalan dengan strategi perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat, yang menekankan sinergi antarwilayah dan sektor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdaya saing. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang berorientasi pada kesejahteraan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

masyarakat, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

4. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif**.**

Arah kebijakan penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif diarahkan untuk membangun model pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berorientasi pada keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui pembentukan klaster percontohan, kebijakan ini berfokus pada integrasi sektor pertanian ramah lingkungan, energi terbarukan, industri kreatif, dan pariwisata berkelanjutan yang saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi baru non-ekstraktif. Pendekatan ini juga menekankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal dalam mengembangkan produk bernilai tambah tinggi yang berbasis kearifan lokal dan inovasi teknologi.

Upaya tersebut sejalan dengan strategi perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan potensi wilayah secara tematik dan terpadu. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang tangguh, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara.

e. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Inovatif dalam Mewujudkan Produk Lokal Masyarakat dan Hilirisasi Sektor Strategis.

Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif menjadi langkah kunci dalam mendorong lahirnya produk lokal yang berdaya saing sekaligus mendukung hilirisasi sektor strategis daerah. Melalui program inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif, pemerintah daerah dapat menyediakan pendampingan, akses pembiayaan, serta dukungan teknis untuk mempercepat tumbuhnya wirausaha baru. Dengan demikian, pelaku usaha lokal akan lebih siap menghadapi tantangan pasar, meningkatkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kualitas produk, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri *(link and match)* menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia. Dengan menghadirkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, generasi muda serta tenaga kerja lokal dapat lebih adaptif, produktif, dan siap bersaing. Hal ini tidak hanya mendukung pengembangan UMKM, tetapi juga mempercepat hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang menjadi motor pembangunan ekonomi nonekstraktif.

Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital akan mempercepat promosi, distribusi, dan penetrasi produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Dengan kombinasi antara inkubasi bisnis, penguatan vokasi, dan digitalisasi pemasaran, ekosistem kewirausahaan inovatif dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi Kutai Kartanegara. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif.

   Arah kebijakan inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan Daerah melalui pembinaan terpadu, peningkatan kapasitas manajerial, dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal agar mampu menciptakan produk yang inovatif, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas kreatif dalam menyediakan akses terhadap pelatihan, teknologi, pemasaran digital, serta pembiayaan yang inklusif. Melalui program inkubasi, UMKM didorong untuk bertransformasi dari usaha konvensional menjadi pelaku ekonomi modern yang adaptif terhadap perubahan pasar dan mampu berkontribusi pada hilirisasi sektor strategis Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Upaya ini sejalan dengan strategi penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis, yang berfokus pada pengembangan wirausaha produktif dan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang menumbuhkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (*link* dan *match*).

Arah kebijakan pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri *(link and match)* diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil, adaptif, dan siap kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pelaku industri, dan pemerintah dalam menyusun kurikulum berbasis kompetensi, menyediakan fasilitas pelatihan yang relevan, serta membuka peluang magang dan sertifikasi keahlian bagi peserta didik. Melalui pendekatan ini, pelatihan vokasi tidak hanya menghasilkan tenaga kerja berkualitas, tetapi juga menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif dan mampu berkontribusi dalam hilirisasi sektor-sektor strategis daerah.

Upaya ini sejalan dengan strategi penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis, yang berfokus pada penguatan keterhubungan antara pendidikan, industri, dan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis keterampilan dan kreativitas. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital.

Arah kebijakan pemasaran produk unggulan desa berbasis digital diarahkan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal melalui pemanfaatan teknologi informasi serta transformasi digital di tingkat komunitas. Kebijakan ini mendorong pelaku UMKM, kelompok tani, pengrajin, dan pelaku ekonomi kreatif di desa agar mampu memasarkan produknya secara efektif melalui platform daring, *e-commerce*, dan media sosial dengan dukungan pelatihan digital marketing serta pendampingan berkelanjutan. Selain meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, kebijakan ini juga bertujuan memperkuat jejaring antar pelaku usaha desa dan membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

Langkah ini sejalan dengan strategi penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis, yang menekankan pentingnya inovasi, teknologi, dan konektivitas dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang mendorong kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

f. Perwujudan Ekonomi Mandiri Berbasis Produk Unggulan sebagai Fondasi Transformasi Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau.

Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan diarahkan untuk memperkuat posisi Kutai Kartanegara sebagai pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang berdaya saing tinggi. Strategi utama dilakukan melalui hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan budaya agar menghasilkan produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Hilirisasi ini bukan hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tawar pelaku usaha lokal, membuka lapangan kerja baru, serta memastikan bahwa potensi daerah dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Penguatan integrasi ekonomi antar-wilayah, termasuk kemitraan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi instrumen penting dalam memperluas jejaring pasar dan mempercepat arus distribusi barang serta jasa. Kolaborasi lintas wilayah akan menciptakan sinergi ekonomi yang saling menguntungkan, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan daya saing kawasan. Dengan integrasi yang baik, Kutai Kartanegara dapat mengambil peran strategis sebagai penopang ekonomi regional sekaligus memperluas akses bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar.

Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan menjadi prioritas. Iklim usaha yang kondusif, transparan, dan berbasis keberlanjutan akan mendorong masuknya investasi ramah lingkungan di sektor pangan, pariwisata, dan industri hijau. Investasi hijau ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan sosial, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Dengan strategi ini, Kutai Kartanegara mampu mewujudkan ekonomi mandiri yang berbasis produk unggulan sekaligus berkontribusi pada transformasi menuju daerah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah**.**

   Arah kebijakan hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi Daerah melalui pengembangan industri pengolahan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi sumber daya lokal secara berkelanjutan. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan rantai nilai yang menghubungkan petani, nelayan, pelaku industri, dan pelaku ekonomi kreatif dalam satu ekosistem ekonomi terpadu. Selain berfokus pada peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, kebijakan ini

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

juga mendorong pemanfaatan potensi budaya lokal sebagai inspirasi dalam pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing di pasar nasional maupun global.

Langkah ini sejalan dengan strategi perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau, yang menempatkan hilirisasi sebagai motor utama penguatan ekonomi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang menumbuhkan nilai tambah, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN.

Arah kebijakan penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra Ibu Kota Negara (IKN) diarahkan untuk menciptakan sinergi pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan antara Kutai Kartanegara dan wilayah sekitarnya, dengan menjadikan potensi daerah sebagai bagian penting dari rantai pasok dan sistem pendukung ekonomi nasional. Kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan konektivitas infrastruktur, harmonisasi kebijakan antarwilayah, serta kolaborasi dalam pengembangan sektor-sektor strategis. Melalui integrasi ini, Kutai Kartanegara diharapkan mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung IKN, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai lumbung pangan dan pusat inovasi ekonomi kreatif di Kalimantan Timur.

Langkah ini sejalan dengan strategi perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kemandirian ekonomi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang tangguh,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

inklusif, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

3. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan ramah lingkungan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Kebijakan ini berfokus pada penyederhanaan proses perizinan, peningkatan pelayanan investasi berbasis digital, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan ekonomi hijau. Melalui pendekatan ini, Kutai Kartanegara diharapkan menjadi destinasi investasi yang menarik sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Upaya ini juga memperkuat transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan.

Kebijakan ini selaras dengan strategi perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau, yang menempatkan investasi hijau sebagai katalis pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang berkelanjutan, berkeadilan, dan menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara.

g. Penguatan rantai nilai dan upditas unggulan daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan keanekaragaman hayati guna meningkatkan daya saing, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.

Penguatan rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan berlandaskan keanekaragaman hayati merupakan strategi penting dalam mewujudkan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif. Strategi ini sejalan dengan arah kebijakan industrialisasi sektor

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

unggulan dan pengembangan kawasan strategis hijau, yang menempatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai basis peningkatan nilai tambah. Pendekatan ini memungkinkan daerah untuk mengembangkan komoditas pertanian, perikanan, dan hasil kreatif secara lebih inovatif, sambil menjaga integritas ekologis yang menjadi identitas khas wilayah. Dengan demikian, penguatan rantai nilai tidak hanya mendorong daya saing, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Selanjutnya, peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan produk kreatif menjadi bagian integral dari akselerasi hilirisasi komoditas unggulan Daerah. Produk-produk yang telah melalui proses pengolahan ramah lingkungan dan memenuhi standar mutu global memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional, sekaligus memperkuat posisi Daerah dalam rantai pasok global rendah karbon. Upaya ini sejalan dengan kebijakan transformasi menuju ekonomi rendah karbon, yang menekankan pada efisiensi energi, pengurangan emisi, serta penurunan jejak ekologis dalam proses produksi dan distribusi. Dalam kerangka ini, daerah tidak hanya memproduksi komoditas yang berdaya saing, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan melalui praktik bisnis hijau berbasis konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam mendukung akselerasi tersebut, peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja menjadi prasyarat utama agar transformasi ekonomi hijau dapat berjalan optimal. Tenaga kerja lokal perlu dibekali kompetensi terkait energi terbarukan, manajemen sumber daya alam, teknologi bersih, efisiensi energi, dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini selaras dengan konsep green jobs menurut *International Labour Organization (ILO)*, yaitu pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan, peningkatan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan memperluas kesempatan kerja hijau dalam sektor pertanian berkelanjutan, ekowisata, dan industri kreatif ramah lingkungan, strategi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun struktur ekonomi daerah yang lebih tangguh, adaptif, dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berorientasi masa depan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan Kawasan Strategis hijau.

   Arah kebijakan industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan kawasan strategis hijau menjadi pilar penting dalam memperkuat rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan Daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan berlandaskan keanekaragaman hayati. Melalui industrialisasi yang berorientasi hijau, proses pengolahan komoditas pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem. Pendekatan ini mendorong terciptanya hilirisasi sektor unggulan yang tidak hanya meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Daerah bertumpu pada prinsip non-ekstraktif. Dengan demikian, pengembangan Kawasan Strategis hijau berfungsi sebagai penggerak utama transformasi ekonomi menuju sistem produksi yang rendah emisi, konservatif terhadap keanekaragaman hayati, dan mampu menjadi fondasi ekonomi baru yang tangguh dan berkelanjutan.

2. Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan kreatif.

   Arah kebijakan peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan produk kreatif merupakan langkah strategis dalam memperkuat rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan Daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan berlandaskan keanekaragaman hayati. Dengan mendorong produk-produk yang telah melalui proses pengolahan berkelanjutan untuk menembus pasar global, Daerah dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Upaya ini memperkuat hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, karena produk ekspor bernilai tambah tinggi tidak

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya primer, melainkan pada inovasi, kualitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, peningkatan ekspor tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terjaganya kelestarian lingkungan melalui praktik produksi yang efisien, ramah lingkungan, dan berbasis konservasi sumber daya hayati.

3. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon.

Arah kebijakan transformasi menuju ekonomi rendah karbon menjadi landasan penting dalam strategi penguatan rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan Daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan berlandaskan keanekaragaman hayati. Melalui penerapan teknologi bersih, efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan praktik produksi beremisi rendah, Daerah dapat memperkuat hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif secara lebih berkelanjutan dan kompetitif. Transformasi ini tidak hanya menurunkan jejak karbon dalam seluruh rantai produksi, tetapi juga meningkatkan daya saing komoditas unggulan di pasar domestik maupun global yang semakin menuntut standar keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi rendah karbon mendukung terbangunnya pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang lebih tangguh, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.

4. Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja yang mencakup pengetahuan tentang energi terbarukan, manajemen sumber daya alam, teknologi bersih, efisiensi energi, dan keberlanjutan.

Arah kebijakan peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja terutama dalam bidang energi terbarukan, manajemen sumber daya alam, teknologi bersih, efisiensi energi, dan keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam strategi penguatan rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan Daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan berlandaskan keanekaragaman hayati. Dengan membekali tenaga kerja lokal dengan kompetensi hijau

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(*green skills*), proses hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat berjalan lebih inovatif, efisien, dan sesuai standar keberlanjutan global.

Peningkatan kapasitas ini memastikan bahwa pengembangan komoditas unggulan tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mendukung praktik produksi berkelanjutan yang menjaga kelestarian ekosistem. Dengan demikian, kebijakan peningkatan keterampilan menjadi kunci untuk membangun pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Misi 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara, sebagai berikut:

a. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Serta Infrastruktur Digitalisasi Pelayanan Publik yang Adaptif, Konsisten dan Implementatif

Penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, konsisten, dan implementatif. Strategi ini diwujudkan melalui penyusunan sistem perencanaan–penganggaran terpadu yang selaras antara visi pembangunan Daerah dengan alokasi sumber daya yang tersedia. Dengan adanya integrasi perencanaan dan penganggaran, setiap program pembangunan dapat lebih terukur, transparan, serta menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, penataan kelembagaan Daerah dilakukan untuk memastikan Perangkat Daerah mampu beradaptasi dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan baru. Penataan ini mencakup penyederhanaan struktur, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembentukan unit-unit kerja yang lebih responsif terhadap isu strategis daerah. Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur digitalisasi pelayanan publik menjadi prioritas untuk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan kombinasi penguatan regulasi, penataan kelembagaan, serta digitalisasi layanan publik, strategi ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, dan berintegritas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, tetapi juga memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam mengawal transformasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan sistem perencanaan- penganggaran terpadu**.**

   Arah kebijakan penyusunan sistem perencanaan–penganggaran terpadu diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui integrasi antara proses perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis kinerja. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi pembangunan Daerah, prioritas program, dan alokasi sumber daya agar setiap kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran, efisien, serta berorientasi pada hasil yang terukur. Penerapan sistem ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital dalam proses perencanaan dan monitoring, sehingga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

   Langkah ini sejalan dengan strategi penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten, dan implementatif, yang menekankan reformasi birokrasi berbasis data dan inovasi digital. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berintegritas, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menuju birokrasi yang adaptif dan berdaya saing di Kutai Kartanegara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan pembangunan baru.

Arah kebijakan penataan kelembagaan Daerah sesuai kebutuhan pembangunan baru diarahkan untuk menciptakan struktur organisasi pemerintahan yang efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Kebijakan ini berfokus pada penyesuaian fungsi, peran, dan kewenangan perangkat daerah agar selaras dengan arah pembangunan daerah dan prioritas strategis Kutai Kartanegara, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor serta efektivitas pelaksanaan program. Proses penataan kelembagaan juga didukung oleh digitalisasi tata kelola dan penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, guna meningkatkan kinerja birokrasi dan transparansi layanan publik.

Langkah ini sejalan dengan strategi penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten, dan implementatif, yang menekankan pentingnya birokrasi modern berbasis inovasi dan efisiensi. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berintegritas serta peningkatan kompetensi aparatur sipil negara dalam menjawab tantangan pembangunan yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

b. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur serta Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur merupakan langkah fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan keterampilan berbasis teknologi dan inovasi. Aparatur yang berkualitas akan mampu merumuskan kebijakan yang tepat, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta mendukung tata kelola kelembagaan publik yang lebih efektif dan efisien.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk memastikan setiap unit kerja dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara maksimal. Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap kebutuhan pembangunan serta tantangan baru yang dihadapi daerah. Sejalan dengan itu, penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja menjadi instrumen penting untuk menilai capaian program dan memastikan setiap kegiatan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan strategi ini, tata kelola pemerintahan Daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil pembangunan. Kombinasi antara ASN yang kompeten, kelembagaan yang kuat, serta mekanisme akuntabilitas yang berbasis kinerja akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung terwujudnya misi terbaik dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik.

   Arah kebijakan peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik diarahkan untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia aparatur serta optimalisasi kinerja kelembagaan pemerintahan. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas ASN melalui pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan karier yang transparan, serta penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur. Selain itu, penguatan tata kelola kelembagaan dilakukan dengan mendorong efisiensi struktur organisasi, peningkatan koordinasi antar-Perangkat Daerah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Langkah ini sejalan dengan strategi peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, yang bertujuan memperkuat fondasi birokrasi modern berbasis kinerja dan inovasi. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan terpercaya, sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan Daerah.

2. Penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja.

Arah kebijakan penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah terlaksana secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan ini menitikberatkan pada penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan yang terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil melalui penggunaan indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kinerja dan evaluasi pembangunan juga menjadi prioritas, guna meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Selain itu, kebijakan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.

Langkah ini sejalan dengan strategi peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, yang menekankan pentingnya aparatur yang kompeten dan lembaga yang kuat dalam mendukung akuntabilitas publik. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kinerja, guna meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pembangunan di Kutai Kartanegara.

c. Penerapan Digitalisasi Layanan Publik dan Penguatan Sistem Pengawasan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.

Penerapan digitalisasi layanan publik menjadi salah satu strategi kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi, sehingga mampu memangkas proses birokrasi yang berbelit serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Pemerintah Daerah dapat memperkuat inovasi pelayanan yang konsisten dengan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang transparan, mudah diakses, dan responsif. Sistem ini berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menampung aspirasi, keluhan, maupun laporan dugaan penyimpangan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti secara akuntabel. Dengan mekanisme pengaduan yang kuat, Pemerintah Daerah dapat memperbaiki kualitas layanan, memperkuat integritas aparatur, serta memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Dengan sinergi antara digitalisasi layanan publik dan sistem pengawasan yang partisipatif, strategi ini mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan berintegritas. Hal ini selaras dengan misi terbaik, yakni menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan akuntabel sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara dalam mengawal transformasi pembangunan daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Digitalisasi layanan publik.

Arah kebijakan digitalisasi layanan publik diarahkan untuk mewujudkan sistem pelayanan pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

teknologi informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, integrasi data antar-Perangkat Daerah, serta penerapan layanan publik berbasis elektronik *(e-government)* yang mudah diakses, cepat, dan akuntabel. Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, sehingga meningkatkan transparansi, mencegah penyimpangan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Selain itu, penguatan kapasitas ASN di bidang literasi digital dan inovasi teknologi menjadi bagian integral dari kebijakan ini untuk memastikan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Langkah ini sejalan dengan strategi penerapan digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang menekankan efisiensi dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan terpercaya melalui transformasi digital sebagai fondasi pelayanan publik Daerah.

2. Penguatan sistem pengaduan.

Arah kebijakan penguatan sistem pengaduan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui penyediaan mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan terintegrasi secara digital. Kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjadikan sistem pengaduan sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui penerapan teknologi digital, sistem pengaduan dikembangkan agar lebih efisien, terpantau secara real-time, serta mampu memberikan umpan balik yang jelas dan terukur kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dalam menangani laporan publik dengan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

profesionalisme dan integritas juga menjadi prioritas untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Langkah ini sejalan dengan strategi penerapan digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang menekankan keterbukaan dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas, guna membangun birokrasi yang melayani dan dipercaya masyarakat Kutai Kartanegara.

d. Perwujudan Tata Kelola dan Sistem Evaluasi Pembangunan yang Adaptif, Konsisten, serta Implementatif sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Pembangunan.

Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan Daerah. Strategi ini diwujudkan dengan mendorong pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pembangunan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat lebih transparan serta sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dicapai bersama.

Pemanfaatan aplikasi *dashboard* lintas sektor menjadi terobosan strategis untuk memperkuat integrasi data, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Melalui sistem digital ini, Pemerintah Daerah dapat memantau capaian program secara real time, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, dan memastikan tindak lanjut kebijakan berjalan secara konsisten. *Dashboard* ini juga menjadi media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melihat perkembangan pembangunan secara terbuka.

Dengan sinergi antara pelibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital, sistem evaluasi pembangunan diharapkan semakin responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Strategi ini sejalan dengan misi terbaik, yaitu membangun

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengawal transformasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

   Arah kebijakan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bersama. Melalui mekanisme partisipatif seperti forum konsultasi publik, pengawasan berbasis komunitas, dan pemanfaatan platform digital untuk pelaporan serta pemantauan pembangunan, masyarakat didorong untuk aktif berperan dalam menjaga integritas dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

   Langkah ini juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola aspirasi serta masukan publik secara profesional dan terbuka. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan, yang menekankan kolaborasi dan keterbukaan dalam manajemen pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, partisipatif, dan berintegritas, sebagai landasan peningkatan kualitas pembangunan di Kutai Kartanegara.

2. Aplikasi *dashboard* lintas sektor**.**

   Arah kebijakan pengembangan aplikasi *dashboard* lintas sektor diarahkan untuk memperkuat sistem tata kelola dan evaluasi pembangunan yang terintegrasi, transparan, serta berbasis data secara real-time. Kebijakan ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menghubungkan berbagai Perangkat Daerah agar proses

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan secara sinkron, efisien, dan terukur. Melalui *dashboard* lintas sektor, Pemerintah Daerah dapat memantau capaian indikator kinerja, mengidentifikasi kendala, serta mengambil keputusan strategis secara cepat dan berbasis evidensi. Selain meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi, kebijakan ini juga mendorong penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data dan analisis pembangunan secara profesional.

Langkah ini sejalan dengan strategi perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan, yang menempatkan digitalisasi dan integrasi data sebagai pilar utama peningkatan kinerja birokrasi. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil, guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan Daerah.

e. Penguatan Kolaborasi Multipihak (Pemerintah, Masyarakat, Swasta) dalam Tata Kelola Pembangunan.

Penguatan kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Strategi ini mengedepankan pola kerja kolaboratif berbasis pentahapan, di mana setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Dengan melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, berorientasi pada kebutuhan nyata, serta menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Selain itu, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan tata kelola pembangunan yang inklusif. Kolaborasi multipihak juga mencakup sinergi dalam menjaga lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Daerah bersama aparat keamanan, komunitas lokal, dan pelaku usaha dapat membangun sistem kewaspadaan dini serta program berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan sosial.

Mengedepankan tata kelola yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif, serta menjamin stabilitas keamanan wilayah, strategi ini memperkuat misi terbaik dalam menghadirkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan mampu menggerakkan seluruh potensi daerah. Sinergi lintas sektor akan memastikan pembangunan berjalan lebih konsisten, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan**.**

   Arah kebijakan tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, mendorong inovasi dalam pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Kebijakan ini menekankan pentingnya penerapan pendekatan bertahap dan terukur dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah. Melalui tata kelola yang terbuka dan partisipatif, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada hasil. Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur juga menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang kreatif, responsif, dan mampu menjadi fasilitator kolaborasi lintas sektor.

   Kebijakan ini sejalan dengan strategi penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan, yang menempatkan kemitraan sebagai instrumen utama keberhasilan pembangunan Daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan kolaboratif menuju pemerintahan yang efektif

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.

Arah kebijakan peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan harmonis sebagai prasyarat utama bagi terselenggaranya pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi multipihak antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga ketenteraman sosial, mencegah potensi konflik, serta memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap keamanan wilayah. Pendekatan partisipatif dan preventif diutamakan melalui peningkatan kapasitas lembaga keamanan daerah, penguatan peran masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi gangguan ketertiban.

Upaya ini sejalan dengan strategi penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan, yang menempatkan sinergi dan gotong royong sebagai fondasi stabilitas daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berintegritas, serta membangun ketahanan sosial wilayah Kutai Kartanegara menuju pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Misi 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, sebagai berikut:

a. Pengembangan Kualitas Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Partisipasi Multipihak dalam Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Strategi ini diawali dengan penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan potensi bencana, sehingga Pemerintah Daerah memiliki pijakan yang kuat dalam perencanaan, mitigasi risiko, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan data yang akurat, upaya perlindungan lingkungan dapat lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat pendidikan karakter masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Selain itu, penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap kawasan dikelola sesuai fungsi ekologis dan sosialnya. Kebijakan zonasi ini akan memandu arah pembangunan agar tetap selaras dengan daya dukung lingkungan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Dengan adanya panduan per zona, pembangunan dapat berlangsung terarah, adaptif, dan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, serta ekologi.

Partisipasi multi pihak pemerintah, swasta, masyarakat, dan komunitas lokal juga diperkuat untuk memastikan perlindungan lingkungan berjalan efektif. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai warisan bersama. Dengan strategi ini, Kutai Kartanegara mampu mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih berkualitas, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan misi dalam mengembangkan pendidikan karakter dan menjaga kelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana**.**

   Arah kebijakan penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana diarahkan untuk membangun sistem informasi lingkungan yang komprehensif, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan serta mitigasi risiko bencana di Kutai Kartanegara. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengumpulan dan pengelolaan data spasial terkait kondisi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ekosistem, sumber daya alam, serta potensi kerentanan wilayah terhadap bencana alam, guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis evidensi. Melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga riset, masyarakat, dan sektor swasta, penyusunan basis data ini juga menjadi instrumen penguatan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan alam.

Langkah ini sejalan dengan strategi pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan partisipasi multipihak dalam perlindungan lingkungan hidup, yang menempatkan data dan kolaborasi sebagai fondasi kebijakan ekologis yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, melalui pengelolaan lingkungan yang cerdas, partisipatif, dan berwawasan keberlanjutan demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang.

2. Penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara.

Arah kebijakan penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara diarahkan untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang terencana, berbasis potensi dan karakteristik ekologis masing-masing wilayah, serta mendukung keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian alam. Kebijakan ini menitikberatkan pada penetapan zona perlindungan lingkungan yang meliputi kawasan konservasi, kawasan budidaya, serta kawasan rawan bencana, dengan pendekatan pengelolaan yang adaptif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Melalui penyusunan kebijakan zonasi yang terintegrasi, Pemerintah Daerah berupaya mendorong keterlibatan multipihak termasuk masyarakat adat, akademisi, dan pelaku usah dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial-ekonomi lingkungan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Upaya ini sejalan dengan strategi pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan partisipasi multipihak dalam perlindungan lingkungan hidup, yang menekankan pentingnya sinergi dan partisipasi aktif seluruh elemen dalam menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai ruang belajar bersama dalam membangun peradaban hijau yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

b. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat serta Pengelolaan Limbah Secara Terpadu dan Bertanggung Jawab.

Peningkatan ketahanan lingkungan merupakan langkah strategis untuk memastikan Pembangunan Daerah berjalan berkelanjutan sekaligus menjaga daya dukung ekosistem. Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis, baik berupa pemulihan lahan terdegradasi, perlindungan kawasan resapan air, maupun penghijauan wilayah rawan bencana. Upaya rehabilitasi ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter masyarakat agar semakin peduli pada pentingnya kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat ketahanan lingkungan. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, permasalahan persampahan dapat ditangani secara lebih efektif. Pendekatan ini juga didukung dengan pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab, sehingga potensi pencemaran dapat ditekan dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan sampah yang produktif.

Dengan mengintegrasikan rehabilitasi lingkungan kritis dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, strategi ini tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperkuat karakter masyarakat yang lebih peduli lingkungan. Sejalan dengan misi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terbaik, langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga warisan ekologis bagi generasi mendatang. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis.

   Arah kebijakan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis diarahkan untuk memulihkan fungsi ekosistem yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia maupun bencana alam, melalui pendekatan terpadu yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada kegiatan reforestasi, revegetasi, pengendalian erosi, serta konservasi sumber daya air dan tanah untuk mengembalikan keseimbangan ekologis serta mendukung ketahanan lingkungan daerah. Pelibatan masyarakat lokal, lembaga adat, dan dunia usaha menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi, dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan tanggung jawab bersama terhadap pelestarian alam. Selain itu, integrasi dengan pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu turut memperkuat efektivitas program rehabilitasi, menjadikannya bagian dari ekosistem pengelolaan lingkungan yang holistik.

   Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab, yang menekankan kolaborasi dan kesadaran lingkungan sebagai dasar keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menjadikan rehabilitasi lingkungan sebagai wujud nyata harmoni antara manusia dan alam di Kutai Kartanegara.

2. Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

   Arah kebijakan penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan pengelolaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sampah, mulai dari pemilahan, pengurangan, hingga pemanfaatan kembali. Kebijakan ini menekankan pentingnya perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan mengedepankan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta penerapan teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana, pelatihan, dan dukungan kelembagaan agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan efektif di tingkat komunitas dan desa. Selain memperkuat ketahanan lingkungan, kebijakan ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengelolaan sampah produktif yang melibatkan UMKM dan kelompok masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan strategi peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab, yang menempatkan kolaborasi dan kesadaran ekologis sebagai inti keberlanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menumbuhkan budaya peduli lingkungan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kutai Kartanegara.

c. Pengendalian Pencemaran serta Optimalisasi Kualitas Daya Dukung Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Pengendalian pencemaran dan optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Upaya ini menekankan pentingnya menjaga kualitas air, udara, dan tanah agar tetap mendukung kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi. Dengan pengendalian pencemaran yang konsisten, pembangunan dapat berlangsung tanpa mengurangi kapasitas lingkungan dalam menyediakan sumber daya dan jasa ekosistem yang vital bagi kesejahteraan masyarakat.

Strategi diperkuat penerapan sistem peringatan dini di Daerah rawan bencana menjadi instrumen penting dalam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

melindungi daya dukung lingkungan sekaligus keselamatan masyarakat. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi bencana, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Selain melindungi masyarakat, peringatan dini juga menjadi sarana edukasi yang memperkuat pendidikan karakter tentang pentingnya kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap lingkungan berbasis kearifan lokal.

Dengan kombinasi pengendalian pencemaran, optimalisasi daya dukung lingkungan, dan penerapan sistem peringatan dini, strategi ini mendukung terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan misi yaitu mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pendidikan karakter masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana.

   Arah kebijakan penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam melalui pemanfaatan teknologi informasi serta kearifan lokal dalam mitigasi risiko. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengembangan sistem pemantauan dan deteksi dini yang terintegrasi, berbasis data spasial dan sensor lingkungan, agar peringatan dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat di wilayah rawan. Selain itu, pelibatan masyarakat, lembaga adat, dan dunia pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun budaya tanggap bencana serta memperkuat edukasi lingkungan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Penerapan sistem ini juga mendukung pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas daya dukung lingkungan melalui perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek mitigasi dan keberlanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan strategi pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berkelanjutan dan mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, guna menciptakan Kutai Kartanegara yang tangguh, aman, dan selaras dengan alam.

d. Perwujudan Peran Serta Multipihak dalam Pengendalian Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Pengembangan Potensi Energi Ramah Lingkungan.

Perwujudan peran serta multi pihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Strategi ini dapat diwujudkan melalui penerapan skema insentif perlindungan lingkungan swadaya yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, swasta, dan komunitas lokal dalam menjaga kelestarian alam. Insentif ini dapat berupa dukungan teknis, akses pembiayaan hijau, maupun penghargaan bagi inisiatif perlindungan lingkungan, sehingga tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Penguatan tata ruang ekologis dan penetapan zonasi konservasi menjadi instrumen strategis dalam mencegah kerusakan lingkungan dan mengelola pemanfaatan ruang secara lebih berkelanjutan. Melalui tata ruang yang memperhatikan aspek ekologi, kawasan lindung dan konservasi dapat dijaga, sementara kawasan pemanfaatan dapat dikelola sesuai daya dukung dan daya tampungnya. Dengan pendekatan ini, pembangunan tetap berjalan, namun tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan dan fungsi ekosistem.

Strategi ini juga mencakup pengembangan potensi energi ramah lingkungan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya, biomassa, dan mikrohidro, dapat mendukung kebutuhan energi masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan sinergi peran multipihak, insentif lingkungan, tata ruang ekologis, serta energi bersih, Kutai Kartanegara dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan misi Terbaik dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pelestarian lingkungan berbasis

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kearifan lokal. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Skema insentif perlindungan lingkungan swadaya.

   Arah kebijakan skema insentif perlindungan lingkungan swadaya diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, lembaga adat, dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pendekatan berbasis penghargaan dan tanggung jawab bersama. Kebijakan ini berfokus pada pemberian insentif baik dalam bentuk bantuan teknis, akses pembiayaan hijau, maupun pengakuan sosial bagi individu, kelompok, atau komunitas yang berinisiatif melaksanakan kegiatan konservasi, reboisasi, pengelolaan sampah, atau pemanfaatan energi terbarukan secara mandiri. Pendekatan ini memperkuat semangat gotong royong dan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam, sekaligus menjadi instrumen efektif untuk mengurangi ancaman kerusakan lingkungan dari aktivitas manusia. Upaya tersebut sejalan dengan strategi perwujudan peran serta multipihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan dan pengembangan potensi energi ramah lingkungan, yang menekankan kolaborasi dan inovasi dalam pelestarian ekosistem. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan membangun budaya ekologis masyarakat Kutai Kartanegara yang mandiri, sadar lingkungan, dan berkelanjutan.

2. Penguatan tata ruang ekologis dan zonasi konservasi.

   Arah kebijakan penguatan tata ruang ekologis dan zonasi konservasi diarahkan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui penataan ruang yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem. Kebijakan ini menekankan pentingnya penetapan zona konservasi dan kawasan lindung yang berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, melindungi sumber daya alam, serta mengendalikan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pelaksanaannya, kebijakan ini mendorong kolaborasi multipihak melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga adat, akademisi, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang berlandaskan data ilmiah, kearifan lokal, serta prinsip pelestarian jangka panjang. Selain itu, penerapan energi ramah lingkungan dan praktik pembangunan hijau di dalam tata ruang juga menjadi bagian dari upaya mengurangi tekanan ekologis.

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi perwujudan peran serta multipihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan dan pengembangan potensi energi ramah lingkungan, yang menempatkan kolaborasi dan kesadaran ekologis sebagai kunci pengelolaan wilayah yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menjadikan tata ruang ekologis sebagai instrumen utama menuju keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam di Kutai Kartanegara.

e. Penguatan Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan dan Rendah Karbon untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Strategi ini diwujudkan melalui implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif, dengan penerapan teknologi efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta penerapan prinsip ekonomi hijau dalam setiap aktivitas pembangunan. Upaya ini tidak hanya menekan emisi karbon, tetapi juga menanamkan pendidikan karakter masyarakat untuk lebih peduli terhadap penggunaan energi yang bijak dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Selain itu, perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor menjadi kunci dalam menjaga daya dukung lingkungan dan menguatkan komitmen terhadap pembangunan hijau. Pemerintah Daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat perlu bersinergi dalam melaksanakan program

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

konservasi, baik melalui perlindungan hutan, rehabilitasi kawasan kritis, maupun pemeliharaan ekosistem pesisir dan perairan. Dengan partisipasi lintas sektor, konservasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan kolektif untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Kombinasi implementasi pembangunan rendah karbon dan perluasan program konservasi, Kutai Kartanegara dapat memperkuat posisinya sebagai Daerah yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan misi Terbaik, yaitu mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pembentukan karakter masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif.

   Arah kebijakan implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pengurangan emisi karbon serta efisiensi penggunaan sumber daya alam. Kebijakan ini menitikberatkan pada penerapan prinsip ekonomi hijau dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan, dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, teknologi bersih, serta praktik industri dan pertanian ramah lingkungan. Pembangunan di kawasan strategis dan produktif dirancang agar tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, partisipasi masyarakat dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi pembangunan rendah karbon berbasis kearifan lokal, yang menghormati nilai-nilai budaya dan keberlanjutan alam Kutai Kartanegara.

   Kebijakan ini sejalan dengan strategi penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yang menempatkan transisi energi bersih sebagai fondasi utama pembangunan masa depan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan membangun Kutai Kartanegara sebagai daerah yang tangguh, hijau, dan berdaya saing tinggi.

2. Perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor.

Arah kebijakan perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor diarahkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi prinsip konservasi dan penggunaan energi ramah lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan, baik di sektor pertanian, industri, pariwisata, maupun jasa, sehingga setiap sektor menjadi bagian aktif dari upaya menurunkan emisi karbon dan menjaga daya dukung ekosistem. Melalui penerapan praktik berkelanjutan dan inovasi hijau, program konservasi diharapkan tidak hanya melindungi sumber daya alam, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

Pendekatan ini sejalan dengan strategi penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yang menempatkan kolaborasi multipihak sebagai kunci dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menjadikan konservasi sebagai gerakan kolektif menuju masa depan Kutai Kartanegara yang berkelanjutan, tangguh, dan berbudaya ekologis.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, sebagai berikut:

a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Konektivitas dan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi yang Mendukung Ketahanan Wilayah.

Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan wilayah sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif. Strategi ini diarahkan pada penyelesaian kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Dengan pemerataan pembangunan jalan, jembatan, jaringan transportasi, energi, dan air bersih, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan dasar serta aktivitas ekonomi.

Selain memperluas konektivitas antar-wilayah, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing Daerah, dan membuka peluang investasi baru. Infrastruktur yang merata dan berkeadilan akan memperkokoh ketahanan wilayah, karena mampu mendukung pergerakan barang, jasa, dan orang secara lebih cepat, aman, dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan misi terbaik, yaitu menghadirkan fondasi pembangunan kewilayahan yang adil dan mampu mengurangi kesenjangan antar-wilayah.

Dengan strategi ini, Kutai Kartanegara tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mendukung keberlanjutan, memperkuat kohesi sosial, dan mempercepat transformasi ekonomi. Infrastruktur kewilayahan yang terencana dengan baik akan menjadi pendorong terciptanya wilayah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika pembangunan masa depan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.

   Arah kebijakan penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara diarahkan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kebijakan ini mencakup percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi antarwilayah, guna memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur dasar juga dirancang agar mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Selain memperhatikan aspek teknis, kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan sinergi antarlevel pemerintahan dalam pelaksanaannya.

   Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi yang mendukung ketahanan wilayah, yang menempatkan infrastruktur sebagai penggerak utama pemerataan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, guna membangun Kutai Kartanegara yang maju, inklusif, dan tangguh secara berkelanjutan.

b. Peningkatan Daya Jangkau Infrastruktur Kawasan dan Layanan Dasar yang Diarahkan Mendukung Pemerataan Transformasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan

   Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar diarahkan untuk mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan di Kutai Kartanegara. Strategi ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada kawasan pangan, wisata, dan perikanan sebagai sektor strategis yang menopang kemandirian ekonomi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

daerah. Dengan infrastruktur yang memadai, kawasan-kawasan tersebut akan lebih produktif, mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta membuka akses pasar yang lebih luas. Hal ini juga berfungsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar-wilayah.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi fokus penting agar masyarakat di wilayah sekitar memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya memastikan pemerataan pelayanan dasar, tetapi juga mempersiapkan desa penyangga agar mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru. Layanan dasar yang kuat akan memperkokoh kualitas sumber daya manusia serta ketahanan sosial masyarakat lokal.

Dengan strategi ini, Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya dalam membangun infrastruktur dan layanan dasar yang merata, inklusif, dan berkeadilan. Peningkatan daya jangkau infrastruktur dan layanan dasar tidak hanya memperkuat fondasi pembangunan kewilayahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa transformasi pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan.

   Arah kebijakan peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan daya saing wilayah melalui penyediaan prasarana yang mendukung produktivitas sektor unggulan daerah secara berkelanjutan. Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, jaringan irigasi, pelabuhan perikanan, fasilitas wisata, serta sarana distribusi hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi lokal. Upaya ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kearifan lokal, agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan sumber daya alam.

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan, yang menempatkan pemerataan infrastruktur sebagai kunci percepatan pembangunan Daerah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, guna menciptakan wilayah Kutai Kartanegara yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN.

Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN diarahkan untuk memperkuat kapasitas wilayah perdesaan dalam mendukung dinamika pembangunan nasional sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan strategis tersebut. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan akses dan mutu layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan konektivitas transportasi di desa-desa penyangga agar mampu bertransformasi menjadi wilayah yang produktif, tangguh, dan berdaya saing. Pembangunan layanan dasar ini juga diintegrasikan dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal yang selaras dengan arah pembangunan IKN, sehingga menciptakan sinergi wilayah yang saling menguatkan. Selain itu, pelibatan masyarakat dan pemerintah desa menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi lokal.

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan, yang menempatkan desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sebagai basis penting dalam pembangunan inklusif. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, menuju terciptanya desa penyangga IKN yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di Kutai Kartanegara.

c. Penguatan Sistem Transportasi dan Logistik serta Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Inklusif dan Berdaya Saing

Penguatan sistem transportasi dan logistik serta pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pemerataan pembangunan. Strategi ini diwujudkan melalui modernisasi desa dengan konsep *smart village*, yang mengintegrasikan akses internet, sistem layanan digital, dan pemanfaatan energi alternatif. Dengan transformasi digital di tingkat desa, layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sekaligus memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan diarahkan untuk memperlancar distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat. Peningkatan kualitas jaringan transportasi darat, laut, dan sungai serta pengembangan simpul logistik yang efisien akan menurunkan biaya distribusi dan memperluas jangkauan pasar produk lokal. Dengan konektivitas yang lebih baik, kawasan pangan, wisata, dan perikanan dapat saling terhubung, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkeadilan.

Melalui kombinasi modernisasi desa berbasis *smart village* dan penguatan konektivitas antar kawasan, Kutai Kartanegara dapat membangun infrastruktur kewilayahan yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing. Strategi ini tidak hanya memperkuat ketahanan wilayah, tetapi juga memastikan bahwa transformasi pembangunan berbasis kewilayahan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. Modernisasi desa melalui *smart village* (internet, sistem layanan digital, energi alternatif.

   Arah kebijakan modernisasi desa melalui *smart village* diarahkan untuk mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi di tingkat perdesaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. Kebijakan ini berfokus pada penyediaan infrastruktur digital seperti jaringan internet, sistem layanan publik berbasis teknologi, serta pemanfaatan energi alternatif ramah lingkungan yang mendukung efisiensi dan kemandirian desa. Melalui pengembangan *smart village*, Pemerintah Daerah berupaya menciptakan desa yang adaptif, terhubung, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui digitalisasi ekonomi, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya yang cerdas. Integrasi dengan sistem transportasi, logistik, dan infrastruktur wilayah juga menjadi prioritas agar desa dapat terhubung secara efektif dengan pusat-pusat ekonomi dan pelayanan.

   Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi penguatan sistem transportasi dan logistik serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, inklusif, dan berdaya saing, yang menempatkan inovasi teknologi sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, dengan menghadirkan desa modern yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan era digital.

2. Penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan.

   Arah kebijakan penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi dan distribusi yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan guna memperkuat keterhubungan antar-wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Kutai Kartanegara. Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi darat, laut, dan sungai yang mendukung kelancaran arus

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

barang, jasa, dan mobilitas masyarakat, terutama antara kawasan produksi, kawasan industri, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, optimalisasi sistem logistik modern berbasis teknologi informasi juga menjadi prioritas untuk mempercepat distribusi dan menekan biaya ekonomi wilayah. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat guna memastikan konektivitas yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi penguatan sistem transportasi dan logistik serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, inklusif, dan berdaya saing, yang menempatkan konektivitas sebagai fondasi percepatan transformasi pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, dengan membangun sistem transportasi dan logistik yang mampu menghubungkan potensi antarwilayah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

d. Perwujudan Infrastruktur Kewilayahan yang Mendukung Terciptanya Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan.

Perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan menjadi prioritas untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus menjamin pemerataan hasil pembangunan. Strategi ini ditempuh melalui pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antarwilayah yang lebih terintegrasi. Dengan sistem logistik yang efisien, arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih cepat, murah, dan lancar, sehingga mampu mendukung produktivitas sektor-sektor unggulan Daerah seperti pangan, perikanan, dan pariwisata.

Selain itu, peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi langkah strategis untuk menempatkan Kutai Kartanegara sebagai mitra utama pembangunan kawasan inti pemerintahan negara. Aksesibilitas yang baik ke IKN akan membuka peluang investasi baru, memperluas pasar produk lokal, serta memperkuat posisi strategis daerah sebagai penopang pembangunan nasional.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Infrastruktur yang berkualitas juga memastikan konektivitas antarwilayah semakin inklusif, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan strategi ini, Kutai Kartanegara dapat membangun fondasi kewilayahan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga berkeadilan. Infrastruktur yang terencana dengan baik akan memperkuat integrasi ekonomi, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mempercepat transformasi wilayah menuju pusat pertumbuhan baru yang tangguh dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antar wilayah.

   Arah kebijakan pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antarwilayah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan distribusi barang serta memperkuat konektivitas ekonomi di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur logistik yang terintegrasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan menekan biaya distribusi, sehingga memperkuat daya saing produk lokal. Pendekatan ini juga mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan sistem logistik yang inklusif dan berkelanjutan.

   Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan, yang menempatkan penguatan logistik sebagai elemen kunci percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, dengan menciptakan sistem logistik yang efisien, adaptif, dan mampu menghubungkan potensi antarwilayah secara produktif dan merata.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke IKN.

Arah kebijakan peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke Ibu Kota Negara (IKN) diarahkan untuk memperkuat konektivitas strategis antara Kutai Kartanegara dan kawasan inti IKN sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan pemerataan pembangunan kewilayahan. Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan serta peningkatan infrastruktur transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan guna memperlancar mobilitas orang, barang, serta jasa antarwilayah. Selain memperkuat integrasi ekonomi, infrastruktur ini juga diharapkan mampu membuka akses bagi masyarakat pedesaan dan kawasan produktif untuk berpartisipasi dalam arus pembangunan nasional. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tepat sasaran.

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan, yang menempatkan konektivitas sebagai penggerak utama efisiensi pembangunan lintas wilayah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, dengan menjadikan Kutai Kartanegara sebagai simpul utama konektivitas dan pemerataan pembangunan di kawasan penyangga IKN

e. Pemantapan Infrastruktur untuk Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan.

Pemantapan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam mendorong akselerasi transformasi pembangunan yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Strategi ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur cerdas yang mengedepankan transportasi massal, pemanfaatan energi bersih, serta pengembangan kawasan hijau. Infrastruktur cerdas tidak hanya menjawab kebutuhan mobilitas dan energi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan emisi karbon dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur mendukung terwujudnya tata ruang wilayah yang modern, adaptif, dan ramah lingkungan.

Selain itu, implementasi infrastruktur terintegrasi di Kawasan Strategis menjadi prioritas untuk memperkuat peran Kutai Kartanegara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif. Infrastruktur yang terintegrasi akan memperlancar konektivitas antarwilayah, memperkuat distribusi logistik, serta menciptakan efisiensi pembangunan lintas sektor. Dengan pendekatan ini, setiap kawasan dapat berkembang sesuai potensinya, namun tetap saling terhubung dalam satu sistem pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui strategi pemantapan infrastruktur berbasis teknologi cerdas dan integrasi kawasan, Kutai Kartanegara mampu mempercepat transformasi pembangunan menuju wilayah yang tangguh, produktif, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan misi Terbaik, yaitu membangun fondasi kewilayahan yang adil dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur cerdas: transportasi massal, energi bersih, kawasan hijau.

   Arah kebijakan pembangunan infrastruktur cerdas yang meliputi transportasi massal, energi bersih, dan kawasan hijau diarahkan untuk mewujudkan sistem pembangunan wilayah yang modern, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung transformasi pembangunan di Kutai Kartanegara. Kebijakan ini menekankan pentingnya penerapan teknologi inovatif dan prinsip ramah lingkungan dalam penyediaan infrastruktur publik. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung upaya penurunan emisi karbon serta penguatan ketahanan lingkungan daerah. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan infrastruktur cerdas yang berdaya guna dan berkeadilan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi pemantapan infrastruktur untuk menuju akselerasi transformasi pembangunan, yang menjadikan pembangunan infrastruktur berteknologi dan berwawasan lingkungan sebagai pendorong utama perubahan ekonomi wilayah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, dengan membangun Kutai Kartanegara sebagai daerah yang tangguh, hijau, dan berdaya saing tinggi di era transformasi pembangunan.

2. Implementasi infrastruktur terintegrasi Kawasan Strategis.

Arah kebijakan implementasi infrastruktur terintegrasi di kawasan strategis diarahkan untuk memperkuat konektivitas, efisiensi, dan sinergi antar-wilayah dalam mendukung percepatan transformasi pembangunan Daerah. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan infrastruktur yang saling terhubung antar sektor meliputi transportasi, energi, air, sanitasi, dan telekomunikasi guna menciptakan kawasan strategis yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penerapan konsep integrasi ini juga mencakup penataan ruang yang efisien dan berwawasan lingkungan, sehingga setiap pembangunan infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian alam dan keseimbangan sosial. Kolaborasi lintas sektor dan multipihak menjadi fondasi utama dalam memastikan keselarasan antara infrastruktur ekonomi, sosial, dan ekologis di kawasan prioritas pembangunan.

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Pemantapan Infrastruktur untuk Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai katalis utama percepatan pembangunan wilayah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi yang mendorong konektivitas, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3.5

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi “Kutai Kartanegara IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	1. Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar dan gizi masyarakat serta penguatan eksistensi budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat	1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan	2. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan	2. Penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara
			3. Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat	3. Identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal
			4. Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing serta ikatan sosial masyarakat yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya	4. Ekspansi program beasiswa, pelatihan dan pendampingan untuk kelompok rentan
			5. Pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya menuju akselerasi transformasi pembangunan	5. Penguatan kelembagaan budaya lokal (sanggar, komunitas adat)
				6. Perlindungan sosial kelompok rentan
				7. Penyediaan hunian layak dan terjangkau
				8. Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia
				9. Peningkatan mutu SDM melalui sekolah vokasi dan pelatihan kerja
				10. Transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi dan pariwisata
				11. SDM unggul dan adaptif: kolaborasi dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha
				12. Revitalisasi nilai-nilai lokal dalam transformasi sosial
				13. Peningkatan daya saing SDM dan budaya di tingkat nasional

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				14. Promosi identitas budaya daerah secara luas
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	1. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan)
			2.Pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis berbasis penguatan pasar domestik	2. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata
			3.Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif	3. Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro
		Meningkatnya investasi daerah	4. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat	4. Penetapan lokasi sentra logistik berbasis kawasan produksi unggulan daerah yang didukung oleh infrastruktur pergudangan, penyimpanan, pengolahan awal, dan distribusi barang
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	5. Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis	5. Peningkatan efisiensi tata niaga, memperpendek rantai distribusi, serta memperluas akses produsen lokal terhadap pasar regional dan nasional guna menjaga stabilitas pasokan dan harga
			6. Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau	6. Penguatan fasilitas pascapanen, pengolahan, pengemasan, standarisasi mutu, serta sertifikasi produk
			7. Penguatan rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan keanekaragaman hayati guna meningkatkan daya saing, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan	7. Pengelompokkan destinasi wisata alam, budaya dan agrowisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan yang saling terhubung, berbasis potensi lokal dan keunikan sumber daya alam dan budaya Kutai Kartanegara
				8. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi pariwisata secara terintegrasi dan tematik
				9. Peningkatan kualitas amenitas dan layanan pariwisata, melalui penyediaan fasilitas pendukung yang layak, ramah lingkungan, inklusif, dan berstandar internasional
				10. Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan
				11. Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan
				12. Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				13. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif
				14. Inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif
				15. Pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (link dan match)
				16. Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital
				17. Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah
				18. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN
				19. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan
				20. Industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan Kawasan Strategis hijau
				21. Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan kreatif
				22. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon
				23. Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja yang mencakup pengetahuan tentang energi terbarukan, manajemen sumber daya alam, teknologi bersih, efisiensi energi, dan keberlanjutan
Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	1. Penyusunan sistem perencanaan- penganggaran terpadu
		Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah	2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	2. Penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan pembangunan baru
			3. Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	3. Peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik
			4. Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	4. Penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja
				5. Digitalisasi layanan publik
				6. Penguatan sistem pengaduan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan	7. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
				8. Aplikasi dashboard lintas sektor
				9. Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan
				10. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal	Meningkatnya keberkelanjutan lingkungan hidup daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1. Pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan partisipasi multi pihak dalam perlindungan lingkungan hidup	1. Penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana
			2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab	
			3. Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	
		Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	4. Perwujudan peran serta multi pihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan dan pengembangan potensi energi ramah lingkungan	2. Penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara
			5. Penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	3. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis
				4. Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat
				5. Penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana
				6. Skema insentif perlindungan lingkungan swadaya
				7. Penguatan tata ruang ekologis dan zonasi konservasi
				8. Implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif
				9. Perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor
Terbaik dalam mewujudkan	Meningkatnya fondasi	Meningkatnya pemerataan	1. Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dan infrastruktur kewilayahan	1. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	yang terintegrasi yang mendukung ketahanan wilayah	
			2. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan
			3. Penguatan sistem transportasi dan logistik serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, inklusif dan berdaya saing	3. Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN
			4. Perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan	4. Modernisasi desa melalui smart village (internet, sistem layanan digital, energi alternatif)
			5. Pemantapan infrastruktur untuk menuju akselerasi transformasi pembangunan	5. Penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan
				6. Pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antar wilayah
				7. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke IKN
				8. Pembangunan infrastruktur cerdas: transportasi massal, energi bersih, kawasan hijau
				9. Implementasi infrastruktur terintegrasi Kawasan Strategis

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2.2 Program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui *cascading* kinerja yang dimulai dari visi hingga *outcome*, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Daerah. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3.6

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan" MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber	Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	
				PDRB per Kapita	
				Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	
			Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Pertumbuhan volume usaha koperasi	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan/atau Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya layanan administrasi perekonomian dan pembangunan	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Meningkatnya hasil produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya hasil produksi hortikultura	Peningkatan Produksi Hortikultura	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
daya manusia aparatur sipil negara MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan			Meningkatnya hasil produksi komoditas peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
			Meningkatnya produksi komoditas perkebunan yang didukung sarana berkualitas dan merata	Produksi Komoditas Perkebunan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B/Yang Terlayani Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Cakupan Luas Lahan Perkebunan dengan prasarana yang sesuai standar	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Binaan Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian
			Meningkatnya kemandirian dan daya saing petani melalui penguatan kelembagaan koperasi	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Difasilitasi dan Dibina	
			Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Bidang Perkebunan	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			kedaulatan dan kemandirian pangan	Pemerintah Kabupaten/Kota	untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Meningkatnya investasi daerah		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	
			Meningkatnya realisasi investasi di sektor industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Realisasi Total Investasi	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman	Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kelengkapan jalan berkeselamatan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Sungai, Danau	Program Pengelolaan Pelayaran
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah yang dilakukan Penatagunaan	Program Penatagunaan Tanah
			Meningkatnya nilai tanah yang telah dipetakan	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dipetakan	
			Meningkatnya tertib administrasi pengadaan tanah	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi	
			Meningkatnya layanan irigasi dalam kondisi baik	Persentase luas layanan irigasi dalam kondisi baik	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung
			Terpenuhinya kepatuhan masyarakat terhadap PBG dan SLF di kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/kota	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	
				Indeks Daya Saing Daerah	
				Indeks Pelayanan Publik	
				Nilai SAKIP	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah	Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya Tata kelola Perbendaharaan	Indeks Penyerapan Anggaran	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Presentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
				Presentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan	
				Presentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar kader manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan rancangan pengembangan dan evaluasi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase pejabat fungsional yang memiliki sertifikasi kompetensi diluar guru dan tenaga kesehatan	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Sangat Baik dan Baik	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelinpahan kewenangan	Indeks Pelimpahan Kewenangan pada Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD	Program Administrasi Pemerintahan Desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			pengawasan pemerintahan desa	yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	
		Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah		Angka kriminalitas	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase anggota Satpol PP yang dilatih	
			Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Persentase anggota Satlinmas yang dilatih	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	
			Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	
			Meningkatnya kompetensi PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter		Tingkat Kemiskinan	
			Meningkatknya Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar peserta Didik	Skor kemampuan literasi SD/Sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan
				Skor kemampuan numerasi SD/Sederajat	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Skor kemampuan literasi SMP/Sederajat	
				Skor kemampuan numerasi SMP/Sederajat	
				Persentase PAUD yang mendapatkan Akreditasi B	
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan Pendidikan	Indeks Iklim Keamanan PAUD	
				Indeks Iklim Keamanan SD/Sederajat	
				Indeks Iklim Keamanan SMP/Sederajat	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD/Sederajat	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMP/Sederajat	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD/Sederajat	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP/Sederajat	
			Meningkatnya Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik	APM PAUD 5-6 Tahun	
				APS PAUD 5-6 Tahun	
				APK SD/Sederajat	
				APK SMP/Sederajat	
				APM SD/Sederajat 7-12 Tahun	
				APS SD/Sederajat 7-12 Tahun	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				APM SMP/Sederajat 13-15 Tahun	
				APS SMP/Sederajat 13-15 Tahun	
				APS Kesetaraan 7-18 Tahun	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru PAUD	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				Indeks Distribusi Guru SD	
				Indeks Distribusi Guru SMP	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PAUD	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP	
				Persentase Guru PAUD yang memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah D.4 atau S.1	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Persentase Desa/Kelurahan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			berkualitas baik, adil, dan terjangkau	sanitasi total berbasis masyarakat	
				Prevalensi Obesitas > 18 tahun	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	
				Persentase lanjut usia yang mandiri	
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	
				Cakupan penemuan kasus TB	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi buruk) pada balita)	
				Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	
				Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes	
				Insidensi Stunting Balita (kasus baru)	
				Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	
				Eliminasi Kusta	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	
				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	
				Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Desa Budaya yang Aktif	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	
			Meningkatnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial	Indeks Zakat Nasional	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Hukum Adat
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan		Tingkat Pengangguran Terbuka	
				Rasio Gini	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	
				Persentase Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi	Program Rehabilitasi Sosial

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Kebutuhan Dasarnya di luar panti	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bancana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	
			Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang tertangani	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Meningkatnya keberkelanjutan lingkungan hidup daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang meningkat Pemahamannya terhadap Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Meningkatnya status mutu lingkungan perairan	Indeks Pencemaran Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya status mutu udara	Indeks Pencemaran Udara	
				Indeks Risiko Bencana	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2.3 Keterkaitan Program Strategis Nasional dengan Dukungan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Program Strategis Nasional merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan dan program prioritas yang termuat dalam dokumen RPJMN dan RKP. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun dukungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada arahan ini sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	Urusan
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapuasan kemiskinan ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Sekolah rakyat	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
	Pembangunan 3 juta rumah	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketahanan pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan
Kesehatan untuk semua dengan proyek/kegiatan	Jaminan kesehatan nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
	Makan bergizi gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	Urusan
		Upaya Kesehatan Masyarakat	
Perluasan akses pendidikan dengan proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah		Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan	Pengendalian inflasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perdagangan
	Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi dan UKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM
	Kemudahan perizinan di daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Koperasi dan UKM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
Program strategis nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh presiden			

Salah satu strategi utama untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 2 (dua) program unggulan yakni gratispol dan jospol yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut kedua program unggulan Provinsi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kalimantan Timur yang telah disesuaikan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, berikut kegiatan-kegiatan unggulan:

Tabel 3.8.

Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 untuk Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
Program Unggulan Gratispol		
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3	1. Program Pengelolaan Pendidikan
		2. Program Kesejahteraan Rakyat
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Gratis Internet di Setiap Desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
5	Gratis Seragam Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
6	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah	Program Kesejahteraan Rakyat
Program Unggulan Jospol		
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern		
1	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	Pengembangan kawasan tanaman Pisang Kepok (Grecek)	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4	Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao dan Karet	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3. Prog. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5	Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Jospol 2 Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik		
1	Pembangunan Aplikasi SAKTI (Super App)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Jospol 3 Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah		
1	Pemberian Insentif Dosen, Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	Program Kesejahteraan Rakyat
Jospol 4 Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Digital Untuk Mendukung UMKM		
1	Bantuan Permodalan, Peralatan dan Pembinaan UMKM Secara Terpadu	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3	Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Jospol 5 Mengembangkan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa		
1	Pengembangan Desa Wisata yang berstandar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2	Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Mendukung Pariwisata Berbasis Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Jospol 6 Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan		
1	Pembangunan SMA/SMK Unggulan	Program Pengelolaan Pendidikan
Jospol 7 Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional		
1	Kegiatan peningkatan/rehabilitasi ruas jalan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan
Jospol 8 Revitalisasi Sungai Mahakam untuk Transportasi Publik, Angkutan Industri dan Pariwisata		
1	Revitalisasi Dermaga Sungai Mahakam	Program Pengelolaan Pelayaran
Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta		
1	Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	Forum Investasi Daerah	Program Promosi Penanaman Modal

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang diiringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi. Sinkronisasi dengan rencana tata ruang perlu dilakukan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Selain untuk memastikan bahwa pembangunan Daerah berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di Kalimantan Timur. *Highlights* indikasi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2.4 Program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat.

Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan.

Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Program

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Unggulan KDH yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Tabel 3.9

Keterkaitan Program Unggulan KDH Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Prioritas RPJMD

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	PD
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
3	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
4	Program Etam Sejahtera	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Hubungan Industrial	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Program Pembangunan Kawasan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	PD
	Ekonomi Sejahtera.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
6	Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh;	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pertanian)	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan)	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Pertanian)	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan)	Dinas Perkebunan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	PD
7	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
8	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	Program Stimulus Komunitas Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum
10	Program Pelayanan Publik Cerdas;	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
11	Program ASN Kukar Terbaik.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	PD
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	Program RT Ku-Terbaik	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
14	Program Jaga Lingkungan Lestari	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
16	Program Internet Desa Gratis.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	PD
17	Program Permukiman Idaman Terbaik.	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 17 (tujuh belas) Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan 17 (tujuh belas) Program Dedikasi sebagai bentuk komitmen nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Program-program ini dirancang secara strategis untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dimana 17 (tujuh belas) Program Dedikasi ini merupakan turunan langsung dari misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setiap program mencerminkan arah kebijakan yang fokus, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta memperhatikan potensi dan karakteristik lokal. Berikut merupakan keterkaitan 17 (tujuh belas) Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan misi:

Tabel 3.10

Keterkaitan 17 (tujuh belas) Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara

Misi	Program Dedikasi
Misi 1 Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia
	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa
	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Misi	Program Dedikasi
	Program Etam Sejahtera
Misi 2 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera
	Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh
	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik
	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah
	Program Stimulus Komunitas Kreatif
Misi 3 Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Program Pelayanan Publik Cerdas
	Program ASN Kukar Terbaik
Misi 4 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal	Program RT Ku-Terbaik
	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku
	Program Jaga Lingkungan Lestari
Misi 5 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik
	Program Internet Desa Gratis
	Program Permukiman Idaman Terbaik

Program Unggulan Kepala Daerah Kutai Kartanegara yang dikemas dalam 17 (tujuh belas) Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan serangkaian program strategis yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Program-program ini tidak hanya diarahkan untuk menjawab tantangan aktual, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi Daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berikut penjabaran 17 (tujuh belas) Program Dedikasi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029:

Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, berupa pemberian makanan pokok bergizi pada balita atau kategori PAUD sebagai upaya mengeliminasi angka gizi buruk dan gizi kurang khususnya pada keluarga prasejahtera, serta pengurangan resiko angka prevalensi stunting, selanjutnya memberikan bantuan makanan sehat bagi lansia melalui penguatan posyandu, dengan pola pelaksanaan yang sinergi, tertib, dan berbasis data, serta ditopang oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pengendalian yang berkala.

Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, dengan meringankan beban biaya perlengkapan sekolah dan biaya transportasi pada murid PAUD-SD-SMP, dengan penyediaan baju seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi murid setiap tahunnya, salah satunya melalui peningkatan BOSKAB pada masing-masing sekolah,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

khusus untuk fasilitasi transportasi sekolah disediakan sarana dan prasarana antar jemput sekolah, dengan unit transportasi menyesuaikan karakteristik wilayah Kutai Kartanegara dengan standard keamanan yang layak. Selain daripada itu, untuk menurunkan resiko putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan di wilayah terpencil, dikembangkan sekolah menengah pertama (SMP) berasrama (boarding school) bersubsidi dan berbasis pilot project pada lokasi yang dapat menjadi simpul dalam satu wilayah kecamatan.

Dalam memastikan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan mendorong pencapaian prioritas daerah, maka tetap dilanjutkan program beasiswa stimulan kepada siswa/siswi Kutai Kartanegara, dengan sasaran prioritas: 1) Penyiapan Siswa Sekolah Kedinasan, 2) Masyarakat Prasejahtera dan 3) Siswa/Siswi. Berprestasi pada jenjang SD-SMP-SMA/Sederajat, serta beasiswa tuntas bagi mahasiswa Kutai Kartanegara khususnya menunjang penyediaan tenaga layanan dasar dan penyediaan tenaga teknis yang sejalan dengan prioritas daerah, diantaranya adalah: Tenaga Pendidik, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Teknik Industri, Seni, Sastra dan Budaya, serta Teknologi Informasi dengan target minimal 1.000 Orang Mahasiswa, yang dikelola secara profesional bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi minimal Baik Sekali. Selain daripada itu dikhususkan pula beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat tergolong pra sejahtera dalam kerangka kebijakan “Satu KK Satu Sarjana”

Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat sekolah swasta sebagai bagian dari satuan pendidikan di Kutai Kartanegara, dengan memberikan program bantuan berbasis sekolah swasta/pondok pesantren bagi peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru swasta, sarana dan prasarana sekolah.

Program Etam Sejahtera

merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat prasejahtera, dengan memberikan bantuan pangan bagi kelompok kategori jompo, disabilitas dan anak terlantar kategori miskin. Memastikan jaminan kesehatan terpenuhi 100%, jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan termasuk relawan kebencanaan/kemanusiaan, dan perbaikan rumah tidak layak huni minimal 500 unit per tahun, serta memfasilitasi kelompok disabilitas agar mendapat akses pada lapangan kerja formal dan informal melalui penguatan dan integrasi program kukar siap kerja dan klinik wirausaha pemuda mandiri, dengan membuka unit layanan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja hingga di setiap kecamatan. Khusus untuk peningkatan layanan kesehatan dikembangkan jaminan kesehatan, dengan pola Berobat Gratis cukup dengan KTP.

Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk pembangunan kawasan-kawasan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

strategis/khusus untuk mempersiapkan simpul kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien, berbasis pada sumber daya ekonomi terbarukan, dengan membangun pola hubungan industri hulu dan hilir yang produktif, dalam satu kesatuan wilayah ekonomi potensial, dengan tujuan menciptakan suatu ekosistem perekonomian wilayah yang menjangkau seluruh potensi daerah secara terintegrasi dan terstruktur dalam bingkai rantai nilai yang saling terkait, dengan melakukan serangkain kegiatan, mulai dari penyiapan lahan, SDM, sarana dan prasarana, jaringan logistik, tata kelola pengairan, hingga kelembagaan yang disusun dalam satu kesatuan dokumen perencanaan yang dilaksanakan secara fokus, gradual dan berkesinambungan. Adapun target pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera (KES), tersebut berada pada 3 zona tematik, yakni :

a. Zona Selatan;
b. Zona Timur; dan
c. Zona Utara.

Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan dan menyediakan generasi petani /peternak /nelayan tangguh yang dilaksanakan dengan metode pelatihan, pendampingan, magang dan yang diiringi dengan fasilitasi sarana dan prasarana petani/nelayan. Program ini untuk mendorong tumbuhnya petani/nelayan millenial yang memiliki keterampilan/keahlian pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan modern dengan metode sekolah dilaksanakan di dalam/luar wilayah Kutai Kartanegara.
Selain untuk pengembangan sumber daya manusia, maka perlu didukung penguatan kapasitas produksi di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan penyediaan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang layak dan modern pada sektor perikanan dan pertanian, melalui program bantuan untuk 100 Ribu Petani, Nelayan, dan Peternak Produktif. Dan dalam rangka menjaga kelangsungan nelayan agar mudah mengakses BBM, dilakukan fasilitasi pembangunan SPBN diwilayah potensi perikanan tangkap.

Program Kredit Kukar Idaman Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Peternak dan Nelayan, untuk mengakses bantuan permodalan yang bersumber dari bank, dengan pengurusan yang mudah, cepat dan tanpa bunga, dengan rentang nilai kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Serta memperkuat permodalan pada Koperasi dan BUMDesa dengan alokasi sebesar 1 Milyar Rupiah, salah satunya dalam rangka menyediakan pupuk bersubsidi yang dijalankan secara selektif dan berdampak bagi geliat perekonomian di desa/kelurahan.

Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya Kukar, dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada sanggar seni dan budaya, baik berupa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sarana dan prasarana, fasilitasi legalitas kelembagaan, promosi pertunjukan, serta peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan daya tarik destinasi wisata daerah. Dengan kegiatan utama adalah pembangunan pusat seni dan budaya daerah di setiap kecamatan, re-visioning Pulau Kumala sebagai kawasan wisata kuliner, seni dan budaya nusantara yang modern sebagai bagian dari Pembangunan Tenggarong sebagai pusat sejarah dan budaya.

Program Stimulus Komunitas Kreatif

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan ruang kepada seluruh insan kreatif di Kutai Kartanegara, dengan membangun ekosistem ekonomi kreatif yang produktif, dengan memberikan stimulus dalam membangun kolaborasi komunitas ekraf minimal bantuan stimulus sebesar 100 juta rupiah bagi komunitas ekraf yang diikuti dengan mengoptimalkan Fasilitas Gedung Ekonomi Kreatif secara gratis sebagai sharing pengetahuan, peningkatan keterampilan, fasilitasi HAKI, dan wadah membangun jaringan kemitraan dan pertunjukan yang diselenggarakan secara kolaboratif. Minimal 2 kali setahun rutin menyelenggarakan kontes karya kreatif yang bertaraf nasional, dan 1 Event 1 Kecamatan yang bertaraf Nasional.

Program Pelayanan Publik Cerdas

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip smart and good governance hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan publik cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

Program ASN Kukar Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk menjalankan prinsip-prinsip ASN BerAKHLAK secara optimal, dengan fokus pada perbaikan kapasitas SDM Aparatur, melalui implementasi merit system pada jenjang karir yang disertai dengan peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai dan melakukan perbaikan tata kelola yang berkeadilan bersandar pada perhitungan beban kerja yang realistis dan faktual. Selain daripada itu diperkuat dengan peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Dengan kegiatan utama beasiswa tugas belajar kepada ASN potensial mulai jenjang S1, S2 dan S3. Disisi lain dalam upaya meningkatkan keahlian ASN, diperkuat dengan Optimalisasi Pelayanan Diklat Kepegawaian, tahap awal didukung dengan skema kerjasama dengan lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Program RT Ku-Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program-program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab.
Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

Program Terima Kaseh Guru Ngaji-Ku

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk penghargaan kepada guru mengaji kitab suci (seluruh agama) terdaftar pada lembaga pendidikan keagamaan, serta imam, khotib dan marbot masjid/mushola/rumah ibadah lainnya yang terdaftar, dengan memberikan insentif bulanan yang dikelola secara bertanggung jawab. Selanjutnya untuk memberikan apresiasi kepada pemuka dan pelaku keagamaan disiapkan Umroh Gratis, dan khusus bagi kegiatan-kegiatan pengajian melalui lembaga majelis ta'lim dan shalawat di berikan bantuan 25 juta rupiah untuk penunjang aktivitas rutin yang lebih bernilai. Seluruh kebijakan tersebut diintegrasikan dengan Program RT Ku-Terbaik.

Program Jaga Lingkungan Lestari

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui peningkatan pengawasan pada seluruh perusahaan yang beraktifitas di wilayah Kutai Kartanegara untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup, dengan mewajibkan kepada seluruh perusahaan untuk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mengalokasikan Program Kelestarian Lingkungan Hidup di sekitar daerah operasi. Selanjutnya melanjutkan program Kukar Peduli Lingkungan dengan menyediakan pengelolaan persampahan yang baik, dengan memperluas pembangunan unit TPS-3R (*reduce, reuse, recycle*) modern dengan standar kelayakan yang tinggi minimal satu Unit per-kecamatan, serta melanjutkan Program Desa Ramah Lingkungan, dengan target seluruh desa di wilayah Kutai Kartanegara.

Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan desa, untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis potensi desa, dengan mendorong kerjasama antar Pemerintah Desa dalam kerangka pembangunan wilayah perdesaan yang di desain secara fokus dan tematik. Adapun kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah desa, melakukan dukungan kebijakan melalui penguatan fiskal pemerintah desa melalui BKKD, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, serta promosi dan pemasaran hasil produk BUMDes. Dengan Mengalokasikan anggaran dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebesar 100 Milyar Per Tahun. Kondisi ini ditopang pula dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program Internet Desa Gratis

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memastikan Kukar tanpa *blank spot* dengan menyediakan internet desa secara mudah dan gratis, dengan mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi informasi yang adaptif dan modern.

Program Permukiman Idaman Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas permukiman di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan kegiatan utama peningkatan kualitas jalan lingkungan, penyediaan penerangan jalan umum, perluasan cakupan air bersih, penyediaan energi baru terbarukan, rumah ibadah, drainase, dan ruang terbuka hijau/taman/pemakaman.
Untuk mendukung penyediaan permukiman yang layak di wilayah perkotaan, adapun proyek prioritas yang dilaksanakan dalam periode kepemimpinan adalah: 1) Penataan Permukiman Tepi Sungai; 2) Fasilitasi Kerjasama dengan Pengembang Perumahan Yang Terjangkau Bagi Korban Bencana/Relokasi dan Masyarakat yang Termasuk Kategori Berpendapatan Rendah. 3) Penyediaan energi listrik dan air bersih berbasis perdesaan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau PLN dan PDAM, sebagai pengembangan Program Terang Kampongku dan Program Air Bersih Desa.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2.5 Rencana Kebutuhan Pendanaan Program Unggulan Kepala Daerah

Rencana kebutuhan pendanaan program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun memberikan gambaran komprehensif mengenai arah kebijakan pembangunan Daerah melalui program-program unggulan yang telah ditetapkan, sekaligus proyeksi pembiayaan yang dibutuhkan pada setiap tahunnya. Penyusunan tabel ini bertujuan untuk mencermati secara menyeluruh keterpaduan antara perencanaan program unggulan dengan kemampuan pendanaan daerah, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh program unggulan dimaksud telah teralokasi dan terdanai secara memadai, baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. Dengan demikian, tabel ini menjadi dasar penting dalam memastikan kesinambungan, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program unggulan selama periode kepemimpinan, serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3.11

Rencana Kebutuhan Pendanaan Program Unggulan Kepala Daerah

NO	PROGRAM DEDIKASI	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial							
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	35.015.531.414,00	66.438.918.600,00	96.648.243.400,00	101.053.561.400,00	102.332.241.400,00	103.779.801.400,00
2	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	249.494.137.770,00	329.690.850.000,00	343.768.592.000,00	345.783.575.000,00	348.656.655.000,00	346.008.705.000,00
3	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik	300.000.000,00	34.175.524.000,00	34.175.524.000,00	34.175.524.000,00	34.175.524.000,00	34.175.524.000,00
4	Program Etam Sejahtera	140.964.889.320,00	166.767.437.600,00	190.301.337.600,00	201.087.737.600,00	211.824.137.600,00	222.960.537.600,00
MISI 2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif							
5	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera.	70.881.148.504,00	109.265.981.510,00	321.515.981.510,00	317.115.981.510,00	317.115.981.510,00	317.115.981.510,00
6	Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh;	164.673.922.200,00	537.872.400.000,00	542.705.987.500,00	542.930.987.500,00	543.050.987.500,00	543.470.987.500,00
7	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.	500.000.000,00	925.000.000,00	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00
8	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.	10.900.000.000,00	32.950.000.000,00	36.300.000.000,00	36.300.000.000,00	31.300.000.000,00	31.300.000.000,00
9	Program Stimulus Komunitas Kreatif	300.000.000,00	14.850.000.000,00	29.450.000.000,00	29.450.000.000,00	14.450.000.000,00	14.450.000.000,00
MISI 3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;							
10	Program Pelayanan Publik Cerdas;	500.000.000,00	4.360.000.000,00	4.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	PROGRAM DEDIKASI	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Program ASN Kukar Terbaik.	1.600.000.000,00	6.500.000.000,00	6.150.000.000,00	5.950.000.000,00	6.350.000.000,00	5.950.000.000,00
MISI 4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;							
12	Program RT Ku-Terbaik	173.945.472.960,00	497.258.472.960,00	497.208.472.960,00	497.208.472.960,00	497.208.472.960,00	497.208.472.960,00
13	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
14	Program Jaga Lingkungan Lestari	17.050.000.000,00	32.580.000.000,00	30.680.000.000,00	30.680.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
MISI 5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;							
15	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.	100.000.000,00	27.207.200.000,00	26.266.000.000,00	26.428.000.000,00	26.285.000.000,00	25.900.000.000,00
16	Program Internet Desa Gratis.	300.000.000,00	3.675.000.000,00	5.000.000.000,00	3.950.000.000,00	5.275.000.000,00	8.019.500.000,00
17	Program Permukiman Idaman Terbaik.	7.953.455.000,00	88.991.000.000,00	339.957.319.700,00	480.007.319.700,00	479.807.319.700,00	468.752.319.700,00
	TOTAL	874.478.557.168,00	1.953.807.784.670,00	2.505.502.458.670,00	2.654.996.159.670,00	2.621.356.319.670,00	2.622.616.829.670,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Zonasi Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan arah kebijakan pengembangan wilayah yang berfokus pada optimalisasi potensi lokal sesuai karakteristik masing-masing kecamatan, mulai dari penguatan sektor agraris dan kehutanan, pengembangan industri, perdagangan, serta jasa, hingga pemanfaatan sumber daya migas, kelautan, dan perikanan secara berkelanjutan; sehingga seluruh wilayah dapat berkembang secara terpadu dan seimbang, mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Berikut merupakan peta zonasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 3.2

Peta Zonasi Tematik Pembangunan Wilayah Kutai Kartanegara

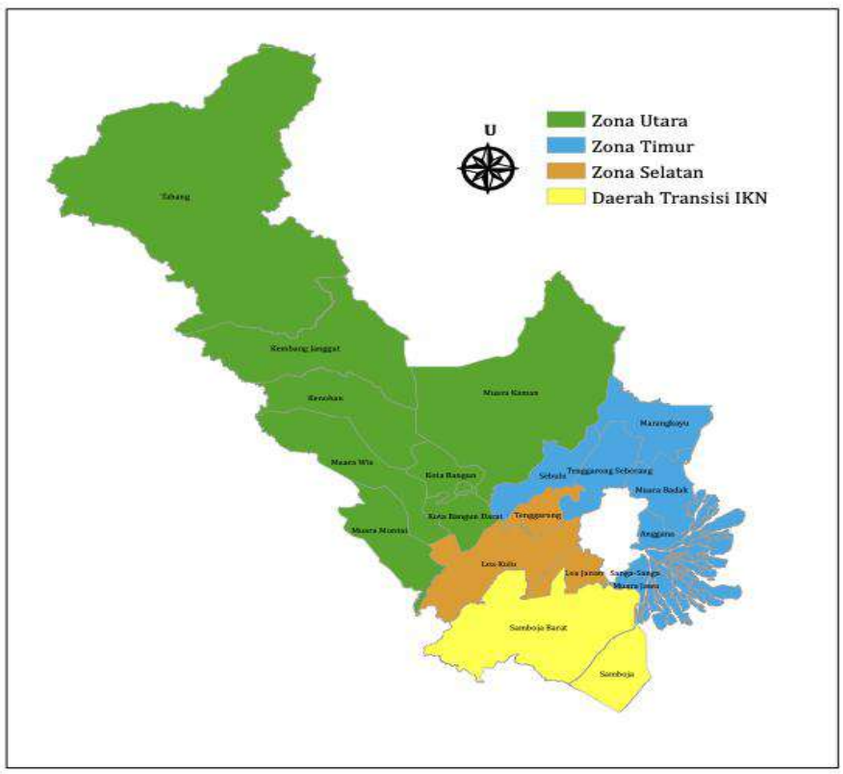

Kabupaten Kutai Kartanegara membagi wilayah pengembangan perekonomian menjadi tiga zona strategis, yaitu zona utara, zona timur, dan zona selatan. Pembagian ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, memperhatikan karakteristik geografis, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Zona utara difokuskan pada pengelolaan potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Zona timur diarahkan pada pengembangan industri berkelanjutan. Sementara itu, zona selatan lebih kawasan perkotaan modern sekaligus mitra strategis Ibu Kota Nusantara

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(IKN). Berikut tabel pemetaan arah kebijakan berdasarkan zona di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.12

Pemetaan Arah Kebijakan Berdasarkan Zona

ZONA	ARAH KEBIJAKAN
UTARA	Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata
TIMUR	Pengembangan industri berkelanjutan
SELATAN	Pengembangan kawasan perkotaan modern dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN)
DAERAH TRANSISI IKN	Mitra Pelayanan Publik (sebelum PEMDASUS IKN)

Dengan adanya pembagian zona ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya menciptakan struktur ekonomi yang seimbang, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

3.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Zona Utara

Penetapan Zona Utara Kutai Kartanegara sebagai kawasan prioritas pengembangan pangan dan pariwisata karena memiliki karakteristik wilayah yang mendukung kedua sektor tersebut. Secara geografis, Zona Utara Kutai Kartanegara didominasi oleh bentang alam dataran tinggi dan berbukit dengan kualitas tanah yang subur dan ketersediaan air permukaan yang melimpah sehingga menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan pertanian pangan. Selain itu, wilayah ini menyimpan kekayaan biodiversitas, bentang alam yang eksotik, serta budaya lokal yang masih lestari sehingga menjadikannya sangat cocok untuk pengembangan pariwisata berbasis alam, ekowisata, dan wisata budaya.

Wilayah seperti Kecamatan Tabang, Kota Bangun Darat, hingga Kota Bangun menyuguhkan atraksi wisata alami yang unik, seperti danau, air terjun, gunung, hingga hutan hujan tropis yang masih alami. Keberadaan komunitas adat dan kearifan lokal juga menjadi daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki wilayah lain. Kombinasi antara kesuburan lahan, kekayaan potensi wisata, dan kekhasan budaya inilah yang menjadikan Zona Utara memiliki keunggulan komparatif sebagai kawasan terpadu untuk pengembangan pangan dan pariwisata secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, wilayah Kutai Kartanegara Zona Utara juga memiliki posisi strategis dalam mendukung peran kabupaten ini sebagai bagian dari

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya untuk Kecamatan Kota Bangun. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01.1/590/PL/DPPR/II/2022 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Komoditas Padi di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebutkan bahwa kawasan pertanian komoditas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sawah eksisting dengan luas keseluruhan kurang lebih 8.093,06 ha (delapan ribu sembilan puluh tiga koma enam hektar) yang salah satunya merupakan Kawasan Pertanian Kecamatan Sebulu – Muara Kaman.

Wilayah seperti Kota Bangun dan Muara Kaman memiliki luasan lahan yang cukup besar dengan kesuburan tanah yang baik, ketersediaan sumber air tawar dari danau dan sungai, serta ekosistem yang relatif masih alami. Kondisi ini sangat ideal untuk pengembangan subsektor tanaman pangan sebagai basis penguatan ketahanan pangan daerah maupun nasional. Di sisi lain, Kutai Kartanegara Zona Utara juga memiliki keunikan alam dan budaya yang berdaya tarik tinggi bagi pariwisata, seperti keberadaan Danau Semayang, Danau Melintang, Danau Jempang, Gunung Babi, Sungai Lauw, dan situs-situs budaya lokal, yang menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan wisata berbasis ekologi dan budaya.

Dalam perencanaan jangka menengah, zona utara fokus pada pertanian dan pengembangan pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

1. Zona Kawasan Pusat Pangan Pembangunan Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian Baru serta Area Perikanan Strategis.

Dengan kebutuhan lahan pangan seluas 74.900 ha (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus hektare), dan target penambahan lahan pangan di Zona Utara seluas 41.000 ha (empat puluh satu ribu hektare). Implikasi dari pemenuhan sarana irigasi dan lahan pertanian kedepannya dapat menjadi kawasan pusat pangan yang terletak di 8 (delapan) kecamatan dengan total daerah irigasi (DI) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dengan luas 45.333 ha (empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga hektare). Pembentukan zona pangan ini dapat berkontribusi ekonomi sebesar 50% (lima puluh persen) dalam 5 (lima) tahun ke depan, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 3.3

Proyeksi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Target Kontribusi Zona Utara

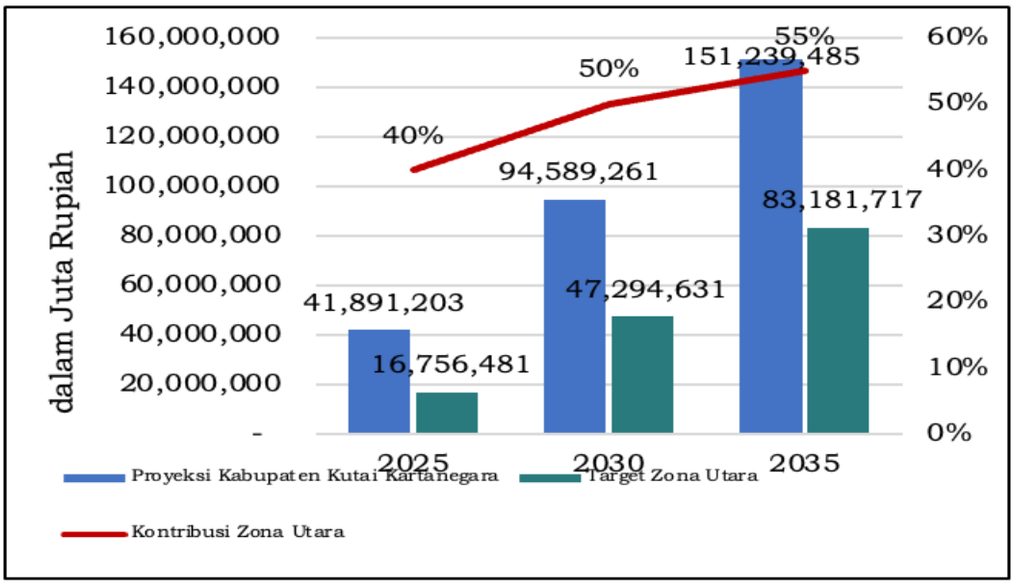

2. Pengembangan Kawasan Pariwisata Baru

Pengembangan perekonomian untuk zona utara dengan fokus pariwisata baru untuk jelajah ekosistem hutan tropis kalimantan. Kawasan pariwisata baru ini terdiri dari enam kawasan yaitu Kawasan Tabang I, Tabang II, Wisata Tiga Danau, Wisata Kota Bangun, Kawasan Kota Bangun Darat, dan Kawasan Kedang Ipil. Pembentukan kawasan pariwisata ini dapat berkontribusi ekonomi sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam lima tahun ke depan yang terakumulasi dalam sektor penyediaan akomodasi, makan minum, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar 3.4

Proyeksi PDRB Sektor Penyedia Akomodasi Mamin

dan Target Kontribusi Zona Utara

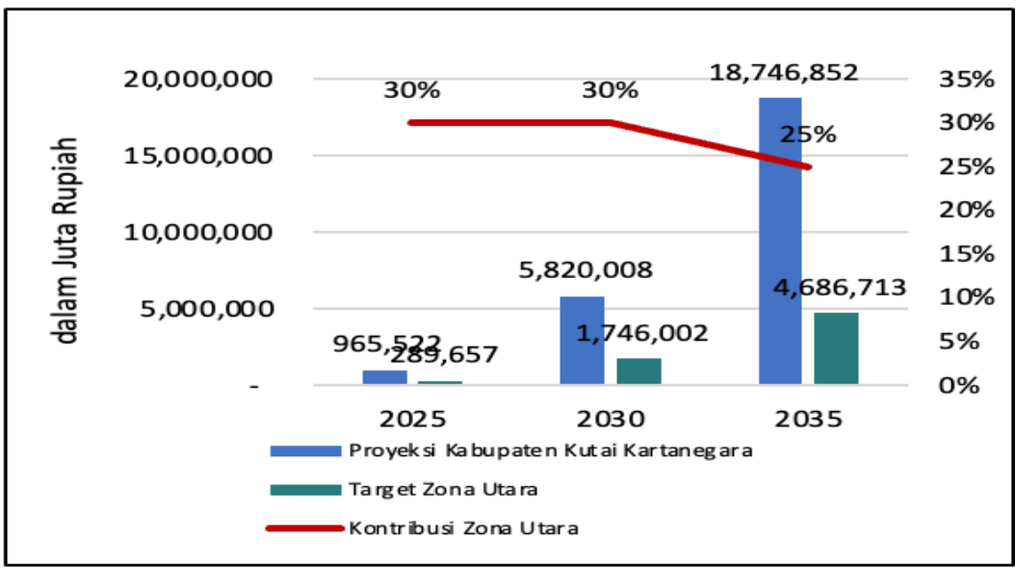

Beberapa kecamatan yang masuk dalam Zona Utara antara lain Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, yang masing-masing memiliki potensi. Berikut ini potensi zona Utara yang disertai dengan permasalahan dan indikasi intervensi:

Tabel 3.13

Pemetaan Potensi Zona Utara

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Identifikasi Lokasi Prioritas
Pertanian	Padi	Kuantitas, kualitas, dan kapasitas faktor produksi pangan, terutama lahan dan air yang semakin menurun	- Perluasan lahan pertanian pada lahan potensial - Pemanfaatan lahan dengan dua (2) masa tanam padi dan diselingi satu (1) masa tanam palawija/jagung	Kecamatan Kota Bangun, Kota Bangun Darat, dan Muara Kaman
		Skala usaha tani yang masih rendah	- Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu - Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki) - Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Identifikasi Lokasi Prioritas
			- Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil;	
		Relatif terbatasnya dukungan dan ketersediaan infrastruktur wilayah di pedesaan dan pertanian	Penyediaan sarpras penunjang pertanian	
		Masih terdapatnya potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk pangan secara berkelanjutan	Intensifikasi lahan pertanian untuk komoditas padi di zona utara melalui perluasan lahan pertanian pada lahan potensial	
	Ubi kayu	Belum optimalnya hilirisasi ubi Kayu menjadi alternatif pangan bebas gluten	Peningkatan produksi pangan nabati; dan peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik.	Kecamatan Kota Bangun, Kota Bangun Darat, dan Muara Kaman
Perikanan air tawar	Ikan patin dan nila	Teknologi budidaya utama yang diaplikasikan oleh rumah tangga perikanan masih bersifat sederhana	Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya air tawar berbasis keramba	Muara Muntai; Muara Wis; Kota Bangun; Kota Bangun Darat; Muara Kaman; Kenohan; Kembang Janggut; Tabang
Pariwisata	• Kawasan Wisata Pela • Kawasan Wisata Kedang Ipil • Kawasan Wisata Kota Bangun Darat • Kawasan Wisata Tabang 1 • Kawasan Wisata Tabang 2		- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antar objek wisata, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas pelayanan wisata dapat menjadi langkah strategis untuk membuka isolasi kawasan, meningkatkan kenyamanan wisatawan, serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal secara berkelanjutan - Pengembangan wisata yang unik, bertema khusus, dan menyasar segmen pasar tertentu. Tabang memiliki potensi keunikan budaya, alam, dan ekowisata yang sesuai dengan pendekatan *niche*, sehingga pengembangannya sejak awal dianggap strategis untuk membentuk identitas kawasan wisata yang khas serta menarik wisatawan dengan minat khusus	Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Zona Selatan

Arah pengembangan Zona Selatan Kutai Kartanegara diarahkan untuk menjadi kawasan perkotaan modern sekaligus mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah ini mencakup Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, dan Loa Janan. Posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan IKN menjadikan Zona Selatan memiliki peran sebagai daerah penyangga, yang mampu menampung limpahan aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan dari kawasan inti IKN.

Pengembangan Zona Selatan Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan erat dengan mandat yang diberikan kepada Otorita IKN, yang memiliki kewenangan dalam perencanaan Ibu Kota Negara, karena sebagian daerah kabupaten ini termasuk dalam area yang tercakup batasan wilayah IKN. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Sangasanga, Muara Jawa, dan Samboja Barat, yang berfungsi sebagai Daerah Mitra IKN.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022, kerja sama dengan Daerah Mitra IKN mencakup delapan sektor pembangunan, yaitu: Ekonomi dan Industri, Logistik dan Konektivitas, SDM dan Ketenagakerjaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Energi dan Ketenagalistrikan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan RTRW Pulau Kalimantan. Pengembangan Zona Selatan didasarkan pada penetapan fungsi pusat pertumbuhan. Tenggarong ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Loa Kulu sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), dan Loa Janan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Penetapan ini selaras dengan RTRW Kutai Kartanegara 2023–2042 dan menjadi landasan penting untuk mengoptimalkan peran masing-masing kecamatan. Dengan struktur ini, Zona Selatan diharapkan dapat menghadirkan tata ruang perkotaan yang modern, terkoneksi, dan berkelanjutan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas dari IKN.

Secara strategis, posisi Zona Selatan yang berada di segitiga emas Balikpapan–Samarinda–IKN menjadikannya wilayah dengan potensi ekonomi tinggi. Kehadiran fasilitas *Tax Holiday* bagi investor di IKN akan menarik arus

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

investasi yang juga berdampak ke Kutai Kartanegara. *Spillover activity* ini mencakup permintaan perumahan, infrastruktur dasar, kawasan komersial, serta jasa pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, arah pengembangan wilayah ini difokuskan pada penyediaan permukiman perkotaan, penguatan utilitas, transportasi, serta peningkatan layanan publik untuk mendukung urbanisasi yang cepat. Dua konsep besar pembangunan perkotaan yaitu *waterfront city* yang menyasar kawasan di sepanjang sungai (Tenggarong–Loa Kulu, Jongkang, dan sebagian Loa Janan), serta kota kompak yang dikembangkan di Jonggon.

Kedua konsep ini dipilih untuk menyeimbangkan kebutuhan ruang kota modern dengan pelestarian lingkungan, sekaligus menghadirkan identitas khas perkotaan Kutai Kartanegara yang ramah lingkungan dan menarik investasi. Dengan demikian, alasan utama pengembangan Zona Selatan Kutai Kartanegara ke arah perkotaan modern adalah karena posisi strategisnya sebagai mitra IKN, fungsi kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan RPJPD, serta proyeksi pertumbuhan penduduk yang signifikan.

Zona ini diproyeksikan menjadi pusat hunian, perdagangan, dan jasa yang berperan vital dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN sekaligus meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara menyeluruh.

Dalam perencanaan jangka menengah, zona selatan masuk dalam pengembangan kawasan perkotaan baru, pembangunan kawasan pangan dan pariwisata sebagai bagian dari mitra IKN. Zona Selatan juga masuk dalam kawasan strategis pendukung IKN.

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

   Lokasi 4 (empat) kawasan perkotaan baru kawasan perkotaan Loa Ipuh Darat-Jonggon; Jongkang; Tenggarong-Loa Kulu; Loa Janan Ulu. Dengan luasan 4.151 ha (empat ribu seratus lima puluh satu hektare) yang terdiri dari perumahan, perdagangan, jasa, transportasi, dan utilitas permukiman.

2. Pengembangan Kawasan Pangan

   Pengembangan Kawasan Pangan Potensi pengembangan sawah irigasi di 18 (delapan belas) Desa sebesar 4.929,93 ha (empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh tiga hektare) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) daerah irigasi potensial kewenangan Daerah dan 1 (satu) daerah irigasi potensial kewenangan provinsi.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Pengembangan Kawasan Pariwisata Mitra IKN

Pengembangan kawasan pariwisata mitra IKN terbagi atas dua zona layanan pariwisata :

- Zona Inti Radius 1.000 m (seribu meter) atau 15 (lima belas) menit berjalan kaki. Terdapat Museum Mulawarman menjadi pusat pariwisata.
- Zona Pendukung Radius 4.000 m (empat ribu meter) atau 60 (enam puluh) menit berjalan kaki. Daya Tarik Wisata: Waduk Panji Sukarame.

Pembentukan ketiga proyek strategis Pembangunan tersebut diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Gambar 3.5

Dampak Ekonomi dari Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

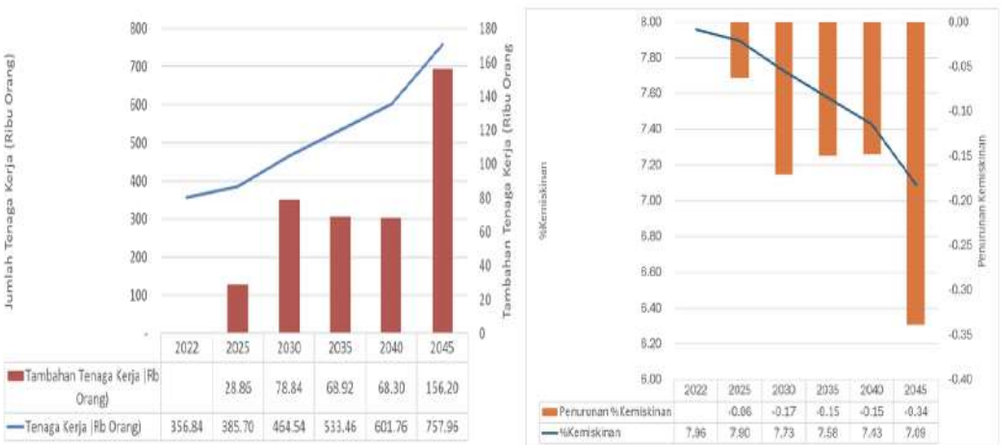

Berikut ini potensi zona Selatan yang disertai dengan permasalahan dan indikasi intervensi:

Tabel 3.14

Pemetaan Potensi Zona Selatan

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Indikasi Lokasi Prioritas
Permukiman perkotaan	Kawasan perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, komersial	(1) Keterbatasan infrastruktur dasar (air bersih, listrik, sanitasi) (2) Pertumbuhan penduduk cepat memicu potensi kawasan kumuh (3) Kesiapan lahan yang belum optimal untuk pembangunan kota baru	Pembangunan kawasan perkotaan baru (*compact city & waterfront city*), pengembangan jaringan utilitas, peningkatan kualitas permukiman eksisting	Kawasan Perkotaan Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Jonggon, Jongkang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Indikasi Lokasi Prioritas
Pertanian	Padi, hortikultura, perikanan air tawar	(1) Alih fungsi lahan sawah akibat urbanisasi (2) Sistem irigasi yang terbatas (3) Produktivitas rendah dibanding kebutuhan pangan regional	Penguatan kawasan pangan, revitalisasi irigasi, ekstensifikasi lahan sawah teknis, penerapan pertanian modern	Kawasan sawah irigasi teknis di Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong
Pariwisata	Wisata budaya, sejarah, alam, *waterfront* Tenggarong	(1) Fasilitas wisata belum memadai (2) Promosi dan aksesibilitas rendah (3) Belum terintegrasi dengan pusat kota & IKN	Pengembangan destinasi unggulan (*waterfront city*, wisata budaya Kutai), pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi & integrasi dengan jalur IKN-Samarinda-Balikpapan	Tenggarong (Museum Mulawarman, Kedaton), Loa Kulu (agrowisata), kawasan Jonggon & Jongkang

3.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Zona Timur

Zona Timur Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri hijau yang mendukung konsep ekonomi berkelanjutan berbasis efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya terbarukan, dan pengurangan dampak lingkungan.

Strategi pengembangan ini mengintegrasikan berbagai aspek infrastruktur, konektivitas, dan sistem pendukung untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan. Zona Timur Kutai Kartanegara memiliki potensi signifikan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertema industri.

Keunggulan utama calon lokasi KEK ini terletak pada lokasinya yang berasosiasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai RTRW, serta kawasan industri eksisting di Marang Kayu dan Muara Badak. Posisinya yang strategis di tepi laut juga menjamin aksesibilitas tinggi terhadap jalur pelayaran, menjadikannya ideal untuk kegiatan ekonomi berskala regional dan internasional.

Potensi ini semakin diperkuat dengan adanya rencana pembangunan konektivitas baru berupa Pelabuhan Khusus dan Pengumpan Regional, serta Jalan Tol Samarinda-Bontang yang akan meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi. Pusat pertumbuhan primer di Zona Timur akan memancarkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pengaruh ekonomi ke wilayah sekitarnya, bahkan hingga Kota Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan kawasan IKN. Dengan demikian, Zona Timur tidak hanya menjadi episentrum industri Kutai Kartanegara, tetapi juga bagian penting dari ekosistem ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Dari sisi infrastruktur, pengembangan diarahkan pada peningkatan konektivitas transportasi, baik laut, darat, maupun udara. Kecamatan Anggana ditetapkan sebagai pintu gerbang laut Kutai Kartanegara, sementara Tenggarong Seberang diposisikan sebagai penyangga inti pertumbuhan.

Selain itu, pembangunan pelabuhan, terminal, bandara khusus, dan jaringan jalan menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas logistik dan distribusi barang. Infrastruktur ini dirancang agar Zona Timur memiliki daya tarik investasi yang kuat sekaligus menunjang operasional industri berskala regional. Alasan utama pengembangan ini adalah potensi strategis Zona Timur yang berada di koridor ekonomi penting Kalimantan Timur.

Dengan basis sumber daya alam, akses ke jalur perdagangan, dan kedekatannya dengan IKN, wilayah ini berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan industri ramah lingkungan. Pendekatan *green economy* diharapkan meningkatkan efisiensi energi, membuka lapangan kerja berkualitas, memperkuat daya saing regional, serta menjaga ketahanan ekologi. Pada akhirnya, arah pengembangan ini dimaksudkan agar Kutai Kartanegara dapat bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Dalam perencanaan jangka menengah, zona timur Kutai Kartanegara fokus pada sektor industri pengolahan, yang disertai dengan amanat kebijakan kewilayahan RPJMN yang masuk dalam perencanaan zona timur antara lain: Kawasan Perdesaan Prioritas dan Kawasan Sentra Perikanan**.** Berikut kegiatan prioritas zona timur :

1. Penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kutai Kartanegara untuk Industri Hijau

Dalam perencanaan jangka menengah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan 5 (lima) lokasi indikatif yang diusulkan sebagai Kawasan Industri serta 1 (satu) lokasi indikatif sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penetapan lokasi-lokasi ini merupakan bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah yang berorientasi jangka panjang, di mana Kawasan Ekonomi Khusus menjadi target pembangunan jangka panjang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Oleh karena itu, hingga tahun 2030 diupayakan telah terbentuk fondasi pembangunan kawasan, yang diawali dengan pengembangan Kawasan Pengembangan Industri (KPI) sebagai tahap awal menuju pembentukan kawasan industri dan KEK yang terintegrasi dan berdaya saing. Adapun lokasi indikatif Kawasan Industri dimaksud meliputi:

- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Sebulu
- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Muara Badak 1
- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Muara Badak 2
- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Muara Badak 3
- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Marangkayu

Dari lima Kawasan ekonomi tersebut, harapannya dapat meningkat nilai ekonomi dari sektor industri pengolahan, dengan rincian proyeksi nilai ekonomi sebagai berikut:

Gambar 3.6

Nilai Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

Produk Industri	Produksi per tahun (Ton)	Nilai Ekonomi 2045	Tenaga Kerja Per tahun	Kebutuhan Energi (2035-2045) (MJ)	Energi Bersih (MJ) (2035-2045)
Biodiesel	4,932,920.00	Rp62,191,500,000,000	6413	14,107,272,727.27	50.33%
Karagenan	155,270.91	Rp21,897,900,000,000	1923	1,040,294,818.18	53.87%
DAP	6,501,220.00	Rp37,822,300,000,000	7690	14,324,037,272.73	54.28%
Ammonium Nitrat	3,951,343.64	Rp25,839,500,000,000	5287	3,024,106,363.64	52.18%
Feronikel	551,874.00	Rp76,538,800,000,000			
Total		**Rp224,290,000,000,000**	**21313**	**32,495,711,181.82**	**17,014,234,000.00**

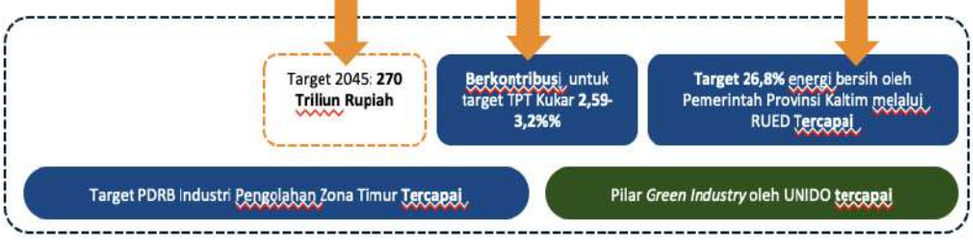

2. Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di SEPARI SEJAHTERA.

Dengan ditetapkannya Separi Sejahtera sebagai bagian dari kebijakan nasional maka dalam jangka menengah, disusun arah kebijakan berdasarkan aspek agroekowisata sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3.15

Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

Aspek Agroekowisata	Arah Kebijakan
Rekreasi	● Pengembangan Paket Wisata Tematik (Agro+Budaya+Alam), pengembangan wisata pertanian padi semi-subak (konsep Bali-Kutai) ● Pengembangan wisata atraksi alam yang dipadukan dengan lanskap perkebunan, pertanian kawasan melalui pengadaan jembatan gantung, perosotan, dan *walking path*/jalur sawah.
Edukasi	● Pengembangan wisata edukasi berbasis pengelolaan pertanian terintegrasi
Pelestarian Lingkungan	● Rehabilitasi lahan bekas tambang di Bukit Pariaman menjadi agroekowisata berbasis budaya dan pertanian. ● Penataan jalur wisata sawah, sarana edukatif, amenitas wisata, dan pemenuhan prasarana dasar berwawasan lingkungan.
Kearifan Lokal	● Penerapan langgam bangunan bercorak budaya kutai dan bali, serta *landmark*serta penanda kawasan yang khas budaya setempat untuk menguatkan citra kawasan dan rasa *sense of belonging*.
Pemanfaatan Ekonomi	● Pengembangan pusat pengelolaan produk pertanian terintegrasi. ● Penguatan UMKM lokal (kerajinan tangan, olahan keripik) melalui penyediaan pusat perdagangan skala WP-SWP dan fungsi campuran kawasan
Partisipasi Masyarakat dan Tata Kelola	● Pelatihan pengelolaan wisata dan pertanian ● Pelatihan pemandu wisata bagi pemuda desa. ● Pelatihan pengelolaan kawasan agroekowisata antar-desa. ● Penguatan kelembagaan Pokdarwis dan kelompok tani dalam pengembangan kawasan

3. Pembangunan Kawasan Sentra Perikanan Budidaya (Marangkayu-Muara Badak-Anggana)

Berdasarkan atas potensi pengembangan sentra perikanan di wilayah pesisir berikut indikasi kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan:

- Pengembangan dan Dukungan Infrastruktur:
  1. Pembangunan & Percepatan Pengoperasian *Hatchery* Udang Windu.
  2. Pemetaan & Legalisasi Lahan Potensial Budidaya & *Hatchery*
  3. Penataan Kawasan Budidaya & Tata Lingkungan.
  4. Penguatan Sistem Distribusi & Logistik Benih Udang.
  5. Revitalisasi Infrastruktur Tambak Udang & Rumput Laut.
- Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan
  1. Penguatan Kapasitas SDM Budidaya
  2. Penguatan Kelembagaan Koperasi/Kelompok
- Pemasaran dan Keberlanjutan Program
  1. Dukungan Pembiayaan Operasional Pabrik Rumput Laut
  2. Monitoring & Evaluasi Terpadu Tahunan
  3. Pengembangan Rantai Pasok Rumput Laut Berbasis Industri
  4. Peningkatan Akses Pasar & Promosi Hasil Budidaya

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Wilayah Zona Timur Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Sebulu, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Marang Kayu, Anggana, Sangasanga mencapai 5.433,50 km2 dan setara 20% luas wilayah dari total luas wilayah zona timur. Berikut ini potensi zona Timur yang disertai dengan permasalahan dan indikasi intervensi:

Tabel 3.16

Pemetaan Potensi Zona Timur

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Indikasi Lokasi Prioritas
Industri Hijau & Pengolahan	Biodiesel dari kelapa sawit	(1) Ketergantungan bahan baku CPO yang fluktuatif; (2) Infrastruktur logistik terbatas; (3) Limbah produksi belum tertangani optimal	Hilirisasi kelapa sawit berbasis biodiesel, penerapan *green industry* & *waste management*	Muara Badak, Marangkayu
	Karagenan dari rumput laut	(1) Pasokan bahan baku rumput laut tidak stabil; (2) Keterbatasan teknologi pengolahan; (3) Daya saing pasar rendah	Penguatan rantai pasok rumput laut, investasi teknologi pengolahan modern, diversifikasi produk	Muara Badak, Marangkayu
	Diammonium Phosphate (DAP)	(1) Ketergantungan impor bahan baku; (2) Tingginya biaya produksi; (3) Emisi & limbah kimia tinggi	Substitusi impor dengan bahan lokal, efisiensi energi, penerapan teknologi rendah emisi	Tenggarong Seberang
	Ammonium Nitrate	(1) Risiko keselamatan tinggi (bahan peledak); (2) Kebutuhan energi besar; (3) Potensi pencemaran lingkungan	Pengendalian ketat keselamatan industri, bauran energi bersih, teknologi pengurangan limbah	Sebulu, Muara Badak
Industri Penopang	Feronikel (existing)	(1) Produksi rendah dibanding potensi; (2) Ketergantungan energi fosil; (3) Dampak lingkungan tinggi	Transisi ke produksi hijau berbasis EBT, investasi upgrading teknologi	Marangkayu
Energi Baru Terbarukan (EBT)	Pembangkit listrik tenaga surya, angin, hidro	(1) Ketergantungan energi fosil masih dominan; (2) Keterbatasan infrastruktur transmisi; (3) Investasi awal tinggi	Penerapan target RUED Kaltim (26,8% energi bersih 2045), integrasi energi terbarukan di kawasan industri	Marangkayu, Muara Badak, Sebulu
Perikanan & Kelautan	Rumput laut, perikanan tangkap & budidaya	(1) Fluktuasi produksi; (2) Keterbatasan sarana penyimpanan & pengolahan; (3) Akses pasar lemah	Penguatan *cold storage*, diversifikasi produk olahan, penguatan akses pasar ekspor	Anggana, Muara Badak
Pertanian & Perkebunan	Kelapa sawit, padi, hortikultura	(1) Produktivitas menurun akibat degradasi lahan; (2) Keterbatasan irigasi; (3) Rantai distribusi belum efisien	Intensifikasi & diversifikasi pertanian, penguatan irigasi, modernisasi rantai pasok	Tenggarong Seberang, Sebulu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Transisi IKN

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah transisi menuju pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelum terbentuknya pemerintahan daerah khusus (Pemdasus) IKN, Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Mitra Pelayanan Publik, dengan tanggung jawab mendukung penyediaan layanan dasar seperti permukiman, transportasi, utilitas, pendidikan, dan kesehatan yang akan menopang pertumbuhan kawasan IKN. Hal ini selaras dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2022, di mana Kutai Kartanegara diarahkan untuk menyediakan infrastruktur pendukung serta menjadi penyangga logistik, pangan, energi, dan layanan sosial, sehingga transisi pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara geografis, beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara seperti Samboja dan Samboja Barat telah diposisikan sebagai daerah mitra utama IKN. Kedua wilayah ini memiliki keunggulan strategis karena kedekatannya dengan kawasan inti IKN sekaligus akses langsung ke jalur konektivitas menuju Balikpapan dan Samarinda. Arah kebijakan pembangunan di kawasan ini menitikberatkan pada pembentukan pusat layanan publik, pengembangan kawasan permukiman terintegrasi, serta peningkatan peran sebagai hub logistik dan transportasi. Selain itu, Samboja dan Samboja Barat juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi hijau, pariwisata, dan hilirisasi pertanian, sehingga mampu berperan ganda: mendukung kebutuhan langsung IKN sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Dengan demikian, peran Kutai Kartanegara sebagai daerah transisi IKN tidak hanya sebatas penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai mitra pembangunan strategis yang memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penetapan Samboja dan Samboja Barat sebagai bagian dari kawasan mitra IKN menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan pembangunan daerah dengan agenda nasional, sehingga Kutai Kartanegara dapat mengambil manfaat maksimal dari keberadaan IKN, baik dalam bentuk peningkatan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, maupun diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.3.5. Distribusi Program Prioritas Per Kecamatan Berdasarkan Arah Kebijakan Kewilayahan

Pembangunan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan secara tematik melalui pengembangan zona strategis yang menekankan potensi unggulan, penguatan sektor prioritas, dan integrasi dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.

1. Zona Utara

Zona utara difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berbasis perikanan air tawar serta pariwisata lokal. Kecamatan seperti Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, dan Tabang diarahkan untuk:

- Peningkatan produktivitas pertanian (padi dan ubi kayu).
- Penguatan sentra perikanan air tawar.
- Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi alam dan budaya.

Adapun targetnya terwujudnya lumbung pangan Daerah yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan, serta tumbuhnya ekonomi wisata berbasis kearifan lokal.

2. Zona Selatan

Zona selatan diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru, pusat permukiman, pertanian hortikultura, dan agrowisata. Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, dan Tenggarong menjadi titik pertumbuhan utama dengan fokus pada:

- Pembangunan pusat perkotaan baru (Loa Janan Ulu, Jongkang, Loa Ipuh Darat-Jonggon).
- Penyediaan kawasan permukiman perkotaan terencana.
- Pengembangan pertanian hortikultura terpadu dan perikanan air tawar.
- Pariwisata perkotaan dan agrowisata.

Adapun targetnya yaitu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan perkotaan baru yang mendukung IKN, penguatan pangan hortikultura, serta pengembangan pariwisata modern.

3. Zona Timur

Zona Timur diarahkan menjadi pusat industri hijau, energi baru terbarukan, dan sentra kelautan serta perikanan. Kecamatan Anggana, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Sebulu, dan Tenggarong Seberang berfokus pada:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Kawasan sentra perikanan budidaya (udang, rumput laut, dan perikanan tangkap).
- Pengembangan industri hilirisasi kelapa sawit, rumput laut, dan amonium nitrat.
- Pengembangan energi baru terbarukan (listrik tenaga surya, angin, dan hidro).
- Penyelenggaraan SPAM regional dan pembangunan pelabuhan.

Adapun targetnya adalah tercapainya kawasan industri hijau yang berdaya saing, terbangunnya rantai pasok kelautan terpadu, serta dukungan infrastruktur energi dan logistik yang berkelanjutan.

4. Daerah Transisi IKN

Kecamatan Muara Jawa, Samboja dan Samboja Barat ditetapkan sebagai zona transisi Ibu Kota Negara (IKN) dengan fungsi sebagai penyangga strategis.

- Peningkatan infrastruktur dasar dan transportasi.
- Penataan ruang permukiman yang adaptif terhadap kebutuhan IKN.
- Pengembangan kawasan strategis sebagai daerah penopang pertumbuhan ekonomi baru.

Adapun targetnya adalah terciptanya kawasan transisi yang terintegrasi dengan IKN, serta menjadi pusat pelayanan dan permukiman yang modern sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berikut merupakan tabel distribusi program strategis per kecamatan.

Tabel 3.17

Distribusi Program Strategis Per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Program Strategis	Keterangan	Kode
A	Anggana	Kawasan Sentra perikanan budidaya	Zona Timur	A1
		Penataan Kawasan Budidaya & Tata Lingkungan	Zona Timur	A1
		Perikanan dan kelautan - rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya	Zona Timur	A3
B	Kembang Janggut	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
C	Kenohan	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
D	Kota Bangun	Prioritas pertanian - padi	Zona Utara	A3
		Prioritas pertanian - ubi kayu	Zona Utara	A3
		Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
E	Kota Bangun Darat	Prioritas pertanian - padi	Zona Utara	A3
		Prioritas pertanian - ubi kayu	Zona Utara	A3
		Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
F	Loa Janan	Kawasan Perkotaan Baru	Loa Janan Ulu	A3
		Kawasan permukiman perkotaan	Zona Selatan	A3
		Pertanian - padi hortikultura, perikanan air tawar	Zona Selatan	A3
G	Loa Kulu	Kawasan Perkotaan Baru	Jongkang	A3
		Kawasan permukiman perkotaan	Zona Selatan	A3
		Pertanian - padi hortikultura, Perikanan air tawar	Zona Selatan	A3
		Kawasan pariwisata agrowisata	Zona Selatan	A3
H	Marang Kayu	Industri hijau dan pengolahan- Biodiesel dari kelapa sawit	Zona Timur	A3
		Industri hijau dan pengolahan- Karagenan dari rumput laut	Zona Timur	A3
		Industri penopang - feronikel	Zona Timur	A3
		Energi Baru terbarukan - pembangkit listrik tenaga surya, angin, hidro	Zona Timur	A3
		Penyelenggaraan SPAM regional Marangkayu	Zona Timur	A2

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Nama Kecamatan	Program Strategis	Keterangan	Kode
I	Muara Badak	Kawasan Sentra perikanan budidaya	• Pembangunan & Percepatan Pengoperasian Hatchery Udang Windu • Penguatan Sistem Distribusi & Logistik Benih Udang • Pemetaan & Legalisasi Lahan Potensial Budidaya & Hatchery • Penguatan Kapasitas SDM Budidaya • Penguatan Kelembagaan Koperasi/Kelompok • Dukungan Pembiayaan Operasional Pabrik Rumput Laut • Peningkatan Akses Pasar & Promosi Hasil Budidaya • Monitoring & Evaluasi Terpadu Tahunan	A1
		Industri hijau dan pengolahan- Biodiesel dari kelapa sawit	Zona Timur	A3
		Industri hijau dan pengolahan- Karagenan dari rumput laut	Zona Timur	A3
		Industri hijau dan pengolahan- Amonium Nitrat	Zona Timur	A3
		Energi Baru terbarukan - pembangkit listrik tenaga surya, angin, hidro	Zona Timur	A3
		Perikanan dan kelautan - rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya	Zona Timur	A3
J	Muara Jawa	-	Masuk daerah transisi IKN	
		-	Masuk daerah transisi IKN	
K	Muara Kaman	Prioritas pertanian - padi	Zona Utara	A3
		Prioritas pertanian - ubi kayu	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
		Pembangunan pelabuhan tambat	Zona Utara	A2
L	Muara Muntai	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
M	Muara Wis	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
N	Sangasanga	Pengembangan Kawasan Industri Eksisting	Zona Timur	-
O	Sebulu	Industri hijau dan pengolahan- Amonium Nitrat	Zona Timur	A3
		Energi Baru terbarukan - pembangkit listrik tenaga surya, angin, hidro	Zona Timur	A3
		Pertanian dan perkebunan - kelapa sawit, padi, hortikultura	Zona Timur	A3
P	Tabang	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Nama Kecamatan	Program Strategis	Keterangan	Kode
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
		Kawasan *Heart of Borneo*	Zona Utara	A1
Q	Tenggarong	Kawasan Perkotaan Baru	Kawasan perkotaan Loa Ipuh Darat-Jonggon	A3
		Kawasan permukiman perkotaan	Zona Selatan	A3
		Pertanian - padi hortikultura, perikanan air tawar	Zona Selatan	A3
		Kawasan pariwisata - museum mulawarman kedaton	Zona Selatan	A3
R	Tenggarong Seberang	Pembangunan kawasan perdesaan prioritas		A1
		Industri hijau dan pengolahan- Diammonium Phosphate (DAP)	Zona Timur	A3
		Pertanian dan perkebunan - kelapa sawit, padi, hortikultura	Zona Timur	A3
		Pembangunan sekolah unggulan		A2
		Pembangunan kawasan perdesaan agro ekowisata separi sejahtera		A3
S	Samboja	-	Masuk daerah transisi IKN	
T	Samboja Barat	-	Masuk daerah transisi IKN	

Keterangan:

A1: Prioritas Nasional

A2: Prioritas Provinsi Kalimantan Timur

A3: Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan arah kebijakan kewilayahan secara utuh, dapat di sajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.7

Sebaran Program Strategis dalam Pendekatan Wilayah

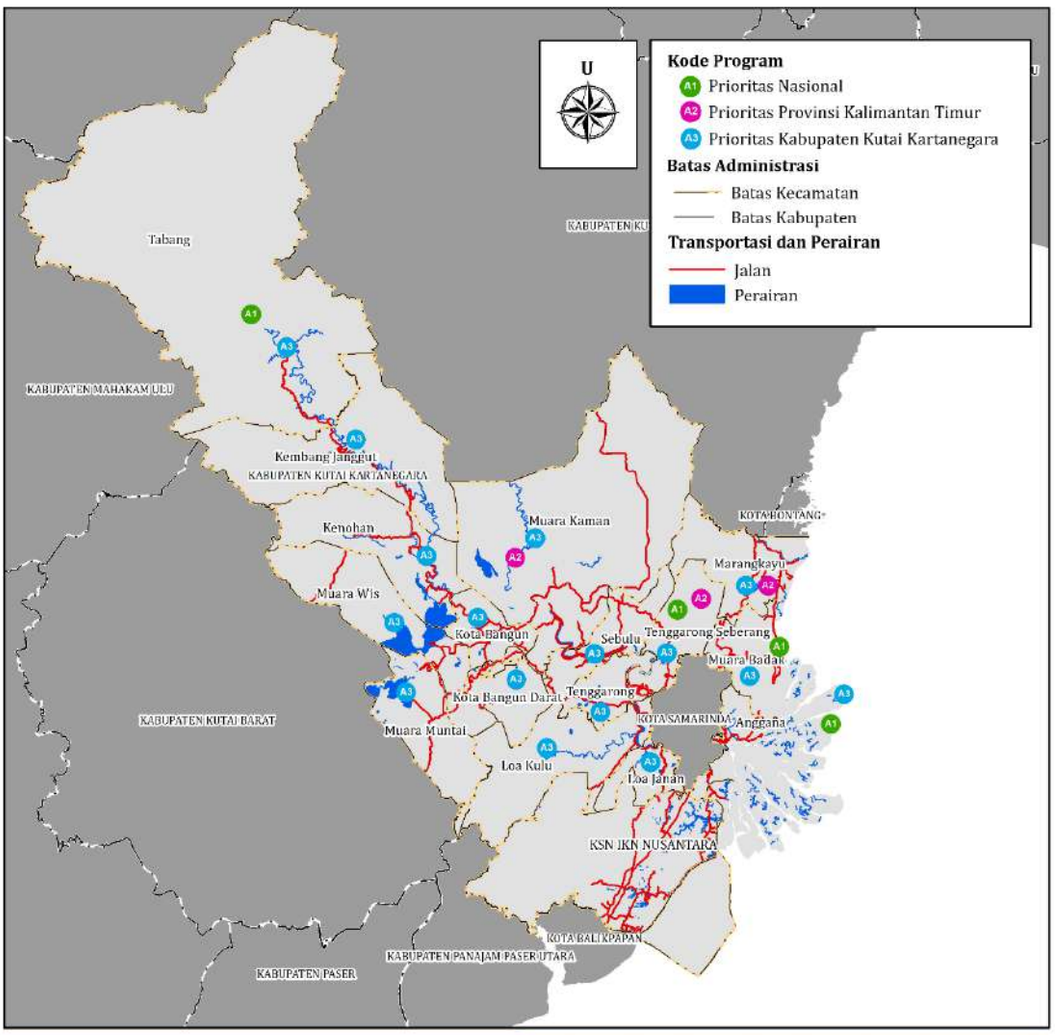

A1 - Prioritas Nasional

1. **Kawasan sentra perikanan budidaya**
   — Kecamatan Anggana dan Muara Badak
2. **Penataan kawasan budidaya dan tata lingkungan**
   — Kecamatan Anggana
3. **Kawasan heart of Borneo**
   — Kecamatan Tabang
4. **Pembangunan kawasan pedesaan prioritas**
   — Kecamatan Tenggarong Seberang

A2 - Prioritas Provinsi Kalimantan Timur

1. **Penyelenggaraan SPAM regional**
   — Kecamatan Marang Kayu
2. **Pembangunan pelabuhan tambak**
   — Kecamatan Muara Kaman
3. **Pembangunan sekolah unggulan**
   — Kecamatan Tenggarong Seberang
4. **Kawasan pedesaan agroekowisata**
   — Kecamatan Tenggarong Seberang

A3 - Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara

1. **Perikanan dan kelautan - rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya**
   — Kecamatan Anggana dan Muara Badak
2. **Prioritas perikanan air tawar**
   — Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, dan Tabang
3. **Prioritas pariwisata**
   — Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Muara Wis, Tabang, Tenggarong
4. **Prioritas pertanian dan perkebunan - padi, ubi kayu, dan kelapa sawit**
   — Kecamatan Bangun, Bangun Darat, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Kanan, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang
5. **Kawasan perkotaan baru**
   — Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, dan Tenggarong
6. **Kawasan permukimaan perkotaan**
   — Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, dan Tenggarong
7. **Industri hijau dan pengolahan - biodiesel dari kelapa sawit, keragenan dari rumput laut, amonium nitrat, Diammonium Phospate (DAP)**
   — Kecamatan Marang Kayu, Muara Badak, Sebulu, dan Tenggarong Seberang
8. **Industri penopang - feronikel**
   — Kecamatan Marang Kayu
9. **Energi baru terbarukan - Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Angin, Hidro**
   — Kecamatan Marang Kayu, Muara Badak, dan Sebulu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.3.6. Keterkaitan Indikasi Intervensi Provinsi Kalimantan Timur dengan Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikasi Intervensi Provinsi Kalimantan Timur dengan Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian integral dari penyusunan RPJMD yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan lintas tingkat pemerintahan. Indikasi intervensi ini disusun sebagai bentuk sinkronisasi arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pelaksanaan pembangunan Daerah dapat berjalan selaras, terarah, dan berdaya ungkit tinggi. Penyelarasan ini diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan, serta memperkuat peran Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur secara berkelanjutan. Berikut merupakan tabel keterkaitan Indikasi Intervensi Provinsi Kalimantan Timur dengan Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 3.18

Indikasi Intervensi Provinsi Kalimantan Timur dengan Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi	Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan	Aspek	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bantuan permodalan, peralatan dan pembinaan UMKM secara terpadu	Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil	Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.62	5,63-5,70	5,98-6,05	6,30-6,37	6,67-6,74	7,06-7,13	7,50-7,71
		Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil		PDRB Per Kapita	Juta	259.19	271,53 - 271,71	287,89 - 288,27	308,51 - 309,12	333,93 - 334,81	364,91 - 366,11	402,83 - 404,53
2	Kemitraan pelaku industri dengan UMKM	Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki)										
3	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Pakan Ternak dan Pabrik Minyak Goreng	Hilirisasi kelapa sawit berbasis biodiesel, penerapan green industry & waste management										
4	Pengembangan kawasan tanaman pisang kepok (grecek)	Penyediaan sarpras penunjang pertanian										
5	Pengembangan distribusi logistik terpadu barang kebutuhan pokok	peningkatan peran sebagai hub logistik dan transportasi										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi	Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan	Aspek	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Revitalisasi tambak tradisional menjadi tambak modern berkelanjutan	Peningkatan kualitas tambak daerah, penguatan rantai pasok rumput laut, investasi teknologi pengolahan modern, diversifikasi produk										
7	Pengembangan sentra budidaya perikanan pesisir (udang vaname, bandeng, rumput laut)	Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu										
		Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya air tawar berbasis keramba										
		Penguatan cold storage, diversifikasi produk olahan, penguatan akses pasar ekspor										
8	Pengembangan kawasan tanaman kakao, kopi, aren, dan karet	Pengembangan kawasan tanaman kakao, kopi, aren, dan karet yang terintegrasi										
9	Penyediaan infrastruktur pertanian untuk mendukung ketahanan pangan	Perluasan lahan pertanian pada lahan potensial										
		Penyediaan sarpras penunjang pertanian										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi	Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan	Aspek	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Intensifikasi lahan pertanian untuk komoditas padi di zona utara melalui perluasan lahan pertanian pada lahan potensial										
		Penguatan kawasan pangan, revitalisasi irigasi, ekstensifikasi lahan sawah teknis, penerapan pertanian modern										
		Intensifikasi & diversifikasi pertanian, penguatan irigasi, modernisasi rantai pasok										
10	Pengembangan kawasan sentra pangan terpadu (padi dan jagung)	Pemanfaatan lahan dengan dua (2) masa tanam padi dan diselingi satu (1) masa tanam palawija/jagung										
11	Pengembangan dermaga sungai	Revitalisasi dermaga sungai mahakam										
12	Pembangunan pelabuhan tambat	Revitalisasi dermaga sungai mahakam										
13	Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan rumput laut	Peningkatan kualitas tambak daerah, penguatan rantai pasok rumput laut, investasi teknologi pengolahan modern, diversifikasi produk										
14	Pengembangan ekonomi kreatif (kuliner, kriya, seni pertunjukan, dokumenter, dll)	Pengembangan destinasi unggulan (waterfront city, wisata budaya Kutai),										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi	Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan	Aspek	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi & integrasi dengan jalur IKN-Samarinda-Balikpapan										
15	Pengembangan ekowisata Pulau Kumala, Bukit Bengkirai, Danau Semayang, dll	Pengembangan destinasi unggulan (waterfront city, wisata budaya Kutai), pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi & integrasi dengan jalur IKN-Samarinda-Balikpapan										
16	Festival budaya dan edukasi (Erau, adat kerajaan Kutai, tarian, seni pertunjukan, dll)	Pengembangan destinasi unggulan (waterfront city, wisata budaya Kutai), pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi & integrasi dengan jalur IKN-Samarinda-Balikpapan										
17	Pengembangan Desa Wisata Kedang Ipil, Pela, Enggelam, Samboja, Muara Badak, dll	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antar objek wisata, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas pelayanan wisata										
		Pengembangan wisata yang unik, bertema khusus, dan menyasar segmen pasar tertentu										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi	Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan	Aspek	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Memperkuat sektor ekonomi hijau, pariwisata, dan hilirisasi pertanian										
19	Pembangunan instalasi biogas program PDKT	Memperkuat sektor ekonomi hijau, pariwisata, dan hilirisasi pertanian										
20	Penguatan pembangunan Kawasan Perdesaan Agroekowisata Separi Sejahtera	Memperkuat sektor ekonomi hijau, pariwisata, dan hilirisasi pertanian										
21	Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH)	Penyediaan sarpras penunjang pertanian										
22	Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Penguatan tata kelola manajemen dan administrasi penanaman modal daerah										
23	Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Penguatan tata kelola manajemen dan administrasi penanaman modal daerah										
24	Peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan	Pengembangan destinasi unggulan (waterfront city, wisata budaya Kutai), pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi & integrasi dengan jalur IKN-Samarinda-Balikpapan										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi	Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan	Aspek	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
25	Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kabupaten Kutai Kartanegara–Kutai Barat	Peningkatan produksi pangan nabati; dan peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik										
26	Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Pengembangan destinasi unggulan (waterfront city, wisata budaya Kutai), pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi & integrasi dengan jalur IKN-Samarinda-Balikpapan										
27	Pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Peningkatan akses rumah layak huni dan permukiman yang sehat	Sosial	Tingkat Kemiskinan	%	7.28	6.72	6,15-6,59	5,80-6,24	5,46-5,90	5,13-5,97	4,80-5,24
28	Pemberian bantuan biaya uang kuliah tunggal dan beasiswa S1/S2/S3/Profesi	Akselerasi kualitas SDM seluruh masyarakat Kutai Kartanegara		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.11	3,85-4,00	3,67-3,83	3,50-3,66	3,33-3,49	3,16-3,33	3,00-3,18
29	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni dan permukiman yang sehat		Rasio Gini	Rasio	0.307	0,285-0,301	0,281-0,297	0,277-0,293	0,273-0,290	0,269-0,286	0,265-0,282
30	Peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga	Akselerasi kualitas SDM seluruh masyarakat Kutai Kartanegara										
31	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan provinsi	Peningkatan akses rumah layak huni dan permukiman yang sehat										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi	Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan	Aspek	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
32	Pembangunan jaringan distribusi listrik	Pembangunan kawasan perkotaan baru (compact city & waterfront city), pengembangan jaringan utilitas, peningkatan kualitas permukiman eksisting										
		Penerapan target RUED Kaltim (26,8% energi bersih 2045), integrasi energi terbarukan di kawasan industri										
33	Peningkatan layanan air minum dan sanitasi	Pembangunan kawasan perkotaan baru (compact city & waterfront city), pengembangan jaringan utilitas, peningkatan kualitas permukiman eksisting										
34	Pengendalian banjir	Pembangunan kawasan perkotaan baru (compact city & waterfront city), pengembangan jaringan utilitas, peningkatan kualitas permukiman eksisting										
35	Penyediaan/perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan kawasan perkotaan baru (compact city & waterfront city), pengembangan jaringan utilitas, peningkatan kualitas permukiman eksisting										

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi	Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan	Aspek	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Pembentukan pusat layanan publik										
		Pengembangan kawasan permukiman terintegrasi										
36	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mahakam	Pembangunan kawasan perkotaan baru (compact city & waterfront city), pengembangan jaringan utilitas, peningkatan kualitas permukiman eksisting										
37	Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas kesehatan di wilayah dengan akses terbatas	SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.57	76.86	77.37	77.85	78.34	78.9	79.41
38	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas kesehatan di wilayah dengan akses terbatas										
39	Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas	Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas kesehatan di wilayah dengan akses terbatas										
40	Peningkatan biaya operasional sekolah	Akselerasi kualitas SDM seluruh masyarakat Kutai Kartanegara										
41	Pemberian seragam sekolah gratis	Akselerasi kualitas SDM seluruh masyarakat Kutai Kartanegara										
42	Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan	Akselerasi kualitas SDM seluruh										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi	Indikasi Intervensi Kebijakan Kewilayahan	Aspek	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		masyarakat Kutai Kartanegara										
43	Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah	Akselerasi kualitas SDM seluruh masyarakat Kutai Kartanegara										
44	Revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah	Akselerasi kualitas SDM seluruh masyarakat Kutai Kartanegara										
45	Pembangunan sekolah unggulan SMAN 3 Tenggarong	Akselerasi kualitas SDM seluruh masyarakat Kutai Kartanegara										
46	Penyediaan internet gratis di setiap desa	Akselerasi kualitas SDM seluruh masyarakat Kutai Kartanegara										
47	Pemberian penghargaan perjalanan suci kepada petugas rumah ibadah	Akselerasi kualitas SDM seluruh masyarakat Kutai Kartanegara										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan Daerah serta program Perangkat Daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif program guna mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah, dengan memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai periodesasi RPJMD.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan Daerah untuk periode tahun 2025-2029, sedangkan belanja Daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada program-program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2030. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

Rumusan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya. Pada RPJMD ini, Pagu Indikatif yang tertera telah sesuai dengan kapasitas keuangan Daerah. Berikut *outcome* dan program Perangkat Daerah yang disertai target indikator dan pendanaan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 4.1
Program, Target dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026-2030

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.042.751.534.403		4.010.436.018.165		4.087.015.015.269		4.142.230.581.656		4.200.349.170.675	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.456.864.943.951		1.552.414.943.552		1.577.237.280.588		1.613.695.505.291		1.654.430.531.380	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				1.456.864.943.951		1.552.414.943.552		1.577.237.280.588		1.613.695.505.291		1.654.430.531.380	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				920.213.719.384		927.438.719.384		932.861.056.421		927.438.719.384		927.438.719.384	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	61,83	73,5		74		74,5		75		75,5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				533.131.224.567		617.356.224.168		636.756.224.167		678.636.785.907		719.371.811.996	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatknya Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar peserta Didik	Skor kemampuan literasi SD/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	70,98	71,01		71,04		71,07		71,1		71,13		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Skor kemampuan numerasi SD/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	63,42	66,42		69,42		72,42		75,42		78,42		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Skor kemampuan literasi SMP/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	81,45	84,45		87,45		90,45		93,45		96,45		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Skor kemampuan numerasi SMP/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	75,82	78,82		81,82		84,82		87,82		90,82		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase PAUD yang mendapatkan Akreditasi B (Dengan Satuan:Persen)	47,36	49,72		49,92		50,12		50,32		50,52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Menimgkatnya Kualitas dan pemerataan layanan Pendidikan	Indeks Iklim Keamanan PAUD (Dengan Satuan:Persen)	65,56	68,54		68,74		68,94		69,14		69,34		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Iklim Keamanan SD/Sedrajat (Dengan Satuan:Persen)	70,87	70,15		71,15		71,35		71,55		71,75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Iklim Keamanan SMP/Sedrajat (Dengan Satuan:Persen)	69,71	70,37		70,57		70,77		70,97		71,17		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Iklim Kebhinekaan SD/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	70,79	68,59		71,99		72,19		72,39		72,59		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	73,12	70,79		73,22		73,52		73,72		73,92		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Iklim Inklusivitas SD/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	53,59	55,09		55,39		55,59		55,79		55,99		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Iklim Inklusivitas	56,46	57,32		57,52		57,72		57,92		58,12		Dinas Pendidikan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		SMP/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)												dan Kebudayaan
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik	APM PAUD 5-6 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	86,38	65,71		86,41		86,61		86,81		87,31		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS PAUD 5-6 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	60,51	74,34		74,54		74,74		74,94		75,34		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SD/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	105,06	105,49		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMP/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	104,74	104,18		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD/Sederajat 7-12 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	95,99	95,73		96,00		96,21		96,41		96,81		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS SD/Sederajat 7-12 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	99,78	99,6		99,78		99,78		99,78		99,78		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SMP/Sederajat 13-15 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	81,00	81,33		81,53		81,73		81,93		82,13		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS SMP/Sederajat 13-15 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	99,46	98,28		99,46		99,56		99,66		99,76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS Kesetaraan 7-18 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	18,10	25,53		27,53		28,53		29,53		30,53		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				1.720.000.000		5.520.000.000		5.520.000.000		5.520.000.000		5.520.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru PAUD (Dengan Satuan:Indeks)	0,27	0,56		0,76		0,96		1,16		1,36		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Distribusi Guru SD (Dengan Satuan:Indeks)	0,38	0,72		0,92		1,12		1,32		1,52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Distribusi Guru SMP (Dengan Satuan:Indeks)	0,27	0,72		0,92		1,12		1,32		1,52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PAUD (Dengan Satuan:Persen)	28,69	34,5		35,5		36,5		37,5		38,5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD (Dengan Satuan:Persen)	36,04	62,89		63,89		64,89		65,89		66,89		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	36,94	47,5		48,5		49,5		50,5		51,5		Dinas Pendidikan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		SMP (Dengan Satuan:Persen)												dan Kebudayaan
		Persentase Guru PAUD yang memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah D.4 atau S.1 (Dengan Satuan:Persen)	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				530.000.000		680.000.000		680.000.000		680.000.000		680.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				820.000.000		970.000.000		970.000.000		970.000.000		970.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Pengembangan Bahasa dan Sastra (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.327.442.538.847		1.209.161.992.556		1.221.957.883.176		1.236.491.720.677		1.250.280.108.558	
	DINAS KESEHATAN				1.327.442.538.847		1.209.161.992.556		1.221.957.883.176		1.236.491.720.677		1.250.280.108.558	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				881.810.047.948		936.556.732.748		944.256.728.199		958.110.046.210		966.809.829.534	Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75,12	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
		Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit (Dengan Satuan:Nilai)	82,6	82,75		83		83,25		83,5		84		Dinas Kesehatan
		Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti (Dengan Satuan:Nilai)	86,6	89,66		92,72		95,78		98,84		100		Dinas Kesehatan
		Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja (Dengan Satuan:Nilai)	79,4	80,5		81		81,5		82		83		Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				432.027.490.899		261.495.259.808		266.591.154.976		267.271.674.467		272.360.279.024	Dinas Kesehatan
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (Dengan Satuan:Persen)	1,56	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	7,2	12,2		14,7		17,2		22,2		24,7		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (Dengan Satuan:Persen)	43,42	40,11		36,79		33,48		30,16		26,85		Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	58,83	60		65		70		75		80		Dinas Kesehatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)												
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	84,5	84,5		85,5		86,5		87,5		88		Dinas Kesehatan
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (Dengan Satuan:Persen)	70	80		85		90		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Dengan Satuan:Persen)	83	83		83		86		86		86		Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	80	80		85		90		95		100		Dinas Kesehatan
		Persentase lanjut usia yang mandiri (Dengan Satuan:Persen)	82,78	77		79		81		83		85		Dinas Kesehatan
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (Dengan Satuan:Persen)	7,7	11,40		10,40		9,4		8,4		7,4		Dinas Kesehatan

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan penemuan kasus TB (Dengan Satuan:Persen)	70,6	80		85		90		91		91		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	92	92		93		93		94		95		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi buruk) pada balita (Dengan Satuan:Persen)	9	9		8,5		8		7,5		7		Dinas Kesehatan
		Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes (Dengan Satuan:Persen)	50	70		80		90		100		100		Dinas Kesehatan
		Insidensi Stunting Balita (kasus baru) (Dengan Satuan:Persen)	0	2,3		1,7		1,3		1		1		Dinas Kesehatan
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (Dengan Satuan:Angka)	388	326		278		244		219		199		Dinas Kesehatan
		Eliminasi Kusta (Dengan Satuan:Persen)	0,3	0,2		0,15		0,1		0,05		0,01		Dinas Kesehatan
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				4.350.000.000		3.780.000.000		3.780.000.000		3.780.000.000		3.780.000.000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Dengan Satuan:Per 1000)	3,77	4,35		4,59		4,81		5,01		5,2		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	44,44	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	66,67	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				730.000.000		730.000.000		730.000.000		730.000.000		730.000.000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Dengan Satuan:Persen)	98,8	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase penerbitan dan	72	72		74		76		78		80		Dinas Kesehatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)												
		Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (Dengan Satuan:Persen)	75	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	70	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Kesehatan
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				8.525.000.000		6.600.000.000		6.600.000.000		6.600.000.000		6.600.000.000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Dengan Satuan:Persen)	0	35		45		64		80		100		Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Kemitraan atau kerjasama yang terlaksana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				925.461.523.485		636.424.389.939		616.731.979.822		605.094.834.579		608.567.269.561	
	DINAS PEKERJAAN UMUM				712.181.023.485		577.319.389.939		469.063.970.822		457.242.725.579		459.765.160.561	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				47.644.658.111		56.784.138.659		58.172.750.479		58.184.652.979		58.198.340.854	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72,47	77,05		77,1		77,15		77,2		77,25		Dinas Pekerjaan Umum
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				45.312.170.934		60.404.727.034		34.276.245.143		30.582.333.578		30.548.046.404	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (Dengan Satuan:Persen)	17,24	29,46		32,19		35,10		37,06		39,06		Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi (Dengan Satuan:Persen)	2,82	6,94		8,60		8,60		8,60		8,60		Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya layanan irigasi dalam kondisi baik	Persentase luas layanan irigasi dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	70,11	73,53		74,33		75,23		75,95		76,68		Dinas Pekerjaan Umum
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				48.750.000.000		34.287.629.313		37.789.117.465		26.856.903.963		27.805.869.377	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	N/A	6,93		11,81		17,18		21		24,95		Dinas Pekerjaan Umum
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				20.993.501.200		17.206.732.073		14.167.969.809		13.836.136.970		13.906.735.723	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	61,29	62,37		62,90		63,44		63,98		64,52		Dinas Pekerjaan Umum
	Terpenuhinya kepatuhan masyarakat terhadap PBG dan SLF di kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				136.699.437.240		46.951.851.183		24.835.220.574		30.208.519.524		29.653.979.071	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata (Dengan Satuan:Persen)	69,75	71		71,38		71,75		72,13		72,5		Dinas Pekerjaan Umum

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				408.616.256.000		358.585.837.243		297.347.741.600		295.029.455.551		297.096.821.873	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Dengan Satuan:Persen)	63,198	65,981		65,48		66,484		67,23		67,79		Dinas Pekerjaan Umum
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				4.165.000.000		3.098.474.435		2.474.925.753		2.544.723.014		2.555.367.258	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Bersertifikat (Dengan Satuan:Persen)	3,43	5,17		6,39		7,22		8,06		8,92		Dinas Pekerjaan Umum
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				208.255.500.000		52.905.000.000		141.668.009.000		142.502.109.000		142.502.109.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				130.828.000.000		50.775.000.000		112.528.000.000		113.970.000.000		113.970.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten (Dengan Satuan:Persen)	80,2	84,78		87,28		89,84		92,49		96,11		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN				77.427.500.000		2.130.000.000		29.140.009.000		28.532.109.000		28.532.109.000	Dinas Perumahan

BerAKHLAK Bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya rumah yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Dengan Satuan:Persen)	89,1	98,94		99,16		99,3		99,38		99,4		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG				5.025.000.000		6.200.000.000		6.000.000.000		5.350.000.000		6.300.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5.025.000.000		6.200.000.000		6.000.000.000		5.350.000.000		6.300.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas penyelenggaran penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (Dengan Satuan:Persen)	58.2	68.87		76.96		84.8		91.78		100		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				173.620.185.757		452.217.401.871		505.114.955.264		507.459.610.021		496.927.045.003	
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				173.620.185.757		452.217.401.871		505.114.955.264		507.459.610.021		496.927.045.003	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.882.935.757		36.546.331.853		36.896.331.853		38.396.331.853		38.396.331.853	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip (Dengan Satuan:Nilai)	70,12	70,5		71		71,5		72		72,5		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				43.201.000.000		71.595.000.000		46.795.000.000		46.395.000.000		46.395.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bancana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni (Dengan Satuan:persen)	100	13		40		60		80		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				4.875.000.000		4.850.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang tertangani	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupten yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	77,42	43,66		60,56		77,46		88,73		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				40.300.000.000		50.667.500.000		50.667.500.000		50.667.500.000		50.667.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani (Dengan Satuan:Persen)	43,56	53,90		65,43		76,95		88,48		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA				52.286.250.000		287.558.570.018		365.156.123.411		366.400.778.168		355.868.213.150	Dinas Perumahan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN UTILITAS UMUM (PSU)													dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (Dengan Satuan:Persen)	16,03	46,41		54,85		63,29		71,73		80,17		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				75.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU (Dengan Satuan:Persen)	n.a	11,76		17,65		23,53		29,41		35,29		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				122.243.961.864		119.055.920.641		123.343.185.811		133.812.694.066		141.602.140.650	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				39.679.659.345		40.536.106.166		42.115.934.762		45.333.933.405		47.887.509.560	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36.836.573.345		34.176.106.166		35.955.934.762		33.934.079.153		36.249.269.560	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	66,29	67		68		69		70		71		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.843.086.000		6.360.000.000		6.160.000.000		11.399.854.252		11.638.240.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase anggota SATPOL PP yang dilatih (Dengan Satuan:Persen)	1,16	20		40		60		80		80		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kapasitas SDM Sat linmas	Persentase anggota SATLINMAS yang dilatih (Dengan Satuan:Persen)	0	20		40		60		80		80		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Dengan Satuan:Persen)	64	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kompetensi PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persen)	0	20		40		60		80		80		Satuan Polisi Pamong Praja
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				24.447.757.748		23.800.200.611		25.385.763.004		28.564.517.761		31.086.952.743	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.282.757.748		18.439.450.293		18.950.763.004		22.231.210.306		24.801.952.743	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	64,62	72,5		72,52		72,54		72,56		72,58		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.165.000.000		5.360.750.318		6.435.000.000		6.333.307.455		6.285.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				46.381.516.166		41.578.801.948		43.164.364.341		46.343.119.098		48.865.554.080	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				40.363.016.166		39.133.801.948		40.439.364.341		43.198.119.098		45.470.554.080	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	46,31	60		62		64		66		68		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				6.018.500.000		2.445.000.000		2.725.000.000		3.145.000.000		3.395.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya sarana prasarana penyelamatan dan kebakaran	Cakupan sarana prasarana penyelamatan dan kebakaran sesuai standar dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	64	66		68		70		72		74		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi "korban kebakaran"	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				11.735.028.605		13.140.811.917		12.677.123.703		13.571.123.802		13.762.124.267	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.735.028.605		13.140.811.917		12.677.123.703		13.571.123.802		13.762.124.267	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75,34	77		78		79		80		81		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37.118.380.499		41.161.369.607		42.629.730.607		45.676.217.022		48.542.075.522	
	DINAS SOSIAL				37.118.380.499		41.161.369.607		42.629.730.607		45.676.217.022		48.542.075.522	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.387.210.499		17.399.099.607		17.608.210.607		16.529.697.022		17.780.555.522	Dinas Sosial
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73,57	75,00		80,00		80,50		81,00		81,50		Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				7.058.800.000		7.358.800.000		7.958.800.000		7.958.800.000		10.558.800.000	Dinas Sosial
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persen)	37,50	62,50		70,80		79,80		91,60		100		Dinas Sosial

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persen)	60,61	68,10		76,00		83,70		93,60		100		Dinas Sosial
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Sosial
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				5.693.370.000		7.933.720.000		8.483.720.000		9.083.720.000		9.583.720.000	Dinas Sosial
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3.904.000.000		6.294.750.000		5.979.000.000		7.604.000.000		8.044.000.000	Dinas Sosial
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Dengan Satuan:Persen)	80	98,15		98,30		98,45		98,60		98,75		Dinas Sosial
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Dengan Satuan:Persen)	n/a	6,54		9,82		13,09		16,36		19,63		Dinas Sosial

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Dengan Satuan:Persen)	n/a	6,54		9,82		13,09		16,36		19,63		Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.550.000.000		1.800.000.000		2.225.000.000		2.150.000.000		2.200.000.000	Dinas Sosial
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (Dengan Satuan:Persen)	n/a	7,02		14,04		17,54		21,05		24,56		Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				3.500.000.000		325.000.000		325.000.000		2.300.000.000		325.000.000	Dinas Sosial

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				805.326.648.807		622.694.217.301		640.761.603.241		653.621.776.466		694.207.453.897	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				33.269.494.450		40.259.452.768		41.820.015.161		44.548.769.918		47.735.482.769	
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				33.269.494.450		40.259.452.768		41.820.015.161		44.548.769.918		47.735.482.769	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.039.494.450		18.855.732.768		18.735.505.607		18.928.184.918		20.334.277.769	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	70,92	72,26		72,76		73,26		73,76		74,26		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		550.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				4.150.000.000		6.462.020.000		6.549.525.000		8.233.885.000		8.664.505.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya (Dengan Satuan:Persen)	21,79	22,93		23,12		23,47		23,78		24,07		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				3.405.000.000		3.050.000.000		4.240.284.554		5.150.000.000		6.050.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Dengan Satuan:Persen)	18,05	24,43		26,85		29,00		30,93		32,66		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				10.600.000.000		11.741.700.000		12.144.700.000		12.086.700.000		12.136.700.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				15.094.373.547		20.122.244.765		21.625.008.551		24.686.031.650		28.443.598.852	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				15.094.373.547		20.122.244.765		21.625.008.551		24.686.031.650		28.443.598.852	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.944.373.547		12.247.244.765		12.475.008.551		14.786.031.650		16.093.598.852	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	58,89	71		71,5		71,8		72		73		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.400.000.000		2.150.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		2.450.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Dengan Satuan:Persen)	18,74	25,99		35		40		45		45		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				925.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				300.000.000		925.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		2.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	15	25		30		35		40		45		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				50.000.000		150.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender (Dengan Satuan:Persen)	53,45	65,52		75,86		82,76		89,66		100,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				275.000.000		1.000.000.000		1.150.000.000		1.550.000.000		2.150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak (Dengan Satuan:Nilai)	690	710		750		800		850		880		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.200.000.000		1.800.000.000		2.550.000.000		2.700.000.000		3.650.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pencegahan dan	Persentase Anak Memerlukan	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:Persen)												Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				52.868.585.612		32.092.118.569		33.721.947.165		36.939.945.808		38.164.966.226	
	DINAS KETAHANAN PANGAN				52.868.585.612		32.092.118.569		33.721.947.165		36.939.945.808		38.164.966.226	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.775.265.612		13.342.118.569		13.976.947.165		14.334.945.808		14.222.466.226	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	66,94	69		70,00		71,00		72,00		73,00		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				15.770.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		6.700.000.000		6.900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	200	100		100		100		100		100		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI				19.087.960.000		10.800.000.000		11.270.000.000		12.155.000.000		12.992.500.000	Dinas Ketahanan Pangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola pangan Harapan (Dengan Satuan:Skor)	93,8	94		94,50		95,00		95,50		96,00		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				2.200.000.000		1.700.000.000		2.100.000.000		2.550.000.000		2.800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan (Dengan Satuan:Persen)	7,30	5,90		5,06		4,22		3,38		3		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				4.035.360.000		950.000.000		1.075.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Dengan Satuan:Persen)	91,50	72,28		73,79		74,80		75,82		76,83		Dinas Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				44.689.753.689		21.044.223.651		21.289.188.830		24.682.480.272		27.396.623.955	
	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG				44.689.753.689		21.044.223.651		21.289.188.830		24.682.480.272		27.396.623.955	
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.367.021.505		16.144.223.651		17.330.499.404		19.785.534.225		22.471.623.955	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75.57	77.75		77.80		77,85		77,9		78		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang Efektif dan Efesien													
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				1.600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase kasus tanah garapan yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	73	82		89		89		89		100		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				22.972.732.184		2.000.000.000		1.183.689.426		2.071.946.047		2.000.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya tertib administrasi pengadaan tanah	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Dengan Satuan:Persen)	60	70		70		80		90		100		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				650.000.000		375.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase luas realisasi Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah	n/a	20		20		20		20		20		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		absentee (Dengan Satuan:Persen)												
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Terlaksananya penetapan tanah ulayat	Persentase Lokasi Tanah Ulayat yang diusulkan untuk ditetapkan (Dengan Satuan:Persen)	45	45		61		62		63		64		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				950.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya bidang Tanah Asset Pemda yang bersertipikat	Persentase luas realisasi Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Dengan Satuan:Persen)	17,75	19,99		21,19		22		23,25		24,28		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				500.000.000		500.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya tertib administrasi pemberian izin membuka tanah	Persentase permohonan izin membuka tanah /dan atau surat tanah yang diterbitkan Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				650.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah yang dilakukan Penatagunaan (Dengan Satuan:Persen)	78	80		81		82		83		84		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya nilai tanah yang telah dipetakan	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dipetakan (Dengan Satuan:Persen)	29	45		50		60		70		80		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				211.818.710.838		108.145.842.481		109.831.404.874		83.030.159.631		84.224.038.876	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				211.818.710.838		108.145.842.481		109.831.404.874		83.030.159.631		84.224.038.876	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.341.593.838		21.038.383.542		21.271.276.534		20.638.383.542		20.893.720.942	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69,76	70,52		72,56		73,25		73,45		73,55		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				800.000.000		700.000.000		500.000.000		0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				4.882.611.000		3.820.000.000		3.870.000.000		3.895.000.000		4.220.916.994	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya status mutu lingkungan perairan	Indeks Pencemaran Air (Dengan Satuan:Indeks)	2,24	4		3,74		3,5		3,25		3		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya status mutu udara	Indeks Pencemaran Udara (Dengan Satuan:Indeks)	0,23	0,229		1,75		1,5		1,25		1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				9.198.506.000		8.448.506.000		8.598.506.000		8.498.506.000		8.448.506.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Dengan Satuan:Persen)	0,37	0,39		0,40		0,41		0,42		0,43		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				475.000.000		400.000.000		400.000.000		475.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN				180.000.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000		800.000.000	Dinas Lingkungan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU (Dengan Satuan:Persentase)	45,37	20,00		20,83		21,67		22,50		23,33		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				75.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		240.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Persentase)	n.a	1		1		1		1		1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN				480.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang meningkat Pemahamannya terhadap Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persentase)	35	40		40		40		40		40		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				200.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				280.000.000		430.000.000		430.000.000		430.000.000		480.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana (Dengan Satuan:Persentase)	100	84		89		89		89		89		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				171.906.000.000		71.268.952.939		72.596.622.340		46.903.270.089		47.340.894.940	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Dengan Satuan:Indeks)	39,90	55		57		60		61		62		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				16.629.598.801		24.439.735.623		26.000.298.016		29.179.052.773		33.030.043.493	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				16.629.598.801		24.439.735.623		26.000.298.016		29.179.052.773		33.030.043.493	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.464.598.801		21.039.735.623		21.964.404.810		23.568.159.567		25.869.150.287	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP (Dengan Satuan:Nilai)	74,58	75		76		77		78		79		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				395.000.000		1.100.000.000		1.375.000.000		1.650.000.000		2.600.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el (Dengan Satuan:persen)	99,79	99,81		99,82		99,83		99,84		99,85		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu identitas Anak (KIA) (Dengan Satuan:persen)	68,01	85		90		95		99		99,4		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				420.000.000		1.300.000.000		1.410.893.206		1.410.893.206		1.410.893.206	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18	99, 68	99		99		99		99		99		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tahun (Dengan Satuan:persen)												
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (Dengan Satuan:persen)	70,46	73		76		79		82		85		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				250.000.000		700.000.000		950.000.000		1.800.000.000		2.300.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				100.000.000		300.000.000		300.000.000		750.000.000		850.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				66.871.585.511		100.335.258.800		102.009.736.408		104.015.634.480		105.406.920.761	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				66.871.585.511		100.335.258.800		102.009.736.408		104.015.634.480		105.406.920.761	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.753.414.441		19.523.533.840		21.265.002.182		21.360.002.182		21.360.002.182	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) (Dengan Satuan:Nilai)	78,65	78		80		82		84		85		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				2.550.000.000		775.000.000		2.600.000.000		4.238.188.428		2.150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Dengan Satuan:Persen)	29,16666667	50		66,66666667		83,33333333		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				435.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Dengan Satuan:Persen)	33,33333333	50		66,66666667		83,33333333		91,66666667		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				21.194.043.870		28.003.472.960		25.063.164.226		25.794.193.870		29.413.108.579	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Persen)	9,79	10,79		16,25		17,22		21,55		27,53		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				23.939.127.200		50.733.252.000		51.681.570.000		51.123.250.000		50.983.810.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) (Dengan Satuan:Persen)	98,12	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				17.092.873.076		22.648.750.422		24.171.514.208		27.282.537.307		31.140.104.509	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				17.092.873.076		22.648.750.422		24.171.514.208		27.282.537.307		31.140.104.509	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.983.073.076		12.140.324.190		12.140.324.190		12.140.324.190		12.140.324.190	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	59	62		65		68		71		74		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				900.000.000		3.426.000.000		3.926.944.018		4.947.404.372		6.199.928.319	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Dengan Satuan:Angka)	2,2	2,19		2,18		2,18		2,17		2,17		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Dengan Satuan:Angka)	25,8	25		24,6		24,3		23,9		23,6		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				2.075.000.000		3.656.426.232		4.177.123.000		5.247.404.373		6.599.926.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Dengan Satuan:Persen)	80,2	80,3		80,3		80,3		80,4		80,4		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Dengan Satuan:Persen)	14,7	10,7		9,6		8,9		8,4		8,1		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Dengan Satuan:Persen)	0,9	4,7		10,4		23,1		27		30		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN				4.134.800.000		3.426.000.000		3.927.123.000		4.947.404.372		6.199.926.000	Dinas Pengendalian

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS)	Indeks Pengasuhan Remaja (Dengan Satuan:Nilai)	90,4	91,4		91,8		92,2		92,6		93		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Lansia Berdaya (Dengan Satuan:Nilai)	56,5	58,2		59,1		59,9		60,7		61,4		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				115.094.761.856		64.731.818.383		63.062.107.610		63.690.276.769		66.648.688.168	
	DINAS PERHUBUNGAN				115.094.761.856		64.731.818.383		63.062.107.610		63.690.276.769		66.648.688.168	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				46.345.726.331		40.613.222.331		40.613.222.331		40.613.222.331		40.613.222.331	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP (Dengan Satuan:Nilai)	55,85	60		65		70		75		80		Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				62.274.035.525		17.643.596.052		15.973.885.279		16.602.054.438		19.560.465.837	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman	Konektivitas Darat (Dengan Satuan:Rasio)	0,038	0,113		0,188		0,263		0,3		0,3		Dinas Perhubungan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kelengkapan jalan berkeselamatan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (Dengan Satuan:Persen)	39,62	41,45		56,09		70,73		85,36		100		Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				6.475.000.000		6.475.000.000		6.475.000.000		6.475.000.000		6.475.000.000	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Sungai, Danau (Dengan Satuan:Rasio)	0,581	0,609		0,616		0,623		0,637		0,644		Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				51.298.010.636		50.651.332.968		51.119.506.503		54.151.408.002		57.573.154.841	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				51.298.010.636		50.651.332.968		51.119.506.503		54.151.408.002		57.573.154.841	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.584.422.466		28.368.863.242		28.524.921.085		29.535.554.924		30.676.137.203	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	66,17	75		78		80		81		82		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.155.000.000		1.939.440.778		2.095.498.624		3.106.132.454		4.246.714.734	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				20.558.588.170		20.343.028.948		20.499.086.794		21.509.720.624		22.650.302.904	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi intormatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				27.085.435.394		24.392.165.955		26.010.526.955		29.307.013.370		30.594.316.133	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				27.085.435.394		24.392.165.955		26.010.526.955		29.307.013.370		30.594.316.133	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.195.435.394		13.167.165.955		14.570.526.955		13.687.013.370		14.059.316.133	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya tata kelola dan akuntablitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	61,54	63,33		64,54		65		66,54		67,54		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				1.000.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Dengan Satuan:Persentase)	24,29	28,9		51,81		53,68		55,56		57,43		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				865.000.000		1.235.000.000		1.450.000.000		1.565.000.000		1.880.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat dan Cukup	19,71	24,67		25,45		26,11		26,67		27,69		Dinas Koperasi dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sehat (Dengan Satuan:Persen)												Usaha Kecil Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				650.000.000		650.000.000		650.000.000		870.000.000		870.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Dengan Satuan:Persen)	16,51	19,5		32,8		34,33		46,82		48,06		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				480.000.000		735.000.000		735.000.000		735.000.000		735.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Dengan Satuan:Persen)	51,82	53,28		54,74		56,2		58,39		60,58		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi (Dengan Satuan:Persen)	108,28	2		2		2,5		3		3		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				3.205.000.000		2.780.000.000		2.780.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari informal ke formal (Dengan Satuan:Persen)	74,21	75,69		76,53		77,38		78,22		79,06		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya ekosistem wirausaha skala mikro	Pertumbuhan Wirausaha (Dengan Satuan:Persen)	0,99	1,2		1,35		1,48		1,49		1,62		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				8.690.000.000		4.575.000.000		4.575.000.000		5.750.000.000		5.850.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan/atau Ekspor (Dengan Satuan:Persen)	2,04	5,30		5,48		6,20		6,13		6,07		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				23.534.440.481		26.006.463.819		26.835.831.784		29.543.659.910		33.020.956.558	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				23.534.440.481		26.006.463.819		26.835.831.784		29.543.659.910		33.020.956.558	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.934.440.481		18.786.463.819		19.735.927.864		22.025.512.532		23.177.237.320	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	78,54	79,33		79,72		80,12		80,52		80,93		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				2.500.000.000		1.075.000.000		1.705.000.000		1.868.147.378		3.676.219.238	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total investasi (Dengan Satuan:Rupiah (trilyun))	11,62	11,8		12,07		12,43		12,85		13,39		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Realisasi Total terhadap Target	105,8406719	74,87		75,98		77,67		79,93		82,58		Dinas Penanaman

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Investasi (Dengan Satuan:Persen)												Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.050.000.000		825.000.000		1.560.000.000		2.010.000.000		2.497.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (Dengan Satuan:Persentase)	75	80		83		85		88		90		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.300.000.000		1.495.000.000		1.535.000.000		1.665.000.000		1.820.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				750.000.000		825.000.000		900.000.000		975.000.000		1.050.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku	75	77		79		80		82		84		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		usaha dalam membuka usaha (Dengan Satuan:Persentase)												Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				1.000.000.000		3.000.000.000		1.399.903.920		1.000.000.000		800.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				86.099.615.063		30.651.044.466		32.256.606.859		35.435.361.616		36.629.240.861	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				86.099.615.063		30.651.044.466		32.256.606.859		35.435.361.616		36.629.240.861	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.819.615.063		19.656.044.466		20.511.606.859		20.440.361.616		20.415.082.861	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72,78	75		77		80		82		82		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				7.925.000.000		3.150.000.000		3.750.000.000		3.800.000.000		3.800.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Dengan Satuan:Persen)	0,76	1		1,25		1,5		1,75		2		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				50.985.000.000		6.525.000.000		6.675.000.000		9.875.000.000		11.094.158.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional (Dengan Satuan:Persen)	4,07	1,02		3,7		4,63		1,02		1,02		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (Dengan Satuan:Persen)	4,6	6,6		7,6		8,6		9,6		10,6		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.370.000.000		1.320.000.000		1.320.000.000		1.320.000.000		1.320.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan (Dengan Satuan:Persen)	80	82		84		86		88		90		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				2.281.000.000		2.065.440.778		2.221.498.624		3.232.132.454		4.372.714.734	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.281.000.000		2.065.440.778		2.221.498.624		3.232.132.454		4.372.714.734	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				2.281.000.000		2.065.440.778		2.221.498.624		3.232.132.454		4.372.714.734	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam	Indek Pembangunan Statistik (Dengan Satuan:Nilai)	2,31	2,6		2,6		3		3		2,9		Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)													
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.485.000.000		1.269.440.778		1.425.498.624		2.436.132.454		3.576.714.734	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.485.000.000		1.269.440.778		1.425.498.624		2.436.132.454		3.576.714.734	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:Persen)	0	26,78		44,64		71,42		89,28		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				15.090.000.000		23.500.579.817		25.500.579.817		26.500.579.817		27.500.579.818	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				15.090.000.000		23.500.579.817		25.500.579.817		26.500.579.817		27.500.579.818	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				9.500.000.000		15.510.579.817		17.510.579.817		18.510.579.817		19.510.579.818	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Dengan Satuan:Persentase)	98	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Desa Budaya yang Aktif (Dengan Satuan:)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN				390.000.000		1.140.000.000		1.140.000.000		1.140.000.000		1.140.000.000	Dinas Pendidikan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KESENIAN TRADISIONAL													dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Dengan Satuan:Persentase)	73	75,5		76		76,5		77		77,5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				500.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentae Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Dengan Satuan:Persentase)	75,52	76,28		76,84		77,32		77,91		78,31		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				3.900.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				800.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan ke Museum (Dengan Satuan:Persentase)	11,05	12,91		13,84		14,23		15,05		15,79		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6.950.000.000		6.000.000.000		6.700.000.000		8.400.000.000		9.350.000.000	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				6.950.000.000		6.000.000.000		6.700.000.000		8.400.000.000		9.350.000.000	
2.23.02	P R O G R A M P E M B I N A A N PERPUSTAKAAN				6.695.000.000		5.150.000.000		5.650.000.000		7.350.000.000		8.100.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	10,74	11		11,09		11,45		11,8		12,15		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				255.000.000		850.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.250.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				18.073.409.853		24.338.303.260		25.160.333.249		26.560.600.234		29.399.308.608	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.178.409.853		22.028.303.260		22.460.333.249		23.860.600.234		25.874.308.608	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NIlai)	72,24	73		73,5		74		74,5		75		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang Efektif dan Efesien													
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				450.000.000		1.650.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.300.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase arsip yang dikelola (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				410.000.000		625.000.000		625.000.000		625.000.000		1.150.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				35.000.000		35.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				456.051.621.026		813.656.395.413		822.416.394.846		834.846.753.548		848.334.740.121	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				136.554.799.081		496.900.074.142		498.595.499.952		502.048.961.910		504.789.385.101	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				136.554.799.081		496.900.074.142		498.595.499.952		502.048.961.910		504.789.385.101	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.134.399.081		27.665.480.957		28.635.480.957		23.227.666.957		22.815.480.957	Dinas Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69,82	70,5		72,5		75		75,5		80		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				34.510.400.000		220.563.248.417		220.697.674.227		211.502.150.185		244.835.559.376	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	116850,23	162,59		182916,17		206329,44		232945,94		263228,91		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				72.100.000.000		231.991.344.768		231.562.344.768		248.619.144.768		217.638.344.768	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)	206327,78	243,89		274374,25		309494,16		349418,9		394843,36		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.250.000.000		5.050.000.000		5.050.000.000		5.050.000.000		5.050.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha (Dengan Satuan:Persen)	90	92		93		94		95		96		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				6.560.000.000		11.630.000.000		12.650.000.000		13.650.000.000		14.450.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya Produksi, Komsumsi dan ekspor hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Dengan Satuan:Kg/ Orang/ Tahun)	67,13	34,88		35,64		36,42		37,22		38,03		Dinas Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	23900	26250		27563		28941		30388		31907		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	1761	1845		1891		1938		1987		2037		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				61.972.579.136		59.089.583.540		60.707.944.540		59.004.430.955		61.620.289.455	
	DINAS PARIWISATA				61.972.579.136		59.089.583.540		60.707.944.540		59.004.430.955		61.620.289.455	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.027.335.968		23.154.583.540		22.763.640.000		22.814.430.955		22.735.420.001	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	68,88	75		75,4		75,6		75,8		76		Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				15.720.243.168		15.650.000.000		15.009.304.540		11.250.000.000		12.000.000.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Presesntase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Dengan Satuan:Persen)	0,8	1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				6.575.000.000		2.525.000.000		3.675.000.000		3.675.000.000		4.599.869.454	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Presentase Peningkatan Akses Terhadap Media Pemasaran Pariwisata	n.a	7		9		11		13		15		Dinas Pariwisata

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Persen)												
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				13.650.000.000		16.175.000.000		17.675.000.000		18.175.000.000		18.175.000.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memilki Kekayaan Intelektual (Dengan Satuan:Persen)	0,479	0,815		0,924		1,025		1,125		1,222		Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				3.000.000.000		1.585.000.000		1.585.000.000		3.090.000.000		4.110.000.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kapasitas SDM	Presentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Dengan Satuan:Persen)	60	70		75		80		85		90		Dinas Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				189.208.245.291		202.019.010.210		205.871.861.831		212.755.785.747		218.271.632.128	
	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN				159.008.487.666		161.915.156.362		163.984.049.768		167.336.023.954		170.049.164.799	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				70.652.087.666		77.124.248.318		78.595.326.927		82.246.036.454		82.915.109.089	Dinas Pertanian dan Peternakan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	64	72		76		80		84		85		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				22.692.400.000		25.205.987.500		25.455.987.500		25.575.987.500		26.380.987.500	Dinas Pertanian dan Peternakan
	meningkatnya hasil produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dengan Satuan:Ton)	131.619,96	136.825,00		139,838		143,132		146,727		150,641		Dinas Pertanian dan Peternakan
	meningkatnya hasil produksi hortikultura	Peningkatan Produksi Hortikultura (Dengan Satuan:Ton)	80773,87	82.759.27		83769,51		84.791.63		85..825.79		86.872.11		Dinas Pertanian dan Peternakan
	meningkatnya hasil produksi komoditas peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan" (Dengan Satuan:Kg)	32.642.246	42.440.469		48.399.110		55.199.184		62.960.188		71.818.686		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				49.805.000.000		38.505.920.544		38.853.735.341		38.435.000.000		39.674.068.210	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B/Yang Terlayani Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	35,29	47,06		52,94		58,82		64,71		70,59		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.305.000.000		1.305.000.000		1.305.000.000		1.305.000.000		1.305.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya jaminan keamanan pangan asal hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)" (Dengan Satuan:Persen)	65	75		80		85		95		100		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				1.675.000.000		1.675.000.000		1.675.000.000		1.675.000.000		1.675.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	82,22	78,49		76,36		74,02		71,47		68,68		Dinas Pertanian dan Peternakan
	Menurunnya kerentanan petani dan lahan pertanian akibat bencana iklim	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian" (Dengan Satuan:Persen)	86,23	84,07		82,24		79,84		76,80		73,04		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan (Dengan Satuan:Persen)	60	66		69		72		75		78		Dinas Pertanian dan Peternakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				12.729.000.000		17.949.000.000		17.949.000.000		17.949.000.000		17.949.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Binaan Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Dengan Satuan:Persen)	4,58	5,06		5,59		6,01		6,64		7,51		Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya kemandirian dan daya saing petani melalui penguatan kelembagaan koperasi.	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Difasilitasi dan Dibina" (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Peternakan
	DINAS PERKEBUNAN				30.199.757.625		40.103.853.848		41.887.812.063		45.419.761.793		48.222.467.329	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.569.757.625		29.243.853.848		28.986.786.352		28.131.786.352		28.131.786.352	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72,37	74,5		76		77,5		79		81,5		Dinas Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.625.000.000		5.180.000.000		5.891.025.711		9.327.975.441		11.830.680.977	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan yang di dukung Sarana Berkualitas dan Merata	Produksi Komoditas Perkebunan (Dengan Satuan:Ton)	3581861,51	4026651,12		4272514,95		4534450,29		4813552,77		5111011,89		Dinas Perkebunan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.005.000.000		4.530.000.000		5.760.000.000		6.360.000.000		6.660.000.000	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Cakupan Luas Lahan Perkebunan dengan prasarana yang sesuai standar (Dengan Satuan:Ha)	410	640		800		970		1150		1350		Dinas Perkebunan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				400.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan (Dengan Satuan:Persen)	55	60		65		72,5		81,25		91,25		Dinas Perkebunan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				250.000.000		250.000.000		300.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizin usaha perkebunan	Persentase perkebunan besar berijin usaha yang terbina dan terawasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perkebunan
	Meningkatnya legalitas usaha perkebunan rakyat	Persentase STDB yang diterbitkan (Dengan Satuan:Persen)	1,43	2,81		3,5		4,54		6,06		7,58		Dinas Perkebunan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				350.000.000		500.000.000		550.000.000		650.000.000		650.000.000	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Bidang Perkebunan	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya	4,88	3,92		8,91		13,89		18,88		19,94		Dinas Perkebunan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Meningkat (Dengan Satuan:Persen)												
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				2.775.000.000		675.000.000		550.000.000		500.000.000		500.000.000	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				2.775.000.000		675.000.000		550.000.000		500.000.000		500.000.000	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				2.775.000.000		675.000.000		550.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya Pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase Luasan TAHURA yang dikelola (Dengan Satuan:Persentase)	15	15,4		17,3		17,3		17,3		17,3		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				25.370.000.000		8.073.702.599		8.892.063.600		10.192.063.600		10.192.063.600	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				25.370.000.000		8.073.702.599		8.892.063.600		10.192.063.600		10.192.063.600	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				160.000.000		139.592.000		139.592.000		139.592.000		139.592.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi izin sesuai dengan ketentuan. (Dengan Satuan:Persen)	5	1		1		1		1		1		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				20.250.000.000		5.221.928.599		6.040.289.600		6.840.289.600		6.840.289.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien mertata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Dengan Satuan:Persen)	53,57	70,96		70,96		70,96		70,96		70,96		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				2.360.000.000		945.990.600		945.990.600		1.445.990.600		1.445.990.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga antar waktu (Dengan Satuan:Koefisien)	3,51	3,5		3,49		3,48		3,47		3,46		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase kinerja realisasi pupuk (Dengan Satuan:Persentase)	62,68	66		68		70		72		75		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				850.000.000		840.498.200		840.498.200		840.498.200		840.498.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya Ekspor barang	Peningkatan Nilai Ekspor Barang (Dengan Satuan:Persen)	70	13		13		14		14		14		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.200.000.000		551.900.600		551.900.600		551.900.600		551.900.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	41,98	50		55		60		65		70		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Persen)												
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				550.000.000		373.792.600		373.792.600		373.792.600		373.792.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase IKM yang menjalin kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (Dengan Satuan:Persen)	5	1		2		3		4		5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				40.070.997.518		45.999.024.923		46.799.024.922		48.795.511.337		51.411.369.837	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				38.220.997.518		35.682.119.132		35.682.119.131		35.682.119.132		35.682.119.131	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	60	70		72		75		78		80		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.450.000.000		9.882.906.991		10.682.906.991		12.679.393.405		15.295.251.906	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya realisasi investasi di sektor industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Dengan Satuan:Persen)	0,97	2,05		2,57		3,09		3,61		4,13		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan	1	2,05		2,57		3,09		3,61		4,13		Dinas Perindustrian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Menengah (IKM) (Dengan Satuan:Persen)												dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				400.000.000		433.998.800		433.998.800		433.998.800		433.998.800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tingkat ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Dengan Satuan:Persen)	5	7		9		10		12		15		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				100.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000	
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				100.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				100.000.000		800.000.000		800.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	15	25		50		75		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				0		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun (Dengan Satuan:Persen)	n/a	0		25		50		75		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN				0		0		0		150.000.000		150.000.000	Dinas Transmigrasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KAWASAN TRANSMIGRASI													dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan (Dengan Satuan:Persen)	n/a	0		0		0		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				343.248.424.748		307.413.965.445		303.651.830.994		309.381.438.333		313.928.049.536	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				220.095.227.729		186.634.784.974		181.466.217.749		184.331.021.419		186.604.327.020	
	SEKRETARIAT DAERAH				220.095.227.729		186.634.784.974		181.466.217.749		184.331.021.419		186.604.327.020	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				137.986.171.944		117.008.532.152		113.768.158.368		115.564.214.084		116.989.436.888	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	60,01	72,55		73,05		73,55		74,05		74,55		Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:Angka)	90,2	90,5		90,8		91,1		91,4		91,7		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				77.927.455.400		66.080.369.085		64.250.373.514		65.264.692.918		66.069.585.067	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	n.a	70		73		76		79		82		Sekretariat Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Angka)												
	Meningkatnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial	Indeks Zakat Nasional (Dengan Satuan:Indeks)	0,39	0,45		0,48		0,51		0,54		0,57		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.181.600.385		3.545.883.737		3.447.685.867		3.502.114.417		3.545.305.065	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya layanan administrasi perekonomian dan pembangunan	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan (Dengan Satuan:Angka)	n.a	65		67		69		71		73		Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD				123.153.197.019		120.779.180.470		122.185.613.245		125.050.416.915		127.323.722.516	
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				123.153.197.019		120.779.180.470		122.185.613.245		125.050.416.915		127.323.722.516	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				96.005.937.019		92.441.867.715		92.734.028.000		94.995.344.915		96.176.028.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	60,01	67		69		71		73		75		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				27.147.260.000		28.337.312.755		29.451.585.245		30.055.072.000		31.147.694.516	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian	Persentase ketepatan penetapan perda APBD tahun N	80	100		100		100		100		100		Sekretariat Dewan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	peraturan perundang-undangan	(Dengan Satuan:Persen)												Perwakilan Rakyat Daerah
		Persentase penetapan Ranperda tahun N (Dengan Satuan:Persen)	80,06	100		100		100		100		100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaran pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	27,07	100		100		100		100		100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.196.974.497.831		1.037.108.311.108		1.052.825.140.578		1.079.599.567.418		1.110.700.704.843	
5.01	PERENCANAAN				38.942.454.827		35.149.439.001		36.478.806.966		39.186.635.092		41.335.376.003	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				38.942.454.827		35.149.439.001		36.478.806.966		39.186.635.092		41.335.376.003	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31.017.454.827		28.324.439.001		28.853.806.966		30.311.635.092		32.810.376.003	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77,84	78,62		79,01		79,41		79,81		80,21		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				3.725.000.000		2.925.000.000		3.725.000.000		4.375.000.000		3.725.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan	Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Capaian Pembangunan Daerah	RKPD dan RPJMD (Dengan Satuan:Persen)												Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian Program Prioritas Daerah (Dengan Satuan:Persen)	93,74	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Presentase Capaian Kinerja Program Dedikasi Daerah (Dengan Satuan:Persen)	n.a	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				4.200.000.000		3.900.000.000		3.900.000.000		4.500.000.000		4.800.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Persen)	94,55	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Presentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Pemerintah dan Pembangunan	n.a	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Manusia (Dengan Satuan:Persen)												
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Presentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	93,65	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Presentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	n.a	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)	92,98	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Presentase Capaian Program Dedikasi	n.a	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)												Pembangunan Daerah
5.02	KEUANGAN				1.077.578.333.881		941.171.917.288		952.830.916.030		970.532.444.089		995.151.382.365	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				70.501.301.193		72.783.781.689		74.286.545.475		77.347.568.574		79.776.580.039	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				62.101.301.193		58.533.781.689		60.036.545.475		62.997.568.574		65.426.580.039	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72,61	72,62		72,65		72,85		73		74		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				8.400.000.000		14.250.000.000		14.250.000.000		14.350.000.000		14.350.000.000	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	6,20	8,29		10,03		14,78		17,60		20,53		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Dengan Satuan:Persen)	5,38	5,49		13,13		25,81		37,63		60,22		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya penerapan sistem	Persentase penerapan sistem informasi keuangan	21,97	18,72		36,83		57,64		70,22		76,85		Badan Pendapatan Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	informasi keuangan berbasis digital	berbasis digital (Dengan Satuan:Persen)												
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				1.007.077.032.688		868.388.135.599		878.544.370.555		893.184.875.515		915.374.802.326	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				150.897.263.014		60.882.695.599		62.475.440.001		61.375.440.001		61.375.440.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Predikat/ Nilai)	74,34	74,6		74,8		75		75,2		75,4		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				851.110.831.324		799.982.695.599		808.518.930.554		824.214.435.514		846.449.362.326	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dengan Satuan:Nilai)	12,001	12,002		12,003		12,004		12,005		12,015		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks Pengalokasian Anggaran belanja dalam APBD (Dengan Satuan:Nilai)	20	20		20		20		20		20		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya tatakelola akuntansi dan pelaporan	Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dengan Satuan:Nilai)	13,1897	13,1997		13,12		13,121		13,122		14		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya Tatakelola Perbendaharaan	Indeks Penyerapan anggaran (Dengan Satuan:Nilai)	15	15		15		15		15		15		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN				5.068.938.350		7.522.744.401		7.550.000.000		7.595.000.000		7.550.000.000	Badan Pengelola

BerAKHLAK banggamelayanibangsa Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BARANG MILIK DAERAH													Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap (Dengan Satuan:Persentase)	15,98	8		8		8		8		8		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN				52.511.859.981		33.583.085.708		34.905.115.697		38.405.382.682		39.465.535.319	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				52.511.859.981		33.583.085.708		34.905.115.697		38.405.382.682		39.465.535.319	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				43.478.859.981		24.015.085.708		24.015.085.708		24.015.085.708		24.015.085.708	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	76,42	77,85		78,5		79		80		80		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9.033.000.000		9.568.000.000		10.890.029.989		14.390.296.974		15.450.449.611	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuan yang sesuai dengan formasi (Dengan Satuan:Persen)	95	97		98		99		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persen)	53,75	91		92		93		94		95		Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (Dengan Satuan:Persen)	50	55		60		65		70		75		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai sangat baik dan baik (Dengan Satuan:Persen)	87	89		90		91		92		93		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.950.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		4.700.000.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.950.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		4.700.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar kader manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:Persen)	25,57	27,85		28,5		30		33,5		36		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan rancangan pengembangan dan evaluasi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	80,28	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu pengelolaan	Persentase pejabat fungsional yang memiliki sertifikasi kompetensi diluar	50,39	63		66		69		72		75		Badan Kepegawaian dan Pengembangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	guru dan tenaga kesehatan (Dengan Satuan:Persen)												Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:Persen)	50,57	52		54		56		58		60		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				20.991.849.142		23.503.869.110		24.910.301.885		27.775.105.555		30.048.411.156	
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				20.991.849.142		23.503.869.110		24.910.301.885		27.775.105.555		30.048.411.156	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.586.849.142		13.884.316.355		13.884.316.356		13.884.316.356		13.884.316.355	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	67,03	68,71		69,55		70,39		71,23		72,07		Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				7.205.000.000		7.214.664.570		8.269.489.149		10.418.091.904		12.123.071.101	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Dengan Satuan:Persen)	64,37	85		90		95		100		100		Badan Riset dan Inovasi Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Dengan Satuan:Persen)	64,37	85		90		95		100		100		Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan (Dengan Satuan:Persen)	64,37	85		90		95		100		100		Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				1.200.000.000		2.404.888.185		2.756.496.380		3.472.697.295		4.041.023.700	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persen)	90,69	90,79		90,89		90,99		91,09		91,19		Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90,69	90,79		90,89		90,99		91,09		91,19		Badan Riset dan Inovasi Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				45.079.247.807		35.274.178.637		36.603.546.602		39.311.374.728		41.460.115.639	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				45.079.247.807		35.274.178.637		36.603.546.602		39.311.374.728		41.460.115.639	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	INSPEKTORAT KABUPATEN				45.079.247.807		35.274.178.637		36.603.546.602		39.311.374.728		41.460.115.639	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				37.879.247.807		27.574.178.637		27.553.546.602		29.761.374.728		31.710.115.639	Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	76,23	76,99		77,74		78,5		79,25		80,01		Inspektorat Kabupaten
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				5.350.000.000		5.750.000.000		6.750.000.000		7.000.000.000		7.200.000.000	Inspektorat Kabupaten
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Dengan Satuan:Persen)	90,11	90,11		90,2		90,3		90,4		90,5		Inspektorat Kabupaten
		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP (Dengan Satuan:Persen)	82,69	82,7		84		86		88		90		Inspektorat Kabupaten
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.850.000.000		1.950.000.000		2.300.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000	Inspektorat Kabupaten
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan,	97	75-100		100		75-100		75-100		75-100		Inspektorat Kabupaten

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pendampingan dan asistensi (Dengan Satuan:Persen)												
7	UNSUR KEWILAYAHAN				601.638.980.378		1.022.128.520.424		1.052.869.034.418		1.119.269.689.337		1.171.960.553.413	
7.01	KECAMATAN				601.638.980.378		1.022.128.520.424		1.052.869.034.418		1.119.269.689.337		1.171.960.553.413	
	KECAMATAN TENGGARONG				103.556.454.700		140.372.083.471		141.917.710.674		145.253.440.974		147.900.440.647	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				50.559.213.879		53.471.903.372		53.551.903.371		53.371.903.371		53.471.903.371	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	70,55	70,6		70,7		70,7		70,75		70,8		Kecamatan Tenggarong
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.050.000.000		17.590.000.000		17.590.000.000		17.590.000.000		17.590.000.000	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Tenggarong

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				39.552.240.821		68.009.180.099		69.474.807.303		72.990.537.603		75.537.537.276	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		1.031.000.000		1.031.000.000		1.031.000.000		1.031.000.000	Kecamatan Tenggarong
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	80		80		80		80		80		Kecamatan Tenggarong
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	n.a	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya kinerja	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	penyelenggaraan pemerintahan desa	Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)												
	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG				34.840.107.359		67.537.308.858		69.074.936.061		72.410.666.361		75.057.666.034	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.095.207.359		10.335.491.599		10.235.491.599		10.235.491.599		10.285.491.599	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	54,53	60		65		70		75		80		Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				24.863.900.000		11.350.817.259		12.988.444.462		16.294.174.762		18.816.174.435	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong Seberang
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		45.170.000.000		45.170.000.000		45.180.000.000		45.230.000.000	Kecamatan Tenggarong Seberang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		361.000.000		361.000.000		361.000.000		361.000.000	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		195.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000		125.000.000		105.000.000		125.000.000		150.000.000	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	61	70		75		80		85		90		Kecamatan Tenggarong Seberang

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN LOA KULU				29.047.896.284		56.260.330.383		57.797.957.586		61.133.687.886		63.780.687.559	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.915.193.284		14.329.293.284		14.582.293.284		15.211.293.284		15.722.293.284	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	64,64	74		75		76		77		78		Kecamatan Loa Kulu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.221.703.000		9.095.037.099		10.214.664.302		12.756.394.602		14.757.394.275	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Loa Kulu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		31.950.000.000		32.040.000.000		32.130.000.000		32.190.000.000	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	80	81		82		81		81		81		Kecamatan Loa Kulu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)												
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				130.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000		200.000.000	Kecamatan Loa Kulu
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Kulu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		421.000.000		421.000.000		421.000.000		421.000.000	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Kulu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				150.000.000		325.000.000		380.000.000		435.000.000		490.000.000	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:)	75	76		77		76		76		76		Kecamatan Loa Kulu
	KECAMATAN LOA JANAN				26.392.635.977		49.982.304.536		51.519.931.739		54.855.662.039		57.502.661.712	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG				6.365.987.977		6.323.927.977		7.765.987.977		7.770.987.977		7.770.987.977	Kecamatan Loa Janan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	59.78	60.75		64,37		66,03		68,07		70,37		Kecamatan Loa Janan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				19.155.648.000		13.017.376.559		13.032.943.762		16.363.674.062		19.010.673.735	Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Loa Janan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		30.286.000.000		30.286.000.000		30.286.000.000		30.286.000.000	Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000	Kecamatan Loa Janan
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		115.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000	Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan
	KECAMATAN MUARA BADAK				17.457.816.557		49.321.150.637		50.935.842.650		54.428.548.494		57.200.112.857	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.539.770.657		12.627.315.558		12.662.275.558		13.757.275.558		13.552.275.558	Kecamatan Muara Badak

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	60,13	74,5		75		76		77		78		Kecamatan Muara Badak
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.814.000.000		4.372.835.079		5.487.567.092		7.850.272.936		10.386.837.299	Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Muara Badak
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				659.045.900		29.950.000.000		30.275.000.000		30.250.000.000		30.325.000.000	Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Badak
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN				175.000.000		521.000.000		461.000.000		546.000.000		611.000.000	Kecamatan Muara Badak

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN KETERTIBAN UMUM													
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	95		96		97		98		99		Kecamatan Muara Badak
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		850.000.000		925.000.000		975.000.000		1.150.000.000	Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Badak
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000		1.000.000.000		1.125.000.000		1.050.000.000		1.175.000.000	Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	95	98		99		100		100		100		Kecamatan Muara Badak
	KECAMATAN MARANGKAYU				12.622.030.723		44.121.483.988		45.785.798.001		49.278.503.845		52.050.068.208	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.198.540.723		14.365.730.126		14.305.730.125		14.265.730.125		14.265.730.125	Kecamatan Marangkayu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:Nilai)	62.86	3,198611111		3,198611111		3,198611111		3,198611111		3,198611111		Kecamatan Marangkayu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.542.490.000		4.755.753.862		6.480.067.876		10.012.773.720		12.784.338.083	Kecamatan Marangkayu
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Marangkayu
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Marangkayu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		24.250.000.000		24.250.000.000		24.250.000.000		24.250.000.000	Kecamatan Marangkayu
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Marangkayu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Kecamatan Marangkayu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Marangkayu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Kecamatan Marangkayu
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Marangkayu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Kecamatan Marangkayu
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Marangkayu
	KECAMATAN MUARA JAWA				54.412.725.138		59.205.963.132		60.676.525.525		63.855.280.282		66.377.715.264	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.722.075.138		22.809.248.414		22.859.248.414		22.964.806.414		23.159.806.414	Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	2,410416667	61		62		63		64		65		Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pemerintahan kecamatan													
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.649.650.000		3.421.714.718		4.817.277.111		7.890.473.868		10.217.908.850	Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Muara Jawa
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.581.000.000		31.129.000.000		31.154.000.000		31.154.000.000		31.154.000.000	Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Jawa
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				125.000.000		1.016.000.000		1.016.000.000		1.016.000.000		1.016.000.000	Kecamatan Muara Jawa
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Jawa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Persen)												
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				335.000.000		830.000.000		830.000.000		830.000.000		830.000.000	Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Jawa
	KECAMATAN SAMBOJA				62.072.870.947		61.784.373.223		63.255.392.616		66.434.147.373		68.956.582.355	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.945.362.697		22.292.130.655		22.641.130.655		24.490.239.123		25.474.439.123	Kecamatan Samboja
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	74,93	74,93		77		77		77		77		Kecamatan Samboja
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.950.108.250		2.605.108.250		2.827.161.961		3.035.108.250		3.310.108.250	Kecamatan Samboja
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Samboja
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan	Indeks pelimpahan kewenangan pada	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Samboja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)												
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.457.400.000		35.115.134.317		35.970.100.000		36.522.800.000		37.511.034.982	Kecamatan Samboja
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	98,39	98,39		98,39		98,39		98,39		98,39		Kecamatan Samboja
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		911.000.000		911.000.000		911.000.000		911.000.000	Kecamatan Samboja
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	na	100		100		100		100		100		Kecamatan Samboja
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				470.000.000		715.000.001		765.000.000		1.325.000.000		1.600.000.000	Kecamatan Samboja
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Samboja
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				75.000.000		146.000.000		141.000.000		150.000.000		150.000.000	Kecamatan Samboja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PEMERINTAHAN DESA													
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:)	na	100		100		100		100		100		Kecamatan Samboja
	KECAMATAN SEBULU				14.390.770.195		53.134.293.275		54.748.985.288		58.241.691.132		61.013.255.495	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.599.668.195		8.430.941.462		9.058.233.475		9.784.543.395		11.504.543.395	Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	71,54	73		73,5		73,5		74		74,5		Kecamatan Sebulu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.796.102.000		11.033.351.813		11.920.751.813		14.227.147.737		14.808.712.100	Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Sebulu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pelimpahan kewenangan													
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				300.000.000		32.120.000.000		32.170.000.000		32.250.000.000		32.450.000.000	Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sebulu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		450.000.000		450.000.000		600.000.000		600.000.000	Kecamatan Sebulu
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	na	100		100		100		100		100		Kecamatan Sebulu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000		950.000.000	Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sebulu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				325.000.000		300.000.000		350.000.000		480.000.000		700.000.000	Kecamatan Sebulu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	76		77		78		79		80		Kecamatan Sebulu
	KECAMATAN MUARA KAMAN				19.488.119.658		63.756.067.538		65.370.759.551		68.863.465.395		71.635.029.758	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.739.917.658		14.454.917.658		13.669.917.658		12.979.917.658		13.379.917.658	Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai sakip (Dengan Satuan:Nilai)	2,514583333	65		68		70		72		75		Kecamatan Muara Kaman
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.012.202.000		9.641.149.880		12.170.841.893		16.353.547.737		18.825.112.100	Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	75	3,392361111		3,628472222		93.75		93.75		100		Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Muara Kaman

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				406.000.000		38.755.000.000		38.655.000.000		38.555.000.000		38.555.000.000	Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	60	70		75		80		85		90		Kecamatan Muara Kaman
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				150.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Kecamatan Muara Kaman
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	90		90		90		100		100		Kecamatan Muara Kaman
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				180.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000	Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	60	70		75		80		85		90		Kecamatan Muara Kaman
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0		205.000.000		175.000.000		275.000.000		175.000.000	Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya kinerja	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan	60	70		73		75		80		85		Kecamatan Muara Kaman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	penyelenggaraan pemerintahan desa	Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)												
	KECAMATAN KOTA BANGUN				20.767.311.553		37.522.817.635		38.983.380.028		42.162.134.785		44.684.569.767	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.402.333.553		6.955.917.317		6.855.917.317		6.855.917.317		6.855.917.317	Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	69	69		69,5		69,5		70		70		Kecamatan Kota Bangun
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.478.978.000		11.566.900.318		13.127.462.711		16.306.217.468		18.828.652.450	Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Kota Bangun
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		18.275.000.000		18.275.000.000		18.275.000.000		18.275.000.000	Kecamatan Kota Bangun

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	70	70,5		71		71,5		72		72,5		Kecamatan Kota Bangun
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000	Kecamatan Kota Bangun
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	75	75		75		75		75		75		Kecamatan Kota Bangun
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000	Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	68	68		69		69		70		70		Kecamatan Kota Bangun
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	80	80		80		80		80		80		Kecamatan Kota Bangun

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN MUARA MUNTAI				25.119.450.537		37.492.586.531		38.955.529.474		42.134.284.231		44.656.719.213	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.931.721.539		8.996.611.173		8.796.611.173		8.246.611.173		8.246.611.173	Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	59.78	60.75		2,692361111		2,752083333		2,838194444		2,942361111		Kecamatan Muara Muntai
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.082.700.000		10.908.975.358		12.571.918.301		16.300.673.058		18.823.108.040	Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Muara Muntai
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				8.354.028.998		16.650.000.000		16.650.000.000		16.650.000.000		16.650.000.000	Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	masyarakat desa dan kelurahan	Aktif (Dengan Satuan:Persen)												
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		311.000.000		311.000.000		311.000.000		311.000.000	Kecamatan Muara Muntai
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000	Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				381.000.000		381.000.000		381.000.000		381.000.000		381.000.000	Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai
	KECAMATAN KENOHAN				12.298.955.674		30.505.305.992		31.965.868.385		35.144.623.142		37.667.058.124	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.697.449.674		8.833.049.674		8.933.049.674		8.933.049.674		8.933.049.674	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	74	75		76		77		78		79		Kecamatan Kenohan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.720.506.000		7.260.256.318		8.620.818.711		11.799.573.468		14.322.008.450	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Kenohan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		13.536.000.000		13.536.000.000		13.536.000.000		13.536.000.000	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Kecamatan Kenohan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		361.000.000		361.000.000		361.000.000		361.000.000	Kecamatan Kenohan
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Kecamatan Kenohan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		415.000.000		415.000.000		415.000.000		415.000.000	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kenohan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:)	85	85		86		87		88		89		Kecamatan Kenohan
	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT				13.729.808.302		37.519.958.620		38.980.521.013		42.159.275.770		44.681.710.752	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.472.314.302		9.912.314.303		9.572.314.302		9.127.314.302		9.127.314.302	Kecamatan Kembang Janggut

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	74	75		76		77		78		79		Kecamatan Kembang Janggut
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.326.494.000		8.101.644.317		9.902.206.711		13.525.961.468		16.048.396.450	Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Kembang Janggut
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		18.625.000.000		18.625.000.000		18.625.000.000		18.625.000.000	Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	80	81		100		100		100		100		Kecamatan Kembang Janggut
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN				175.000.000		311.000.000		311.000.000		311.000.000		311.000.000	Kecamatan Kembang Janggut

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN KETERTIBAN UMUM													
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Kecamatan Kembang Janggut
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		445.000.000		445.000.000		445.000.000		445.000.000	Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kembang Janggut
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	85	85		86		87		88		89		Kecamatan Kembang Janggut
	KECAMATAN TABANG				9.597.163.533		29.501.639.632		31.039.266.835		34.374.997.135		37.021.996.808	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.588.010.533		13.716.486.632		13.459.113.835		13.419.844.135		14.241.843.808	Kecamatan Tabang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:Nilai)	60	70,12		70,45		70,63		70,85		70,85		Kecamatan Tabang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.179.153.000		4.474.153.000		6.199.153.000		9.574.153.000		11.399.153.000	Kecamatan Tabang
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tabang
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Tabang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		9.925.000.000		9.995.000.000		9.995.000.000		9.995.000.000	Kecamatan Tabang
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tabang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		511.000.000		511.000.000		511.000.000		511.000.000	Kecamatan Tabang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tabang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				144.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000	Kecamatan Tabang
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tabang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Kecamatan Tabang
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		70,45		70,63		70,85		70,85		Kecamatan Tabang
	KECAMATAN MUARA WIS				14.787.787.259		31.051.196.358		32.588.823.561		35.924.553.861		38.571.553.534	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.210.585.259		10.075.645.260		9.875.645.259		12.475.645.259		11.475.645.259	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	2,414583333	61		62		63		64		65		Kecamatan Muara Wis

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pemerintahan kecamatan													
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.741.202.000		9.159.551.098		10.897.178.302		11.632.908.602		15.279.908.275	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Muara Wis
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		10.750.000.000		10.750.000.000		10.750.000.000		10.750.000.000	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Wis
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				130.000.000		361.000.000		361.000.000		361.000.000		361.000.000	Kecamatan Muara Wis
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Wis

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Persen)												
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Wis
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	83,57	86		87		88		89		90		Kecamatan Muara Wis
	KECAMATAN SANGA SANGA				34.250.792.885		38.446.108.005		40.085.800.018		43.578.505.862		46.350.070.225	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.875.696.885		15.617.412.005		15.634.104.018		15.633.809.862		15.653.374.225	Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	62,67	63		64		66		68		70		Kecamatan Sanga Sanga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pemerintahan kecamatan													
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.588.696.000		6.853.576.000		8.476.576.000		11.969.576.000		14.721.576.000	Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Sanga Sanga
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.756.400.000		15.059.120.000		15.059.120.000		15.059.120.000		15.059.120.000	Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sanga Sanga
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000	Kecamatan Sanga Sanga
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sanga Sanga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Persen)												
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				855.000.000		305.000.000		305.000.000		305.000.000		305.000.000	Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sanga Sanga
	KECAMATAN ANGGANA				22.064.229.586		41.506.587.466		43.121.279.479		46.613.985.323		49.385.549.686	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.380.939.586		6.942.616.524		6.885.616.524		6.842.616.524		6.842.616.551	Kecamatan Anggana
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	44	70		70		70,01		70,05		70,5		Kecamatan Anggana
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				14.868.290.000		12.512.970.942		14.184.662.955		17.720.368.799		20.491.933.135	Kecamatan Anggana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan	Indeks pelimpahan kewenangan pada	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Anggana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)												
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				370.000.000		21.416.000.000		21.416.000.000		21.416.000.000		21.416.000.000	Kecamatan Anggana
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000	Kecamatan Anggana
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000	Kecamatan Anggana
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				75.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	Kecamatan Anggana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PEMERINTAHAN DESA													
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana
	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT				15.357.167.046		34.851.917.364		36.312.479.757		39.491.234.514		42.013.669.496	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.405.689.046		7.433.439.364		7.754.027.286		7.804.027.286		7.854.027.286	Kecamatan Kota Bangun Darat
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	67	67		67		67		67		67		Kecamatan Kota Bangun Darat
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.070.478.000		8.912.478.000		10.052.452.471		13.181.207.228		15.653.642.210	Kecamatan Kota Bangun Darat
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kota Bangun Darat
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n. a	3		3		3		3		3		Kecamatan Kota Bangun Darat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pelimpahan kewenangan													
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000		17.550.000.000		17.550.000.000		17.550.000.000		17.550.000.000	Kecamatan Kota Bangun Darat
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	66.67	66.69		66.69		66.69		66.69		66.69		Kecamatan Kota Bangun Darat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000		386.000.000		386.000.000		386.000.000		386.000.000	Kecamatan Kota Bangun Darat
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	75	75		75		75		75		75		Kecamatan Kota Bangun Darat
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000	Kecamatan Kota Bangun Darat
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	68	68		68		68		68		68		Kecamatan Kota Bangun Darat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Kecamatan Kota Bangun Darat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	65	66		67		68		69		70		Kecamatan Kota Bangun Darat
	KECAMATAN SAMBOJA BARAT				59.384.886.465		58.255.043.783		59.752.246.176		62.931.000.933		65.453.435.915	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.037.615.715		21.172.188.715		21.436.322.715		21.436.322.715		21.903.665.535	Kecamatan Samboja Barat
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip (Dengan Satuan:nilai)	60	65		65		65		65		65		Kecamatan Samboja Barat
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				16.411.870.750		2.571.455.068		3.596.625.831		5.907.312.750		7.030.472.750	Kecamatan Samboja Barat
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	70		70		70		70		70		Kecamatan Samboja Barat
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Samboja Barat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				22.540.400.000		34.051.400.000		34.151.400.000		35.019.467.838		35.951.400.000	Kecamatan Samboja Barat
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	72	72		100		100		100		100		Kecamatan Samboja Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				125.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Kecamatan Samboja Barat
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	80		80		80		80		80		Kecamatan Samboja Barat
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				270.000.000		295.000.000		352.897.630		352.897.630		352.897.630	Kecamatan Samboja Barat
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	75	75		75		75		75		75		Kecamatan Samboja Barat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kecamatan Samboja Barat
	Meningkatnya kinerja	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Samboja Barat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	penyelenggaraan pemerintahan desa	Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)												
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				11.812.304.000		14.310.049.000		16.276.501.000		18.443.524.000		20.681.535.000	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				11.812.304.000		14.310.049.000		16.276.501.000		18.443.524.000		20.681.535.000	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				11.812.304.000		14.310.049.000		16.276.501.000		18.443.524.000		20.681.535.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				5.560.000.000		6.000.000.000		6.700.000.000		7.200.000.000		7.800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Persen)	2,72	3,12		3,45		3,81		4,23		4,91		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				4.002.304.000		4.252.304.000		4.602.304.000		5.052.304.000		5.452.304.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada partai politik dan lembaga pendidikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				200.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	13,59 (84 ormas)	23,30 (144 ormas)		28,15 (174 ormas)		33,0 (204 ormas)		37,86 (234 ormas)		42,72 (264 ormas)		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA				800.000.000		1.300.000.000		1.800.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	1,79 (10.046 org)	2,04 (11.416 org)		2,25 (12.616 org)		2,50 (14.016 org)		2,77 (15.516 org)		3,09 (17.316 org)		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI				1.250.000.000		2.257.745.000		2.574.197.000		3.491.220.000		4.429.231.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			TOTAL:	7.502.883.258.999,99		7.863.021.655.493,81		8.012.419.066.948,23		8.196.704.705.487,98		8.401.622.323.125,22		

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja terhadap tingkat capaian indikator kinerja. Indikator kinerja yang disajikan merupakan indikator kinerja makro yang menjadi *mandatory*, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang ditetapkan, Indikator Utama Pembangunan Sesuai RPJPD dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan.

4.2.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta indikator sasaran Pembangunan yang ditetapkan oleh Nasional. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penetapan target kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 4.2.

Penetapan Target Indikator Kinerja Makro

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,63-5,70	5,98-6,05	6,30-6,37	6,67-6,74	7,06-7,13	7,50-7,71
2	PDRB Per Kapita	Juta	259,19	271,53 - 271,71	287,89 - 288,27	308,51 - 309,12	333,93 - 334,81	364,91- 366,11	402,83 - 404,53
3	Tingkat Kemiskinan	%	7,28	6,72	6,15-6,59	5,80-6,24	5,46-5,90	5,13-5,97	4,80-5,24
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,11	3,85-4,00	3,67-3,83	3,50-3,66	3,33-3,49	3,16-3,33	3,00-3,18
5	Rasio Gini	Rasio	0,307	0,285-0,301	0,281-0,297	0,277-0,293	0,273-0,290	0,269-0,286	0,265-0,282
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh kepala daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam perwujudan visi dan misi daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangan oleh kepala daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP Pencapaian indikator kinerja utama tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 4.3

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indikator Tujuan										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,63-5,70	5,98-6,05	6,30-6,37	6,67-6,74	7,06-7,13	7,50-7,71	
2	PDRB per Kapita	Juta Rp./ Kapita	259,19	271,53 - 271,71	287,89 - 288,27	308,51 - 309,12	333,93 - 334,81	364,91 - 366,11	402,83 - 404,53	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,51	73,34	75,17	77,01	78,84	80,67	82,50	
4	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52	3,58	3,64	3,70	3,76	3,82	3,88	
5	Tingkat Kemiskinan	%	7,28	6,72	6,15-6,59	5,80-6,24	5,46-5,90	5,13-5,97	4,80-5,24	
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	30,82	17,59	34,91	41,52	47,70	47,03	53,45	
Indikator Sasaran										
1	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	7,88	8,07	9,08	10,05	10,96	12,06	13,35	
2	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-29,18	0,00	0,80	1,00	1,10	1,15	1,20	
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,24	78,66	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	
4	Indeks Pelayanan Publik**	Indeks	4,35	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54	
5	Nilai SAKIP	Nilai	65,93	68,28	70,62	72,97	75,32	77,66	80,01	
6	Angka kriminalitas	per 100.000 penduduk	106	100	95	90	85	80	75	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,11	3,85-4,00	3,67-3,83	3,50-3,66	3,33-3,49	3,16-3,33	3,00-3,18	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Rasio Gini	Rasio	0,307	0,285 - 0,301	0,281 - 0,297	0,277 - 0,293	0,273 - 0,290	0,269 - 0,286	0,265-0,282	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Indeks	73,59	78,82	79,00	79,17	79,34	79,51	79,68	
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	118,80	115,80	112,80	109,80	106,80	103,80	100,80	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum. Indikator aspek geografi dan demografi menggambarkan Indikator pada aspek kewilayahan dan kependudukan. Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Selain itu, Indikator Kinerja Daerah juga mencakup indikator per urusan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Implementasi dari IKU Perangkat Daerah disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk keperluan penilaian SAKIP OPD. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel 4.4.

Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Aspek Geografi dan Demografi									
1	Indeks ketahanan pangan	Indeks	87,16	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	
2	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan^	%	9,72	7,74	7,56	7,48	7,3	7,12	6,94	
3	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	80,2	81	81,81	82,63	83,46	84,29	85,13	
4	Kapasitas air baku^	m3/detik	2,38	2,66	2,81	2,96	3,10	3,25	3,40	
5	Cakupan layanan air minum layak perpipaan ^	%	96,98	82,36	84,78	87,28	89,84	92,49	92,49	
7	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak^	%	73,59	78,82	79,00	79,17	79,34	79,51	79,68	
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah^	%	89,10	98,91	98,94	99,16	99,30	99,38	99,40	
9	Persentase Penanganan Sampah	%	54,63	43,29	44,11	46,18	46,83	49,08	49,72	
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK^	%	57,94	57,00	56,00	55,00	54,00	53,00	52,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Penurunan Emisi GRK									
	a. Kumulatif^	%	16.14	16.27	17.47	18.93	20.58	22.04	23.7	
	b. Tahunan^	Ton-CO2eq	15,460,869.70	15,550,327.98	15,653,305.38	15,771,316.64	15,862,671.22	15,955,738.80	16,088,441.89	
12	Indeks Risiko Bencana^	Indeks	118,8	115,8	112,8	109,8	106,8	103,8	100,8	
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	4,36	7,07	6,19	5,41	4,72	4,10	3,56	
14	Rasio Penduduk	Rasio	107,9	107,46	107,08	106,75	106,44	106,15	105,88	
15	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	31,23	33,43	35,5	35,84	39,19	40,8	42,25	
16	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	14,48	14	13,54	13,07	12,6	12,11	11,61	
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,63-5,70	5,98-6,05	6,30-6,37	6,67- 6,74	7,06- 7,13	7,50-7,71	
2	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	7,88	8,07-8,14	9,08-9,15	10,05- 10,13	10,96- 11,03	12,06- 12,14	13,35- 13,45	
3	PDRB Sektor Pertanian	%	14,48	14,00	13,54	13,07	12,60	12,11	11,61	
4	Tingkat Kemiskinan^	%	7,28	6,72	6,15-6,59	5,80-6,24	5,46- 5,90	5,13- 5,97	4,80-5,24	
5	PDRB Per Kapita	Juta Rp./Kapita	259,19	271,53-271,71	287,89-288,27	308,51-309,12	333,93-334,81	364,91-366,11	402,83-404,53	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka^	%	4,11	3,85-4,00	3,67-3,83	3,50-3,66	3,33- 3,49	3,16- 3,33	3,00-3,18	
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal^	%	NA	50.95	53.39	55.83	58.27	60.71	63.15	
8	Indeks Gini	Nilai	0.307	0,285-0,301	0,281-0,297	0,277- 0,293	0,273 -0,290	0,269- 0,286	0,265 -0,282	
9	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.57	76.86	77.37	77.85	78.34	78.9	79.41	
10	Usia Harapan Hidup^	Tahun	74.33	74.39	74.45	74.51	74.57	74.63	74.69	
13	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	13	13	13	13	13	13	12	
14	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)^	%	14.63	14.10	14.00	13.45	12.58	11.76	10.99	
15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional^	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Rata rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) ^	Tahun	9,27	9,4	9,6	9,8	10,01	10,21	10,41	
17	Harapan Lama Sekolah^	Tahun	13,65	13,67	13,84	14,02	14,19	14,36	14,53	
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	%	49,66	50,93	52,18	53,37	54,49	55,56	56,56	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) ^									
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%) ^	%	54,62	56,89	59,1	61,2	63,2	65,11	66,92	
20	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) ^	%	39,95	75,82	76,38	76,94	77,49	78,05	78,61	
21	Jumlah kejadian konflik SARA ^	Konflik	0	0	0	0	0	0	0	
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan^	Nilai	57,42	58	58,5	59	59,5	60	60,5	
23	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)^	Indeks	66,96	68,1	69,2	70,2	71,2	72,1	73	
24	Indeks Ketimpangan Gender^	Indeks	0,491	0,45	0,42	0,39	0,36	0,33	0,31	
25	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,09	62,5	62,9	63	63,05	63,1	63,2	
26	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	
III	Aspek Daya Saing Daerah									
1	Angka Ketergantungan	Persen	42,73	40,92	39,74	39,01	38,63	38,51	38,54	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan^	%	3,71	4,29	5,41	6,54	7,66	8,78	9,9	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum^	%	0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara^	Orang	3803	3924	4084	4284	4500	4731	4981	
5	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif^	Orang	4386	4386	4416	4436	4486	4535	4584	
6	Persentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%) ^	%	0,1654	0,9946	1,0024	1,0098	1,017	1,0472	1,0865	
7	Rasio Kewirausahaan Daerah^	%	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)^	%	0,29	0,27	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	
9	Return of Aset (ROA) BUMD (%)^	%	12,76*	13,08	13,24	13,4	13,56	13,72	13,88	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,19	65,84	66,5	67,17	67,84	68,52	69,2	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)^	%	44,86	49,08	49,8	50,53	51,25	51,97	52,69	
12	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah	%	NA	74,63	75,42	76,17	76,91	77,77	78,52	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	menggunakan internet selama 3 bulan terakhir ^									
13	Indeks Inovasi Daerah^	Indeks	58.59 (Inovatif)	60.00 (Inovatif)	61.10 (Inovatif)	62.24 (Inovatif)	63.24 (Inovatif)	64.58 (Inovatif)	65.59 (Sangat Inovatif)	
14	Disparitas Harga (%) ^	%	3,52	3,51	3,5	3,49	3,48	3,47	3,46	
15	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-29,18	0,00	0,80	1,00	1,10	1,15	1,20	
16	Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) ^	%	44,83	39,6	39,54	39,48	39,42	39,36	39,3	
17	Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa (%) ^	%	38,01	44,87	45,02	45,17	45,32	45,47	45,62	
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,24	78,66	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	
19	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)^	%	2,12	2,29	2,55	2,81	3,06	3,32	3,58	
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB^	%	0,08	0,13	0,1	0,22	0,28	0,33	0,37	
22	Tingkat Inflasi	%	3,37*	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23	Indeks Perkembangan Harga (%) ^	%	1,53	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	
24	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan									
	- Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)^	%	0,63*	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	
	- Total Kredit/PDRB (%) ^	%	0,11*	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	
25	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	%	24,27	0,14	25,33	25,86	26,39	26,92	27,45	
26	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,63	3,71	3,75	3,79	3,83	3,87	3,9	
IV	Aspek Pelayanan Umum									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,51	73,34	75,17	77,01	78,84	80,67	82,5	
2	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	NA	1,4	1,7	2,1	2,5	2,9	3,1	
3	Indeks Pelayanan Publik^	Indeks	4,35	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54	
4	Indeks Integritas Pemerintah^	Indeks	67,14	72,5	73,03	73,55	74,08	74,6	75,13	
5	Nilai SAKIP	Nilai	65,93	68,28	70,62	72,97	75,32	77,66	80,01	
6	Indeks Daya Saing Daerah^	Poin	3,52	3,58	3,64	3,7	3,76	3,82	3,88	
7	Tingkat Kriminalitas (Crime rate) ^	per 100.000 Penduduk	106	100	95	90	85	80	75	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Jumlah kejadian tindak kriminal^	Kasus	728	600	588	575	563	550	538	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
a. Pendidikan										
1	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	74,34	76,34	78,34	80,34	82,34	84,34	86,34	
2	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	42,81	45,81	48,81	51,81	54,81	57,81	60,81	
3	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	60,51	74,34	74,54	74,74	74,94	75,34	75,54	
4	Persentase jamban dalam kondisi baik	%	90,57	91,57	91,59	91,64	91,7	91,8	91,95	
5	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	72,18	74,18	74,23	74,28	74,33	74,38	74,43	
6	Angka Literasi/Numerasi^									
	Literasi Membaca^									
	SD^	Persen	70,98	72,98	74,98	76,98	78,98	80,98	82,98	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SMP^	Persen	81,45	83,45	85,45	87,45	89,45	91,45	93,45	
	Numerasi^									
	SD^	Persen	63,42	65,42	67,42	69,42	71,42	73,42	75,42	
	SMP^	Persen	75,82	77,82	79,82	81,82	83,82	85,82	87,82	
b. Kesehatan										
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	13	13	13	13	13	13	12	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	%	14,63	14,10	14,00	13,45	12,58	11,76	10,99	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	90,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	98,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia	%	97,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pendidikan dasar sesuai standar									
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	91,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Cakupan imunisasi Bayi Lengkap	%	80,00	80,00	88,00	90,00	93,00	95,00	100,00	
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	75,00	
17	Jumlah Kematian Balita	%	167	167	167	166	165	160	152	
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten	%	70,11	73,05	73,53	74,35	75,23	75,95	76,68	
2	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	63,20	65,73	65,98	66,48	66,48	67,23	67,79	
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan	%	80,20	82,36	84,78	87,28	89,84	92,49	96,11	

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten									
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman di kabupaten	%	0,304	0,81	1,64	2,58	3,64	4,82	6,02	Perubahan target dari 83.48 menjadi 0.304 dikarenakan perubahan kreteria dari sanitasi layak dan aman menjadi sanitasi aman
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab	%	17,24	26,32	29,46	32,19	35,10	37,06	39,06	
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi kewenangan kabupaten	%	2,77	3,72	6,94	8,60	8,60	8,60	8,60	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	77,42	90,32	43,66	60,56	77,46	88,73	100,00	Tahun 2026 terdapat SK kumuh baru (Loa Duri, Loa Kulu Kota, Muara Badak

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Ilir, Anggana Desa Sungai Meriam) Penanganan kawasan kumuh 2025 diharapkan 100% selesai di 2026
4	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	43,59	44,78	53,90	65,43	76,95	88,48	100,00	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	16,03	37,97	46,41	54,85	63,29	71,73	80,17	Intervensi perumahan yang dimaksud pada perhitungan adalah jumlah permukiman
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	33,00	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	61,67	88,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	87,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
f. Sosial										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
a. Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	52,44	50,00	51,25	51,50	52,30	52,45	53,00	
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak										
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif									
c. Pangan										
1	Persentase Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	%	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Menyesuaikan dengan targett Kepala BAPANAS No 15/ 2023
d. Pertanahan										
1	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	7,87	8,26	8,68	9,11	9,56	10,04	10,54	
e. Lingkungan Hidup										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Nilai	73,59	78,82	79	79,17	79,34	79,51	79,68	Target IKLH Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia telah ditentukan oleh Kementrian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Lingkungan Hidup
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	45,37	19,32	20,00	20,83	21,67	22,50	23,33	Rumus Perhitungan Baru sehingga penentuan target juga berubah menyesuaikan dengan perhitungan baru sebelumnya Jumlah Perusahaan Yang Tidak Taat dibagi Jumlah Pengawasan Langsung sedangkan Perhitungan yang baru : Jumlah Perusahaan yang Taat dibagi

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Jumlah Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
3	Jumlah sampah yang tertangani	%	54,63	43,29	44,11	46,18	46,83	49,08	49,72	Rumus Perhitungan Baru sehingga penentuan target juga berubah menyesuaikan dengan perhitungan baru (perhitungan menggunakan IKPS melalui sistem informasi pengelolaan sampah nasional SIPSN yang baru)
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	99, 68	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	68,39	72,50	85,00	90,00	95,00	99,00	99,40	
3	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	7,39	7,76	8,39	9,39	10,39	11,39	12,39	
5	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	70,46	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	88,00	
7	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase desa mandiri	%	45,08	47,66	52,33	56,48	61,14	66,32	72,02	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	33,33	33,33	50,00	66,67	83,33	91,67	100,00	
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,24	2,19	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17	Target diproyeksi dari Kementerian
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	71,70	80,30	80,30	80,30	80,30	80,40	80,40	Target diproyeksi dari Kementerian
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,93	12,30	10,70	9,60	8,90	8,40	8,10	Target diproyeksi dari Kementerian Dan sudah dikonfirmasi oleh Provinsi
i. Perhubungan										
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	0,619	0,640	0,722	0,804	0,886	0,937	0,944	
2	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	
j. Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah									
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	NA	NA	4,00	7,00	10,71	14,29	17,86	
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	108,28	2,00	2,00	2,50	3,00	3,00	3,50	2023 proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual sehingga cakupannya kecil

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										tahun 2024 sudah menggunakan online data system sehingga dapat meningkatkan pengumpulan data secara signifikan
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	74,21	74,85	75,69	76,53	77,38	78,22	79,06	
l. Penanaman Modal										
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-29,18	0,00	0,80	1,00	1,10	1,15	1,20	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	105,84	74,87	75,98	77,67	79,93	82,58	85,99	Tahun 2020 dan 2021 belum ada target dari provinsi
m. Kepemudaan dan Olahraga										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,31	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	4,07	1,02	1,02	3,70	4,63	1,02	1,02	Pelaksanaan turnamen Nasional yang dilakukan pelatda Provinsi tidak dilaksanakan setiap tahun (PON, Popnas dan Peparpenas)
n. Statistik										
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,31	2,31	2,60	2,60	2,75	2,75	2,90	Penilaian dilakukan 2 tahun sekali
o. Persandian										
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	62,17	47,59	49,23	52,07	55,02	58,95	63,75	untuk skor meningkat setiap

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										tahunnya, namun pada tahun 2025 terjadi perubahan cara perhitungan , sehingga angka hasil perhitungannya menurun
p. Kebudayaan										
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	17,89	30,53	43,16	55,79	68,42	81,05	100,00	
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	6,95	8,66	10,80	11,27	12,43	13,55	18,99	
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
q. Perpustakaan										
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,17	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	62,52	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50	
r. Kearsipan										
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	83,05	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00	
3. Urusan Pilihan										
a. Kelautan dan Perikanan										
1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	%	323,178	361,959	406,480	457,290	515,824	582,365	658,072	
2	Angka Konsumsi ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/Kap/Th	67,13	69,14	71,22	73,35	75,56	77,82	80,16	Baru ada di tahun 2024, penetapan target berdasarkan arahan provinsi
b. Pariwisata										
1	Persentase Investasi sektor Penyediaan	%	0,356	0,370	0,376	0,380	0,381	0,385	0,387	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Akomodasi, Makan, Minum									
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	148,562	3,182	4,077	4,897	5,042	5,133	5,284	
3	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	0,479	0,707	0,815	0,924	1,025	1,125	1,222	
c. Pertanian										
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-5,86	1,88	2,04	2,20	2,36	2,51	2,67	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	16,41	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	14,00	14,02	14,03	14,04	14,05	14,06	14,07	
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00	
d. Kehutanan										
e. Energi dan Sumber Daya Mineral										
f. Perdagangan										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	62,68	64,00	66,00	64,00	64,00	64,00	64,00	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	41,99	24,26	34,66	41,59	46,45	48,53	48,53	
g. Perindustrian										
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota									
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Nilai	65,00	5,00	7,00	9,00	10,00	12,00	15,00	
3	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	%	1,00	1,52	2,05	2,57	3,09	3,61	4,13	
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	0,97	1,52	2,05	2,57	3,09	3,61	4,13	
h. Transmigrasi										
4. Urusan Pemerintahan Umum										
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan	%	6,84	6,14	6,32	6,50	6,76	7,09	7,44	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik									
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	5,22	4,81	5,17	5,70	6,31	7,06	8,00	
5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
a. Perencanaan										
1	Kesesuaian antara RKP dengan APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
b. Keuangan										
1	Persentase Belanja pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang	%	19,50	18,61	30,00	30,00	29,50	29,00	28,50	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	telah ditentukan penggunaannya									
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	6,20	8,29	10,03	14,78	17,60	20,53	23,82	
3	Persentase alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total belanja APBD Tahun N	%	61,53	54,51	53,73	54,00	54,50	55,00	55,50	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	52,89	55,94	40,00	41,00	42,00	43,00	45,00	
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	49,77	55,30	56,92	58,83	60,96	64,06	67,65	
d. Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	%	63,79	65,52	68,97	72,41	75,86	79,31	82,76	
e. Fungsi Pengawasan										

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,371	3,433	3,493	3,553	3,583	3,643	3,643	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,000	3,000	3,090	3,125	3,150	3,245	3,275	
3	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,400	3,460	3,520	3,580	3,620	3,650	3,675	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	90,11	90,11	90,20	90,30	90,40	90,50	90,50	
f. Fungsi Pengadaan										
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	26,90	26,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
3	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	9,67	9,67	18,00	18,00	20,00	30,00	30,00	
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah										
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	100 (Tepat)	100 (Tepat)	100 (Tepat)	100 (Tepat)	100 (Tepat)	100 (Tepat)	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	58,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
h. Pelayanan Publik										
1		Nilai	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
PENUTUP

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama RPJPD Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah 5 (lima) tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara serta kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari visi, misi, dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah *(top down)* dan bawah-atas *(bottom up)*. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam koordinasi Perangkat Daerah.

RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi pijakan strategis dalam mengarahkan transformasi pembangunan Daerah menuju KUKAR IDAMAN TERBAIK, dengan menempatkan fondasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau sebagai motor utama pembangunan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dokumen ini secara substansial merespons berbagai permasalahan dan isu strategis daerah, seperti belum optimalnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar, belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, belum optimalnya pembangunan sumber daya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

manusia, belum optimalnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya, serta belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Melalui perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang terintegrasi, RPJMD ini menegaskan arah transformasi struktural ekonomi non-ekstraktif, penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, serta pelestarian lingkungan dan budaya berbasis kearifan lokal. Dengan pendekatan pembangunan yang terukur, bertahap, dan kolaboratif, RPJMD Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing Daerah, serta memastikan kesinambungan pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional dan dinamika kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala Daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Daerah maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala Daerah pada periode berikutnya.
2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada angka 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.

3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh Perangkat Daerah dan Bappeda sebagai koordinator. Terkait dengan perubahan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 memperkenankan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan, seperti:

1. Terjadi perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD.
2. Terjadi bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial, atau kondisi luar biasa lainnya.
3. Adanya perubahan kebijakan nasional atau provinsi yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan Daerah.
4. Perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

Proses perubahan RPJMD harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja Daerah.

Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan RPJMD. Dengan pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menjaga

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

fleksibilitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan Daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.3. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, kaidah pelaksanaan ini juga mencakup pengaturan bagi wilayah transisi yang termasuk dalam delineasi Ibu Kota Negara (IKN), termasuk kecamatan-kecamatan yang telah masuk dalam wilayah IKN, yang hingga saat ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kecuali urusan perizinan, sampai dengan adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada wilayah Otorita IKN.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh Perangkat Daerah/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam rencana Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;

5. Perangkat Daerah wajib melaksanakan dan mengintegrasikan Program Dedikasi Bupati ke dalam Renstra Perangkat Daerah dapat ditindaklanjuti melalui panduan operasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
6. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Terhadap perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
9. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Perangkat Daerah serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Gambar 5.1

Alur Monitoring dan Evaluasi Pengendalian

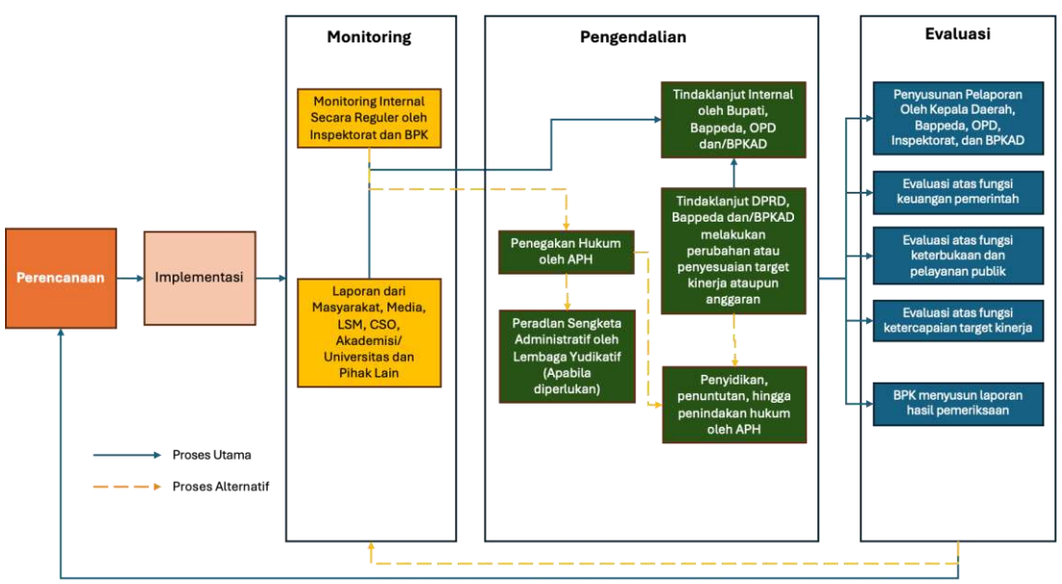

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dalam pelaksanaan RPJMD memperhatikan konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan Daerah. Sedangkan jika terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah.